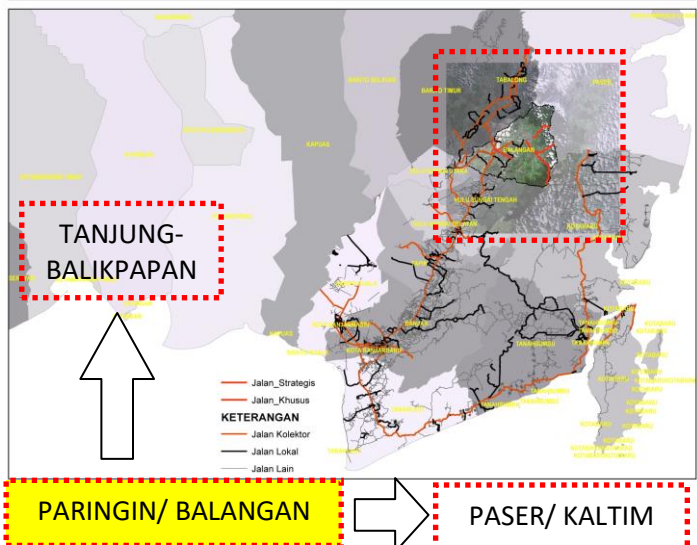
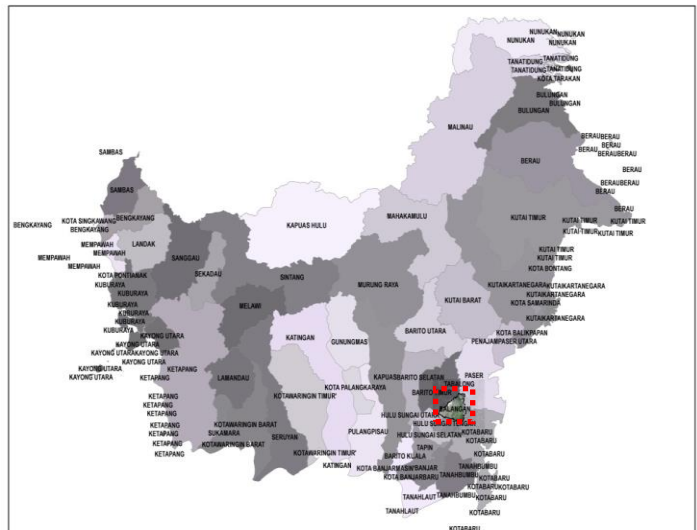


1 PROFIL POTENSI KAB. BALANGAN

2.1. LETAK DAN POSISI STRATEGIS

Kabupaten Balangan terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan pada garis 114°50'31 - 115°50'24 Bujur Timur dan 2°1'31 - 2°35'58 Lintang Selatan, berdasarkan letak geografis maka kabupaten Balangan cukup strategis karena dilalui lintas trans Kalimantan dan berpeluang besar untuk berkembang menjadi kota persinggahan bagi perjalanan dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kabupaten Balangan terletak pada jalur perlintasan Jalan Arteri Banjarmasin-Tanjung-Balikpapan, dari Kota Banjarmasin berjarak ± 195km atau ditempuh dalam waktu 4-5 jam. Dari Banjarmasin melalui Bandara Syamsudin Noer di Kota Banjarbaru dapat ditempuh dengan pesawat dengan tujuan penerbangan ke bandara Warukin di Tanjung sekitar ± 15-20 menit, Bandara Warukin berjarak ± 17 km dari Kota Paringin atau ditempuh dalam waktu ± 30 menit.



Jalur Paringin – Paser melalui Peg. Meratus Hingga saat ini masih Jalan Khusus (milik Perusahaan), belum menjadi Jalan Umum. Dalam RTRW direncanakan sebagai Jalan Strategis Provinsi.

Gb. 1 Posisi Balangan

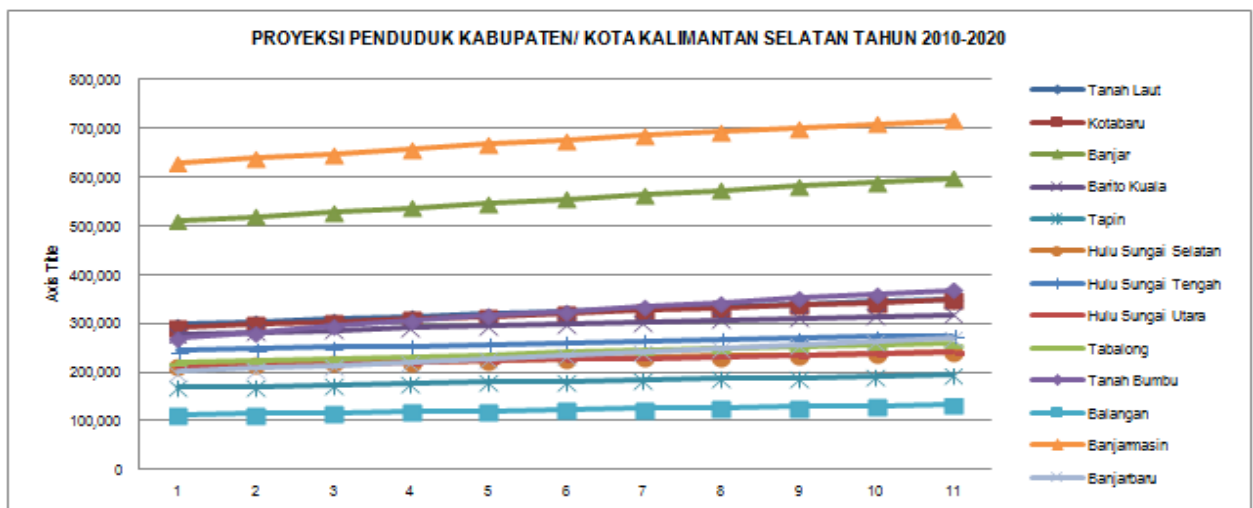
2.2. SUMBERDAYA MANUSIA

Penduduk Kabupaten Balangan dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2010 hingga Tahun 2020 memiliki jumlah penduduk terendah dari 112.815 jiwa di Tahun 2010 menjadi 133.274 jiwa di Tahun 2020.

Tabel 1. Penduduk Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah Laut	297,814	303,190	308,510	313,725	319,098	324,283	329,286	334,328	339,195	343,890	348,623
Kotabaru	291,509	297,335	302,982	308,730	314,492	320,208	325,827	331,326	336,719	342,217	347,399
Banjar	509,091	518,207	527,195	536,328	545,397	554,443	563,062	571,573	580,026	588,066	596,001
Barito Kuala	277,090	281,433	285,595	289,995	294,109	298,282	302,304	306,195	310,016	313,595	317,181
Tapin	168,599	171,281	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672	189,081	191,372	193,635
Hulu Sungai Selatan	213,114	215,984	218,897	221,614	224,474	227,153	229,889	232,587	235,217	237,702	240,279
Hulu Sungai Tengah	244,094	247,522	250,705	253,868	257,107	260,292	263,376	266,501	269,384	272,419	275,213
Hulu Sungai Utara	209,813	212,902	215,980	219,210	222,314	225,386	228,528	231,594	234,604	237,573	240,494
Tabalong	219,696	223,696	227,714	231,718	235,777	239,593	243,477	247,106	250,809	254,322	257,794
Tanah Bumbu	269,581	282,378	295,032	306,185	315,815	325,115	334,314	343,193	351,673	360,187	368,362
Balangan	112,815	115,029	117,088	119,171	121,318	123,449	125,534	127,503	129,505	131,428	133,274
Banjarmasin	628,199	637,873	647,403	656,778	666,223	675,440	684,183	692,793	700,869	708,606	715,703
Banjarnbaru	201,222	207,510	214,011	220,695	227,500	234,371	241,369	248,423	255,597	262,719	270,021
Kalimantan Selatan	3,642,637	3,714,340	3,784,981	3,854,485	3,922,790	3,989,793	4,055,479	4,119,794	4,182,695	4,244,096	4,303,979

Gamabr 2. Penduduk Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020



Sumber : Hasil Analisa

Pada Tahun 2016 Jumlah penduduk Kabupaten Balangan 125.534 jiwa yang tersebar dalam 8 kecamatan. Dimana jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi di Kawasan Perkotaan, seperti Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan. Untuk Kawasan Perdesaan Kecamatan Halong merupakan Wilayah dengan jumlah yang terbanyak.

Tabel 2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan dan Perkotaan	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (Jiwa/ Km2)
1	Kec. Paringin dengan Perkotaan Paringin Kota dan Sekitarnya	19.370	194
2	Kec.Paringin Selatan dengan Perkotaan Batu Piring dan Muara Pitap	13.204	152
3	Kec.Batamandi dengan Perkotaan Batamandi dan Mantimin	18.238	123
4	Kec.Lampihong dengan Perkotaan Simpang Tiga Lampihong	17.816	184
5	Kec.Awayan dengan Perkotaan Putat Basiun – Pudak dan Bihara	13.899	97
6	Kec.Juai dengan Perkotaan Mungkur Uyam Juai	18.300	47
7	Kec.Halong dengan Perkotaan Kapul Halong	21.599	33
8	Kec.Tebing Tinggi dengan Perkotaan Simpang Nadung Tebing Tinggi	6.874	27

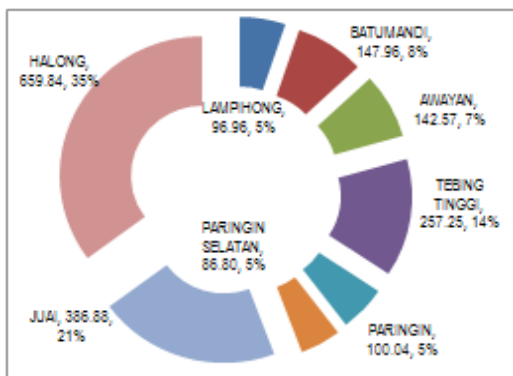
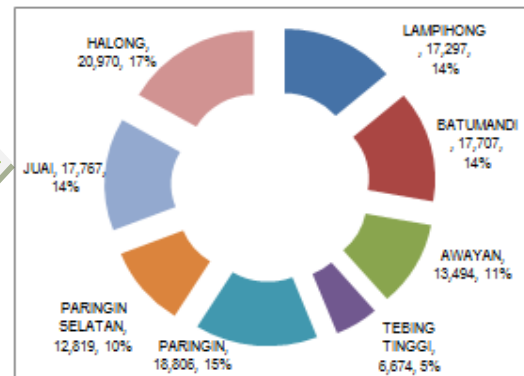
Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Tabel 3. Luas Kecamatan Tahun 2016

KECAMATAN	LUAS (KM ²)	%
LAMPIHONG	96.96	5.16%
BATUMANDI	147.96	7.88%
AWAYAN	142.57	7.59%
TEBING TINGGI	257.25	13.70%
PARINGIN	100.04	5.33%
PARINGIN SELATAN	86.80	4.62%
JUAI	386.88	20.60%
HALONG	659.84	35.13%
JUMLAH	1,878.30	100.00%

Tabel 4. Jumlah Penduduk/ Kecamatan 2016

KECAMATAN	JUMLAH
LAMPIHONG	17,297
BATUMANDI	17,707
AWAYAN	13,494
TEBING TINGGI	6,674
PARINGIN	18,806
PARINGIN SELATAN	12,819
JUAI	17,767
HALONG	20,970
JUMLAH	125,534

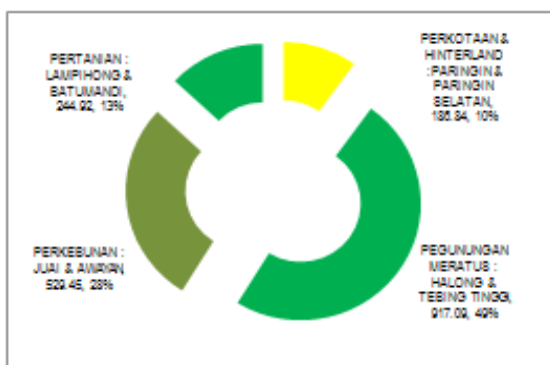
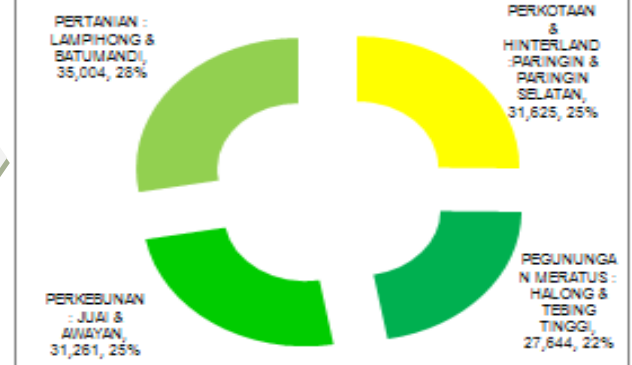
Gambar 3. Luas Kecamatan Tahun 2016

Gambar 4. Jumlah Penduduk/ Kec. 2016

Tabel 5. Luas Wilayah Kelompok Kecamatan dengan Karakter yang sama Tahun 2016

WILAYAH DOMINAN KECAMATAN	LUAS (KM ²)	%
PERKOTAAN & HINTERLAND :PARINGIN & PARINGIN SELATAN	186.84	9.95%
PEGUNUNGAN MERATUS : HALONG & TEBING TINGGI	917.09	48.83%
PERKEBUNAN : JUAI & AWAYAN	529.45	28.19%
PERTANIAN : LAMPIHONG & BATUMANDI	244.92	13.04%
JUMLAH	1,878.30	100.00%

Tabel 6. Jumlah Penduduk/ Wilayah Kelompok Kecamatan 2016

WILAYAH DOMINAN KECAMATAN	JUMLAH	%
PERKOTAAN & HINTERLAND :PARINGIN & PARINGIN SELATAN	31,625	25.19%
PEGUNUNGAN MERATUS : HALONG & TEBING TINGGI	27,644	22.02%
PERKEBUNAN : JUAI & AWAYAN	31,261	24.90%
PERTANIAN : LAMPIHONG & BATUMANDI	35,004	27.88%
JUMLAH	125,534	100.00%

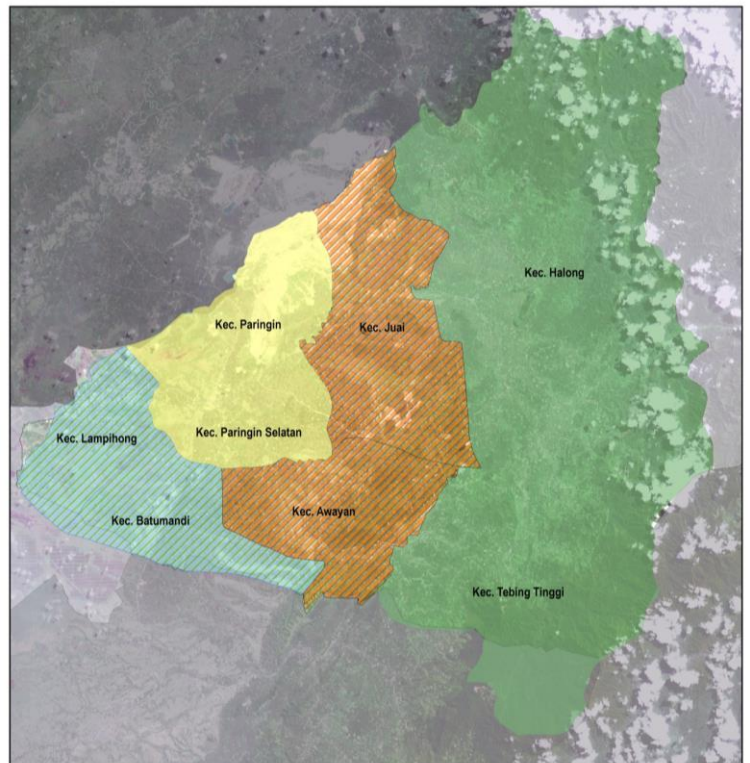
Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Gambar 5. Luas Wilayah Kelompok Kecamatan dengan Karakter yang sama Tahun 2016

Gambar 6. Jumlah Penduduk/ Wilayah Kelompok Kecamatan Tahun 2016


Berdasarkan luasannya diurutkan adalah Kec. Halong (35,13% - 659,84 km²), Kec. Juai (20,60% - 386,88 km²), Kec. Tebing Tinggi (13,70% - 257,25 km²), Kec. Batumandi (7,88% - 147,96 km²), Kec. Awayan (7,59% - 142,57 km²), Kec. Paringin (5,33% - 86,80 km²), Kec. Lampihong (5,16% - 96,96 km²), Kec. Paringin Selatan (4,62% - 86,80 km²). Sedangkan Berdasarkan jumlah dan banyak penduduknya diurutkan Kec. Halong, Kec. Paringin, Kec. Juai, Kec. Lampihong, Kec. Batumandi, Kec. Awayan, Kec. Tebing Tinggi.

Gambar 7. Perwilayahan & Kelompok Kecamatan dengan Karakteristik Sejenis

Yang menarik dan perlu menjadi perhatian adalah karakteristik perwilayah kecamatan yang ada, dikelompokkan pada beberapa kesamaan nya, maka didapatkan;



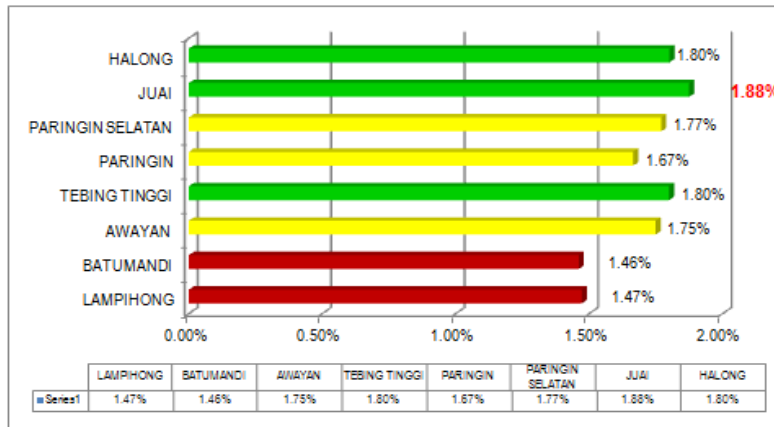
1. Wilayah yang didominasi pemanfaatan Pengembangan Perkotaan dengan Hinterlandnya : Kecamatan Paringin dan Paringin Kecamatan Selatan
 - a. Luas Wilayah 186,84 km² atau 9,96%
 - b. Jumlah Penduduk 31.625 jiwa atau 25,19%
2. Wilayah Perdesaan di Pegunungan Meratus : Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi
 - a. Luas Wilayah 917,84 km² atau 48,83%
 - b. Jumlah Penduduk 27.644 jiwa atau 22,02%
3. Wilayah Perdesaan yang didominasi pemanfaatan Perkebunan Karet, dan Perkebunan Campuran : Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan
 - a. Luas Wilayah 529,45 km² atau 28,19%
 - b. Jumlah Penduduk 31.261 jiwa atau 24,90%
4. Wilayah Perdesaan yang didominasi pemanfaatan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura : Kecamatan Lampihong dan Kecamatan batumandi
 - a. Luas Wilayah 244,92 km² atau 13,04%
 - b. Jumlah Penduduk 35.004 jiwa atau 27,88%

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2016

KECAMATAN	2015	2016	LAJU PERTUM BUHAN
LAMPIHONG	17,046	17,297	1.47%
BATUMANDI	17,452	17,707	1.46%
AWAYAN	13,262	13,494	1.75%
TEBING TINGGI	6,556	6,674	1.80%
PARINGIN	18,498	18,806	1.67%
PARINGIN SELATAN	12,596	12,819	1.77%
JUAI	17,440	17,767	1.88%
HALONG	20,599	20,970	1.80%
JUMLAH	123,449	125,534	1.69%

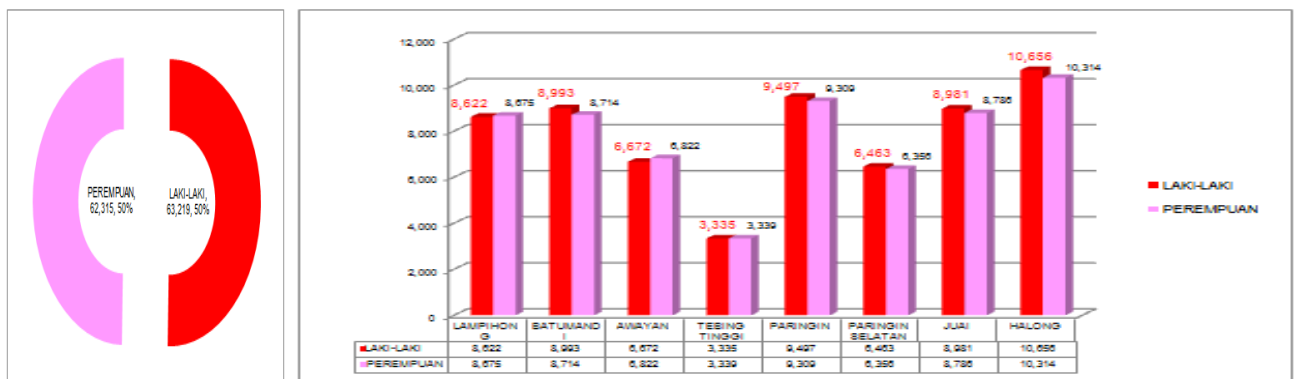
Laju Pertumbuhan Penduduk rata-rata untuk Kabupaten Balangan ± 1,69%, dalam 2 Tahun terakhir. Laju pertumbuhan diatas kabupaten adalah Pertumbuhan Penduduk di kecamatan Awayan, Paringin Selatan, Tebing Tinggi, Halong dan Juai.

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Gambar 8. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2016


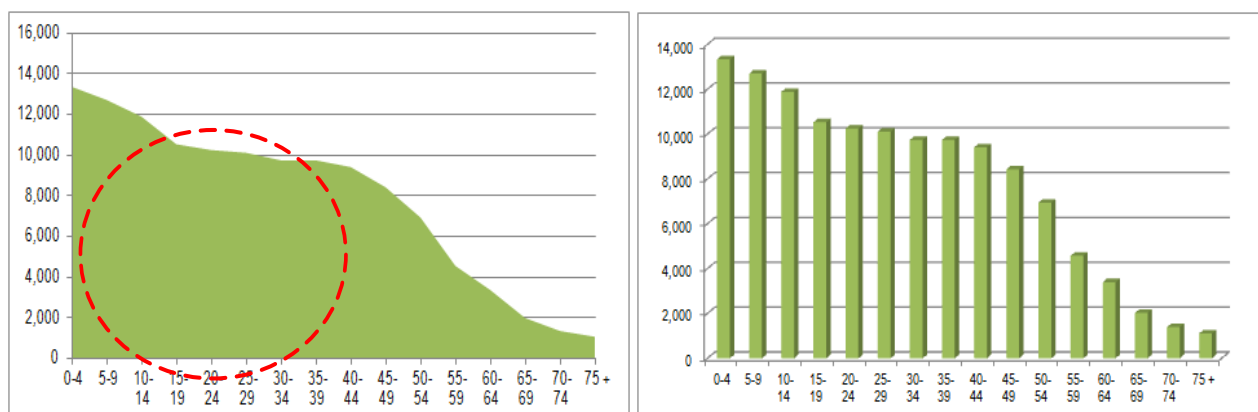
Apabila dikelompokkan menjadi pertumbuhan tinggi, sedang dan rendah maka didapatkan sebagai berikut ; pertumbuhan tinggi di Kec. Juai, Kec. Halong dan Kec. Tebing Tinggi, sedangkan pertumbuhan sedang di Kec. Paringin selatan, Awayan, dan Paringin. Untuk pertumbuhan rendah di Kec. Batumandi dan Lampihong.

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

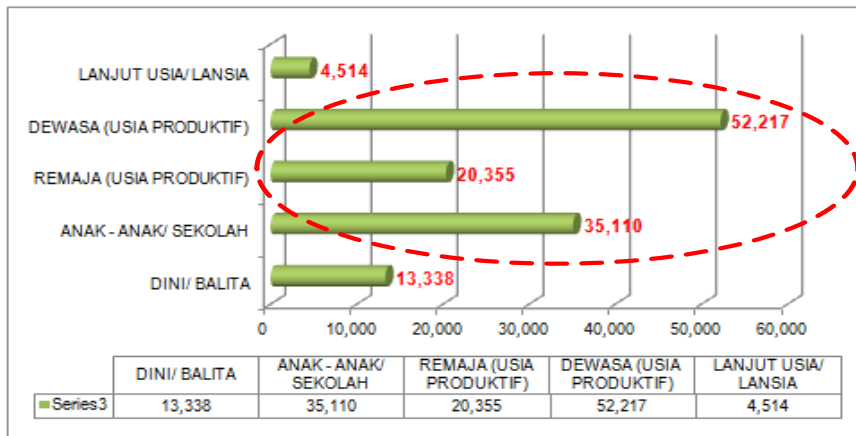
Gambar 9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016


Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, namun selisihnya dibawah 1%. Berdasarkan struktur usia, jumlah penduduk produktif (20-59) jumlahnya paling banyak, dimana penduduk balita adalah jumlah terbanyak untuk kelompok usia tertentu. Hal ini membawa keuntungan bagi Kabupaten Balangan, dimana 10-20 tahun kedepan jumlah penduduk usia produktif akan meningkat dengan pesat dan merupakan peningkatan aset sumberdaya manusia yang signifikan.

Gambar 10. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Tahun 2016


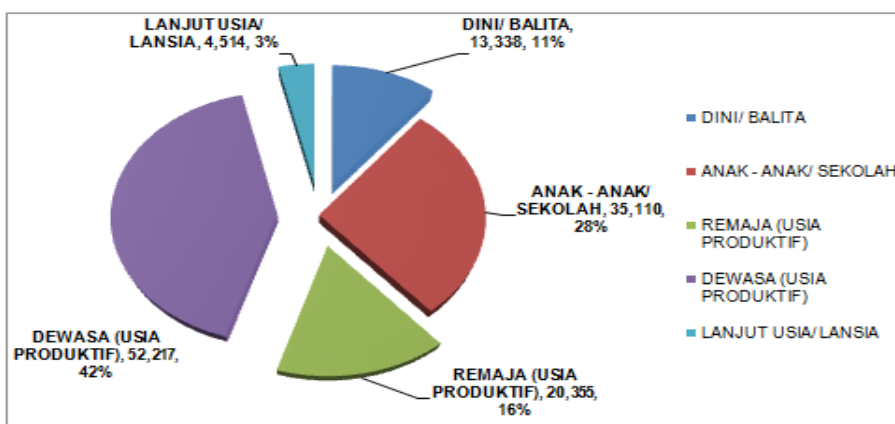
Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Gambar 11. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2016


Penduduk usia produktif terbagi kedalam dua kelompok, kelompok produktif remaja 20.355 jiwa (16%) dan kelompok produktif dewasa 52.217 jiwa (42%).

Sedangkan penduduk anak usia sekolah mencapai 35.110 jiwa atau 28%.

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Gambar 12. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2016


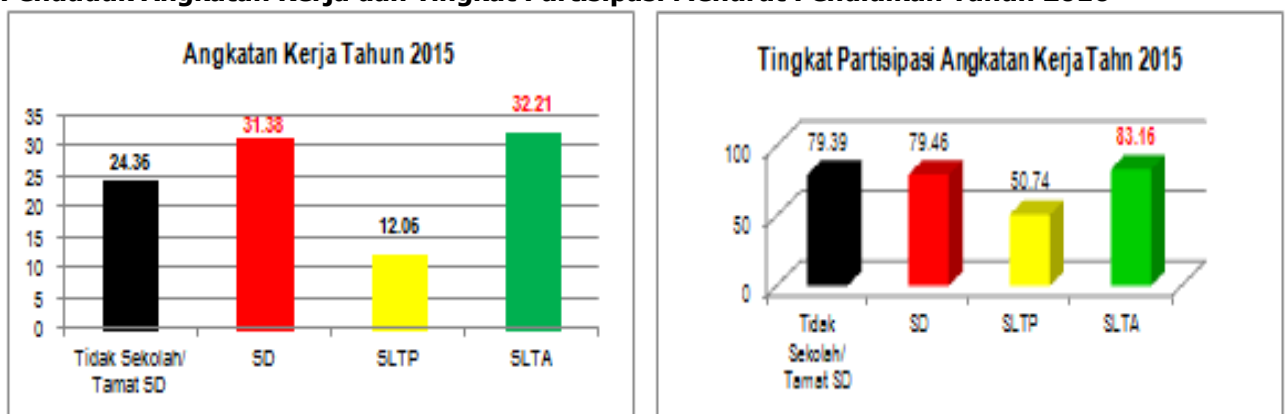
Penduduk kelompok usia dini/ balita sebanyak 13.338 jiwa atau 11% dan usia lanjut sebanyak 4.514 jiwa atau 3%.

Penduduk berumur 15 tahun keatas tingkat partisipasi angkatan kerja lulusan SLTA mencapai 83,16% atau yang tertinggi, lulusan SLTP 50,74 dan lulusan SD 79,46%.

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Tabel 8. Penduduk Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Menurut Pendidikan Tahun 2016

JENIS KEGIATAN UTAMA	Tidak Sekolah/ Tamat SD	SD	SLTP	SLTA
Angkatan Kerja	24.36	31.38	12.06	32.21
Bukan Angkatan Kerja	19.36	24.84	35.85	19.96
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	79.39	79.46	50.74	83.16

Gambar 13. Penduduk Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Menurut Pendidikan Tahun 2016


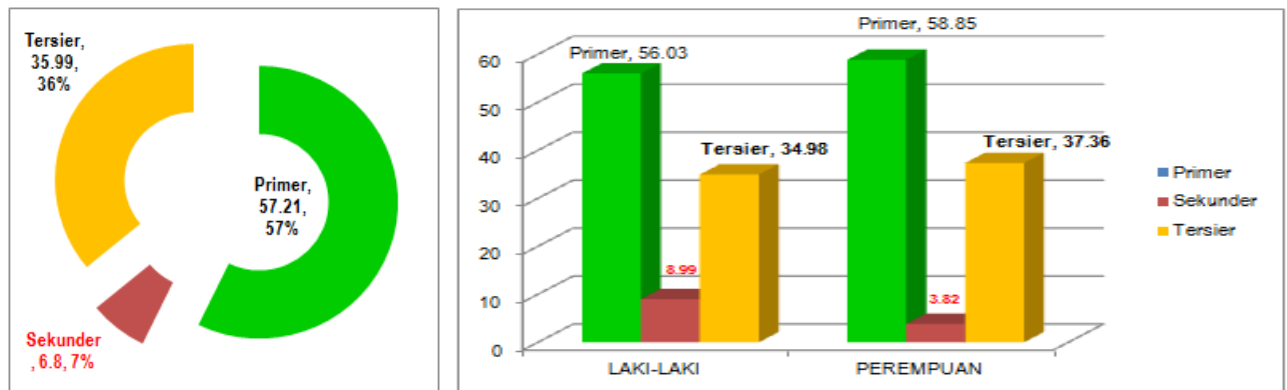
Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Tabel 9. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2016

LAPANGAN USAHA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Primer	56.03	58.85	57.21
Sekunder	8.99	3.82	6.8
Tersier	34.98	37.36	35.99
Jumlah	100	100.03	100

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Penduduk Lapangan Usaha Primer mendominasi sebanyak 56,03 %, kemudian pada sektor usaha tersier mencapai 34,98%.

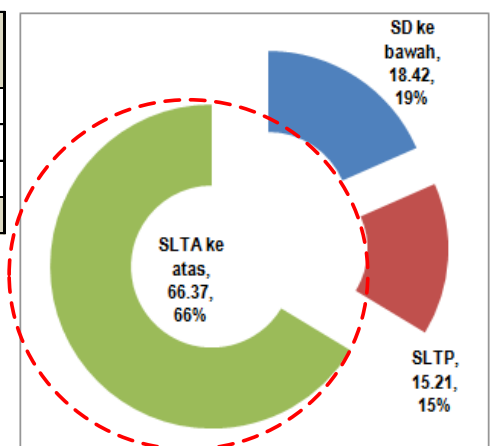
Gambar 14. Penduduk Berumur 15 Th Keatas Menurut Lapangan Usaha & Jenis Kelamin 2016


Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Gambar 16. Persentase Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Persentase
SD ke bawah	18.42
SLTP	15.21
SLTA ke atas	66.37
Jumlah	100.00

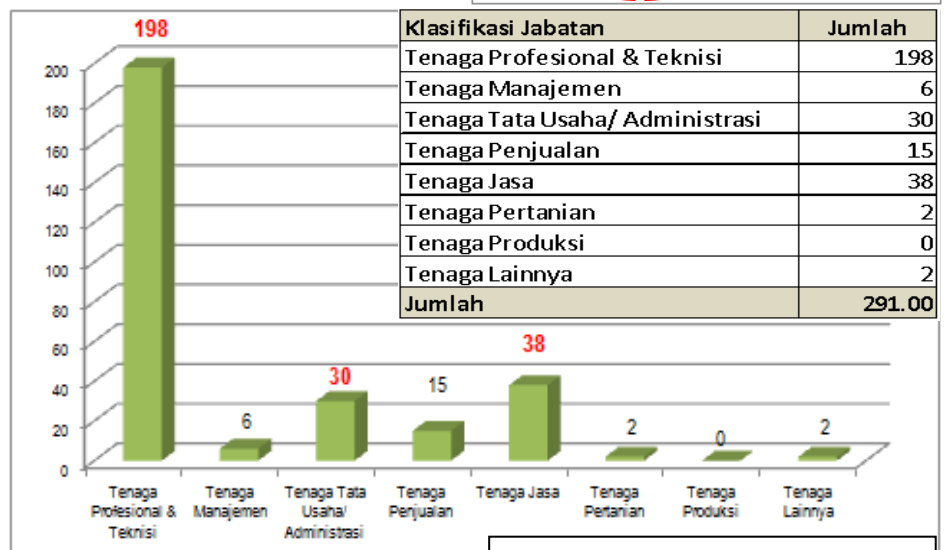
Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah



Pencari kerja terbanyak adalah lulusan SLTA ke atas yaitu 66,37%. Pencari kerja Terdaftar menurut Klasifikasi Jabatan terbanyak adalah Profesional dan Teknisi 198 orang, kemudian Jasa dan Tata Usaha Administrasi masing-masing 38 dan 30 orang.

Gambar 17.

Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Klasifikasi Jabatan, Tahun 2015



Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

2.3. EKONOMI WILAYAH

Perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dari indikator laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Balangan memiliki Laju Pertumbuhan 2,53% lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan usia yang sama yaitu berdiri pada tahun 2003 dengan Laju 3,11. Sedangkan Kabupaten Induknya Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki Laju Pertumbuhan 4,7%.

Tabel 10. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2016

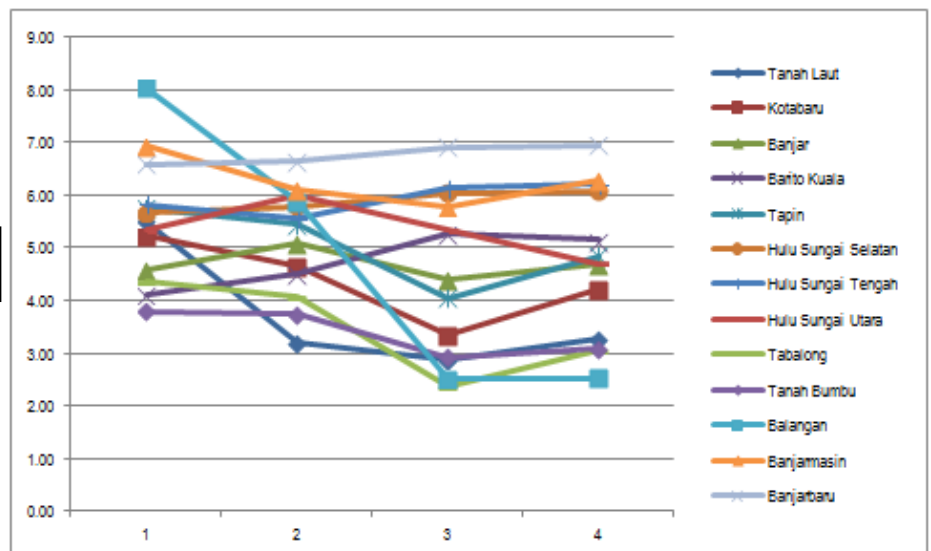
Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015*	2016**	rata-rata
Tanah Laut	5.49	3.19	2.87	3.26	3.70
Kotabaru	5.22	4.66	3.35	4.23	4.37
Banjar	4.60	5.08	4.40	4.70	4.70
Barito Kuala	4.12	4.51	5.27	5.15	4.76
Tapin	5.75	5.44	4.05	4.85	5.02
Hulu Sungai Selatan	5.68	5.79	6.05	6.08	5.90
Hulu Sungai Tengah	5.83	5.56	6.13	6.21	5.93
Hulu Sungai Utara	5.34	5.99	5.34	4.70	5.34
Tabalong	4.36	4.06	2.36	3.06	3.46
Tanah Bumbu	3.80	3.75	2.93	3.11	3.40
Balangan	8.04	5.90	2.52	2.53	4.75
Banjarmasin	6.93	6.11	5.79	6.28	6.28
Banjarbaru	6.59	6.65	6.91	6.95	6.78
Kalimantan Selatan	5.33	4.84	3.83	4.38	4.60

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

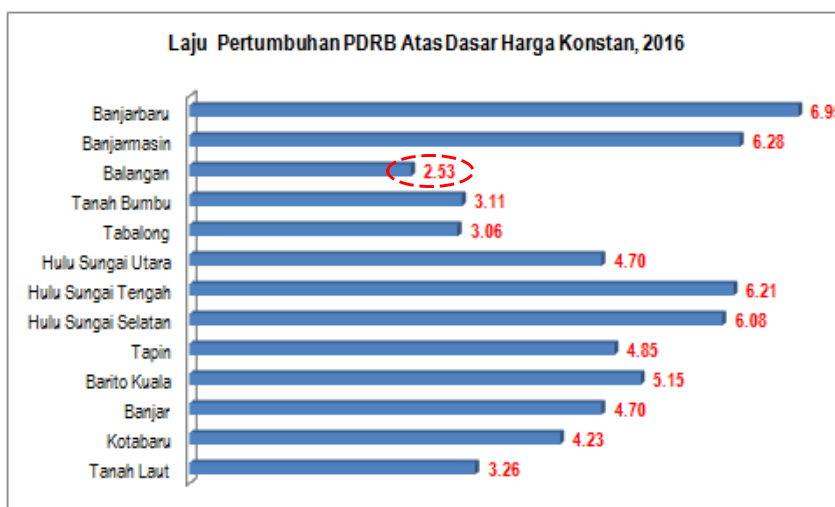
Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Gambar 19. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2013-2016

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah



Gambar 20. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016



Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Tabel 11. PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta), Tahun 2015-2016

PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta), 2015-2016

Kategori	Lapangan Usaha	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,097,515.56	1,166,053.40
B	Pertambangan dan Penggalian	6,014,298.42	5,859,618.37
C	Industri Pengolahan	161,040.52	180,255.11
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,327.26	2,926.25
E	Pengadaan Air	19,887.77	21,567.35
F	Konstruksi	376,382.88	411,386.48
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	430,612.23	489,025.64
H	Transportasi dan Pergudangan	159,226.70	175,319.26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,253.99	29,695.13
J	Informasi dan Komunikasi	112,080.58	120,700.01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,336.33	27,417.05
L	Real Estate	80,484.47	86,923.23
M,N	Jasa Perusahaan	5,577.36	6,162.99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	404,954.08	424,978.03
P	Jasa Pendidikan	262,424.08	303,296.63
Q	Jasa Kesehatan	71,557.01	80,052.76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	43,266.80	48,292.46
PDRB dengan Pertambangan Migas dan Batubara		9,293,213.04	9,433,670.14
PDRB tanpa Pertambangan Migas dan Batubara		3,283,493.95	3,579,188.40

* Angka Sementara

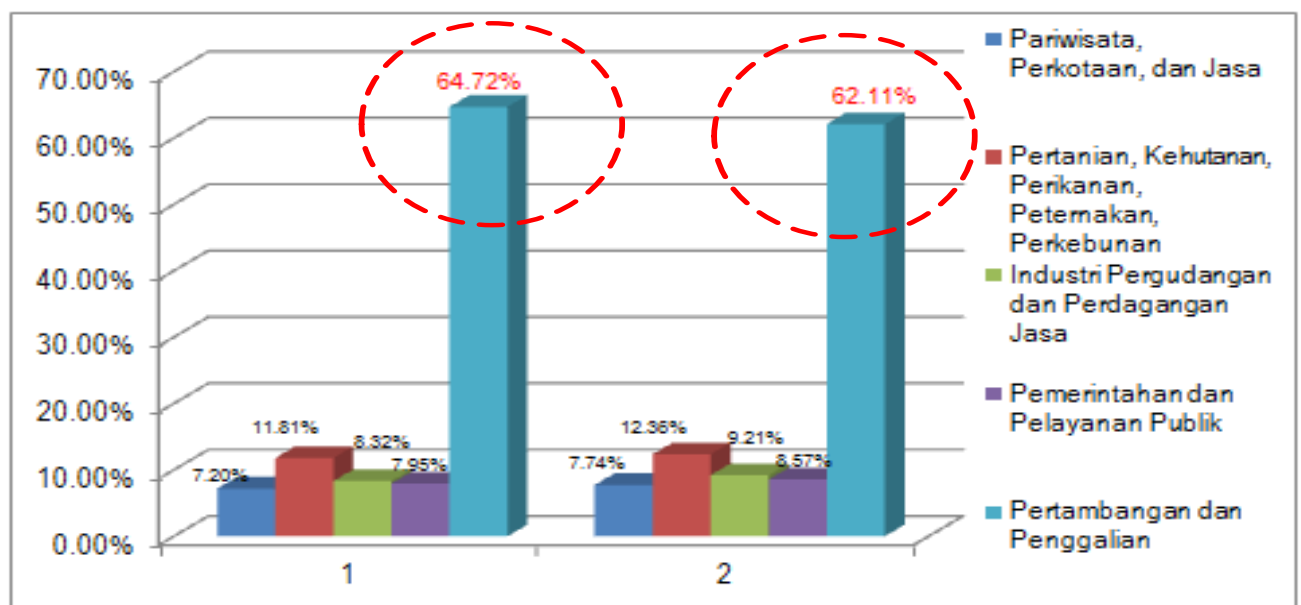
* Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Tabel 12. PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta), Tahun 2015-2016

Kategori	Kelompok Lapangan Usaha	2015*	2016**	% 2015*	% 2016**
F, I,J,K,L,M,N,R,S,T,U	Pariwisata, Perkotaan, dan Jasa	669,382.41	730,577.35	7.20%	7.74%
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan	1,097,515.56	1,166,053.40	11.81%	12.36%
C,D,E,G,H	Industri Pergudangan dan Perdagangan Jasa	773,094.48	869,093.61	8.32%	9.21%
O,P,Q	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	738,935.17	808,327.42	7.95%	8.57%
B	Pertambangan dan Penggalian	6,014,298.42	5,859,618.37	64.72%	62.11%
PDRB dengan Pertambangan Migas dan Batubara		9,293,226.04	9,433,670.15		

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Gambar 21. Kelompok Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016


Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Tabel 13. PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Rp Juta), Tahun 2015-2016

PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Rp Juta), 2015-2016

Kategori	Lapangan Usaha	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	886,734.30	925,934.76
B	Pertambangan dan Penggalian	5,849,851.78	5,917,876.50
C	Industri Pengolahan	122,764.51	130,222.17
D	Pengadaan Listrik, Gas	1,995.68	2,142.39
E	Pengadaan Air	15,391.75	16,453.17
F	Konstruksi	287,269.29	304,125.97
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	325,247.95	353,763.24
H	Transportasi dan Pergudangan	120,961.69	128,654.67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,205.67	22,430.98
J	Informasi dan Komunikasi	94,627.85	100,738.51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,121.49	19,939.37
L	Real Estate	64,415.72	68,419.16
M,N	Jasa Perusahaan	4,001.15	4,324.58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	284,208.68	290,066.24
P	Jasa Pendidikan	201,470.56	218,992.48
Q	Jasa Kesehatan	53,301.07	57,653.71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	32,004.75	34,277.75
PDRB dengan Pertambangan Migas dan Batubara		8,383,573.89	8,396,015.62
PDRB tanpa Pertambangan Migas dan Batubara		2,537,165.34	2,681,872.78

* Angka Sementara

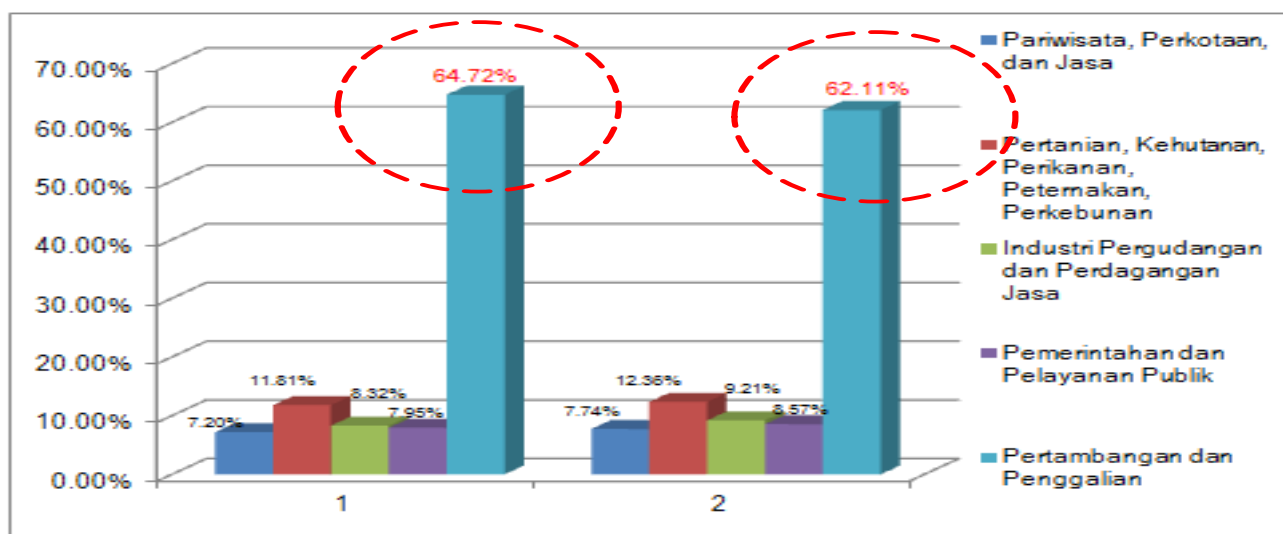
* Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Tabel 14. PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Rp Juta), Tahun 2015-2016

Kategori	Kelompok Lapangan Usaha	2015*	2016**	% 2015*	% 2016**
F, I,J,K,L,M,N,R,S,T,U	Pariwisata, Perkotaan, dan Jasa	521,645.92	554,256.32	6.22%	6.45%
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan	886,734.30	925,934.76	10.58%	10.77%
C,D,E,G,H	Industri Pengolahan dan Perdagangan Jasa	586,361.58	631,235.64	6.99%	7.34%
O,P,Q	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	538,980.31	566,712.43	6.43%	6.59%
B	Pertambangan dan Penggalian	5,849,851.78	5,917,876.50	69.78%	68.84%
PDRB dengan Pertambangan Migas dan Batubara		8,383,573.89	8,596,015.65		

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

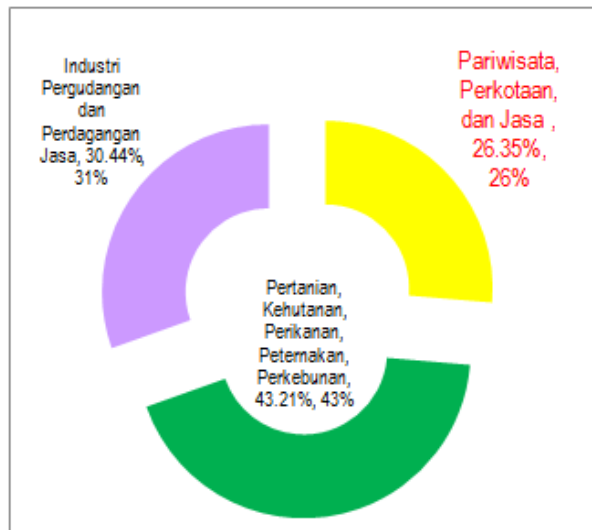
Gambar 22. Kelompok Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016


Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Tabel 15.

**PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta),
Tahun 2015-2016 (Tanpa Pertambangan & Pemerintahan)**

Kategori	Kelompok Lapangan Usaha	2015*	2016**	% 2015*	% 2016**
F, I,J,K,L,M,N,R,S,T,U	Pariwisata, Perkotaan, dan Jasa	669,382.41	730,577.35	26.35%	26.42%
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan	1,097,515.56	1,166,053.40	43.21%	42.16%
C,D,E,G,H	Industri Pergudangan dan Perdagangan Jasa	773,094.48	869,093.61	30.44%	31.42%
PDRB tanpa Pertambangan Migas & Batubara dan tanpa Pemerintahan & Pelayanan Publik		2,539,992.45	2,765,724.36		


Gambar 23.

PDRB harga berlaku (tanpa pertambangan & pemerintahan)

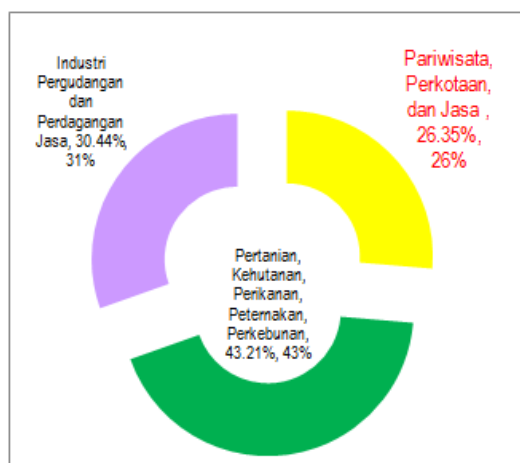
Sektor Primer Pertanian Kehutanan, perikanan, Peketernakan dan Perkebunan mendominasi sebanyak 43%, sedangkan sektor Tersier Pariwisata dan Jasa Perkotaan mencapai 26%.

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

Tabel 16.

**PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Rp Juta),
Tahun 2015-2016 (Tanpa Pertambangan & Pemerintahan)**

Kategori	Kelompok Lapangan Usaha	2015*	2016**	% 2015*	% 2016**
F, I,J,K,L,M,N,R,S,T,U	Pariwisata, Perkotaan, dan Jasa	521,645.92	554,256.32	26.15%	26.25%
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan	886,734.30	925,934.76	44.45%	43.85%
C,D,E,G,H	Industri Pergudangan dan Perdagangan Jasa	586,361.58	631,235.64	29.40%	29.90%
PDRB tanpa Pertambangan Migas & Batubara dan tanpa Pemerintahan & Pelayanan Publik		1,994,741.80	2,111,426.72		


Gambar 24.

PDRB harga konstan (tanpa pertambangan & pemerintahan)

Sektor Primer Pertanian Kehutanan, perikanan, Peketernakan dan Perkebunan mendominasi sebanyak 43%, sedangkan sektor Tersier Pariwisata dan Jasa Perkotaan mencapai 26%.

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

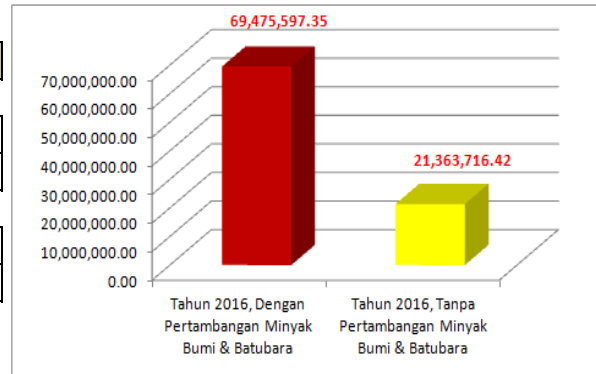
Tabel 17. PDRB Per Kapita Balangan (Rupiah), Tahun 2015-2016
PDRB Per Kapita Balangan (Rupiah), 2015-2016

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
Dengan Pertambahan Minyak Bumi & Batubara		
2015*	75,279,775.76	67,911,233.73
2016**	75,148,327.46	69,475,597.35
Tanpa Pertambahan Minyak Bumi & Batubara		
2015*	26,597,979.32	20,552,336.07
2016**	28,511,705.20	21,363,716.42

* Angka Sementara

* Angka Sangat Sementara

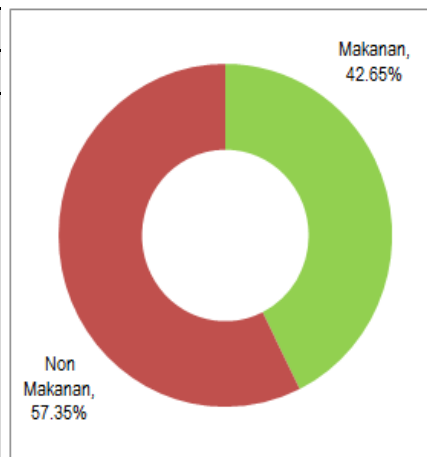
Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah



PDRB harga konstan tanpa pertambahan sebesar 21.363.716 atau sebesar 1/3 atau 30% dari PDRB dengan pertambahan yang mencapai 69.475.597

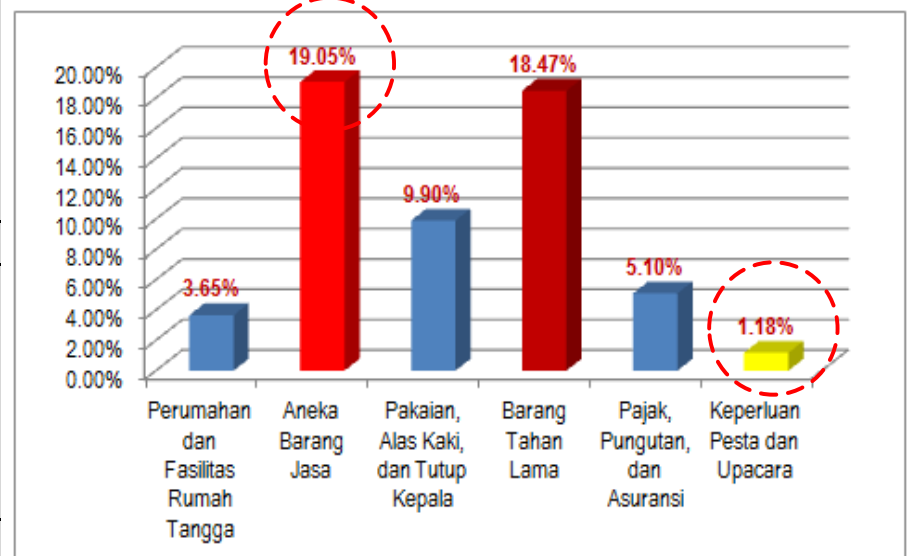
Gambar 25. Distribusi Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016

Jenis Pengeluaran	%	%
Makanan		42.65%
Padi-Padian	5.97%	
Umbi-Umbian	0.14%	
Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	4.91%	
Daging	1.16%	
Telur dan Susu	2.45%	
Sayur-Sayuran	2.28%	
Kacang-Kacangan	0.48%	
Buah-Buahan	2.17%	
Minyak dan Kelapa	1.21%	
Bahan Minuman	1.66%	
Bumbu-Bumbuan	0.90%	
Konsumsi Lain	1.38%	
Makanan dan Minuman	13.27%	
Tembakau dan Sirih	4.67%	
Non Makanan		57.35%
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	3.65%	
Aneka Barang Jasa	19.05%	
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	9.90%	
Barang Tahan Lama	18.47%	
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	5.10%	
Keperluan Pesta dan Upacara	1.18%	
Jumlah	100.00%	100.00%



Distribusi Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan

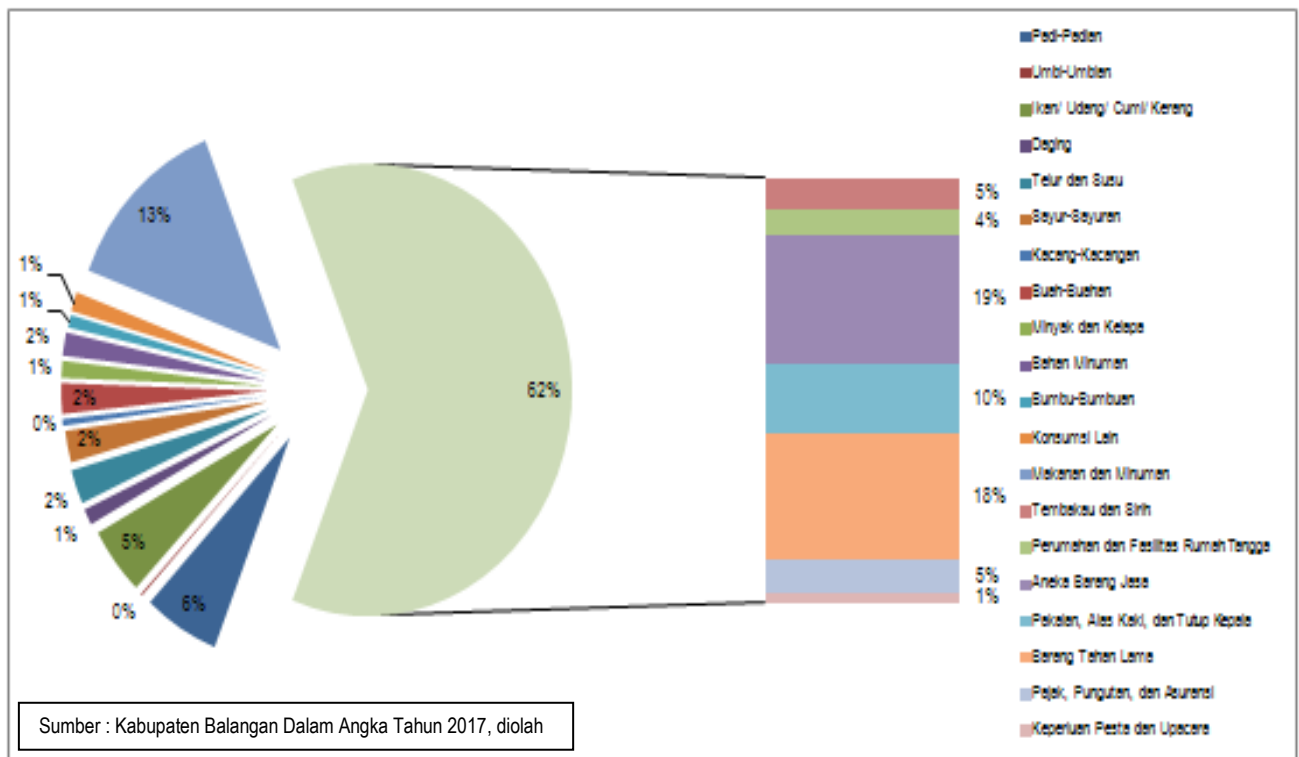
Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016



Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017, diolah

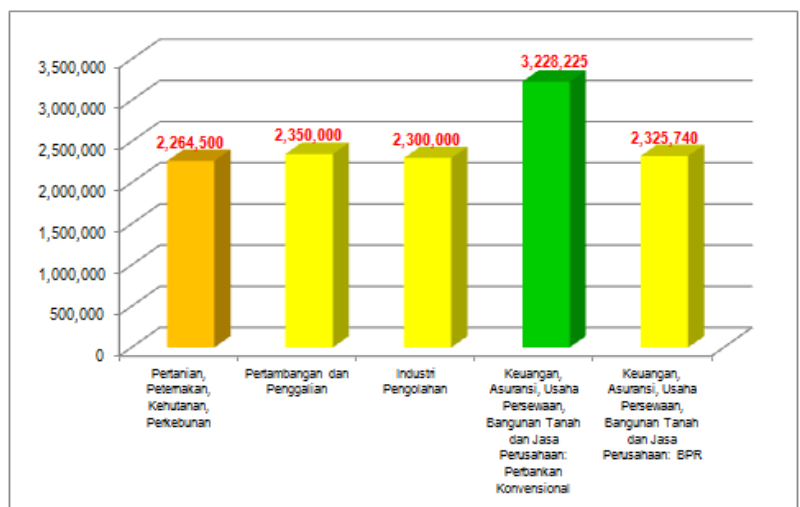
Pengeluaran masyarakat untuk konsumsi makanan dan minuman mencapai lebih dari 42%, dan non makanan kurang dari 58%.

Gambar 26. Distribusi persentase rata-rata pengeluaran perkapita per bulan menurut jenis pengeluaran Tahun 2016



Gambar 27. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Balangan, Tahun 2015

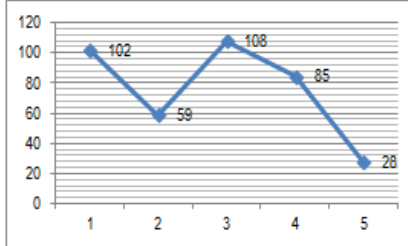
Upah Minimum Sektoral	Biaya (Rp)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan	2,264,500
Pertambangan dan Penggalian	2,350,000
Industri Pengolahan	2,300,000
Persewaan, Bangunan Tanah dan Jasa Perusahaan: Perbankan Konvensional	3,228,225
Kuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan Tanah dan Jasa Perusahaan: BPR	2,325,740



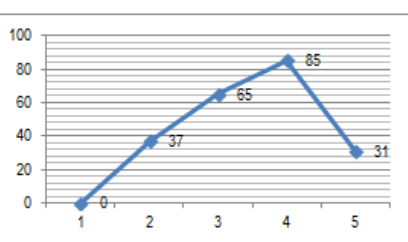
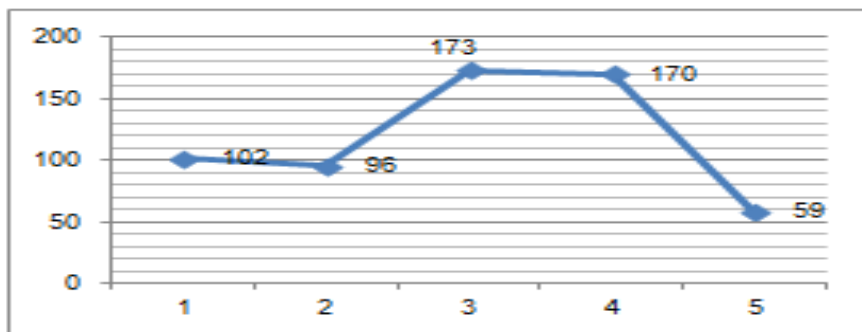
Upah Minimum Sektoral di Kabupaten Balangan tertinggi adalah Sektor Persewaan, Bangunan Tanah dan Jasa Perusahaan (dan Perbankan) sebesar Rp. 3.228.225,00 sedangkan yang terkecil adalah sektor primer (Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan) hanya Rp. 2.264.500,00

Gambar 28. Perkembangan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Tahun 2012-2016
Penerbitan TDP

Bentuk Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016
PT	11	9	32	21	4
Koperasi	1	3	2	1	1
CV	87	46	72	62	23
Fa	0	0	0	0	0
Perorangan	3	0	2	0	0
BUK	0	1	0	1	0
Jumlah	102	59	108	85	28


Pendaftaran Ulang / Memperbarui TDP

Bentuk Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016
PT	0	6	17	21	6
Koperasi	0	2	0	1	1
CV	0	29	47	62	23
Fa	0	0	0	0	0
Perorangan	0	0	1	0	0
BUK	0	0	0	1	1
Jumlah	0	37	65	85	31


JUMLAH AKUMULASI PENERBITAN BARU DAN DAFTAR ULANG


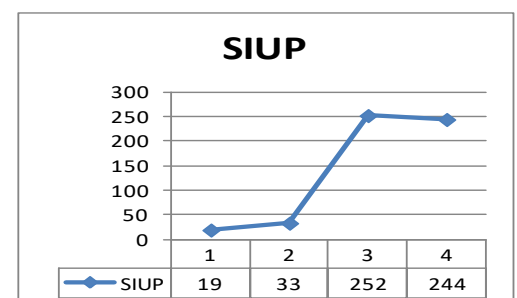
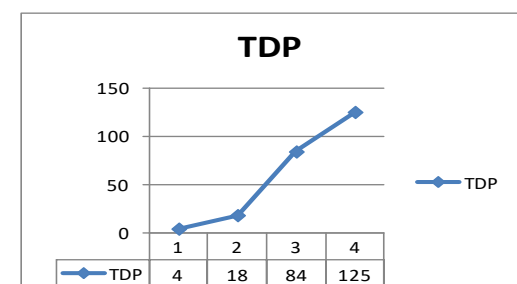
**Perkembangan
Penerbitan
Tanda Daftar
Perusahaan
(TDP) dan
Pendaftaran
Ulang/
Memperbarui,
Tahun 2012-2016**

Sumber :
DPMPTSP Kabupaten Balangan, diolah

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan, terlihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun sejak Perda RTRW pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) mengalami peningkatan dari 19 hingga 252 buah, sedangkan pengeluaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP) juga meningkat dari 4 hingga 125 buah dalam 4 (empat) tahun terakhir).

Gambar 29. Pengeluaran SIUP Tahun 2013-2016

No	Tahun	Izin Prinsip	SIUP	TDP	SITU
1	2013	-	19	4	-
2	2014	-	33	18	-
3	2015	-	252	84	-
4	2016	6	244	125	276


Gambar 30. Pengeluaran TDP Tahun 2013-2016


2.4. KETERSEDIAAN PRASARANA WILAYAH

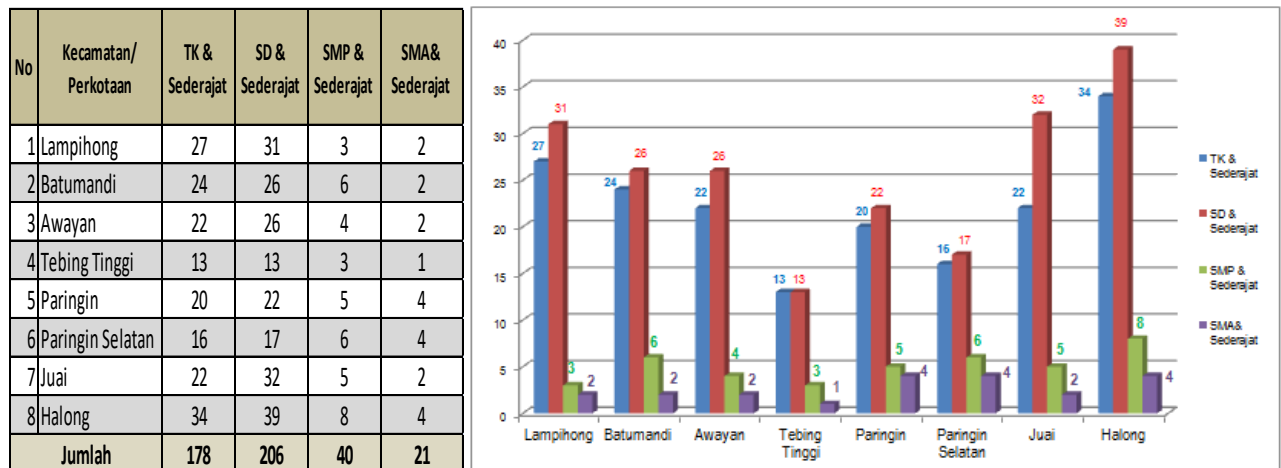
Jumlah pasilitas/ prasarana pendidikan di Kabupaten Balangan mencapai 445 unit (mulai dari tingkat PAUD & TK, SD Sederajat, SLTP Sederajat, dan SLTA Sederajat). Sedangkan Rumah Sakit 1 buah yaitu RSUD Balangan yang telah beroperasi didukung 34 unit fasilitas kesehatan setingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang tersebar di 8 Kecamatan. Dengan 477 unit fasilitas dan tempat peribadatan.

Tabel 18. Jumlah Penduduk, Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Peribadatan Tahun 2016

No	Kecamatan/ Perkotaan	Penduduk	TK & Sederajat	SD & Sederajat	SMP & Sederajat	SMA & Sederajat	Puskesmas, Pustu	Tempat Peribadatan	Tempat Pembuangan Sampah
1	Lampihong	17,297	27	31	3	2	4	79	2
2	Batumandi	17,707	24	26	6	2	4	82	4
3	Awayan	13,494	22	26	4	2	5	60	0
4	Tebing Tinggi	6,674	13	13	3	1	2	23	0
5	Paringin	18,806	20	22	5	4	4	66	27
6	Paringin Selatan	12,819	16	17	6	4	3	29	14
7	Juai	17,767	22	32	5	2	6	57	0
8	Halong	20,970	34	39	8	4	6	81	2
	Jumlah	125,534	178	206	40	21	34	477	49

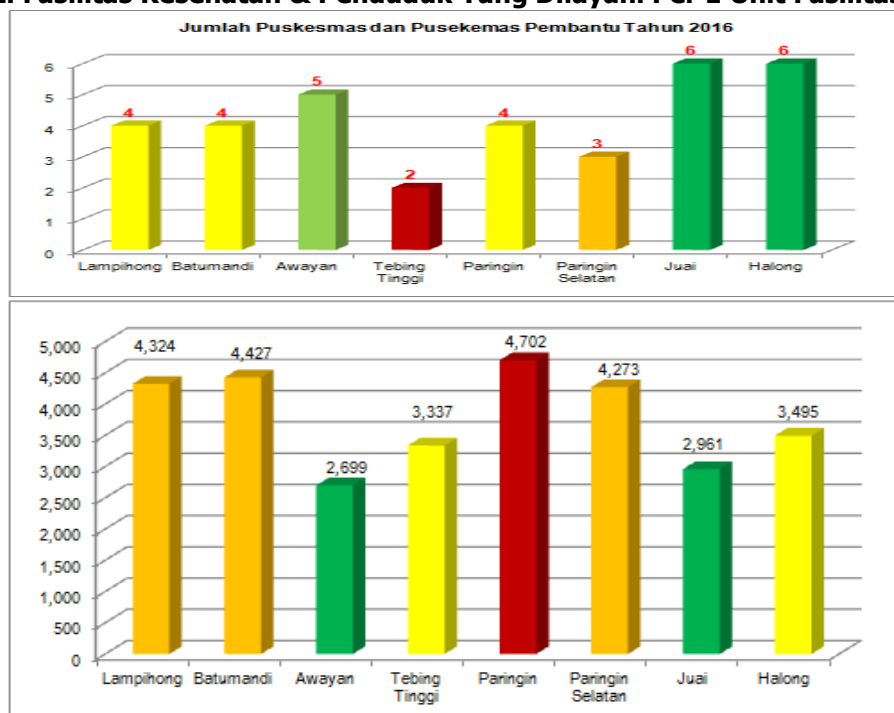
Sumber : KDA Balangan Tahun 2017

Gambar 31. Fasilitas Pendidikan Tahun 2016



Sumber : KDA Balangan Tahun 2017

Gambar 32. Fasilitas Kesehatan & Penduduk Yang Dilayani Per 1 Unit Fasilitas Kesehatan



Sumber : KDA Balangan Tahun 2017

Sistem Prasarana Wilayah di Kabupaten Balangan dapat digambarkan melalui Sistem Prasarana Utama berupa Sistem Jaringan Jalan dan Prasarana Transportasi, dan Sistem Prasarana Lainnya berupa Jaringan Air Minum, Jaringan Persampahan, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Ketenagalistrikan.



Gambar 33. Jalan Ahmad Yani di Depan RTH Batumandi (Arteri Primer Kewenangan Nasional)



Gambar 34. Perbaikan Jembatan pada Jalan Lokal Kewenangan Kabupaten pada Area Wisata

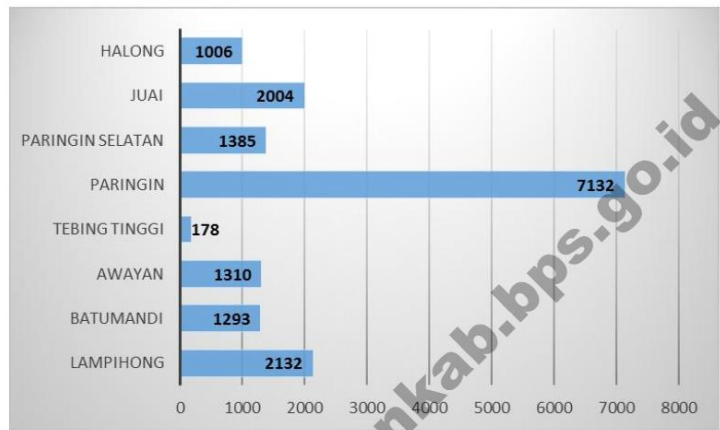


Gambar 35. Peningkatan dan Pelebaran Badan Jalan (Ruang Manfaat Jalan/ Rumaja)

Sistem Prasarana Utama terdiri dari Sistem Jaringan Jalan dan Prasarana Transportasi/ Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Jalan Kewenangan Nasional dengan Fungsi Jalan Arteri Primer (A1) Ruas Jalan Ahmad Yani di Kabupaten Balangan yang melintasi 3 (tiga) Kecamatan Batumandi, Paringin Selatan dan Paringin untuk saat ini terus dilakukan perbaikan karena kerusakan jalan, peningkatan kualitas perkerasan jalan untuk Kelas Jalan yang lebih tinggi dan secara bertahap dilakukan Pelebaran Ruang Milik Jalan (Rumija) yang diprioritaskan pada Kawasan Perkotaan Paringin untuk Tahap Pertama. Sedangkan Jalan Kewenangan Provinsi dengan Fungsi Jalan Kolektor Primer (K1) pada Ruas Paringin – Lampihong mengalami kerusakan akibat longsor pada bagian tepi sungai, yang terus dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan membangun konstruksi perkuatan tebing sungai balangan. Sedangkan Jalan Kewenangan Kabupaten dengan Fungsi Jalan Kolektor Primer (K1), Kolektor Sekunder (K2) dan Jalan Lokal dalam 5 (lima) tahun kebelakang dilakukan peningkatan kualitas perkerasan jalan, pelebaran badan jalan (ruang manfaat jalan/ rumaja), dan peningkatan status fungsi jalan lingkungan menjadi jalan lokal. Untuk penyediaan prasarana transportasi terminal, masih belum terdapat upaya penyediaan dan pembangunan baru, atau peningkatan yang ada.

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian, telah diakomodasi dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Batumandi untuk alokasi ruang stasiun KA dan jaringan relnya.

Sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Balangan terdapat 1 IPA Paringin dan 7 (tujuh) IKK (Awayan, Halong, Juai, Lampihong, Batumandi, Paringin Selatan, dan Tebing Tinggi)



Gambar 36. Jumlah Pelanggan Air Minum Non Niaga Tahun 2016

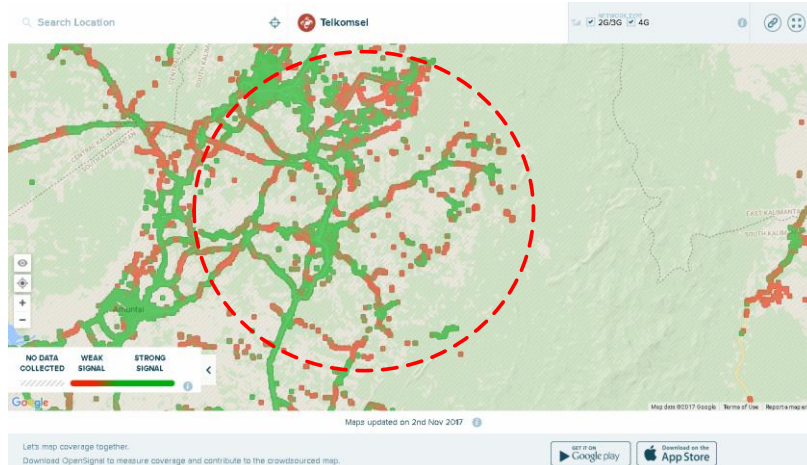
TPA Batu Merah yang berada di Kecamatan Lampihong, cukup efektif dan dekat dengan Perkotaan Kecamatan Lampihong, Kec. Paringin, Kec. Paringin Selatan, Kec. Batumandi, Kec. Awayan dan Kec. Juai. Dengan cadangan luasan lahan yang masih sangat besar mampu menampung dan mengelola sampah dan sampah perkotaan hingga lebih dari 20 tahun kedepan. Jangkauan sinyal telekomunikasi masih terfokus di Perkotaan Paringin, Batumandi dan Ibukota Kecamatan Lainnya, sedangkan pada jalur arteri dan keloktor beberapa masih kurang.



Gambar 37. TPA Batu Merah

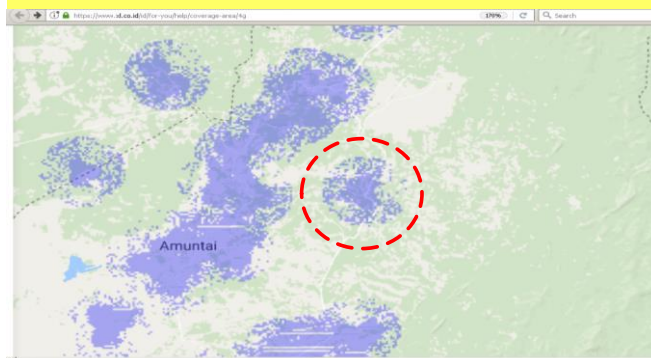
Gambar 38. Jangkauan Pelayanan Telekomunikasi

TELKOMSEL COVERAGE AREA

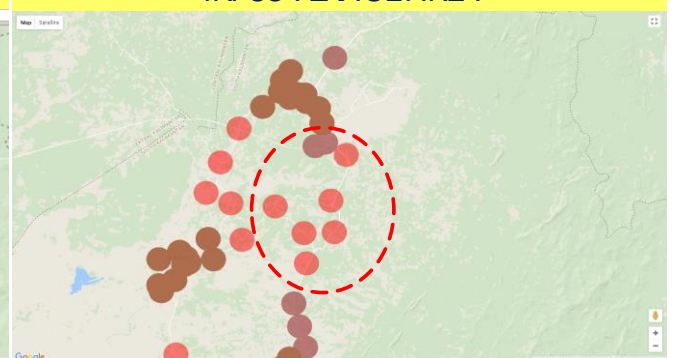


JANGKAUAN PELAYANAN TELEKOMUNIKASI

XL COVERAGE AREA



TRI COVERAGE AREA

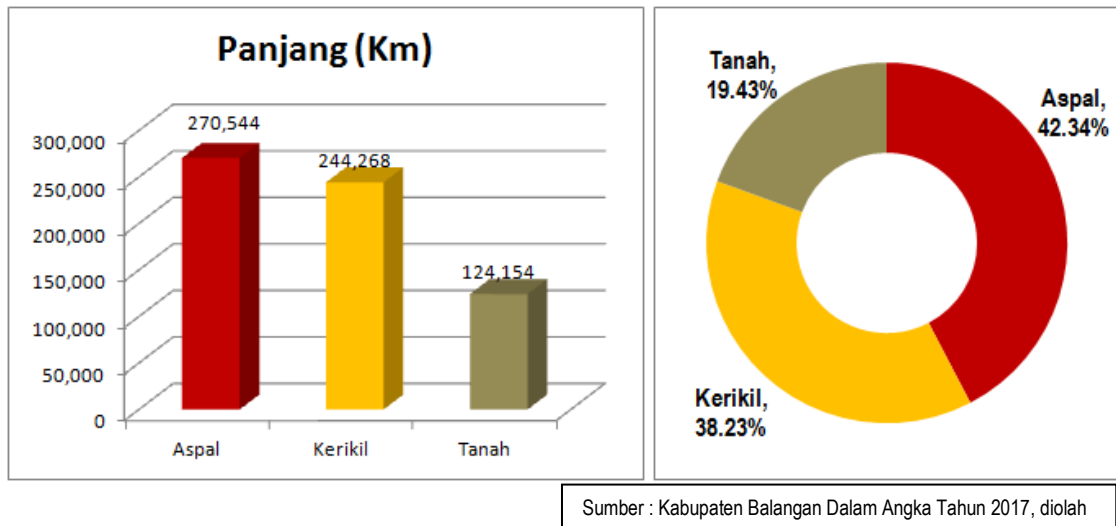


Seluruh Kawasan Perkotaan, Ibukota Kecamatan, Desa-Desa Pusat Pertumbuhan dan Pasar-Pasar di Wilayah Kabupaten Balangan telah terhubung dengan Jaringan Jalan Aspal dalam Kondisi Baik.



Tabel 19. Prasarana Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2016

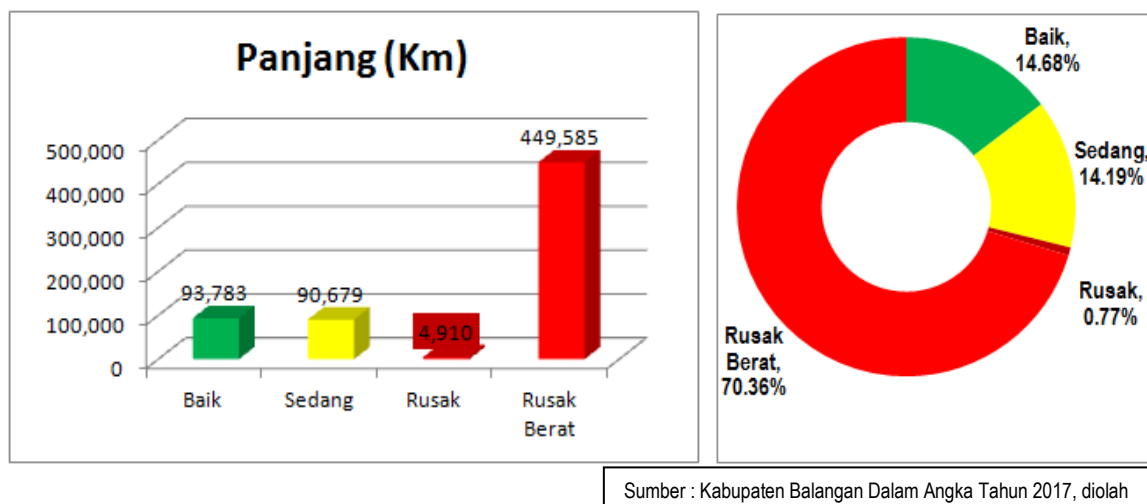
Jenis Permukaan	Panjang (Km)	%
Aspal	270,544	42.34%
Kerikil	244,268	38.23%
Tanah	124,154	19.43%
Jumlah	638,966	100.00%

Gambar 40. Prasarana Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2016


Panjang Jalan total di Kabupaten Balangan mencapai 638,96 km, dengan komposisi jalan aspal 42%, jalan kerikil 28%, dan jalan tanah 20%. Sedangkan jalan dalam kondisi bauj dan sedang mencapai hampir 30%, dimana 20% jalan dalam kondisi rusak berat, hal ini karena jalan masih berupa tanah dan kerikil dimana saat musim hujan jalan menjadi lebih sulit untuk dilalui.

Tabel 20. Prasarana Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2016

Kondisi Jalan	Panjang (Km)	%
Baik	93,783	14.68%
Sedang	90,679	14.19%
Rusak	4,910	0.77%
Rusak Berat	449,585	70.36%
Jumlah	638,957	85.32%

Gambar 41. Prasarana Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2016


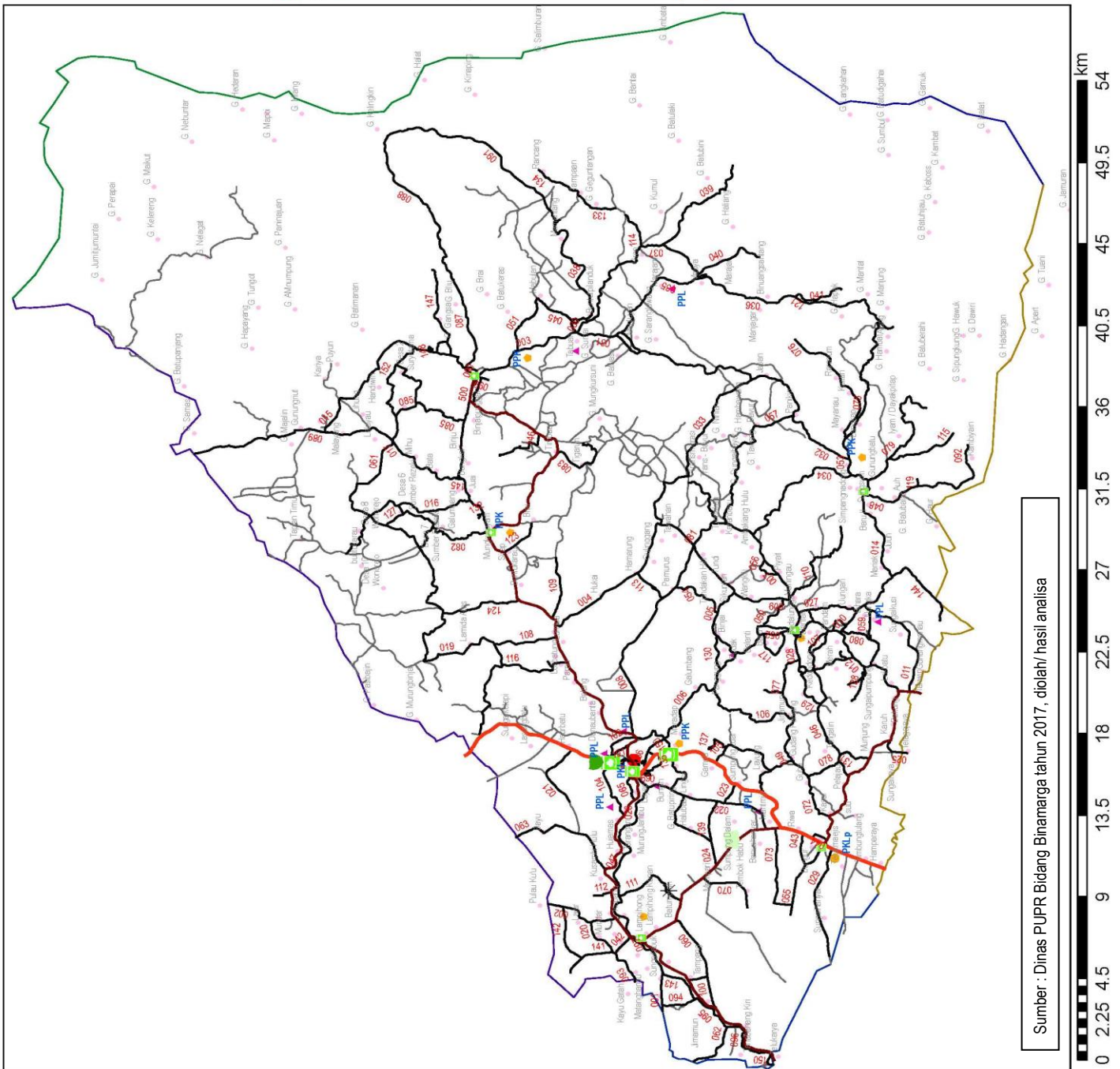
STRUKTUR RUANG SISTEM PRASARANA UTAMA JARINGAN JALAN

Gambar 42. Struktur Ruang & Jaringan Jalan



1:200,000

1 cm = 2 km



2.5. PENGGUNAAN LAHAN

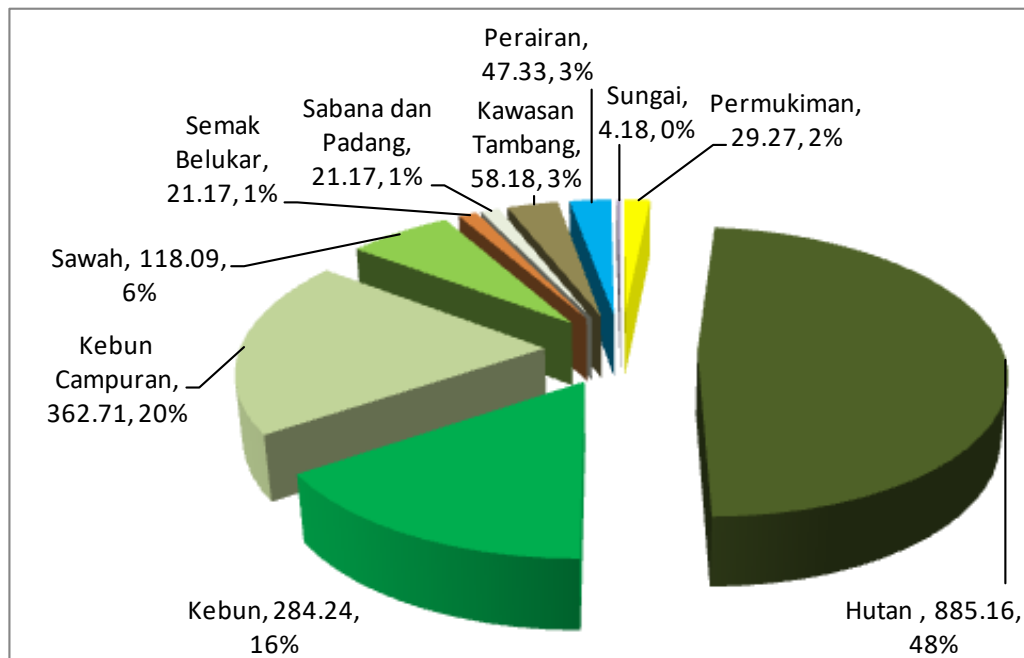
Tutupan Lahan Tahun 2017 dipergunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi akhir dari pemanfaatan lahan setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomer 24 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032. Data Tutupan lahan ini diperoleh dari proses interpretasi Citra Satelit Sentinel Resolusi 10 Meter pengambilan "*acquitition date*" Juli 2017, yang didigitasi dalam skala 1:25.000 s/d skala 1:50.000 oleh Tim Konsultan.

Tabel 21. Tutupan Lahan Kabupaten Balangan Tahun 2017 (10 Klasifikasi)

Tutupan Lahan	Luas (Km ²)	%
Permukiman	29.27	1.60%
Hutan	885.16	48.33%
Kebun	284.24	15.52%
Kebun Campuran	362.71	19.80%
Sawah	118.09	6.45%
Semak Belukar	21.17	1.16%
Sabana dan Padang	21.17	1.16%
Kawasan Tambang	58.18	3.18%
Perairan	47.33	2.58%
Sungai	4.18	0.23%
Jumlah	1,831.50	100.00%

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Gambar 43. Garfik Tutupan Lahan Kabupaten Balangan Tahun 2017 (10 Klasifikasi).



Gambar 44. Kawasan Permukiman Perkotaan Kecamatan Halong



Gambar. 45. Kawasan Kebun Karet Tepi Sungai di Kecamatan Halong

Pada tahun 2017 luasan permukiman di Kabupaten Balangan seluas 29.27 km² atau 1,6%, sedangkan luas area dengan tutupan lahan hutan seluas 885.16 km² atau lebih dari 48%,. Artinya hampir setengah dari luas kabupaten balangan masih berupa tutupan hutan. Sedangkan tutupan berupa kebun dan kebun campuran mencapai 646,95 km² atau lebih dari 35 %. Pada tutupan lahan 2017 teridentifikasi beberapa klasifikasi yang tidak diidentifikasi tersebdiri atau kemungkinan digabungkan dalam klasifikasi lainnya, yaitu berupa tutupan sabana/ apadang, lahan terbuka. Dalam identifikasi tutupan lahan tahun 2017 dengan menggunakan SNI 7645:2010 tentang Klasifikasi Penutup Lahan, menggunakan Kelas Penutup lahan skala 1:50.000 atau 1:25.000, hal ini bertujuan untuk mendapatkan tutupan lahan yang mendekati dengan pemanfaatan lahan yang ada.

Tabel 22. Tutupan Lahan Kabupaten Balangan Tahun 2017 (16 Klasifikasi)

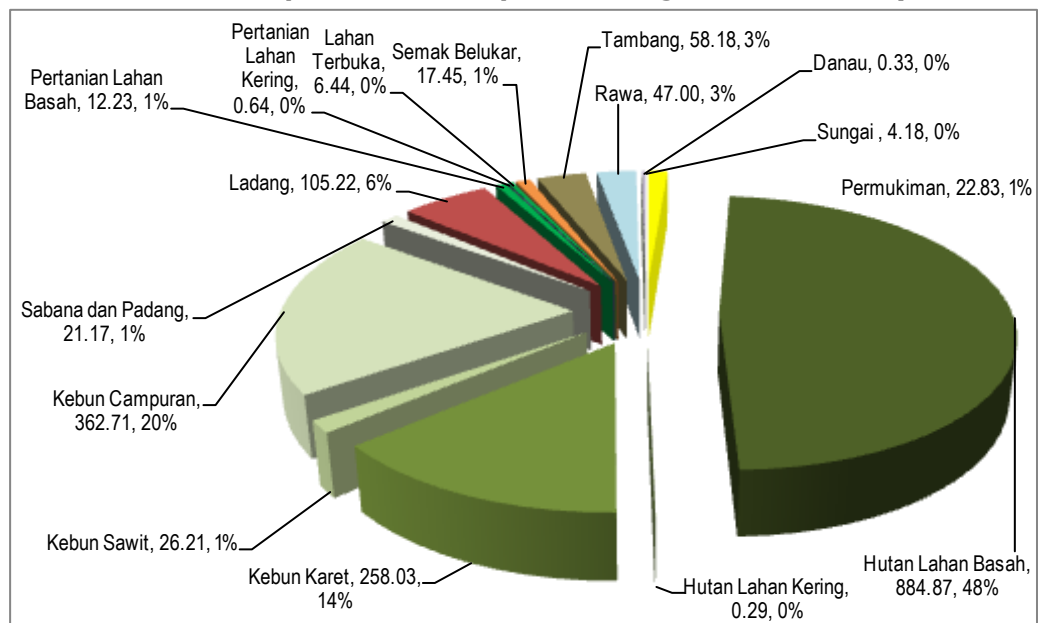
Tutupan Lahan	Luas (Km ²)	%
Permukiman	22.83	1.25%
Hutan Lahan Basah	884.87	48.41%
Hutan Lahan Kering	0.29	0.02%
Kebun Karet	258.03	14.12%
Kebun Sawit	26.21	1.43%
Kebun Campuran	362.71	19.84%
Sabana dan Padang	21.17	1.16%
Ladang	105.22	5.76%
Pertanian Lahan Basah	12.23	0.67%
Pertanian Lahan Kering	0.64	0.04%
Lahan Terbuka	6.44	0.35%
Semak Belukar	17.45	0.95%
Tambang	58.18	3.18%
Rawa	47.00	2.57%
Danau	0.33	0.02%
Sungai	4.18	0.23%
Jumlah	1,827.78	100.00%

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Terdapat beberapa perbedaan dari tutupan lahan awal tahun 2012/ 2013, meliputi :

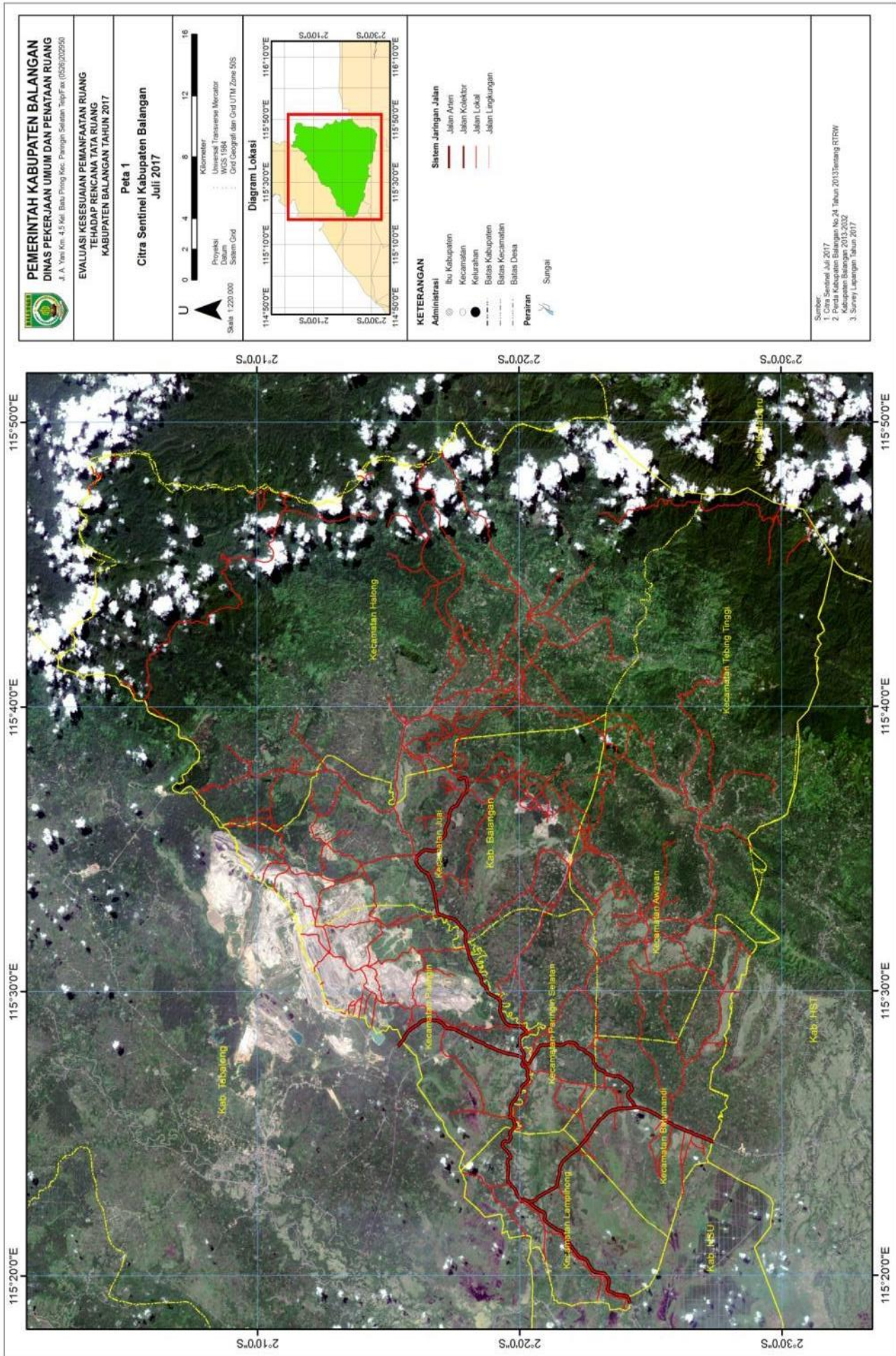
1. Tutupan sawah di uraikan menjadi 3 (tiga) kelas penutup, yaitu ladang, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.
2. Tutupan hutan diuraikam menjadi 2 (dua) kelas penutup, yaitu hutan lahan basah dan hutan lahan kering.
3. Tutupan Kebun diuraikan menjadi 2 (dua) kelas penutup, yaitu kebun karet dankebun sawit.

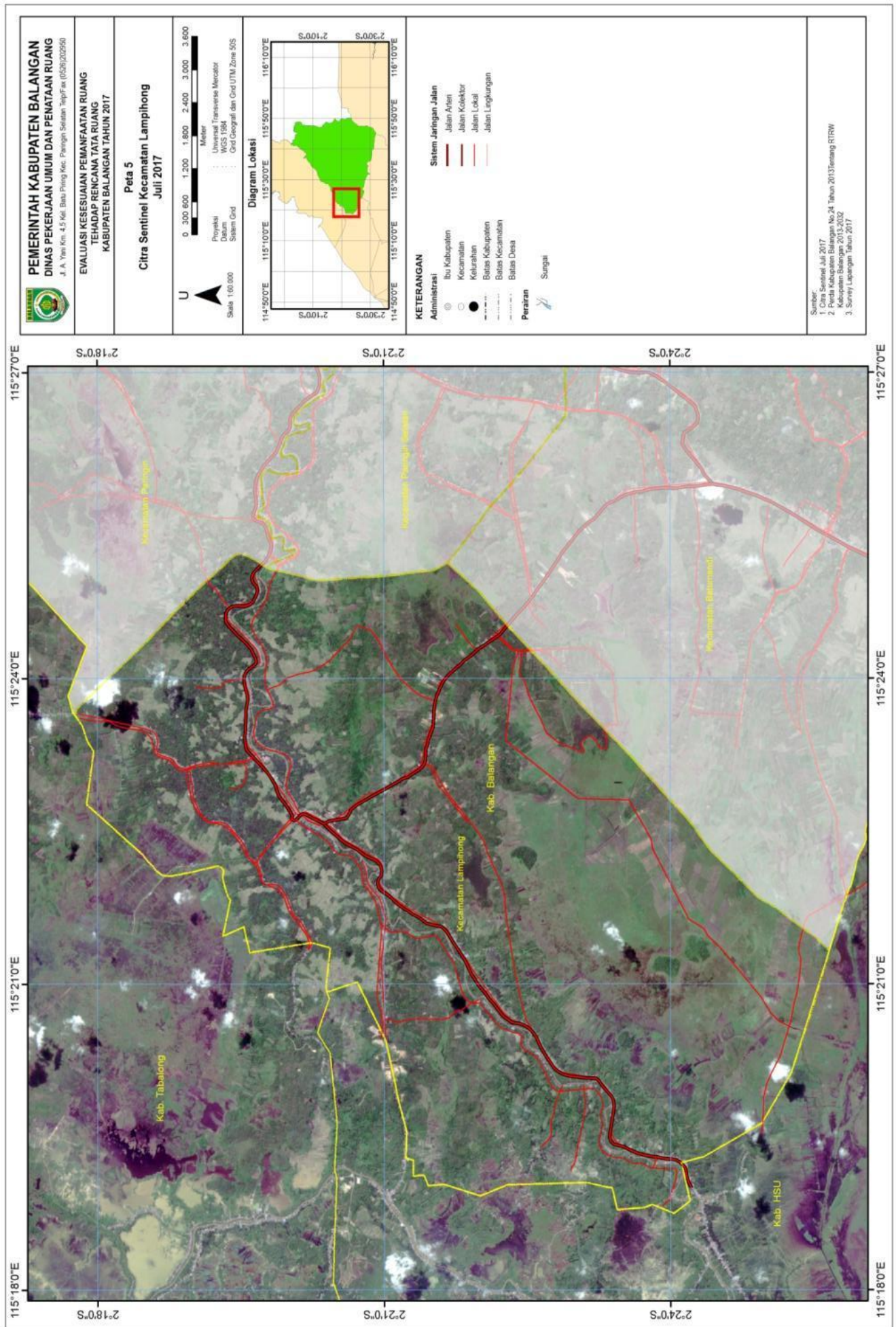
Gambar. 46. Garfik Tutupan Lahan Kabupaten Balangan Tahun 2017. (16 Klasifikasi)



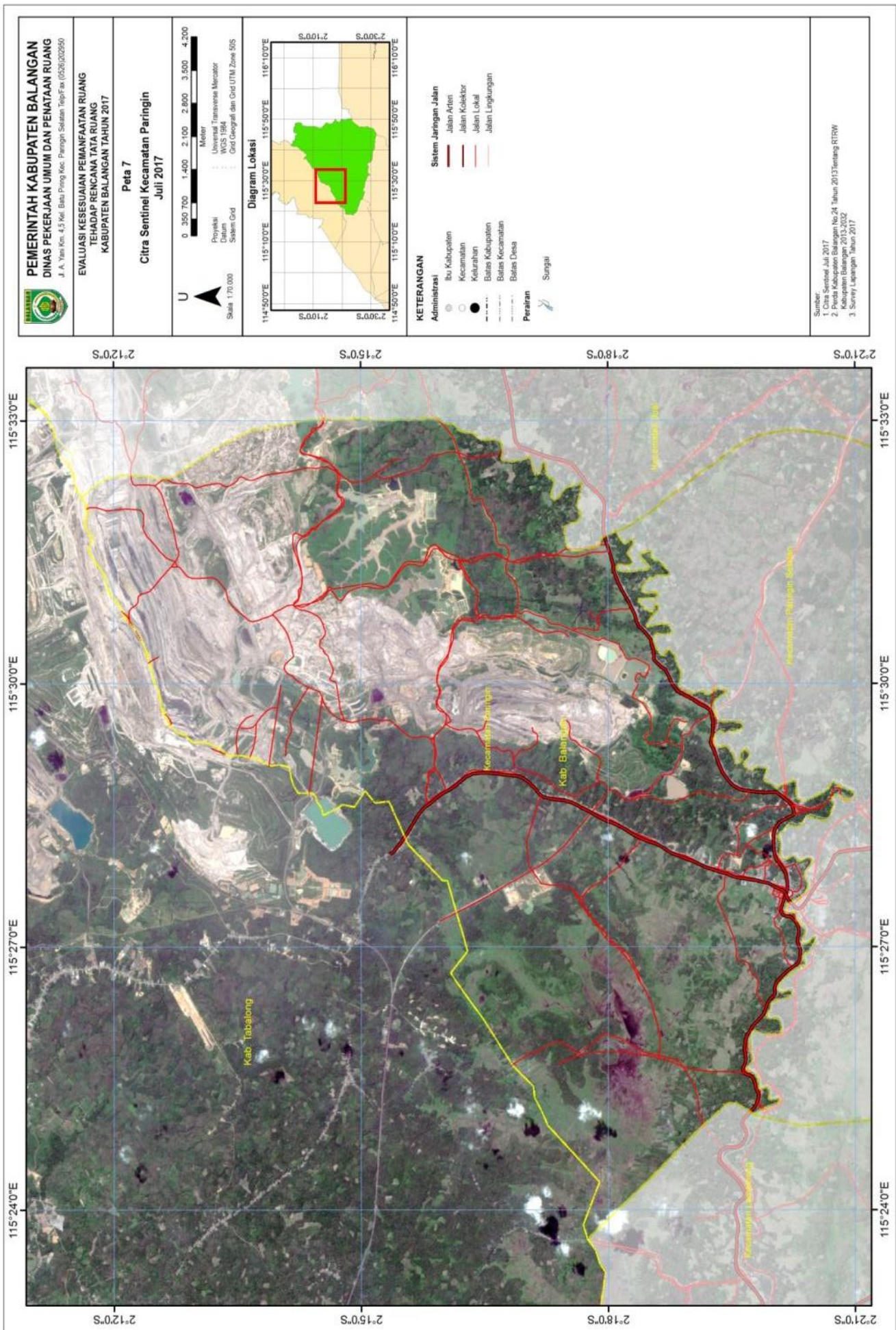
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Yang terlihat berbeda pada tutupan lahan tahun 2012/2013 pada tahun 2017, adalah semakin luasnya area tambang dari 1,79% menjadi 3,18% ditahun 2017. Menurunnya luasan area kebun dan area pertanian dari tahun 2012 ke tahun 2017. Pada tahun 2017 untuk tutupan lahan permukiman, juga dapat berupa lahan terbuka.









PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 J. A. Yuni Km. 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Telp/Fax (0526)200950

EVALUASI KEBESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
TEHADAP RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017

Peta 7
Citra Sentinel Kecamatan Paringin
Juli 2017

U

0 350 700 1.400 2.100 2.800 3.500 4.200
 Meter

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 50S

Skala: 1:70.000

Diagram Lokasi

KETERANGAN

Administrasi

- Ibu Kabupaten
- Kecamatan
- Kelurahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Sungai

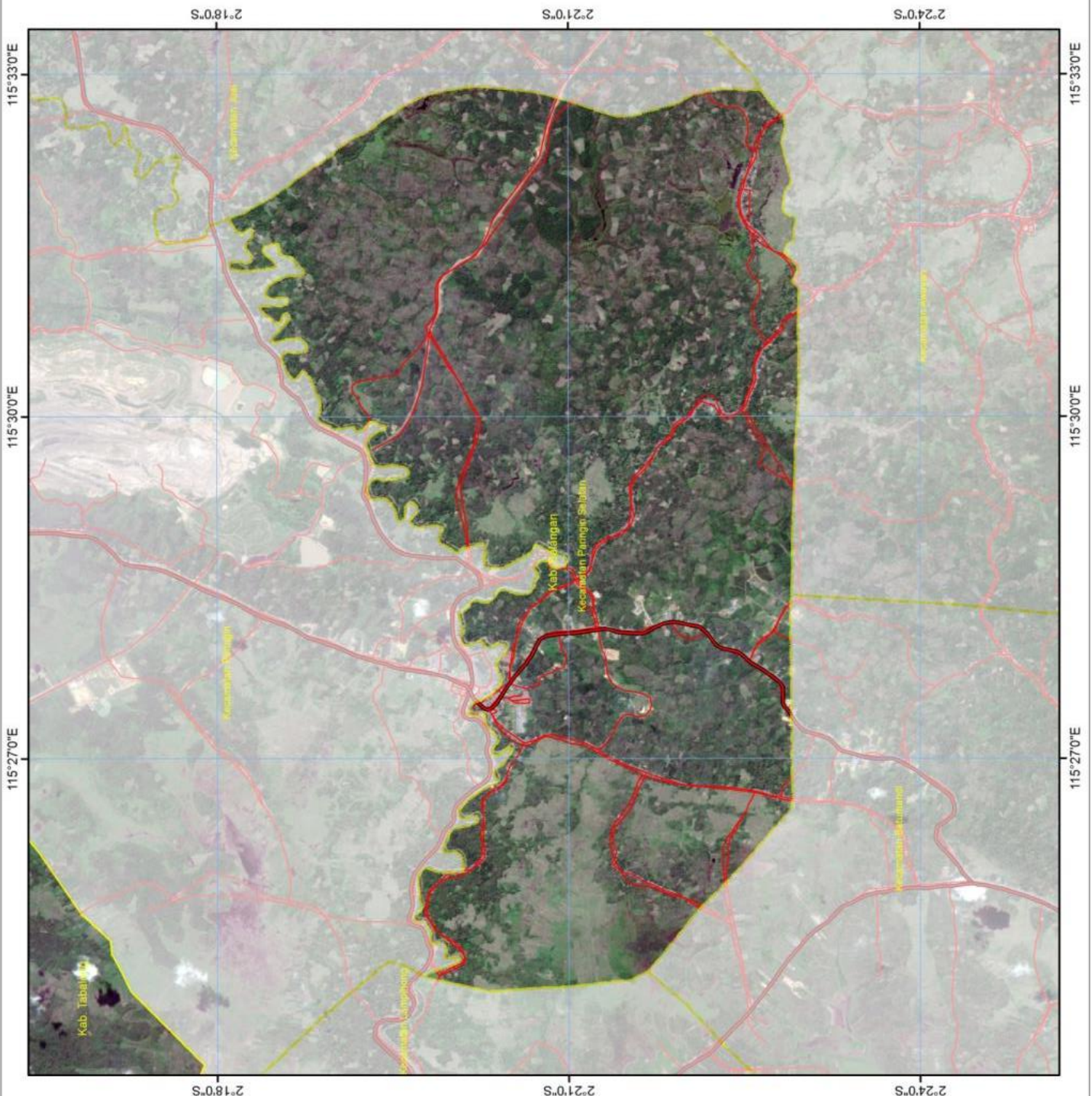
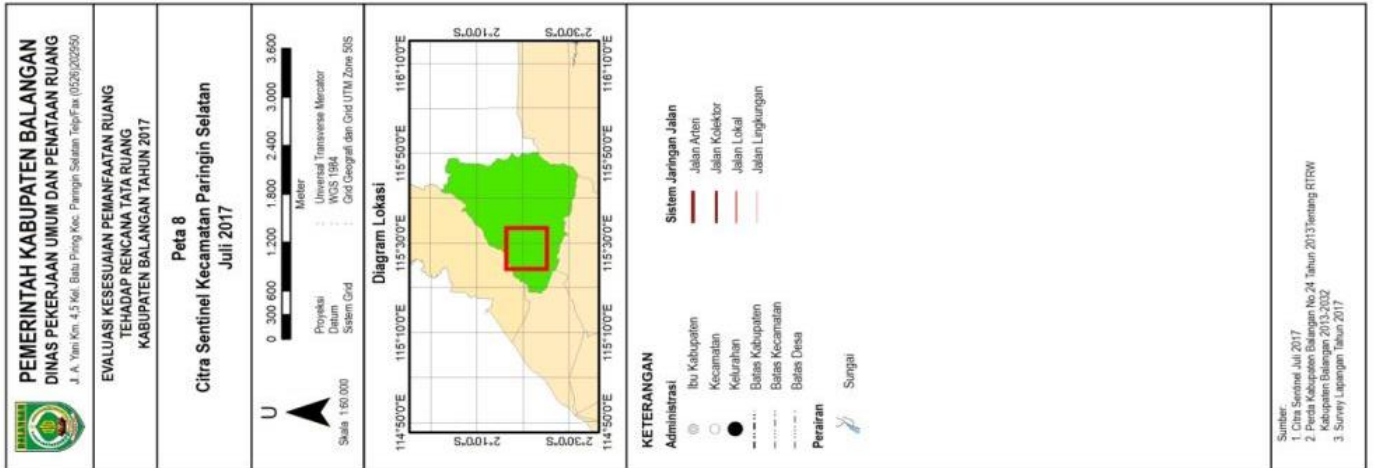
- Sungai

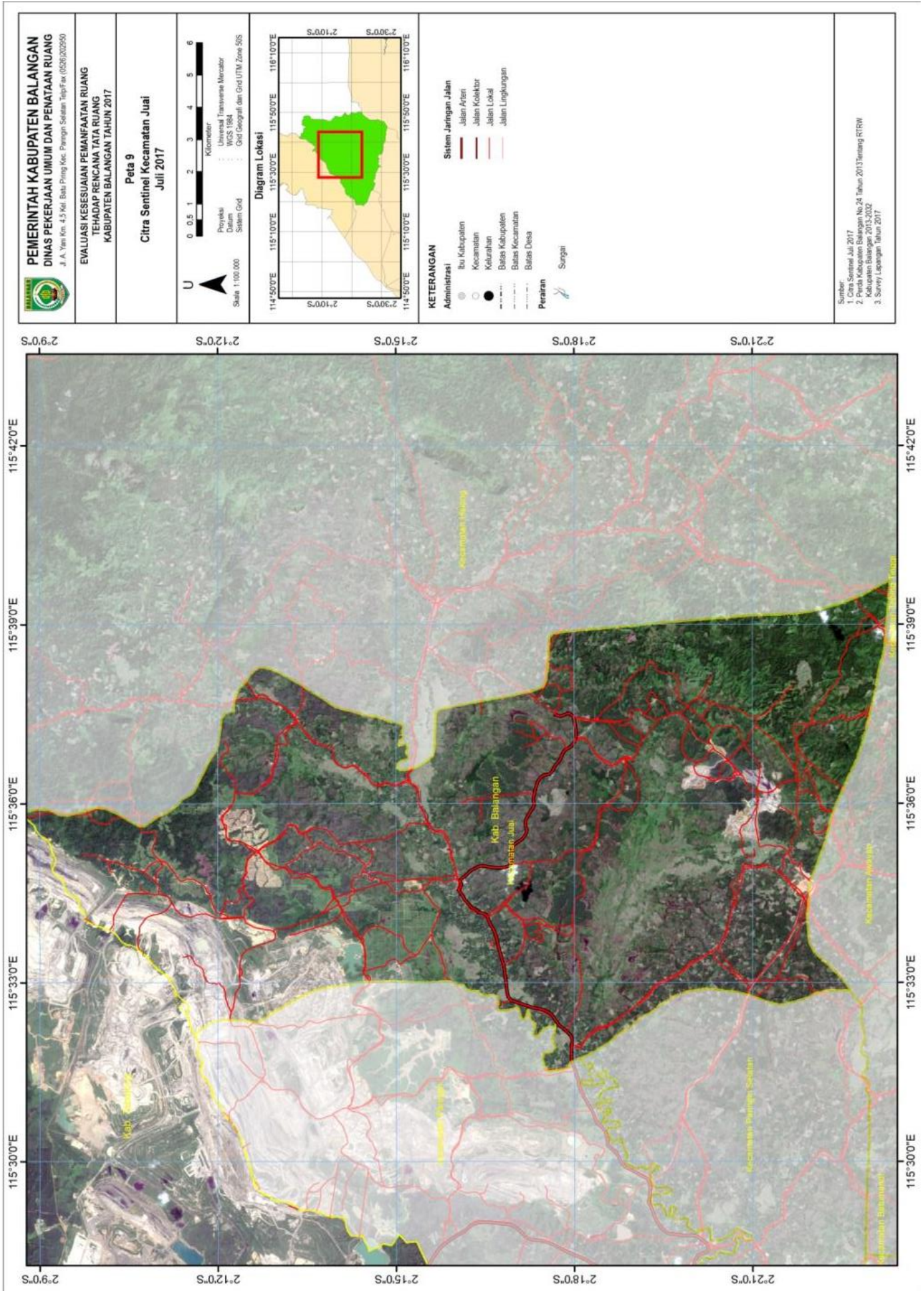
Sistem Jaringan Jalan

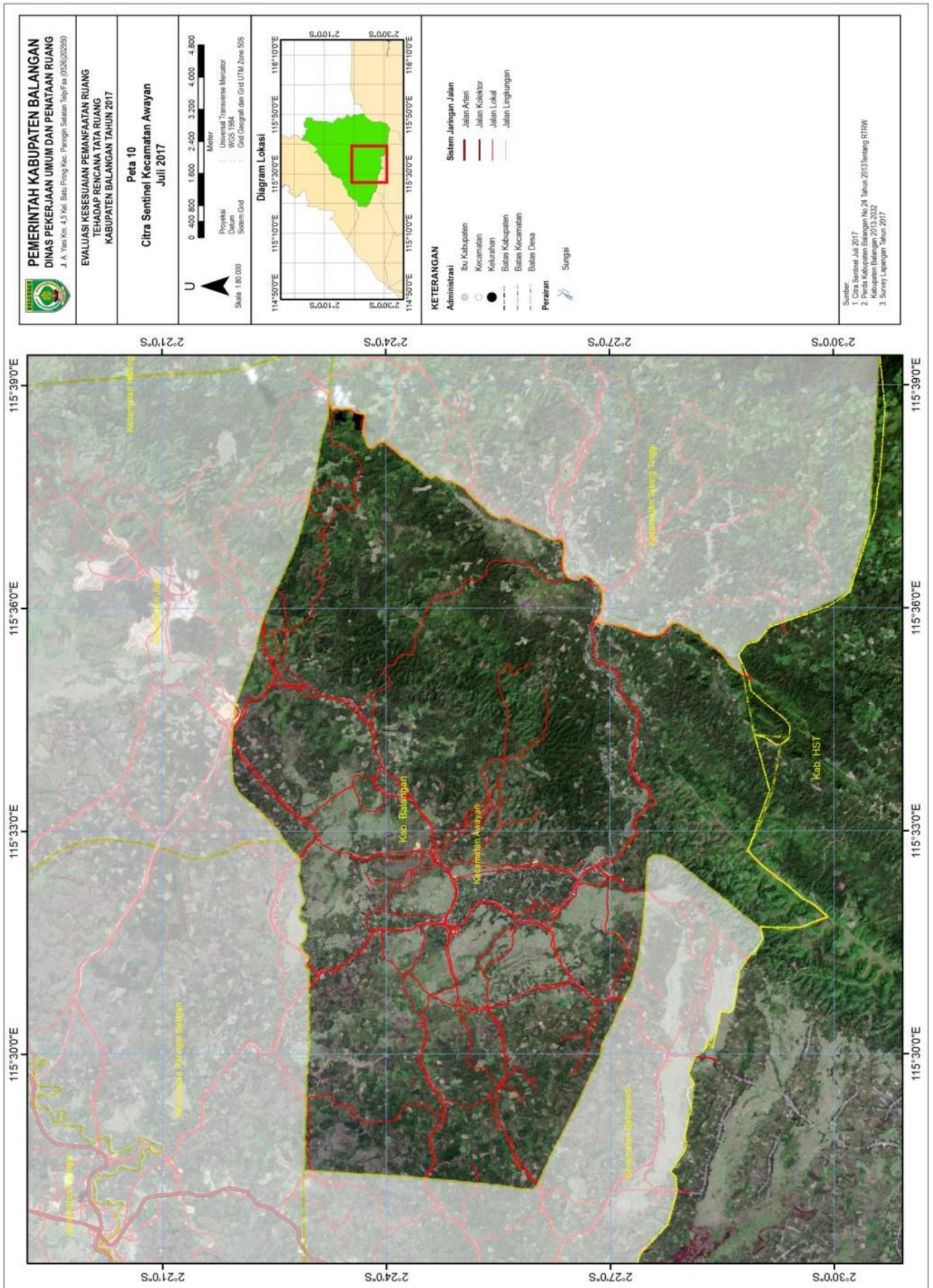
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan

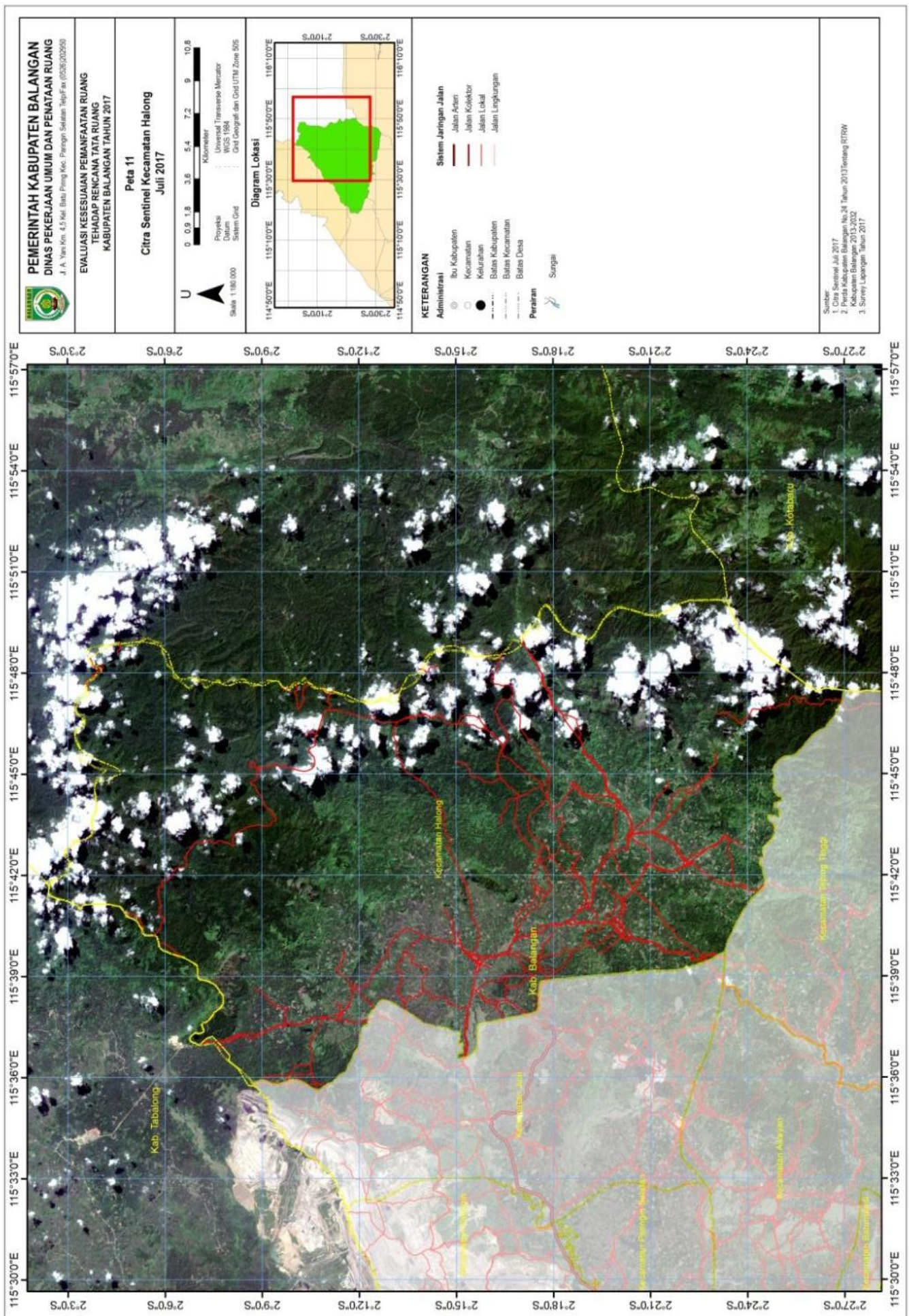
Sumber:

1. Citra Sentinel Juli 2017
2. Peta Kabupaten Balangan No.24 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Balangan 2013-2032
3. Survey Lapangan Tahun 2017

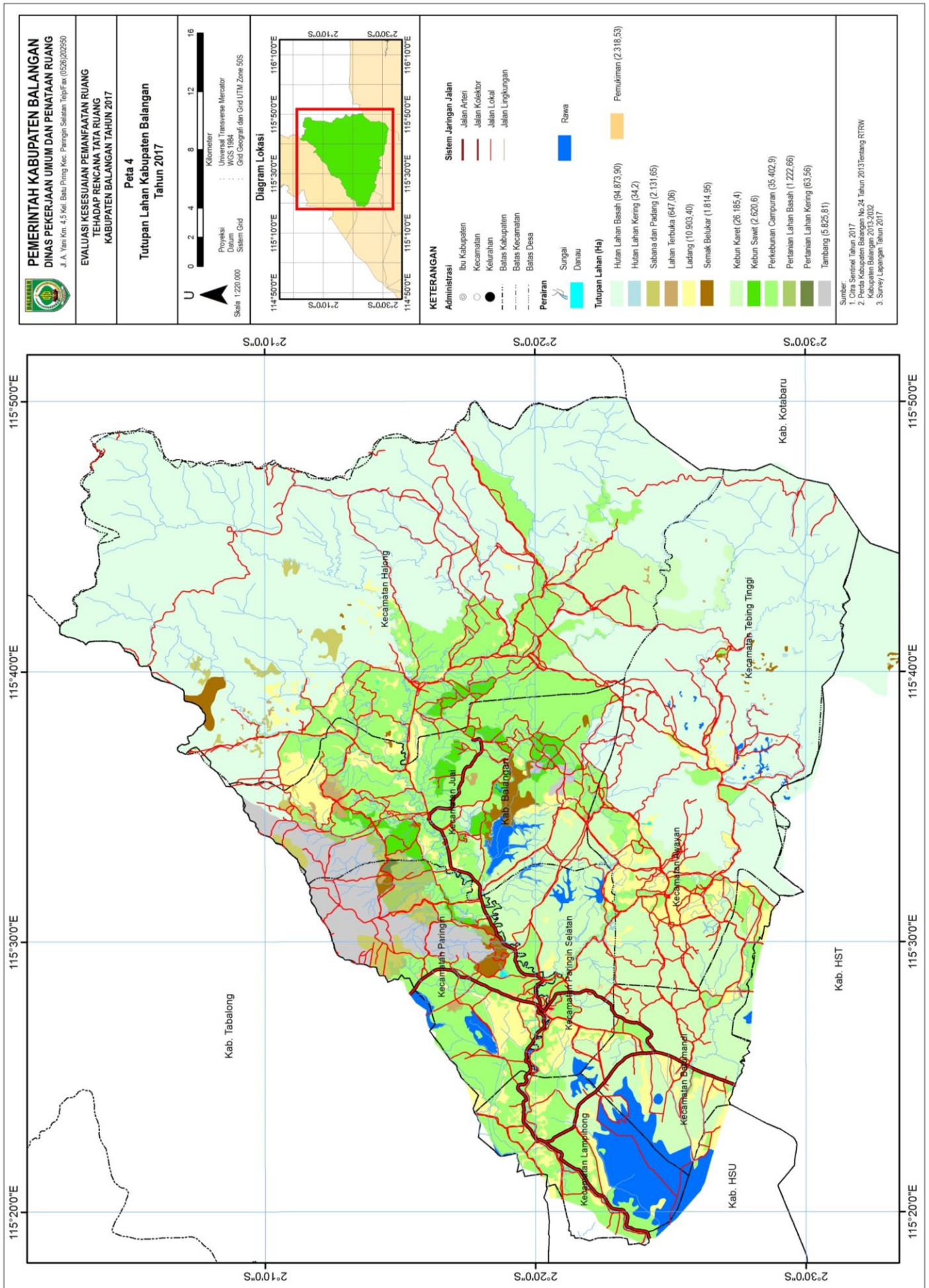


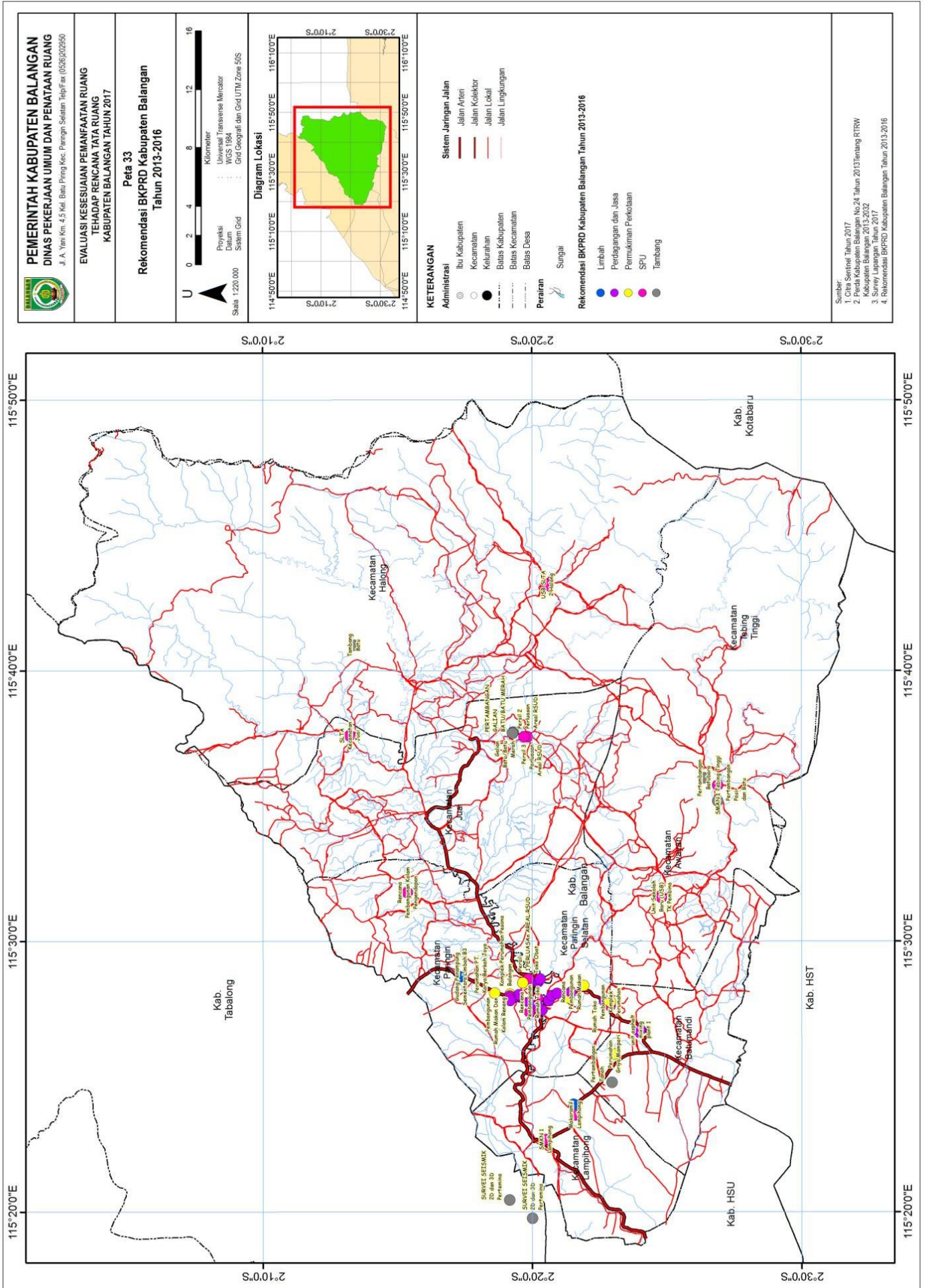










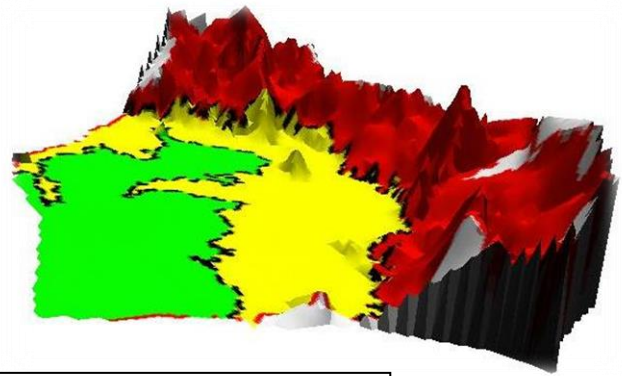


Tabel 23. Rekapitulasi Rekomendasi Kesesuaian Lahan dan Ruang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Balangan Tahun 2013-2016

PEMOHON	PERUNTUKAN	TAHUN	JENIS KEGIATAN	FUNGSI POLA
Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan	SMAN 1 Tebing Tinggi	2013	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan	SMAN 1 Lampihong	2013	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Balangan	TPA Batu Merah	2013	Limbah	NON PERMUKIMAN
PT. Aneka Citra Sarana Manunggal	Perumahan Griya Mampari	2014	Perumahan Perkotaan	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Syaifulah	Pertokoan Tingkat 2	2014	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan	Unit Sekolah Baru (USB) TK Pembina	2014	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Kabupaten Balangan	Makidom Balangan	2014	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Kabupaten Balangan	Makoramil Lampihong	2014	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan	SMKN 1 Lampihong	2014	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan	SLTA Kecamatan Juai	2014	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
PT. Pelaris Sumber Rejeki	Pembangunan Komplek Perumahan	2014	Perumahan Perkotaan	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
PT. Ihsan Utama Perkasa	Unit asphalt mixing plant	2014	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Kabupaten Balangan	Pengembangan Hutan	2014	Ruang Terbuka	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
	unit asphalt mixing plant 1	2014	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan	USB SLTA 2 Halong	2014	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
PT. Adaro Indonesia	Rencana Pembangunan Kolam Pengendapan	2014	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Nunik Yuniarti	Rencana Pembangunan Rumah Warung	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
CV. Anissa Permai	Tambang Batu	2015	Tambang	PERTAMBANGAN
H. Akhmad Syafulah	Rencana Pembangunan Rumah Toko	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Diah Ismaya	Rencana Pembangunan Rumah Toko	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
CV. Vanista Limbah Gemilang	Gudang Penampung Sementara Limbah B3	2015	Limbah	NON PERMUKIMAN
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Balangan	Rencana Pembangunan PAUD Aisiyiyah	2015	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
PT. Makmur Maju Mandiri	Pertambangan Batubara	2015	Tambang	PERTAMBANGAN
Sahdi Riady	Pembangunan Apotek	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
PT. Aia Putra Sanggam	Perumahan PT. Aia Putra Sanggam	2015	Perumahan Perkotaan	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Husdianor	Rencana Pembangunan Tempat Usaha	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
PT. Rizky Bumi Balangan	Perumahan PT. Rizki Bumi Balangan	2015	Perumahan Perkotaan	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Muhammad Rusdi	Rencana Pembangunan Lapangan Olahraga	2015	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Halimah	Rencana Pembangunan Rumah Toko	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Hj. Muntiara Hikmah	Rencana Pembangunan Rumah Makan	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Muliana Juniar	Pembangunan Agen Gas Elpiji	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
H. Supiyat	Rencana Pembangunan Rumah Toko	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Siametno	Lembaga Pendidikan	2015	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Subhanadi	Pembangunan Toko	2015	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
Hj. Fatmawati	Pertambangan Tanah	2016	Tambang	PERTAMBANGAN
PT. Karya Berkah Jaya	Perumahan	2016	Perumahan Perkotaan	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
	Rumah Toko	2016	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
	Komplek Perumahan Pesona Balangan	2016	Perumahan Perkotaan	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
PT. Sondang Jaya Mega Prestasi	Perumahan PT. Sondang	2016	Perumahan Perkotaan	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
	Pertambangan Pasir dan Batu	2016	Tambang	PERTAMBANGAN
	Toko Obat	2016	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
	Pertambangan Galian Batu	2016	Tambang	PERTAMBANGAN
	Galian Batu/Batu Merah	2016	Tambang	PERTAMBANGAN
	Persil 1 Perluasan Real RSUD	2016	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
	Persil 2 Perluasan Areal RSUD	2016	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
	Persil 3 Perluasan Areal RSUD	2016	SPU	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
	Pembangunan Rumah Makan Dan Kolam Renang	2016	Perjas	PERMUKIMAN PERKOTAAN/ DESA
	SURVEI SEISMIK 2D dan 3D Pertamina	2016	Tambang	PERTAMBANGAN
	SURVEI SEISMIK 2D dan 3D Pertamina	2016	Tambang	PERTAMBANGAN

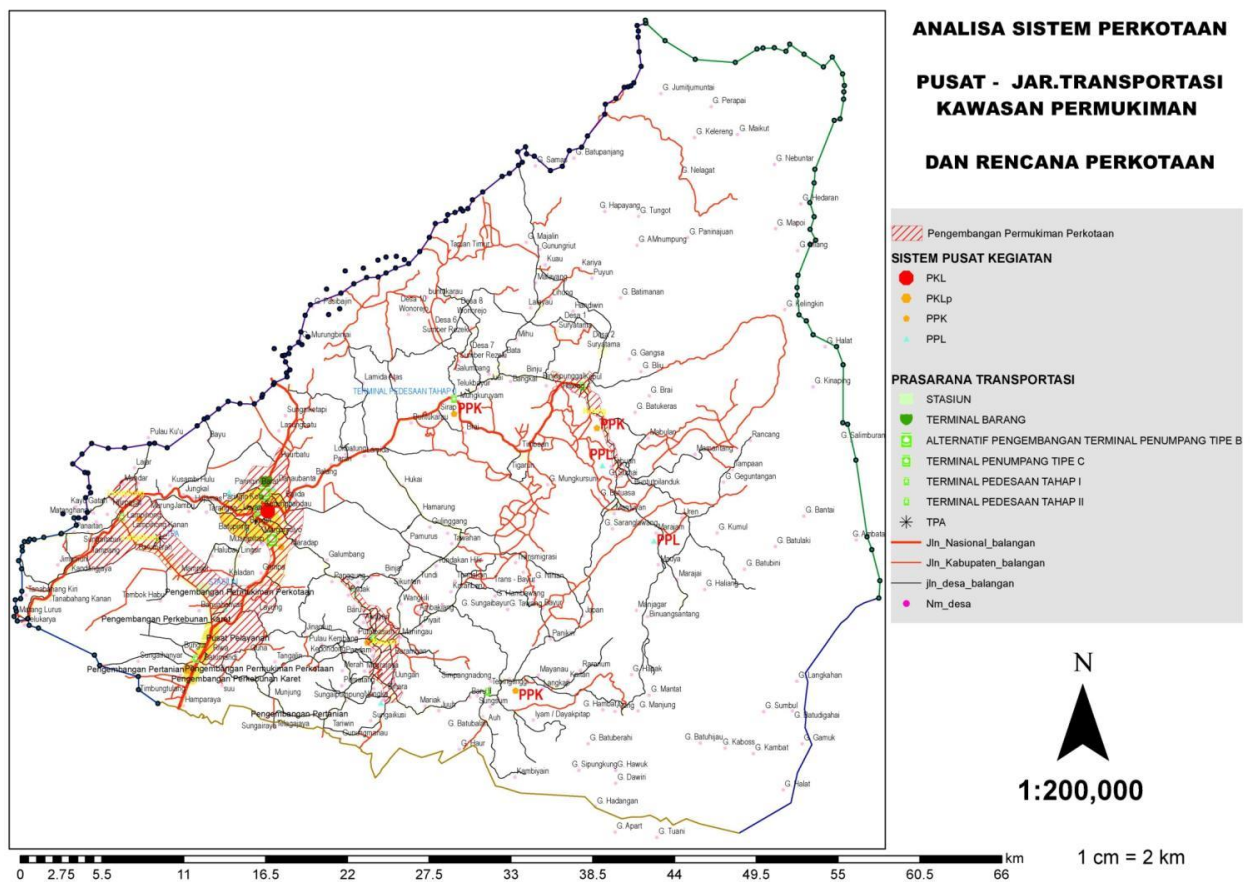
2.6. PENGEMBANGAN PERKOTAAN

Kawasan Perkotaan di Kabupaten Balangan meliputi Ibukota Kabupaten Perkotaan Paringin sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Skala Provinsi Kalimantan Selatan, Perkotaan Batumandi sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Skala Provinsi Kalimantan Selatan, dan 5 Ibukota Kecamatan Perkotaan Lampihong, Perkotaan Juai, Perkotaan Awayan, Perkotaan Halong, dan Perkotaan Tebing Tinggi. 2 Perkotaan terakhir yaitu Perkotaan Halong dan Perkotaan Tebing Tinggi terletak di dataran yang lebih tinggi di Kawasan Pergunungan Meratus di Kabupaten Balangan.



Gambar 58. Profil 3D Kabupaten Balangan

Gambar 59. Analisa Sistem Perkotaan dan Sistem Transportasi Kabupaten Balangan

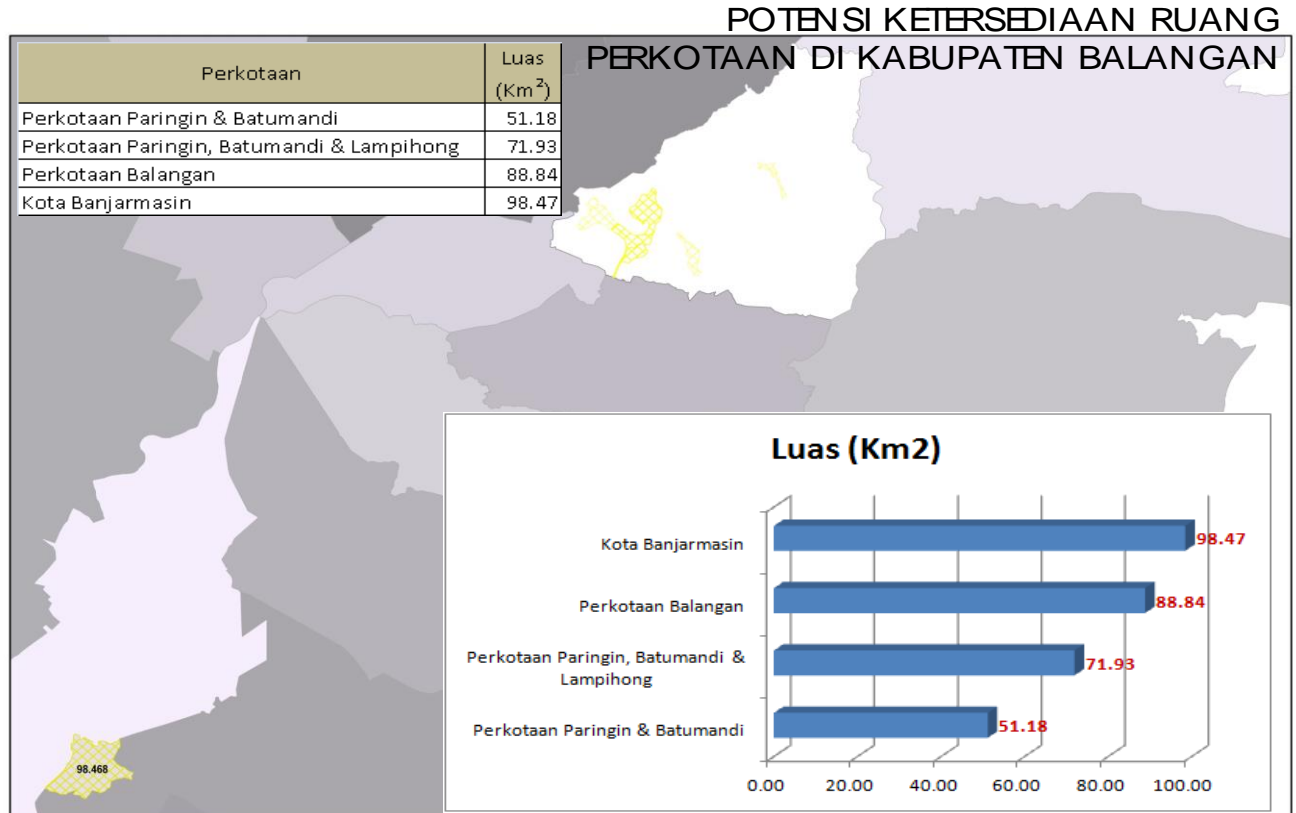


Sumber : Analisa Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2017

Dalam 20 tahun kedepan diperkirakan 3 Kawasan Perkotaan yang terdiri dari 4 Wilayah Administrasi Kecamatan akan menyatu dan terjadi proses konurbasi Kawasan Perkotaan pada Sepanjang Jalan Utama yaitu Jalan Arteri dan Jalan Kolektor.

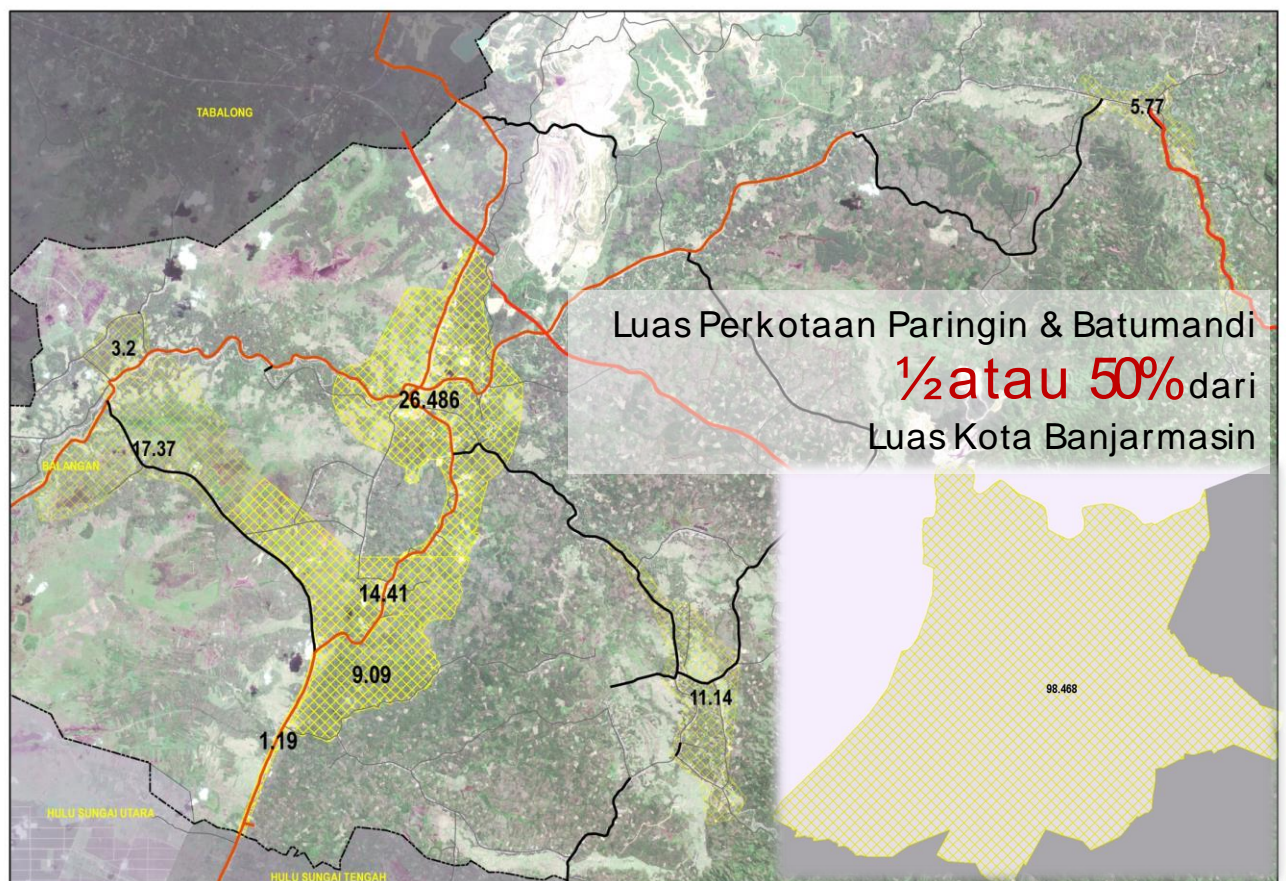
Kabupaten Balangan dalam RTRW Kabupaten nya hingga Tahun 2037 mengalokasikan ruang hingga 88.84 km² atau 90% dari Luas Kota Banjarmasin, untuk 3 Perkotaan yang menyatu (Paringin, Batumandi dan Lampihong) luasannya hingga 71.93 km² atau 73% dari Luas Kota Banjarmasin, sedangkan alokasi Ruang Perkotaan Paringin dan Batumandi mencapai mencapai 51,18 km² atau 52% dari Luas Kota Banjarmasin.

Gambar 60. Analisa Potensi Ketersediaan Ruang Perkotaan Kabupaten Balangan



Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Gambar 61. Analisa Potensi Ketersediaan Ruang Perkotaan Paringin, Batumandi & Lampihong

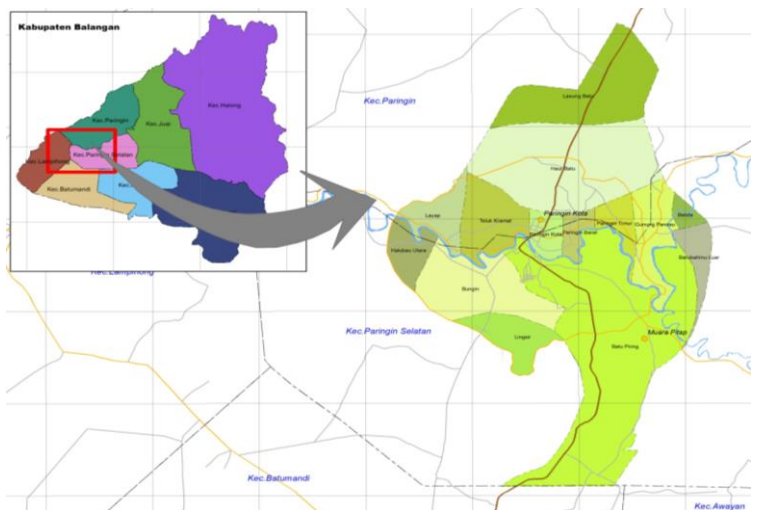
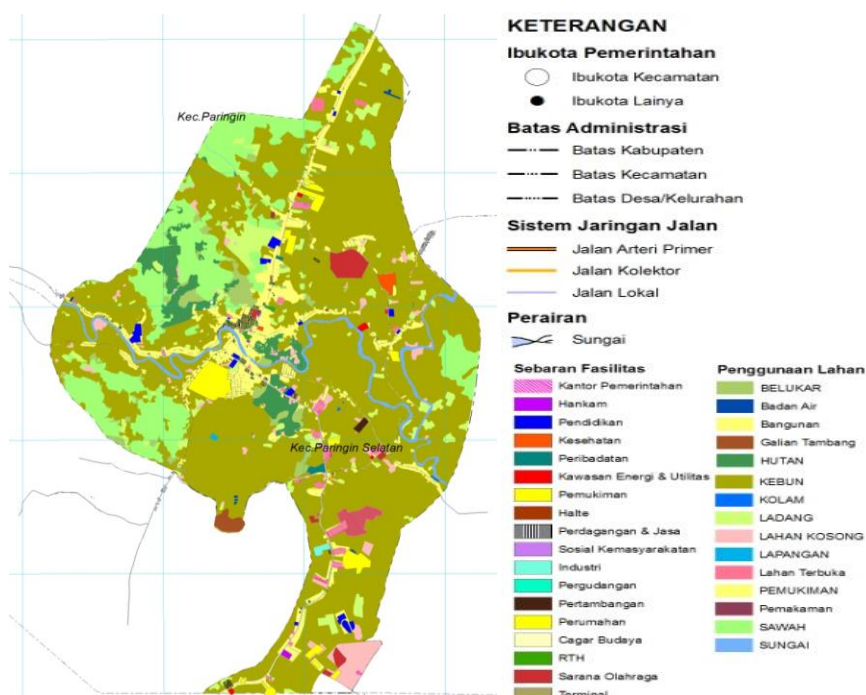


Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Ketersediaan ruang bagi kegiatan Perkotaan ini sangat menguntungkan untuk penanaman modal / investasi di Sektor Properti maupun Jasa Perkotaan lainnya, baik yang mendukung kepariwisataan secara langsung maupun tidak langsung. Industri Besar dan Menengah juga dapat tumbuh dalam ruang perkotaan yang telah di alokasikan. Hingga saat ini sektor properti real estate telah berkembang, utamanya di sepanjang Jalan Arteri Jalan Nasional dan beberapa di sepanjang Jalan Kolektor (Batumandi-Lampihong, dan Paringin-Halong).

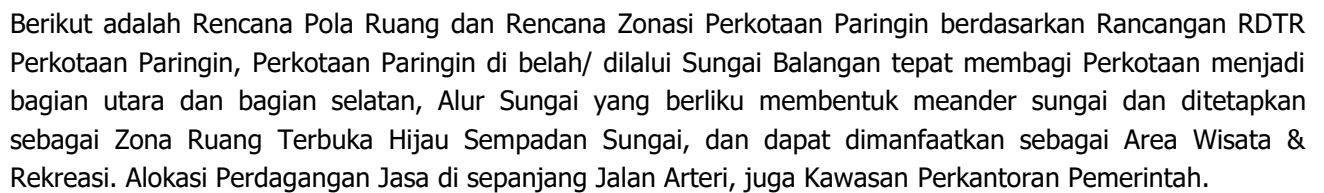

Gambar 62. Kawasan Perkotaan Paringin

Gambar 62 menunjukkan Batasan/ Delineasi Pengembangan Perkotaan Paringin berdasarkan Perda Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 dan Re-Delineasi Pengembangan Perkotaannya berdasarkan Rancangan RDTR Perkotaan Paringin. Luasan Perkotaan Paringin ini sekitar 26.5 km² atau 1/3 atau 27% dari luasan Kota Banjarmasin. Perkotaan Paringin meliputi 14 Administartif Kelurahan/ Desa.


Gambar 63. Batas Perkotaan Paringin
Gambar 64. Penggunaan Perkotaan Paringin Tahun 2015/ 2016


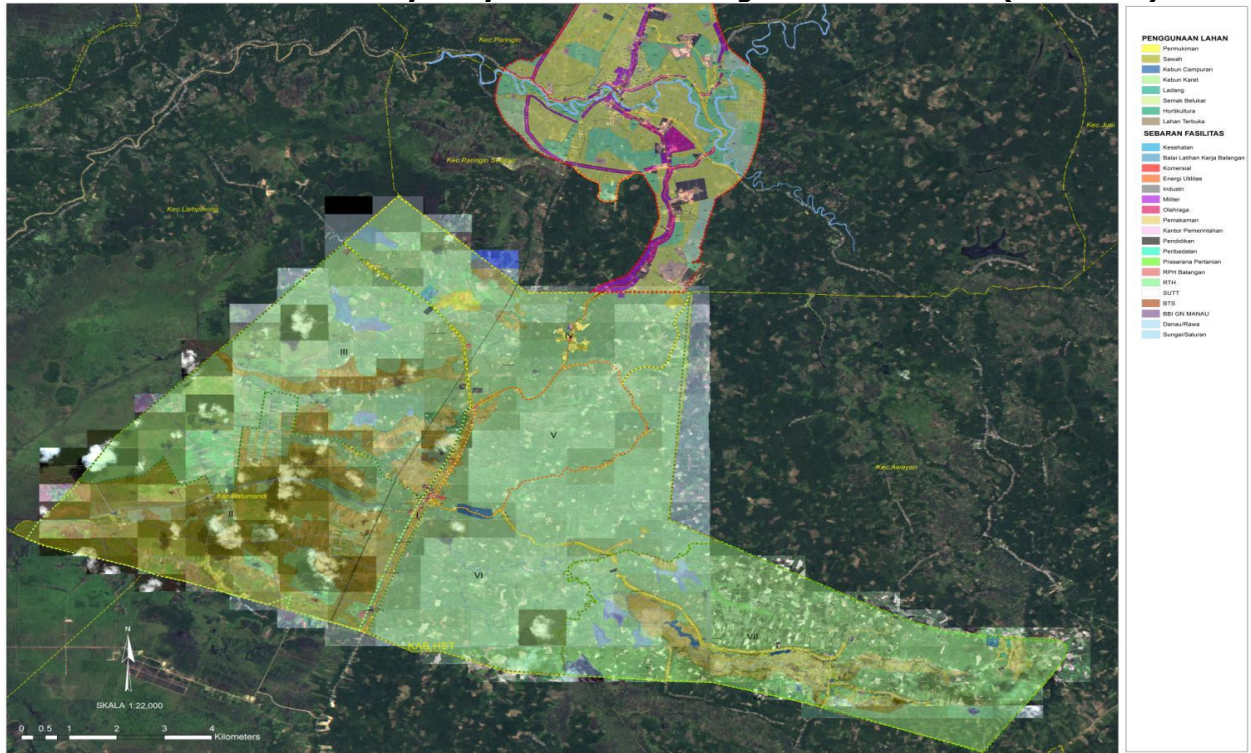
Perkotaan Paringin di kembangkan disepanjang Jalan Arteri Banjarmasin-Tanjung, dan dibentuk melalui Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Timur dan Lingkar Barat Barat Perkotaan yang penyelesaiannya sudah diatas 75%.

Penggunaan Lahan masih didominasi kebun karet dan kebun campuran, sawah dan semak belukar. Masih banyak ruang tersedia untuk pengembangan kegiatan perkotaan dan investasi di sektor properti dan jasa perkotaan lainnya.



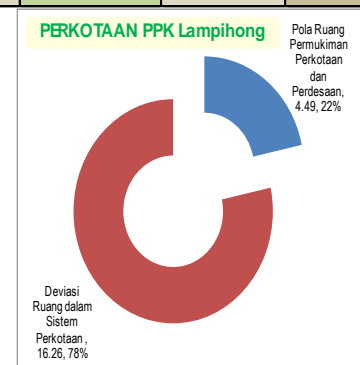
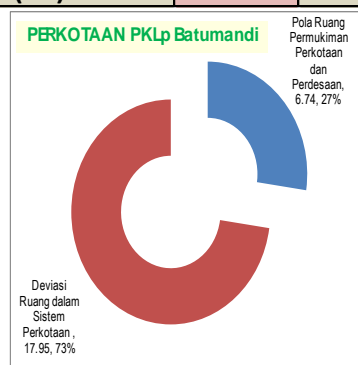
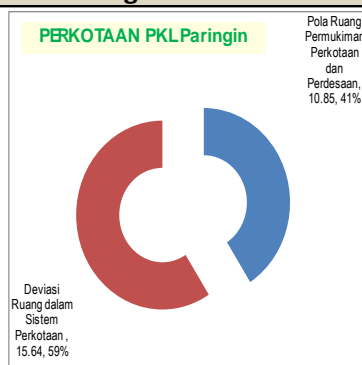
Kawasan Perkotaan Paringin, yang meluas hingga ke arah selatan dan berbatasan dengan Perkotaan Batumandi. Kawasan Perkotaan Batumandi, yang meluas ke arah utara ke Koridor Perkotaan PPK Lampihong dan ke Koridor PKL Paringin dan cenderung menyatu menjadi Perkotaan Besar dalam 20-30 tahun kedepan, kecuali ditetapkan Kawasan Lindung, dapat berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan/ atau Kawasan Pertanian berupa LP2B sebagai Kawasan Penyanggah dan Pembatas dari 3 perkotaan dengan 3 tingkatan yang berbeda; PKL – PKLp – PPK.

Gambar 67. Proses Menyatunya Perkotaan Paringin Dan Batumandi (Konurbasi)



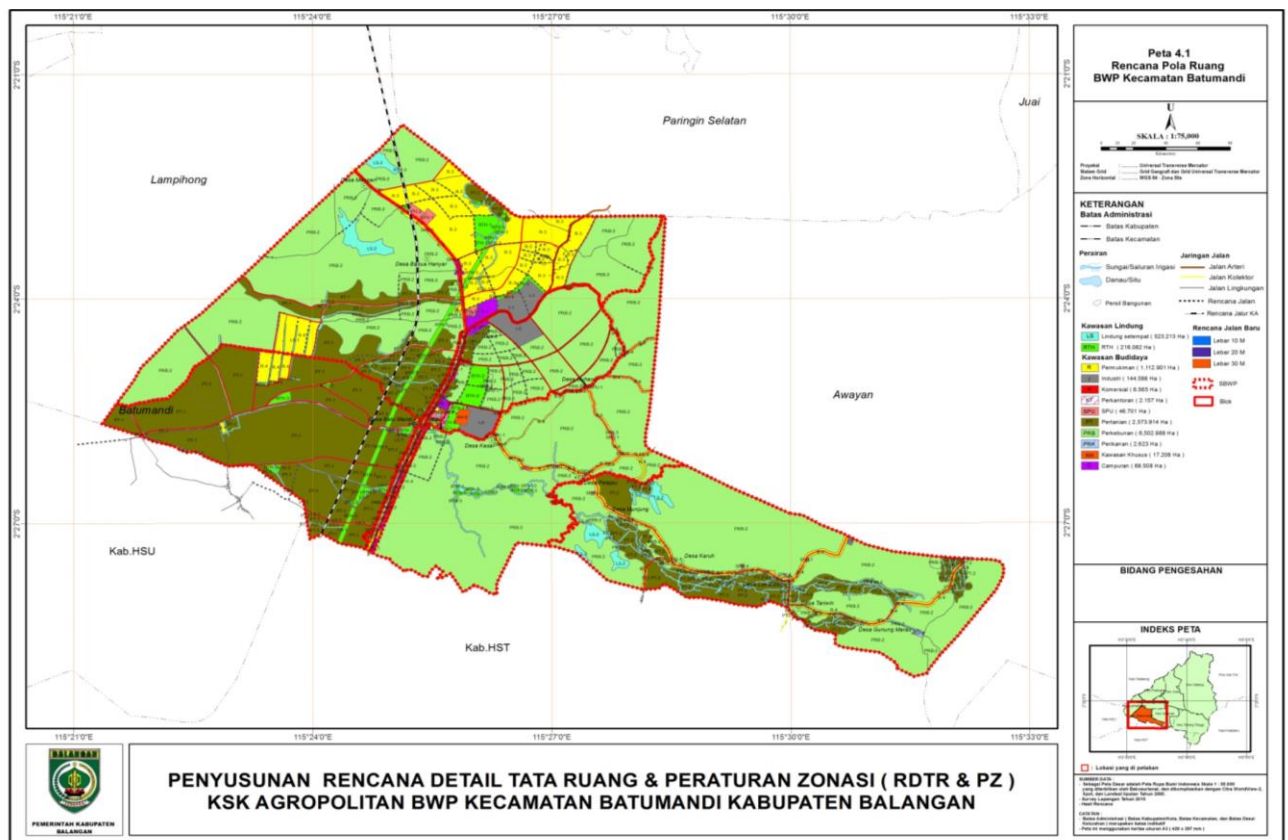
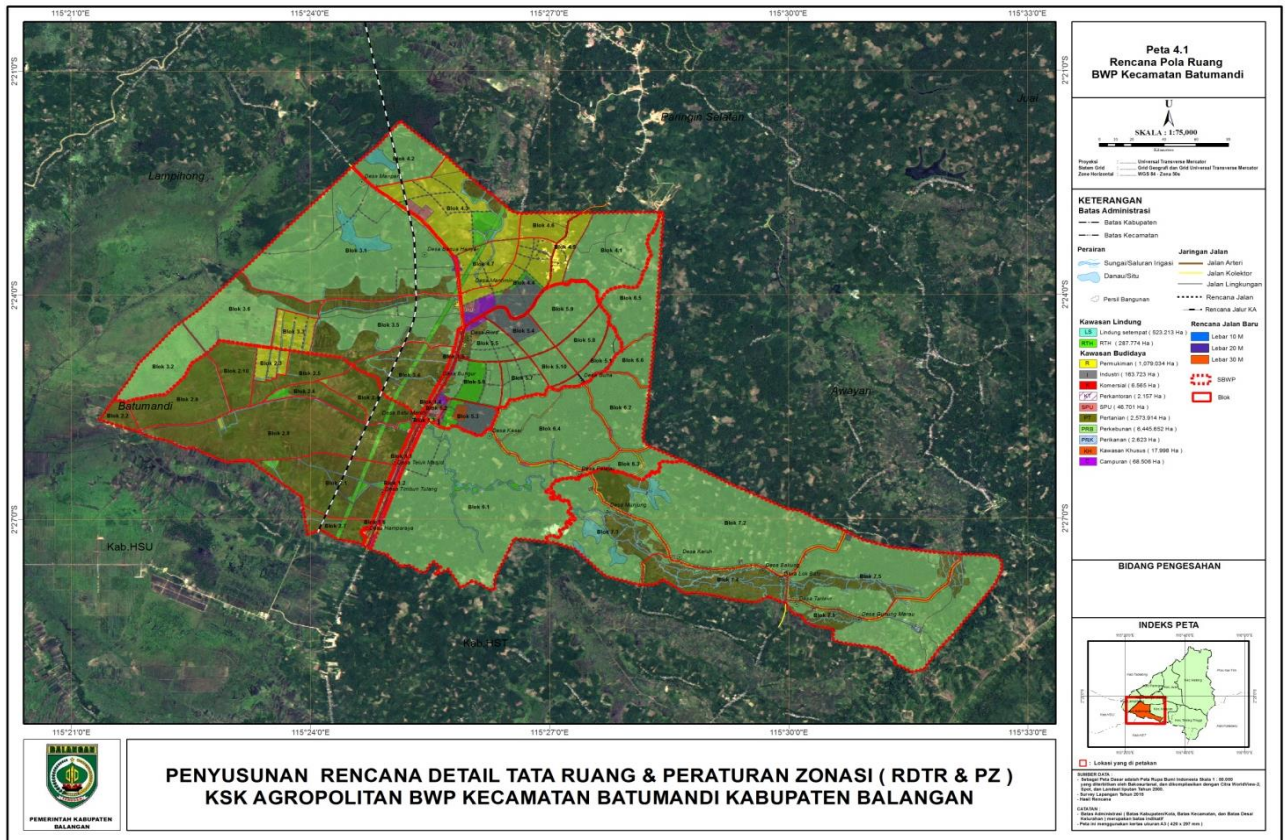
Gambar 68. Evaluasi Perkotaan Kabupaten Balangan

Luas (Km ²)	PKL Paringin	PKLp Batumandi	PPK Lampihong	PPK Awayan	PPK Halong
Delineasi Pengembangan dan Rencana Perkotaan	26.49	24.69	20.75	11.14	5.77
Pola Ruang Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	10.85	6.74	4.49	3.94	2.42
Deviasi Ruang dalam Sistem Perkotaan	15.64	17.95	16.26	7.20	3.35
Deviasi Ruang dalam Sistem Perkotaan (%)	59.04%	72.70%	78.36%	64.63%	58.06%



Perkotaan Paringin, mengarah pertumbuhan linear mengikuti jalan arteri, yang juga di bangun oleh Pemerintah dalam pemenuhan prasarana perkantoran dan pelayanan publik. Perkotaan Batumandi, juga linear mengikuti jalan arteri, tingginya permintaan lahan pada jalan arteri, baik perdagangan jasa dan pengembangan industri pergudangan, serta pengembangan Perkotaan Agropolitan memerlukan prasarana pendukung, seperti industri / pengolahan agro, pergudangan, terminal agro, dan lainnya. Pertumbuhan juga mengarah ke Kec. Lampihong karena adanya pengembangan perumahan dan rencana stasiun kereta api. Pengembangan Perkotaan ini karena adanya pertumbuhan fisik yang linear mengikuti jalan kolektor.

Kebutuhan ruang ini diprediksi masih bersifat jangka panjang/ > 20 tahun, baik karena pengembangan stasiun kereta api, pengembangan jalan lingkar barat paringin dan dampak pengembangan perkotaan paringin-batumandi, yang meluas hingga lampihong. Keberadaan TPA di Kec. Lampihong juga berpotensi untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang berbasis pada pengelolaan sampah perkotaan.



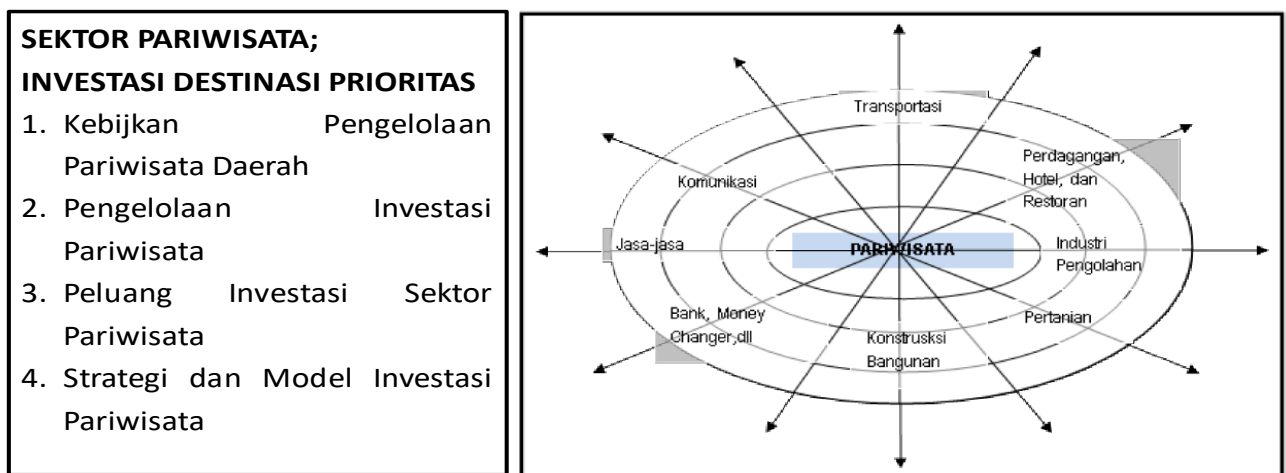
2.7. PRIORITAS KAJIAN PROFIL PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal/ Investasi Kabupaten Balangan, dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar/ utama, primer, sekunder dan tersier. Kabupaten Balangan seperti halnya Kabupaten lain yang baru tumbuh dan berkembang masih didominasi Sektor Primer (seperti Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan). Sektor Pertambangan dan Sektor Kehutanan telah menjadi kewenangan (*domain*) dari Pemerintah Provinsi, sehingga tidak dibahas/ dikaji atau dikelompokkan dalam potensi penanaman modal kabupaten. Sektor Primer sebagai modal dasar telah tumbuh kuat dengan pertumbuhan cukup dan modal sumberdaya yang berlimpah. Sedangkan sektor Sekunder (berupa Industri Pergudangan dan Perdagangan Jasa) belum berkembang baik, dan Industri Pergudangan Kabupaten Balangan merupakan Industri yang bergerak mendukung sektor pertambangan dan pembangunan perkotaan dan properti, sedangkan Perdagangan Jasa masih untuk pelayanan Skala Kabupaten dengan Perkotaan Paringin yang ada saat ini.

Sektor	Kondisi
Sektor Primer : Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Mantap, dengan dukungan Sumberdaya yang telah dikelola dan berjalan
Sektor Sekunder : Industri Pergudangan dan Perdagangan Jasa	Belum Berkembang, karena tidak terdapat pasar/ permintaan yang signifikan.
Sektor Tersier : Pariwisata & Destinasi Prioritas dan Perkotaan & Properti	Belum Optimal, memiliki dukungan Sumberdaya & Potensi Pariwisata yang cukup banyak, namun belum dikelola dan dipromosikan dengan baik.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Prioritas Penyusunan Kajian Profil → Sektor Tersier yang akan memicu Penyediaan dan Pembangunan di Sektor Sekunder



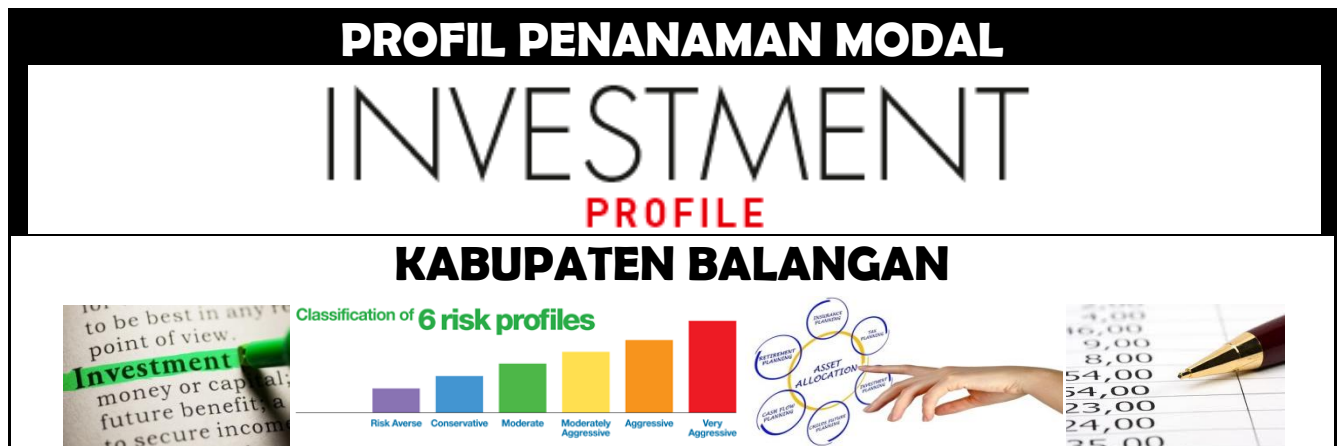
Peran Pengembangan Pariwisata dalam Menggerakkan Sektor Usaha Lain
(Sumber; Cetak Biru Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006)

0

Agenda Pariwisata & Persoalannya

Kajian mengenai perencanaan kepariwisataan di Kabupaten Balangan, telah menjadi **agenda besar** Pemerintah Kabupaten Balangan, namun dalam perjalanannya perencanaan yang ada **belum selesai dan belum sesuai** dengan pelaksanaannya, karena mendapatkan respon yang kurang maksimal dari berbagai pihak, maupun kurang terkoordinasinya perencanaan lintas sektor dalam mengimplementasikan pembangunan pada **Kawasan Strategis Pariwisata**.

Persoalan lain yang muncul adalah masih belum adanya investor yang berinvestasi dalam pengembangan dan pembangunan kawasan tersebut, baik karena belum siapnya **perencanaan, regulasi** sebagai kepastian hukum, hingga dukungan **infrastruktur dasar dan prasarana sarana wisata** yang diperlukan.



3 DUKUNGAN KEBIJAKAN & REGULASI

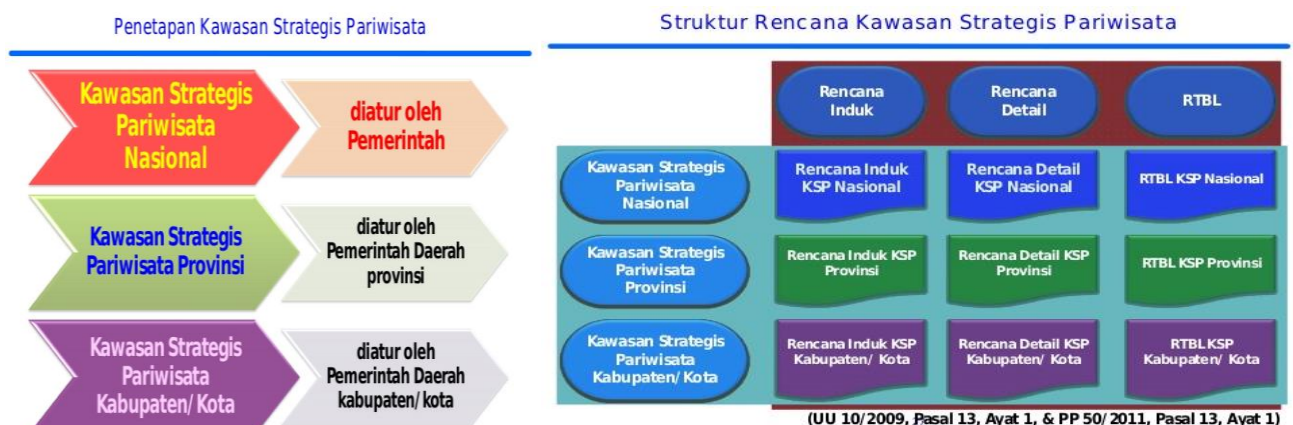
Gambar 72. Kedudukan RI KSPN dalam Sistem Penataan Ruang

Sektor Pariwisata dalam Sistem Penataan Ruang dan dalam Perencanaan Kepariwisataannya sendiri, merupakan Produk Kebijakan dan Regulasi, sehingga harus dilihat posisinya terhadap satu sama lain, untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih perencanaan hingga konflik kepentingan maupun sektor tertentu.



Sumber : UU 10/2009, Pasal 8, Ayat 1 & 2

Gambar 73. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dan Struktur Rencana KSP



Sumber : UU 10/2009. Pasal 13, Ayat 1, dan PP 50/ 2011, Pasal 13, Ayat 1.

RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 menjadi pedoman dan memberikan arahan baru Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Balangan (RIPPDA) yang telah disusun Tahun 2016, untuk selanjutnya berdasarkan arahan RIPPDA tersebut Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dapat disusun Rencana Detail dan atau Rencana Tata Bangunan & Lingkungannya.

KSP Kabupaten Balangan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, penetapan KSP tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dalam Rencana Induk KSP, Rencana Detail KSP, hingga RTBL KSP, sesuai kebutuhan pengembangan, penataan, penanganan, pembangunan dan pengelolaan KSP tersebut.

Gambar 73. Struktur Kawasan Strategis Pariwisata dan jenis Rencana Pengembangan KSP

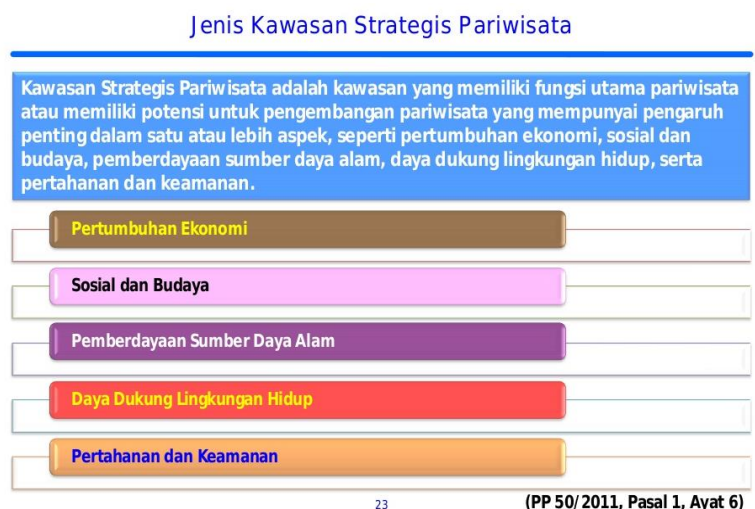


Sumber : UU 10/2009.

Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah menyusun Rencana Induk salah satu Destinasi Prioritas yang diarahkan dalam RIPPDA, yaitu *Grand Design* Obyek Wisata Danau Baruh Bahinu. KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata tersebut akan disusun Rencana Detail KSP nya pada tahap/ tahun berikutnya.

Sedangkan untuk kepentingan praktis/ pragmatis, Rencana Tata Bangunan & Lingkungan dapat dikombinasikan atau disatukan dengan Rencana Tapak Kawasan yang belum tersedia dalam Rencana Induk "*Grand Design*" yang masih fokus pada posisi perairan danau, seperti sisi darat/ Kampung/ Permukiman/ Desa Wisata, Rencana Tapak Area Parkir & Fasilitas Wisata 1-2-3 maupun Zona Darat pada sisi utara seperti Zona Bumi Perkemahan, Zona Tribun, dan lainnya.

Yang lebih penting dan utama KSP Danau Baruh Bahinu tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemanfaatan pariwisata, namun juga dari sudut pandang lain daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan pangan, dalam konteks Pengelolaan Danau Berkelanjutan, berupa pemanfaatan air baku, pertanian, energi/ listrik/ mikro hidro, pengendalian banjir, perikanan dan pemanfaatan potensial lainnya.



23

(PP 50/2011, Pasal 1, Ayat 6)

Gambar 74. Jenis Kawasan Strategis Pariwisata

3.1. RTRW KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013-2032

Berikut adalah arahan RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 terhadap Kawasan Pariwisata:

No	Rencana	Arahan
1	Rencana Struktur	<ol style="list-style-type: none"> PKL Paringin, dengan Fungsi Pelayanan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> Pusat pelayanan perekonomian; kawasan perdagangan regional kabupaten dan provinsi; pusat perbelanjaan pasar regional kabupaten Pusat pelayanan jasa; perbankan, lembaga asuransi, perhotelan, jasa lainnya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau; rekreatif Pengembangan wisata buatan, budaya atau spiritual Pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang Rencana Jaringan Jalan Arteri – Kolektor – Jalan Lokal – Jalan Khusus dan Jalan Strategis Rencana Prasarana Terminal dan Rute Trayek Rencana Jaringan Transportasi Perkereta Apian
2	Rencana Pola Ruang	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan Peruntukan Pariwisata, berupa pariwisata budaya dan pariwisata alam <ul style="list-style-type: none"> Kaw. Peruntukan Pariwisata Budaya ; Wisata Religius Makam Datuk Kandang Haji Juai, Pusat Sejarah Benteng Tundakan Awayan, Pusat Budaya Dayak Pitap Tebing Tinggi Kaw. Peruntukan Pariwisata Alam ; Kaw. Konservasi Perairan (Danau) Baruh Bahinu, Kaw. Desa Wisata Danau Baruh Bahinu, Kaw. Budidaya dan Pariwisata Alam, Kaw. Peruntukan Pariwisata Buatan Rencana Pengembangan Ekowisata ; Hutan Lindung Peg. Meratus Halong dan Tebingi Tinggi. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan
3	Rencana Kawasan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> Kaw. Strategis Sosial Budaya <ul style="list-style-type: none"> Kaw. Komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong Pusat Kegiatan Wisata Religius Makam Datuk Kandang Haji Juai Kaw. Desa Wisata Danau Baruh Bahinu Kaw. Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> Kaw. Ekowisata Hutan Lindung Pegunungan Meratus

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

3.1.1. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Balangan, meliputi ;

- Pusat-Pusat Kegiatan
- Sistem Jaringan Prasarana Utama
- Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pusat-Pusat Kegiatan, merupakan Pusat-Pusat Permukiman, Kegiatan dan Perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Sistem Jaringan Prasarana Utama, berupa Sistem Jaringan Transportasi Darat, yang meliputi Sistem Jaringan Jalan dan Sistem Jaringan Kereta Api.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, terdiri dari Jaringan Prasarana Energi/ Ketenagalistrikan, Jaringan Prasarana Telekomunikasi, Jaringan Prasarana Sumberdaya Air, dan Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan, (dari Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase).

Materi PKL dan PKLp yang diatur dalam Rencana Struktur untuk Pusat-Pusat Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Pusat Kegiatan	Fungsi Pelayanan	Kawasan Perkotaan	Kawasan Strategis
PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pelayanan perekonomian; kawasan perdagangan regional kabupaten dan provinsi; pusat perbelanjaan pasar regional kabupaten 2. Pusat pelayanan jasa; perbankan, lembaga asuransi, perhotelan, jasa lainnya 3. Pusat pelayanan kesehatan; rumah sakit tipe C, dokter spesialis, apotik 4. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA/ Kejuruan, Pesantren dan Perguruan Tinggi) 5. Pusat Olah Raga/Rekreasi; gedung olah raga 6. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau; rekreatif 7. Pengembangan sarana transportasi terminal tipe C 8. Pengembangan wisata buatan, budaya atau spiritual 9. Pusat pengembangan perkantoran kabupaten 10. Pusat pelayanan pertahanan dan keamanan 11. Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, perbengkelan dan pergudangan 12. Pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang 	Paringin, dan Paringin Selatan	<p>Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>Kota Tani Agropolitan</p> <p>Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten.</p> <p>Pusat Kegiatan Keagamaan</p>
PKLp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan; perkantoran kecamatan dan pusat pelayanan lintas kecamatan 2. Pusat perdagangan jasa; perbankan, pasar lokal, pasar hewan, pelayanan kesehatan puskesmas 3. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA/ Kejuruan, Pesantren) 4. Transportasi terminal tipe C dan terminal Agribisnis 5. Depo kebersihan 6. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang 7. Pusat kegiatan industri kecil rumah tangga pengolahan hasil pertanian 8. Pusat pengembangan komoditas pertanian dan hortikultura 9. Pusat pengembangan keagamaan 	Batumandi	<p>Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>Kota Tani Agropolitan</p>

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi PPK dan PPL yang diatur dalam Rencana Struktur untuk Pusat-Pusat Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Pusat Kegiatan	Fungsi Pelayanan	Kawasan Perkotaan	KSK
PPK	1. Pusat pemerintahan kecamatan; perkantoran kecamatan 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan, umum 3. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang 4. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA) 5. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura, perikanan dan peternakan	Muara Pitap Simpang Tiga Lampihong Putat Basiun Awayan Mungkur Uyam Juai	Pertanian Pangan Berkelanjutan
	1. Pusat pemerintahan kecamatan; perkantoran kecamatan 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan, umum 3. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang 4. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA) 5. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura, perikanan dan peternakan	Halong Tebing Tinggi	Adat Dayak Ekowisata Hutan Lindung Pegunungan Meratus
PPL	Fungsi PPL berikut tidak di uraikan dalam Perda RTRW : 1. Pusat pemerintahan desa; dan pusat pelayanan lintas desa 2. Pusat perdagangan jasa skala lokal dan lingkungan: pasar, kesehatan dan pendidikan 3. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang	Batumandi (Mantimin) Awayan (Bihara, Pudak) Halong (Tabuan, Mauya) Paringin (Layap) Paringin Selatan (Gunung Pandau, Bungin)	

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi Sistem Jaringan Transportasi Darat yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem jaringan transportasi darat
 - o Jaringan jalan dan jembatan
 - o Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
 - o Jaringan layanan lalu lintas
- b. Sistem jaringan transportasi perkereta apian

Materi Sistem Jaringan dan jembatan yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut:

Kewenangan	Fungsi Jalan	Ruas Jalan
Nasional	Arteri Primer (A1)	1. Desa Hamparaya (Batas Kab HST) – Ds Batumandi – Ds Mantimin 2. Ds Mantimin – Paringin Kota 3. Paringin Kota – Dahai/ Ds Padang Panjang (Batas Kab. Tabaong)
Provinsi	Kolektor Primer (K1)	1. Ds. Teluk Karya (Batas Kab. HSU) – Lampihong 2. Lampihong – Ds. Mantimin 3. Lampihong – Paringin Kota 4. Batumandi – Lokbatu – Tariwin
Kabupaten	Kolektor Primer (K1)	1. Paringin – Awayan 2. Awayan – Tebing Tinggi 3. Jalan Lingkar Barat dan Jalan Lingkar Timur di Kec. Paringin dan Kec. Paringin Selatan
	Kolektor Sekunder (K2)	1. Lokbatu (Kec. Batumandi) – Muara Jaya (Kec. Awayan) 2. Muaraninian – Awayan
	Jalan Lokal	1. Lampiran II
Jalan Khusus		1. Ds. Lasung Batu – Ds – Sungai Ketapi – Ds. Daha (Paringin) 2. Ruas Uren – Mamantang – Bts Kab. Paser Prov Kaltim 3. Ruas Tundakan – Pamurus – Balang 4. Ruas Handiwin – Gunung Riut – Puyun - Bts Kab. Paser Prov Kaltim
Jalan Strategis		1. Ruas Halong – Magalau (Kab. Kotabaru)

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi **Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan** yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Terminal	Tipe	Lokasi
Penumpang	Tipe C	1. Kelurahan Paringin Kota, Kec. Paringin 2. Kelurahan Batu Piring atau Desa Haur Batu
	Sub Terminal	1. Ds. Batumandi 2. Ds. Halong 3. Ds Simpan Tiga, Kec. Lampihong 4. Ds. Mungkur Uyam, Kec. Juai 5. Ds. Putat Basiun, Kec. Awayan 6. Ds. Simpang Nadung (Berupa Terminal Angkutan Pedesaan, baik untuk angkutan penumpang dan barang untuk komoditas dan pasar lokal/ lingkungan)
Barang	Angkutan Barang	1. Ds. Haur Batu, Kec. Paringin

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-3032.

Materi **Jaringan layanan lalu lintas** yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Angkutan	Rute Trayek
Perkotaan	1. Angkutan Umum Kota Antar Provinsi (AKAP) : Trayek : Banjarmasin – Paringin – Samarinda , Trayek : Paringin – Halong - Paser 2. Angkutan Umum Kota Dalam Provinsi (AKDP) : Trayek : Pantai Hambawang – Barabai – Batumandi – Paringin Trayek : Paringin – Lampihong – Amuntai Trayek : Paringin – Halong - Kotabaru Trayek : Batumandi – Mantimin – Lampihong – Amuntai (Trayek Rencana) 3. Angkutan Umum Kota Dalam Kabupaten (AKDK) : Trayek : Paringin – Juai - Halong Trayek : Paringin – Awayan – Tebing Tinggi Trayek : Batumandi – Lok Batu – Awayan – Tebing Tinggi Trayek : Batumandi – Lok Batu – Awayan – Juai – Halong Trayek : Jalang LIngkar Barat Paringin – Jalan Lingkar Timur Paringin
Perdesaan	Rute Trayek Perdesaan merupakan trayek rintisa yang belum terlayani oleh trayek Angkutan Umum Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Umum Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Umum Kota Dalam Kabupaten (AKDK)

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-3032.

Materi **Sistem jaringan transportasi perkereta apian** yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Lokasi Prasarana
Stasiun	1. Rencana Terminal/ Stasiun KA Ds. Mantimin – Riwa, Kec. Batumandi
Jaringan Rel	1. Jaringan Rel : Barito Timur (Batas Prov. Kalteng) – Kab. Tabalong – Kab. Balangan

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, terdiri dari :

1. Jaringan Prasarana Energi/ Ketenagalistrikan
2. Jaringan Prasarana Telekomunikasi
3. Jaringan Prasarana Sumberdaya Air
4. Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Materi Jaringan Prasarana Energi/ Ketenagalistrikan yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Lokasi Prasarana
Gardu Induk (GI)	1. GI Tanjung, suplai ke Gardu Hubung (GH) Paringin 2. GI Amuntai
Saluran	1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) GI Amuntai – GI Tanjung
Pembangkit	1. Pembangkit Skala Kecil di daerah yang belum terjangkau

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi Jaringan Prasarana Telekomunikasi yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Lokasi Prasarana
Jaringan Kabel	1. Kec. Paringin, Kec. Paringin Selatan, Kec. Juai, Kec. Batumandi 2. Pengembangan seluruh Kecamatan
Jaringan Nirkabel	1. Menara Telekomunikasi Terrestrial; Batu Piring, Paringin Timur, Ds Batumandi, Ds Putat Basiun, Ds Simpang Tiga, Ds Mungkur Uyam, Ds Halong, Ds Tabukan, Ds Mauya, Ds Simpang Nadung, Ds Tebing Tinggi, Ds Dayak Pitap 2. Pengembangan seluruh Kecamatan

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi Jaringan Prasarana Sumberdaya Air yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

1. Sungai
2. Cekungan Air Tanah
3. Jaringan Irigasi
4. Jaringan Air Baku untuk Air Minum
5. Sistem Pengendalian Banjir

Materi Jaringan Irigasi yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Kewenangan	Prasarana dan Lokasi / Cakupan/ Daerah Layanan
Kewenangan Nasional	1. Bendung Pitap
Kewenangan Provinsi	D.I. Pitap, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. D.I. Paringin 2. D.I. Putat Basiun 3. D.I. Lok Batu 4. D.I. Sikuntan 5. D.I. Pitap (Pengembangan) Saluran Rawa/ Daerah Rawa (DR) <ol style="list-style-type: none"> 6. D.R. Batumandi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten	Daerah Irigasi <ol style="list-style-type: none"> 1. D.I. Batumandi 2. D.I. Lok Batu 3. D.I. Paran 4. D.I. Suapin 5. D.I. Tundakan Bendung <ol style="list-style-type: none"> 6. Bendung Bihara (Rencana)

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi Jaringan Air Baku yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Lokasi Prasarana
Sumber Air Baku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendung Pitap 2. Bendung Bihara 3. Sungai Balangan

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Pengelolaan Persampahan
2. Sistem Pengelolaan Air Minum
3. Sistem Drainase
4. Sistem Jaringan Air Limbah
5. Jalur Evakuasi Bencana
6. Sistem Proteksi Kebakaran

Materi Sistem Pengelolaan Persampahan yang diatur dalam Rencana Struktur, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Lokasi Prasarana
TPA	1. TPA Ds. Batu Merah Sanitary Landfill/ Control Lanfill
TPS dan Fasilitas 3R	1. Di Pusat-Pusat Permukiman/ Pusat Kegiatan di seluruh Kawasan Perkotaan (PKL, PKLp, PPK) 2. Tempat Pengolahan Sampah dengan Konsep 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) di seluruh Kawasan Perkotaan (PKL, PKLp, PPK)

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-3032.

Materi Sistem Pengelolaan Air Minum yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Lokasi Prasarana
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bersih	1. IPA Buntu Pudak, di Kec. Halong 2. IPA Sungai Batung , di Kec. Juai 3. IPA Mantimin, di Kec. Batumandi 4. IPA Sungai Balangan, di Kec. Lampihong 5. IPA Simpang Nadung, di Kec. Tebing Tinggi 6. IPA Awayan, di Kec. Awayan 7. IPA Paringin I 8. IPA Paringin II 9. IPA Paringin III
Sumur	1. Sumur Bor/ Sumur Gali di Seluruh Kecamatan

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-3032.

Materi Sistem Drainase yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Kelas Jaringan/ Saluran
Jaringan	1. Sistem Drainase Primer 2. Sistem Drainase Sekunder 3. Sistem Drainase Tersier 4. Sistem Drainase Terpadu dengan Pengaturan dan Pengelolaan Sungai

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-3032.

Materi Sistem Jaringan Air Limbah yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Lokasi Prasarana
Instalasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan limbah B3 (Industri & Kegiatan Perdagangan Skala Besar) : sistem setempat (<i>on-site</i>) dan sistem terpusat (<i>off-site</i>) 2. Pengolahan limbah B3 (Pertambangan) : 3. Pengolahan Limbah Domestik/ Rumah Tangga, Industri Kecil/ Sedang dengan sistem setempat (<i>on-site</i>)

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi Jalur Evakuasi Bencana yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Lokasi Prasarana
Jalur Evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Utama di Kec. Paringin 2. Jalur Utama di Kec. Paringin Selatan 3. Jalur Utama di Kec. Halong 4. Jalur Utama di Kec. Juai 5. Jalur Utama di Kec. Batumandi 6. Jalur Utama di Kec. Lampihong
Area Evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Terbuka Hijau 2. Fasilitas Umum

Sumber : Perda Kabupaten Balangan Nomer 24/ 2013 tentang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Materi Jaringan Sistem Proteksi Kebakaran yang diatur dalam Rencana Struktur Ruang, yaitu sebagai berikut :

Prasarana	Lokasi Prasarana
Jenis dan Daerah Rawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Air 2. Pompa Pemadam 3. Sistem Perpipaan Pemadam 4. Fasilitas dan Lingkungan Rawan Bahaya Kebakaran

Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Balangan digambarkan sebagai berikut :

1. Perkotaan berdasarkan Tingkatan Pusat Kegiatan dengan Fungsi Pelayanannya yang berjenjang, yaitu PKL, PKLp, hingga PPK dan ke PPL di tingkat perdesaan. Serta pemenuhan berbagai macam jenis fasilitas dan sarana prasarana umum dan sosial berdasarkan fungsi pelayanannya masing-masing.
2. Sistem Permukiman yang dibedakan menurut ciri kelengkapan dan kehidupan sosial ekonominya, yaitu Permukiman Perdesaan untuk Masyarakat Agraris dan Permukiman Perkotaan untuk Masyarakat dengan kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih lengkap.



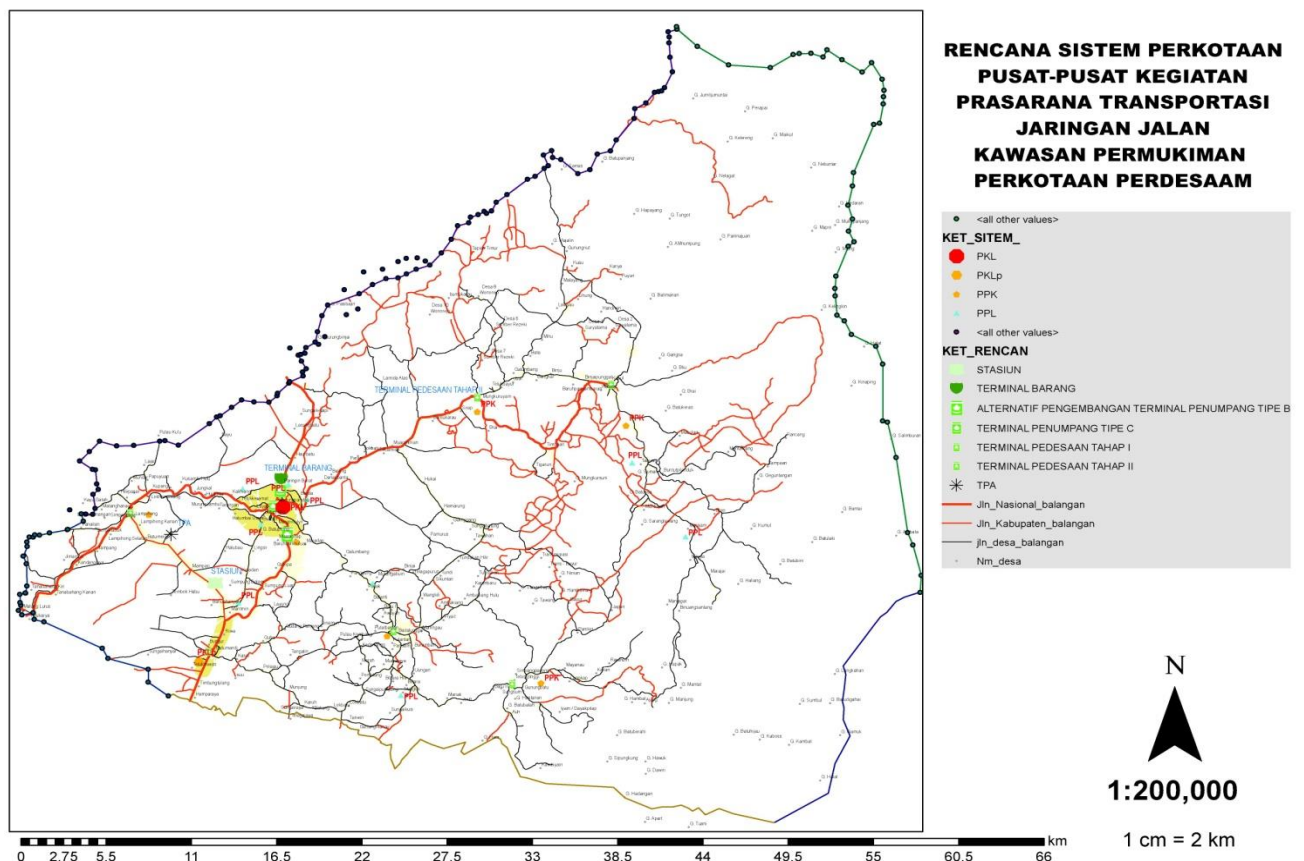
Tabel 24. Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan

No	Perkotaan	Pusat Kegiatan	Keterangan
1	Perkotaan Paringin	PKL Paringin PPK Muara Pitap PPL Haur Batu PPL Layap PPL Gunung Pandau PPL Bungin	Materi Teknis RDTR BWP Paringin
2	Perkotaan Batumandi	PKLp Batumandi PPL Mantimin	Materi Teknis RDTR BWP Batumandi
3	Perkotaan Lampihong	PPK Simpang Tiga	Identifikasi Perkotaan _ Ev.Ruang
4	Perkotaan Juai	PPK Mungkur Uyam	Identifikasi Perkotaan _ Ev.Ruang
5	Perkotaan Awayan	PPK Putat Basiun PPL Pudak PPL Bihara	Identifikasi Perkotaan _ Ev.Ruang
6	Perkotaan Halong	PPK Halon PPL Tabuan PPL Mauya	Identifikasi Perkotaan _ Ev.Ruang
7	Perkotaan Tebing Tinggi	PPK Tebing Tinggi	Identifikasi Perkotaan _ Ev.Ruang

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Selain Perkotaan Paringin dan Batumandi, untuk 5 Pusat Pelayanan Kegiatan Kecamatan lainnya, yaitu Lampihong, Juai, Awayan, Halong dan Tebing Tinggi, Tim Konsultan perlu melakukan identifikasi pemusatan permukiman yang dapat berpotensi berkembang menjadi Perkotaan Kecamatan dalam suatu delineasi.

Gambar 76. Rencana Sistem Perkotaan, Pusat kegiatan dan Jaringan Transportasi



Pada gambar Rencana Sistem Perkotaan terlihat Rencana Sistem Perkotaan yang dihubungkan melalui Jaringan Jalan dan dilengkapi Prasarana Transportasi pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan. Nampak bahwa Sistem Pusat Pelayanan dan Kegiatan di Balangan tidak semuanya direncanakan diatas atau menjadi Perkotaan beberapa lainnya tetap diarahkan menjadi Permukiman Perdesaan seperti Lampihong, Juai, Tebing Tinggi, Awayan dan Juai. Meskipun dapat juga berorientasi pada Konsep "*Rural Urbanisme*" atau Konsep Desa Kota.

Pada Perkotaan Paringin dan Batumandi yang telah lebih dahulu disusun Materi Teknis RDTR nya, memiliki deviasi luasan Kawasan Perkotaan yang lebih luas dibandingkan Luasan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan yang dialokasikan dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032.

Analisa Sistem Perkotaan sebagai bagian dari Struktur Ruang yang dibentuk oleh Pemenuhan Fungsi Pelayanan dan Sistem Prasarana Utama berupa Jaringan Jalan dan Prasarana Transportasi, juga di evaluasi berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan kawasan perkotaannya, baik Kawasan Perkotaan Eksisting dibandingkan 5 Tahun Sebelumnya, maupun Terhadap Rencana Pengembangan Perkotaan seperti Delineasi dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis.

Perkembangan dan Pertumbuhan Kawasan Perkotaan baik eksisting maupun yang direncanakan melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melebihi Luasan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan yang telah di alokasikan ruangnya pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten untuk 20 tahun kedepan. Kecenderungan meluas dan menyatu Pusat-Pusat Pelayanan dalam suatu delineasi kawasan perkotaan yang lebih luas dijelaskan sebagai berikut :

- Perkembangan pada Pusat Pelayanan Kabupaten dan Regional di sepanjang sistem primer pada jaringan arteri dan kolektor yang menghubungkan dan menyatukan Perkotaan Paringin – Batumandi – Lampihong, akan semakin menguat selain karena meningkatkannya kualitas Jalan Arteri juga direncanakan adanya Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api yang berlokasi antara Batumandi dan Lampihong.
- Perkotaan Kecamatan Halong dan Awayan yang juga didukung beberapa PPL dalam 20 tahun kedepan akan menyatu tumbuh linear seperti Perkotaan PKLp Batumandi saat ini.

3.1.2. RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Kawasan Peruntukan yang terdapat dan/ atau dituangkan dalam Rencana Pola Ruang, tidak seluruhnya berupa Delineasi yang memiliki luasan yang di plot pada Lampiran Peta Rencana Pola Ruang, sehingga kegiatan dan/ atau pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan harus sesuai dengan Pola Ruang tersebut, beberapa lainnya, merupakan :

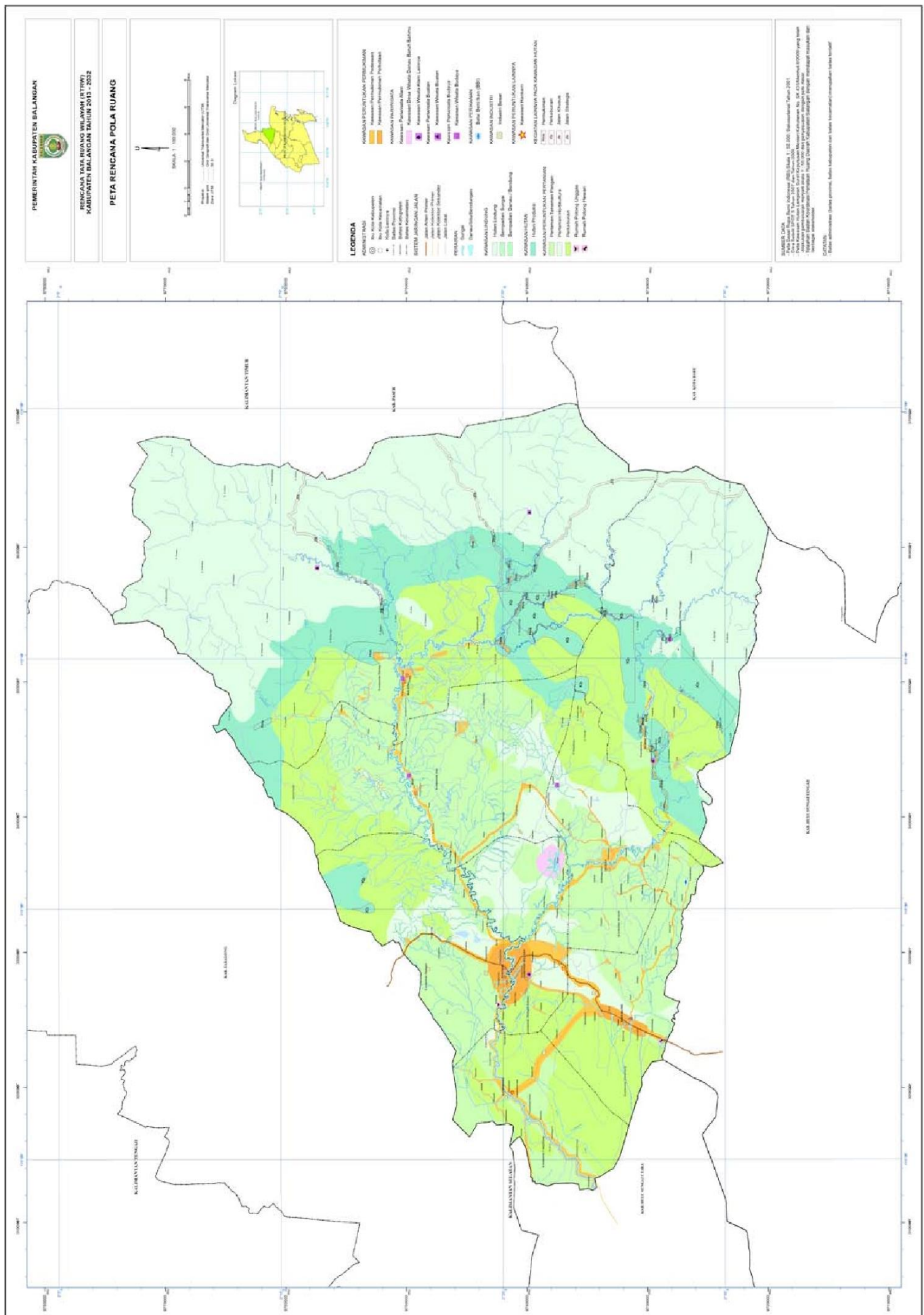
1. Kawasan yang di delineasi luasannya karena kondisi dan keadaan fisik lingkungannya yang menjadikan nya sebagai Kawasan Peruntukan Tertentu tersebut; Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Lindung Geologi
2. Sebaran/ Distribusi Ruang dari Kegiatan-Kegiatan dalam Skala Besar yang menggunakan/ memanfaatkan Pola Ruang tertentu; tidak memerlukan ruang secara permanen dan juga disebabkan dalam Skala 1:50.000 kegiatan-kegiatan tersebut tidak masuk, seperti : Kawasan Peruntukan Peternakan, Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya, Kawasan Peruntukan Industri Sedang-Kecil, Kawasan Peruntukan Lainnya; Peruntukan Pertahanan dan Keamanan.

Kawasan Lindung yang diatur dalam Rencana Pola Ruang dalam satuan (ha), yaitu sebagai berikut :

KAWASAN LINDUNG	kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	Hutan Lindung		60,313.00
			kawasan hutan lindung di Kecamatan Tebing Tinggi	14,718.00
			kawasan hutan lindung di Kecamatan Halong	45,595.00
	kawasan perlindungan setempat	kawasan sempadan sungai	sempadan sungai besar : S Pitap dan S Balangan	2,946.00
			sempadan sungai kecil : S. Mantuyan, S. Tabuan, S. Galumbang, S. Halong, S. Uren, S. Ninian, S. Jauk, S. Batumandi, S. Lokbatu dan S. Juai	8,195.00
		kawasan sempadan danau	di Danau Baruh Bahinu Dalam	59.00
		kawasan sempadan bendung	Bendung Pitap di Kecamatan Aawayan	6.00
		ruang terbuka hijau kota	30%	
	kawasan rawan bencana alam	kawasan rawan tanah longsor		605.00
			Halong	347.00
			Tebing Tinggi	176.00
			Juai	1.00
			Paringin Selatan	55.00
			Awayan	26.00
		kawasan rawan banjir		4,876.00
			Paringin	572.00
			Paringin Selatan	396.00
			Halong	177.00
	kawasan lindung geologi	pegunungan karst	Juai	705.00
			Batumandi	1,703.00
			Lampihong	1,323.00
			Kecamatan Halong	
			Kecamatan Tebing Tinggi	

Kawasan Budidaya yang diatur dalam Rencana Pola Ruang dalam satuan (ha), yaitu sebagai berikut:

KAWASAN BUDIDAYA	kawasan peruntukan hutan produksi	Kawasan peruntukan hutan produksi tetap	hutan produksi tetap di Kecamatan Tebing Tinggi	23,899.00
			hutan produksi tetap di Kecamatan Paringin	6,617.00
			hutan produksi tetap di Kecamatan Juai	1,012.00
			hutan produksi tetap di Kecamatan Halong	1,131.00
			hutan produksi tetap di Kecamatan Awayan	15,083.00
	kawasan peruntukan pertanian	kawasan peruntukan peternakan	peternakan sapi di Kec. Paringin, Kec. Awayan, Kec. Lampihong dan Kec. Batumandi	56.00
			peternakan ayam buras di Kec. Awayan dan Kec. Juai	80,372.00
			peternakan itik di Kec. Lampihong dan Kec. Batumandi	32,715.00
			peternakan menunggang agropolitan di Kec. Paringin, Kec. Halong, Kec. Juai dan Kec. Batumandi	10,262.00
			rencana pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kec. Batumandi dan Rumah Potong Unggas (RPU) di Kec. Paringin	37,395.00
	kawasan peruntukan perikanan	perikanan budidaya	Desa Wisata Baruh Bahinu dan Kawasan Wisata dan Budidaya Terpadu Paringin	
		perikanan budidaya juga terdapat pada rencana pengembangan Balai Benih Ikan Lokal	Gunung Manau, Batumandi	1.40
		di sepanjang sungai Balangan, pengembangan perikanan terdapat pada sungai-sungai alam dan sistem tumpangsari tanaman karet dan		
	kawasan peruntukan pertambangan	pertambangan mineral dan batubara	pertambangan batubara	77,455.00
			pertambangan mineral	
			pertambangan bahan galian bukan logam dan galian berupa batu kapur/batu gamping, kaolin, batu pasir, pasir kwarsa, kerikil dan lempung	
	kawasan peruntukan industri	industri kecil	pertambangan minyak dan gas bumi	
			industri besar	Kec. Paringin, Kec. Paringin Selatan, Kec. Lampihong, Kec. Batumandi dan Kec. Awayan
			industri sedang	Kec. Lampihong, Kec. Batumandi dan di Kec. Paringin Selatan
			industri pangan gula merah di Kec. Lampihong	
			industri pangan sirup di Kec. Batumandi	
			industri pangan mandai tiwadak di Kec. Batumandi	
			industri pangan kerupuk dan sejenisnya di Kec. Juai	
			industri bahan bangunan Batu Bata di Kec. Paringin	
			industri bahan bangunan Batako di Kec. Batumandi	
			industri ukiran kayu di Kec. Batumandi	
	kawasan peruntukan pariwisata	kawasan peruntukan pariwisata budaya	Industri anyaman bamban di Kec. Lampihong	
			wisata religius Makam Datuk Kandang Haji di Kec. Juai	
			pusat sejarah Benteng Tundakan di Kec. Awayan	
			pusat budaya Dayak Pitap di Kec. Tebing Tinggi	
			kawasan konservasi perairan (danau) Baruh Bahinu	
	kawasan peruntukan pariwisata alam	kawasan peruntukan pariwisata alam	kawasan Desa Wisata Danau Baruh Bahinu	295.00
			kawasan budidaya dan pariwisata alam	
			kawasan peruntukan pariwisata buatan	
			Rencana Pengembangan Ekowisata	
	kawasan peruntukan permukiman	permukiman perkotaan	Hutan Lindung Peg. meratus di Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Halong	1,431.00
			kawasan perkotaan paringin	
			kawasan kota agropolitan batumandi	
	kawasan peruntukan lainnya	permukiman perdesaan	di masing-masing Kecamatan	4,516.00
			Kepolisian Resort (Polres) Balangan	di Kecamatan Paringin Selatan
			Kepolisian Sektor (Polsek)	di masing-masing Kecamatan
			Komando Rayon Militer (Koramil)	di masing-masing Kecamatan



3.1.3. RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Ketentuan Umum PZ Pola Ruang Kawasan Pariwisata Alam

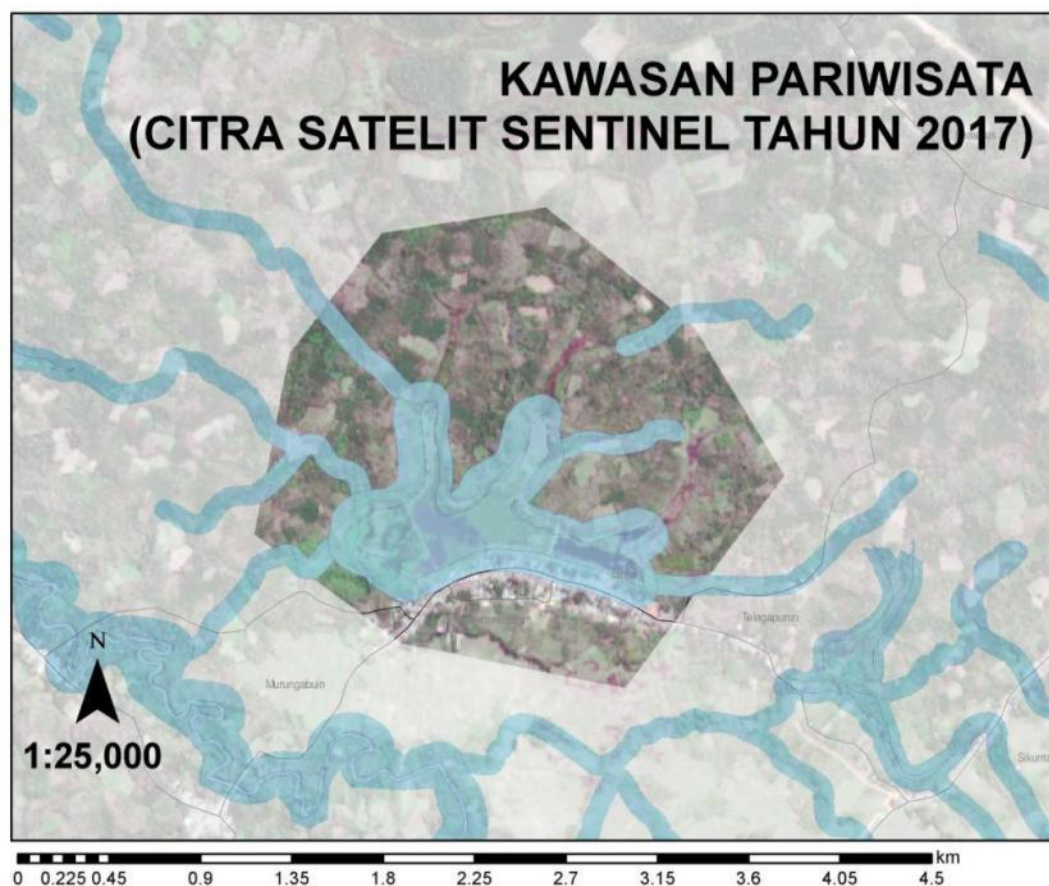
Dilarang	Terbatas/ Bersyarat
1. Permukiman dan industri yang tidak terkait pariwisata	1. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan sistem prasarana wilayah 2. Penelitian dan pendidikan

Pola Ruang Kawasan Pariwisata Alam seluas $\pm 2,95 \text{ km}^2$ di Kecamatan Paringin Selatan berupa Kawasan Desa Wisata, dengan Kawasan Konservasi Perairan (Danau) Baruh Bahinu.

POLA RUANG : KAWASAN PARIWISATA ALAM

TUTUPAN LAHAN YANG TIDAK TERDAPAT DEVIASI/ TIDAK TERDAPAT SPATIAL GAP	TUTUPAN LAHAN YANG TERDAPAT ADA DEVIASI/ ADA SPATIAL GAP (DEVIASI PEMANFAATAN RUANG)	
Desa Wisata Rawa Danau Sungai	Deviasi Fungsi Pola Ruang Permukiman Lahan Terbuka Kebun Karet Kebun Campuran Ladang Semak Belukar	Deviasi Ketidaksesuaian Pola Ruang -

Gambar 78. Citra Satelit Sentinel 2017 pada Kawasan Pariwisata Alam Danau Baruh Bahinu



Umum

Pola Ruang (Km²)	2,95
Tutupan Lahan yang sesuai (Km²)	0,11
Proporsi Pencapaian Perwujudan/ Kesesuaian pada Pola Ruang (%)	3,73%

Detail Tutupan Lahan:

Deviasi Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Luas : 2,84 Km² • Prosentase : 96,27% • Klasifikasi : Tinggi • Berupa : Permukiman, Kebun Karet, Kebun Campuran, Ladang.
Deviasi Perubahan Fungsi Pola Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Luas : 2,84Km² • Prosentase : 96,27% • Klasifikasi : Tinggi • Berupa : Permukiman, Kebun Karet, Kebun Campuran, Ladang.
Deviasi Ketidakesesuaian Pola Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Luas : 0 Km² • Prosentase : 0 % • Klasifikasi : - • Berupa : -
Status Deviasi	a. Kondisi eksisting belum tercapai 100% sesuai rencana, b. Kegiatan wisata masih terkonsentrasi/ fokus pada area perairan danau, desa wisata belum terwujud terlihat dari kegiatan permukiman yang tidak terintegrasi/ tidak terkait wisata dan tidak berorientasi ke area perairan danau.
Indikasi Umum Pengguna Ruang	a. Penduduk/ Masyarakat/ Warga b. Pemerintah Kabupaten
Indikasi Umum Status Tanah	Ruang Privat, Hak Milik Masyarakat
Indikasi Umum Status Perizinan	a. Kegiatan pada Lahan sejak sebelum Perda RTRW
Tipologi Umum Konversi	Fungsi Peruntukan belum terwujud sesuai Pola Ruang



Gambar 79. Kondisi Perairan Danau Baruh Bahinu yang Tertutup Vegetasi Air

Rekomendasi Penanganan Hasil Evaluasi Kesesuaian terhadap Kawasan Pariwisata Alam, meliputi :

1. Penanganan Kawasan Pariwisata Perairan Konservasi Danau baruh Bahinu dan Desa Wisata untuk menjadikan Permukiman Desa sebagai bagian dari Destinasi Wisata.
2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Kawasan Desa Wisata dan Rencana Teknis atau Rencana Aksi lainnya, dengan dimulai dari melibatkan peran serta dan peran aktif masyarakat dalam mengambil keputusan dalam proses perencanaan.
3. Upaya penanganan dan pengelolaan, dapat dibagi menjadi/ kedalam 3 (tiga) kelompok fokus :
 - Rencana/ Upaya penanganan dan pengelolaan area perairan danau baruh bahinu
 - Rencana/ Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan permukiman desa wisata
 - Rencana/ Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan sekitarnya; sebagai area pendukung untuk kegiatan wisata alam.



Tindak lanjut dari hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, meliputi

- Jika tingkat kesesuaiannya tinggi, maka kegiatan selanjutnya adalah memantapkan program-program pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- Jika tingkat kesesuaiannya sedang, perlu kebijakan atau strategi baru untuk memperkuat terwujudnya kesesuaian; dan/ atau pemantapan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
- Jika tingkat kesesuaiannya rendah, (dan temuan faktor lain yang signifikan) diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang yang sedang diterapkan, termasuk peninjauan kembali terhadap perangkat peraturan pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlakukan.

Tabel 25. Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2017

STRUKTUR	CAPAIAN	BOBOT	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
		100%	
PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PELAYANAN	80%	45%	72.40%
PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA UTAMA	69%	35%	
PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA SARANA UTILITAS PENDUKUNG	61%	20%	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Upaya rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk konsistensi Rencana Struktur dan Pola Ruang,:

1. Pemantapan Program
2. Prioritas Sektor yang penting, namun memiliki pertumbuhan yang lambat
3. Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Ruang

Perwujudan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Balangan pada Tahun 2017 mencapai 72%, masuk dalam kategori kesesuaian tinggi. Sedangkan Perwujudan Pola Ruang RTRW Kabupaten Balangan pada Tahun 2017 mencapai 65% untuk kesesuaian sempurna dan 92% untuk kesesuaian dengan perubahan fungsi yang keduanya masih dalam kategori tinggi. Sehingga Rekomendasi Penutup dalam Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2017, adalah belum diperlukannya Peninjauan Kembali Perda Kab. Balangan Nomer 24 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2013-2032, namun untuk faktor-faktor signifikan, dinamika kebijakan, perencanaan, pembangunan dan investasi hanya perlu dilakukan melalui instrumen lainnya, seperti Instrumen Rencana Detail dan Instrumen Pengendalian, serta Instrumen Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Lapangan dalam 5 (lima) tahun kedepan melalui RPJMD yang ada, atau untuk mencapai 10 tahun pertama Perda RTRW.

Tabel 26. Deviasi dan Perwujudan Pola Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2017

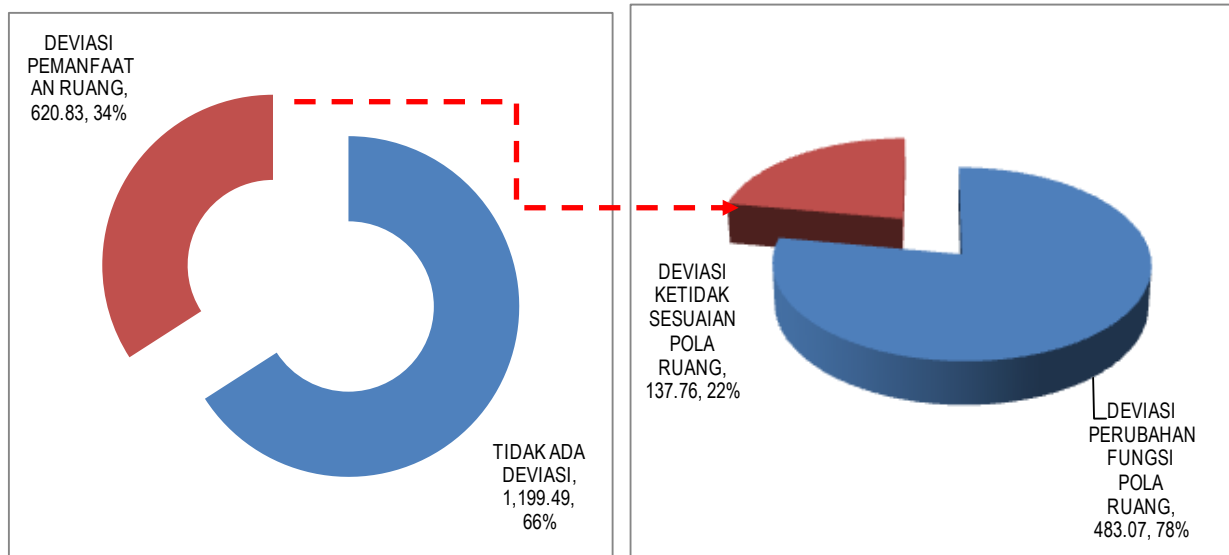
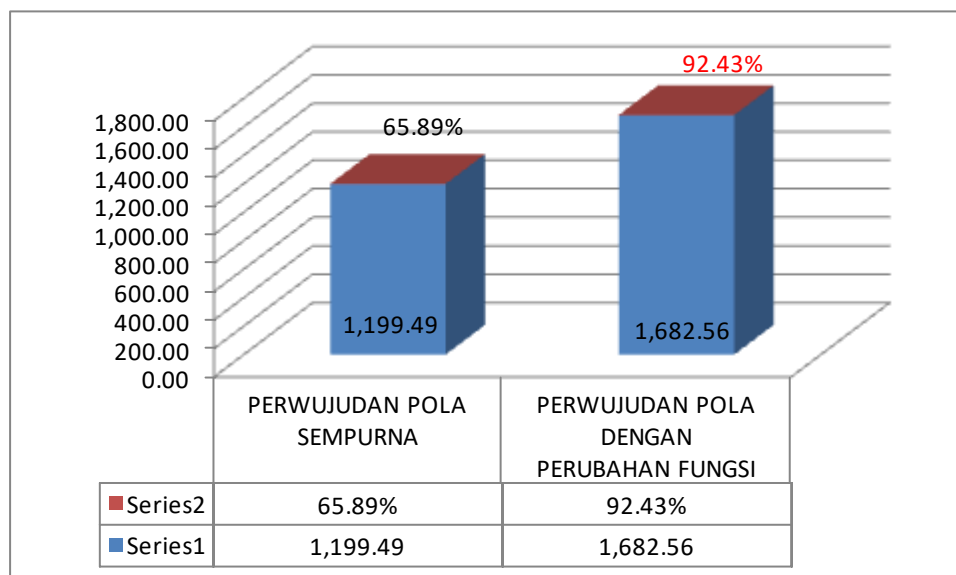
DEVIASI	LUAS	%
TIDAK ADA DEVIASI	1,199.49	65.89%
DEVIASI PEMANFAATAN RUANG	620.83	34.11%
TOTAL POLA RUANG	1,820.32	100.00%
DETAIL DEVIASI PEMANFAATAN RUANG :	620.83	
DEVIASI PERUBAHAN FUNGSI POLA RUANG	483.07	77.81%
DEVIASI KETIDAK SESUAIAN POLA RUANG	137.76	22.19%

PENCAPAIAN / PERWUJUDAN POLA RUANG

PERWUJUDAN POLA SEMPURNA	1,199.49	65.89%
PERWUJUDAN POLA DENGAN PERUBAHAN FUNGSI	1,682.56	92.43%

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

LAPORAN AKHIR


Gambar 81. Deviasi dan Perwujudan Pola Ruang


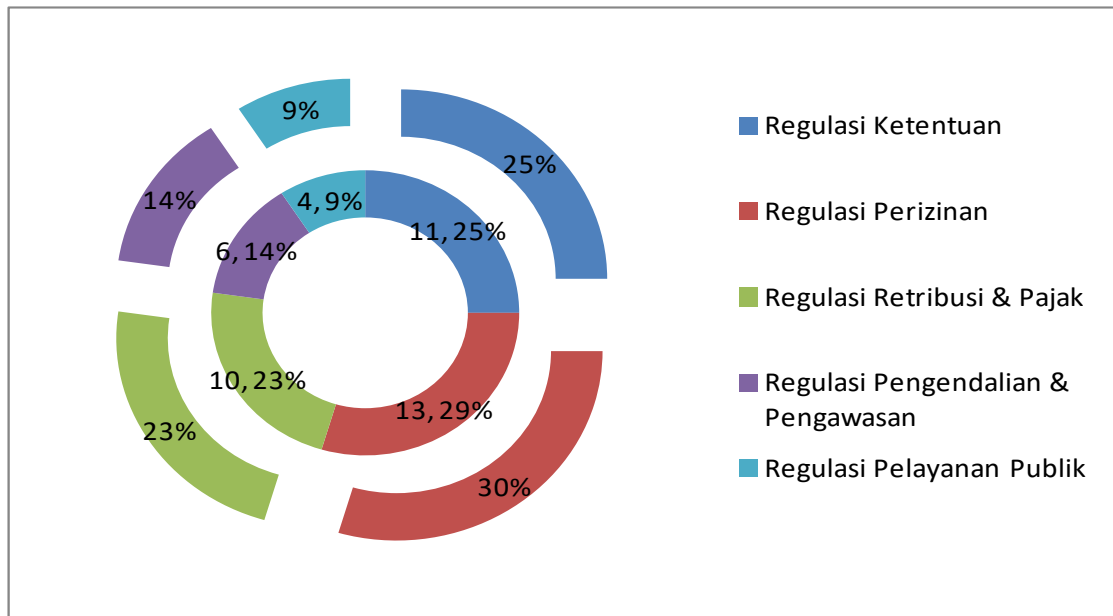
3.2. DUKUNGAN REGULASI (PERDA)

Dukungan regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan yang diterbitkan dari Tahun 2005 hingga Tahun 2016 yang berkaitan dengan Penanaman Modal/ Investasi berjumlah 44 perda.

Tabel 27. Identifikasi Kelompok Regulasi

Jenis Regulasi (Perda)	Jumlah	%
Regulasi Ketentuan	11	25%
Regulasi Perizinan	13	30%
Regulasi Retribusi & Pajak	10	23%
Regulasi Pengendalian & Pengawasan	6	14%
Regulasi Pelayanan Publik	4	9%
Jumlah	44	100%

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Gambar 82. Identifikasi Kelompok Regulasi


DUKUNGAN REGULASI (1)

KETENTUAN

1. [Perda 13/2007 : Garis Sempadan Bangunan Di Kabupataen Balangan](#)
2. [Perda 2/2012 : Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan](#)
3. [Perda 17/2013 : Pedagang Kaki Lima](#)
4. [Perda 18/2013 : Pasar Dan Pertokoan](#)
5. [Perda 19/2013 : Pajak Hotel](#)
6. [Perda 24/2013 : : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032](#)
7. [Perda 25/2013 : Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman](#)
8. [Perda 14/2014 : Penanaman Modal](#)
9. [Perda 11/2016 : Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi](#)
10. [Perda 12/2016 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021](#)
11. [Perda 25/ 2016 : Analisis Dampak Lalulintas di Jalan](#)

DUKUNGAN REGULASI (2)

PERIZINAN

1. [Perda 6/ 2006 : Izin Usaha Industri Dan Retribusinya](#)
2. [Perda 7/ 2006 : Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Retribusinya](#)
3. [Perda 8/2011 : Izin Pengelolaan Parkir](#)
4. [Perda 5/2012 : Izin Pembuangan Limbah Cair](#)
5. [Perda 20/2012 : Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan Dan Tempat Rekreasi](#)
6. [Perda 3/ 2014 : Wajib Daftar Perusahaan](#)
7. [Perda 4/2014 : Izin Usaha Perdagangan](#)
8. [Perda 5/2014 : Izin Lokasi](#)
9. [Perda 6/2014 : Izin Lingkungan](#)
10. [Perda 12/2014 : Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri](#)
11. [Perda 17/2014 : Izin Mendirikan Bangunan](#)
12. [Perda 2/2016 : Izin Menara Telekomunikasi](#)
13. [Perda 22/2016 : Perubahan Atas Perda 1 /2015 : Izin Gangguan](#)

DUKUNGAN REGULASI (3)

PAJAK & RETRIBUSI

1. [Perda 12/ 2009 : Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat \(DIKLUSEMAS\)](#)
2. [Perda 10/2011 : Pajak Parkir](#)
3. [Perda 11/2011 : Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir](#)
4. [Perda 8/2012 : Retribusi Izin Trayek](#)
5. [Perda 14/2012 : Pajak Hiburan](#)
6. [Perda 15/2012 : Pajak Reklame](#)
7. [Perda 16/2012 : Pajak Restoran](#)
8. [Perda 3/2013 : Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan](#)
9. [Perda 7/2013 : Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dibidang Perikanan](#)
10. [Perda 8/2013 : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan](#)

DUKUNGAN REGULASI (4)

PENGENDALIAN & PENGAWASAN

1. [Perda 6/2005 : Pengaturan Kegiatan Yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan](#)
2. [Perda 6/ 2009 : Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Berakohol](#)
3. [Perda 11/ 2009 : Pencegahan, Larangan Dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila](#)
4. [Perda 3/2016: Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan](#)
5. [Perda 4/2016: Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak](#)
6. [Perda 5/2016: Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol](#)

DUKUNGAN REGULASI (5)

PUBLIK

1. [Perda 21/ 2006: Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Balangan](#)
2. [Perda 3/2012 : Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa](#)
3. [Perda 25/2012 : Pelayanan Publik](#)
4. [Perda 18/ 2013 : Pasar dan Pertokoan;](#)

Disamping 44 buah Peraturan Daerah yang mendukung dan atau mendorong tumbuhnya iklim investasi, juga telah terdapat Perda tentang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Balangan masih belum memiliki Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Balangan (RUPM), hasil Kajian Profil Penanaman Modal Sektor Pariwisata & Destinasi Prioritas dan Pengembangan Perkotaan & Properti ini dapat menjadi bagian dari RUPM yang akan disusun kemudian.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomer 14 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal

1. Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian di Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja. Untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya penanaman modal.
2. Penanam modal memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang melekat padanya.
3. Penanaman Modal dilaksanakan oleh Bupati melalui Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Bupati dapat mendelegasikan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pelayanan Perizinan Satu Pintu atau Penanaman Modal

4. Penanaman Modal Dalam Negeri dengan total Nilai Investasi mulai dari Rp. 500.000.000 izinnya harus diproses menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
5. Jenis Pelayanan Penanaman Modal (PM)
 - a. Pelayanan Perizinan; Izin Prinsip PM, Izin Prinsip Perluasan PM, Izin Prinsip Perubahan PM, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM, Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan dan Izin Usaha Penggabungan
 - b. Pelayanan Non Perizinan; Pelayanan Informasi tentang PM dan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Daerah
6. Kebijakan Dasar Penanaman Modal, meliputi :
 - a. Memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.
 - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi.
7. Kebijakan Dasar diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah,
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM) disusun mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM) disusun berdasarkan Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
 - c. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Balangan Nomer 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur Kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
2. SOP AP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), adalah untuk pelayanan 54 jenis perizinan.
3. Proses Pemeriksaan Dokumen dan pemberitahuan kepada Pemohon waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diajukan dan telah memenuhi persyaratan.
4. Dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan, Bupati dapat membentuk 3 Tim; Tim Kebijakan Perizinan, Tim Teknis Perizinan, dan Tim Pengaduan.

Peraturan Bupati Balangan Nomer 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat 54 Perizinan, dikelompokkan menjadi :

1. **Izin Umum** : Izin Gangguan/ HO (Hinder Ordonantie), **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, **Izin Reklame**, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Retribusi Izin Persampahan, Izin Mendirikan Kursus, **Surat Izin Tempat Usaha (SITU)**, **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**, Surat Izin Usaha

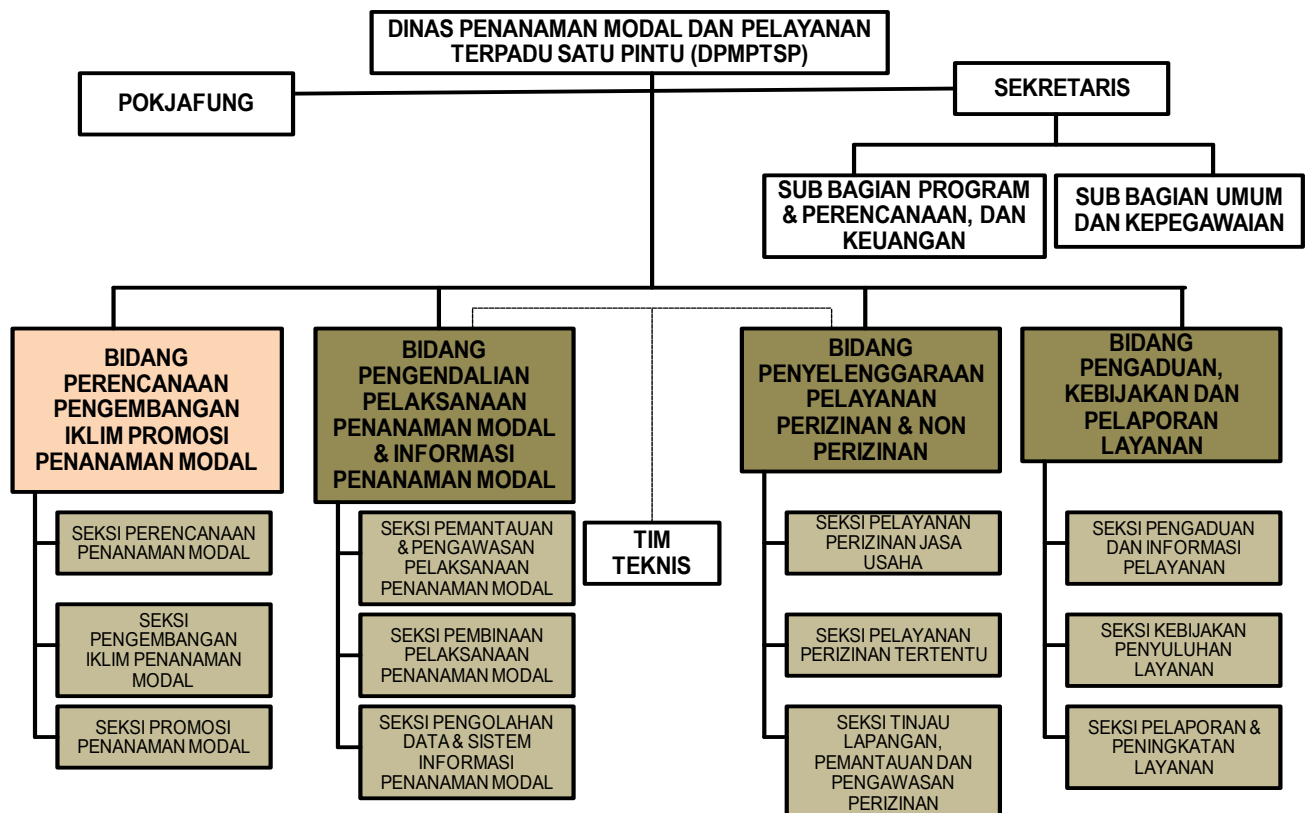
Industri (SIUI), **Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**, Izin Prinsip Penanaman Modal. Izin Panti Asuhan

2. **Izin Bidang Kesehatan** : Jaminan Kesehatan Daerah, Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama dan rekomendasi Klinik Umum Madya, Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik, Izin Pendirian Apotik, Izin Pendirian Optik/ Toko Kacamata, Izin Toko Obat/ Pedagang Eceran Obat, Izin Toko Alat Kesehatan, Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA), Izin Dokter Praktek (Umum, Gigi dan Spesialis), Izin Kerja Perawat, Izin Praktik Perawat, Izin Kerja Perawat Gigi, Izin Kerja Praktik Perawat Gigi, Izin Kerja Perawat Anestesi, Izin Kerja Bidan, Izin Praktik Bidan, Izin Kerja/ Praktik Apoteker (SIKA/ SIPA), Izin Praktik Apoteker Pendamping (SIPA), Izin Kerja tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTIK) , Izin Praktik Fisioterapi, Izin Praktik Okupasi Terapis, Izin Praktik Trafis Wicara, Izin , Izin Kerja Refleksionis Optisien dan Optometris (SIKRO dan SIKO), Izin Kerja Radiografer, Izin Kerja/ Praktik Ortotis Prostetis, Izin Kerja Teknisi Gigi, Izin Kerja/ Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/ SIPTGz), Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS), Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT), Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT), Izin Operasional Klinik,
3. Izin Usaha Lainnya : Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, Izin Operasional di Bidang/ Sektor Usaha Pendidikan (5 Jenis),
4. Izin Usaha Bidang Jasa dan Pariwisata : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) : Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi Wisata, Usaha Jasa Makanan Minuman, Usaha Jasa Kawasan Pariwisata, Usaha Jasa Transportasi Wisata, Usaha Daya Tarik Wisata, Usaha Jasa Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, Usaha Jasa Pramuwisata

Izin Usaha Bidang Jasa dan Pariwisata , berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) :

1. Usaha **Jasa Perjalanan** Wisata: Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata
2. Usaha **Jasa Penyediaan Akomodasi** Wisata,; Hotel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Caravan, Villa, Pondok Wisata, Motel, Lainnya
3. Usaha **Jasa Makanan Minuman**; Restoran, Rumah Makan, Bar/ Rumah Minum, Kafe, Pusat Makanan, Jasa Boga.
4. Usaha Jasa Kawasan Pariwisata,
5. Usaha **Jasa Transportasi** Wisata; Angkutan Jalan Wisata, Angkutan Kereta Api Wisata, Angkutan Sungai dan Danau Wisata,
6. Usaha **Daya Tarik** Wisata; pengelolaan pemandian air panas alami, pengelolaan gua, pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno), pengelolaan museum, pengelolaan permukiman/ lingkungan adat, pengelolaan objek jiarah.
7. Usaha **Jasa Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi**; Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Seni, Hiburan Malam, Panti Pijat, Taman Rekreasi, Karaoke, Jasa Impresariat/ Promoter
8. Usaha **Jasa Pramuwisata**,
9. Usaha **Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran**,
10. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata,
11. Usaha **Jasa Informasi Pariwisata**,
12. Usaha Jasa Wisata Tirta (bahari – memancing, selancar, sungai, danau, waduk - dayung),
13. Usaha Jasa SPA

Gambar 83. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)



3.3. DUKUNGAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Berdasarkan Grafis Positioning Perda RPJMD Periode 2016-2021, maka RTRW Kabupaten Balangan memasuki masa 5 Tahun Kedua, yaitu hingga tahun 2022. **Visi dan Misi RPJMD Periode 2016-2021 :**

VISI : "Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia"

MISI :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan Dan Kesehatan
2. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan
3. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkesinambungan**
4. **Mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Potensi Daerah) Berdasarkan Kearifan Lokal**
5. Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan
6. Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah
7. Mewujudkan Kamtibmas Dan Kepastian Hukum Untuk Terciptanya Suasana Yang Kondusif

Dalam merumuskan Strategi Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan **Misi Nomer 3 dan Misi Nomer 4**, Kepala Daerah dapat menyusun **Strategi Sinkronisasi Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Sektor Pariwisata**, khususnya pada **Kawasan Strategis Pariwisata** Kabupaten melalui **Kebijakan Penanaman Modal**.

Tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat
4. Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
7. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal
8. Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan Olahraga
9. Menurunnya masalah-masalah sosial dan Kemiskinan
10. Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana daerah
11. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel
12. Terciptanya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.
13. Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan

Strategi

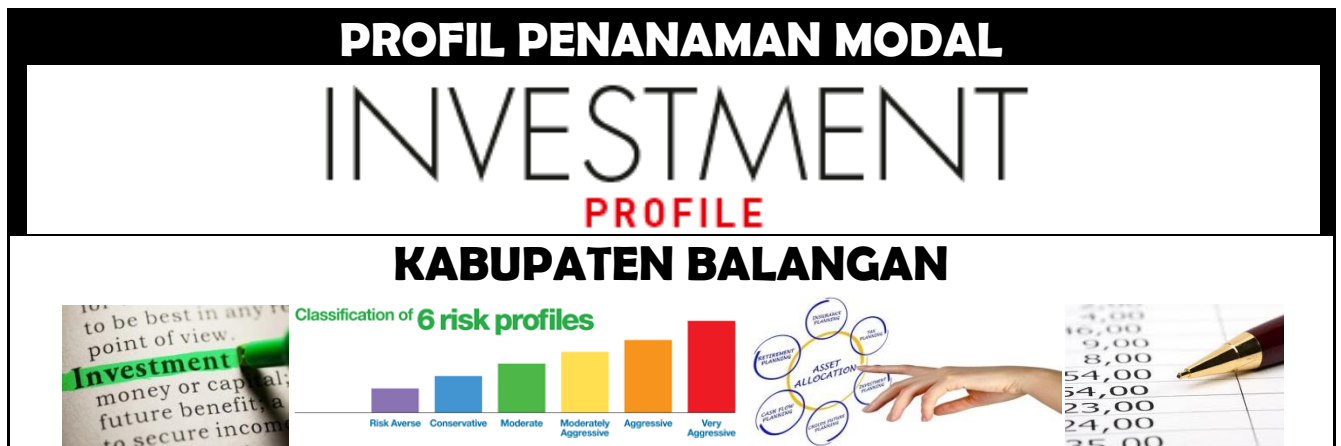
1. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan
2. Peningkatan dan pelestarian keberlanjutan ketersediaan air
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau
4. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum bagi warga masyarakat
5. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan lahan produktif untuk meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan
7. Pembentukan unit teknis untuk membantu stabilisasi harga produk pertanian dan optimalisasi potensi PAD melalui BUMD
8. Dibangunnya potensi wisata di Kabupaten Balangan
9. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
10. Peningkatan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan yang bersifat seni dan budaya
11. Menggalakkan kegiatan kepemudaan dan olahraga bagi para pemuda dalam rangka menyalurkan kegiatan secara positif dan bermanfaat
12. Meningkatkan kordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam upaya penanganan masalah-masalah sosial
13. Meningkatkan kualitas layanan bencana daerah
14. Meningkatkan efisensi dan efektifitas sistem, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, pengawasasn, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
15. Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen layanan dan kualitas SDM pelaksana di tingkat SKPD
16. Meningkatkan kemampuan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui sistem online
17. Membantu desa dalam upaya percepatan pembangunan desa yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan
18. Pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum
19. Mewujudkan cakupan penerbitan kartu administrasi kependudukan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan 2016-2021, kebijakan umum yang ditempuh sebagai berikut:

- a. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Penekanan pembangunan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, pengembangan daya saing tenaga kerja Balangan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. **Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.** Untuk mewujudkannya upaya-upaya pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui ekonomi kerakyatan yang diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka. Hal tersebut diupayakan dengan melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan usaha mikro, kecil dan menengah, yang didukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan lingkungan usaha yang sehat, termasuk peningkatan investasi dan revitalisasi pertanian dalam arti luas, dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri) serta perbaikan iklim ketenagakerjaan.
- c. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan** yang ditunjukkan dari meningkatnya kuantitas & kualitas serta kemanfaatan berbagai infrastruktur, sarana-prasarana umum.
- d. **Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan** yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan.
- e. **Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan** sebagai objek dan subyek pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui seni budaya, olahraga, keagamaan, penanganan kemiskinan dan masalah sosial serta pencegahan dan tanggap darurat bencana;
- f. **Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah** agar dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) , penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan menuju kepada good governance dan clear government. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai.
- g. **Mewujudkan kemananan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondisi.** Kebijakan ini terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di tengah masyarakat serta perlindungan dan pengakuan terhadap status warga Balangan dalam administrasi dan hukum terkait kependudukan. Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Program pembangunan daerah 5 tahun ke depan tetap terfokus pada prioritas:
 - 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia,
 - 2) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.
 - 3) Pembangunan Infrastruktur,
 - 4) Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal
 - 5) Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan
 - 6) Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah
 - 7) Mewujudkan kemananan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondisi

Dalam RPJMD Tahun 2016-2021, terdapat 16 fokus prioritas daerah, diantaranya adanya pembangunan sport center, pembangunan terminal baru, pengembangan jalan di Balangan. Pengembangan dan Pembangunan Terminal Baru dan Jalan Kabupaten dapat mendorong meningkatkan aksesibilitas wilayah, meningkatkan daya jangkau dan memperpendek waktu tempuh.



4 KEBIJAKAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA

4.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARIWISATA DAERAH

Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Daerah Kabupaten Balangan, disusun berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2030. RIPPDA Tahun 2016-2030 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- pembangunan destinasi pariwisata;
- pembangunan industri pariwisata;
- pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Balangan adalah Pengembangan Industri Kepariwisata Kabupaten Balangan yang berbasiskan Wisata Alam dan Budaya Unggulan Skala Regional Yang Lestari Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Balangan adalah:

- Pengembangan kuantitas dan kualitas destinasi wisata andalan yang menarik, mudah dijangkau, berdaya saing regional serta berwawasan lingkungan;
- Pembangunan sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata secara merata;
- Peningkatan tingkat kunjungan wisata regional secara simultan melalui berbagai aksi pemasaran pariwisata secara sinergis dan berkelanjutan;
- Mendorong pertumbuhan berbagai sektor penunjang industri pariwisata;
- Menggerakkan masyarakat sadar wisata dan kemitraan usaha rakyat yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, rasa cinta alam dan budaya, serta mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal;
- Pengembangan organisasi kelembagaan pariwisata sinergis, dari level pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, serta menyusun regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.



RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA (RIPP) KABUPATEN BALANGAN

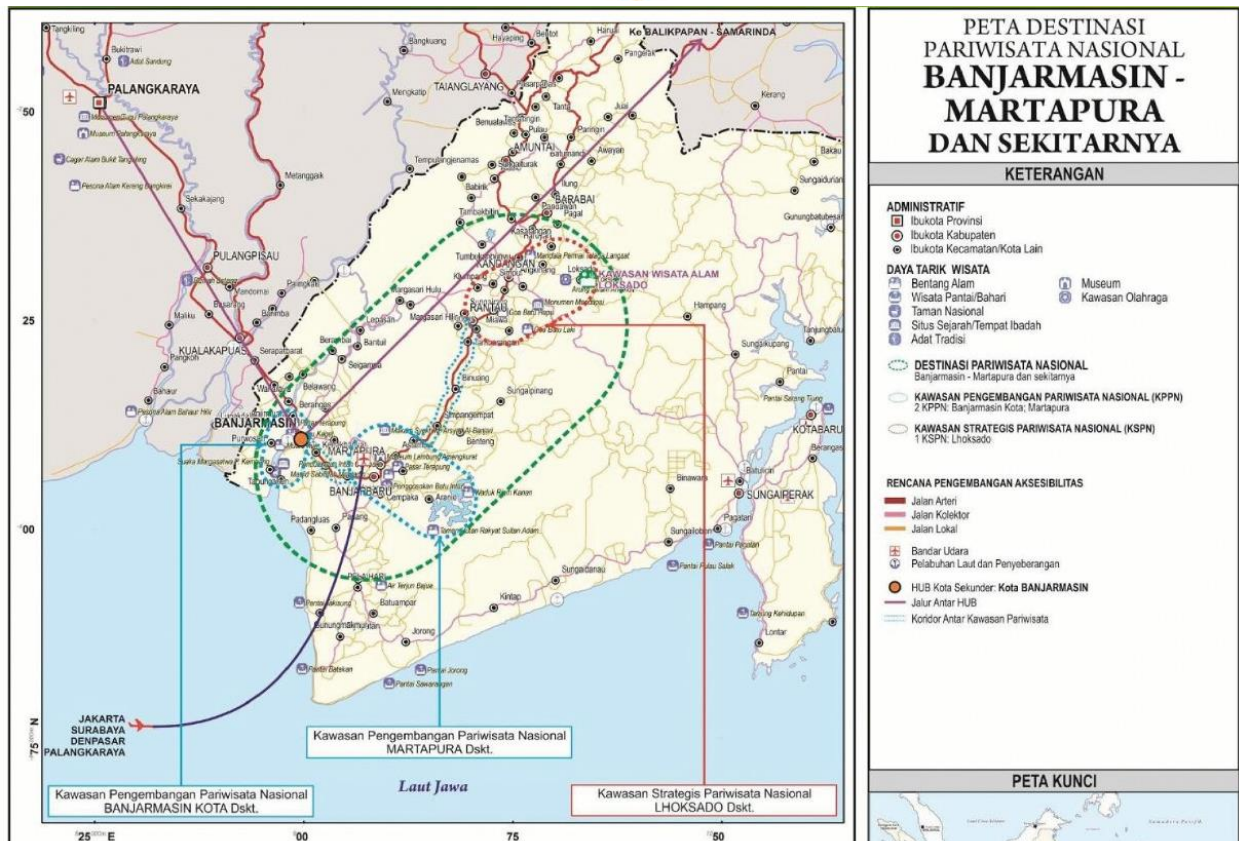
DAN DESTINASI PRIORITAS

Visi Dan Misi

Pembangunan Pariwisata Kabupaten Balangan

“Pengembangan Industri Kepariwisata Kabupaten Balangan yang berbasis Wisata Alam dan Budaya Unggulan Skala Regional Yang Lestari dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Tinjauan Destinasi Nasional & Destinasi Regional di Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 84. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Banjarmasin-Martapura dan Sekitarnya

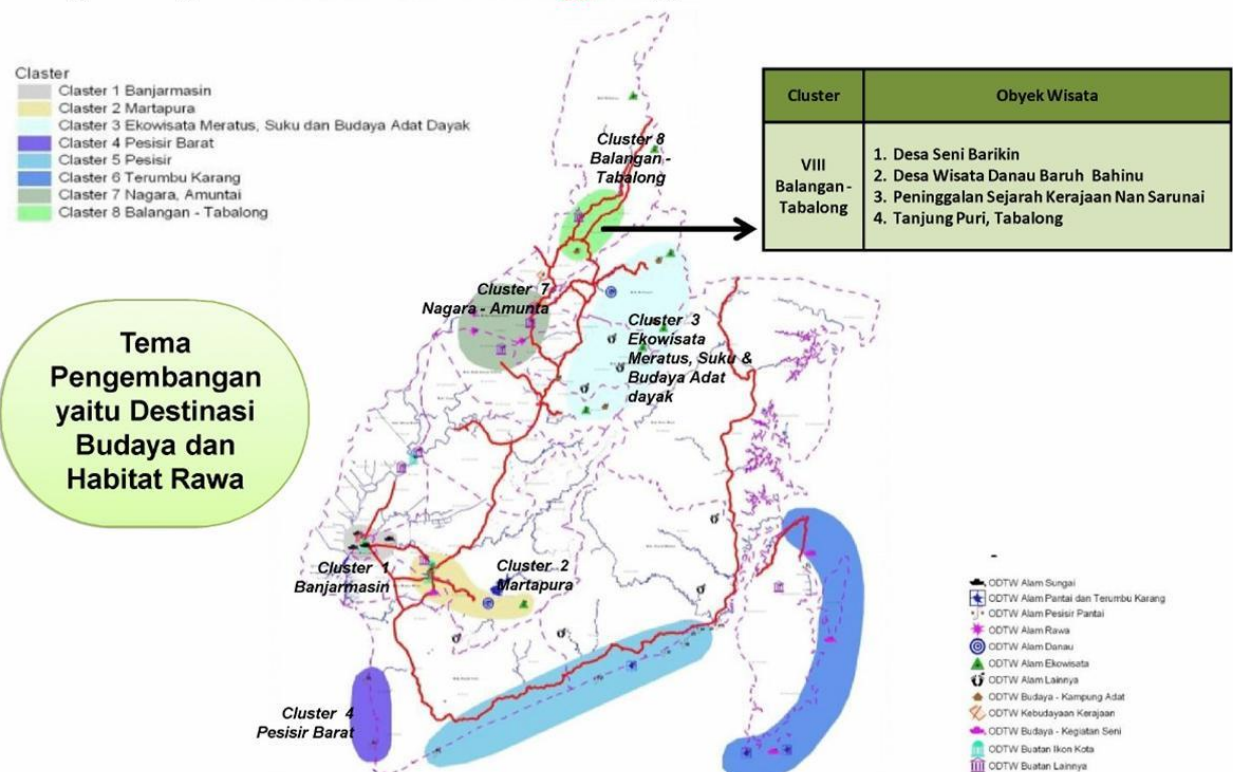
Untuk mengefektifkan pengembangan pariwisata daerah, maka wilayah Kalimantan Selatan dibagi berdasarkan *Pengelompokan Destinasi Unggulan dalam Cluster Berdasarkan Kedekatan Terhadap Pusat Pelayanan* :

Cluster	ODTW		
	Pusat Pelayanan RTRW	Transportasi	Fasilitas Pendukung
Cluster 1 Banjarmasin-Marabahan	PKN Banjarmasin PKL Marabahan	Bandara Syamsuddin Noor Terminal Tipe A A Yani km 17 Terminal Tipe C	Hotel Bintang, Hotel Melati, Penginapan, Restoran, Rumah Makan, Depot
Cluster 2 Martapura-Tahur	PKNp Martapura	Terminal Tipe B Kota Terminal Tipe C Kota	Hotel Bintang, Hotel Melati, Penginapan, Restoran, Rumah Makan, Depot
Cluster 3 Ekowisata Pegunungan, Suku dan Budaya Adat Dayak Meratus	PKWp Barabai PKL Paringin PKL Kandangan PKL Rantau	Terminal Tipe C Pantai Hambaang Terminal Tipe C Paringin Terminal Tipe C Kandangan Terminal Tipe C Rantau By Pass	Hotel Melati, Penginapan Rumah Makan, Depot
Cluster 4 Pesisir Barat	PKLp Batakan PKLp Taksing	Terminal Perdesaan Rencana Pelabuhan Samudera	Penginapan, Depot, Warung
Cluster 5 Pesisir Selatan	PKWp Batulicin - Smp Empat PKLp Kintap PKLp Pagatan PPK Jorong	Bandara Walguson Terminal Tipe C Pagatan Terminal Perdesaan	Hotel Melati, Penginapan, Rumah Makan, Depot
Cluster 6 Terumbu Karang	PKL Kotabaru	Bandara Stagen Terminal Tipe C	Penginapan, Depot, Warung
Cluster 7 Nagara-Amuntai	PKW Amuntai PKL Kandangan	Terminal Tipe B Terminal Tipe C Terminal Perdesaan	Hotel Bintang, Hotel Melati, Penginapan, Restoran, Rumah Makan, Depot
Cluster 8 Balangan-Tabalong	PKL Paringin PKWp Tanjung	Bandara Waruikin Terminal Tipe B Terminal Tipe C	Hotel Bintang, Hotel Melati, Penginapan, Restoran, Rumah Makan, Depot

Sumber : RIPPDA Prov. Kalimantan Selatan tahun 2013-2028

KEBIJAKAN RIPPDA PROV. KALIMANTAN SELATAN 2013-2028

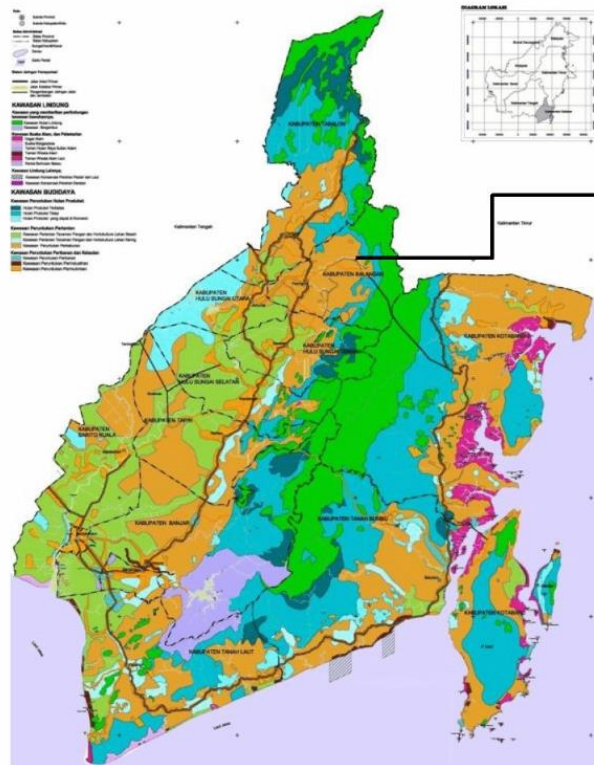
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Prov. Kalimantan Selatan Mengembangkan **8 Cluster Destinasi Unggulan**, yaitu :



Gambar 85. 8 Cluster Destinasi Unggulan Kalsel 2013-2028

KEBIJAKAN RIPPDA PROV. KALIMANTAN SELATAN 2013-2028

Kawasan **Strategis Pariwisata** di Kabupaten Balangan, ditinjau regional **Prov. Kalimantan Selatan**

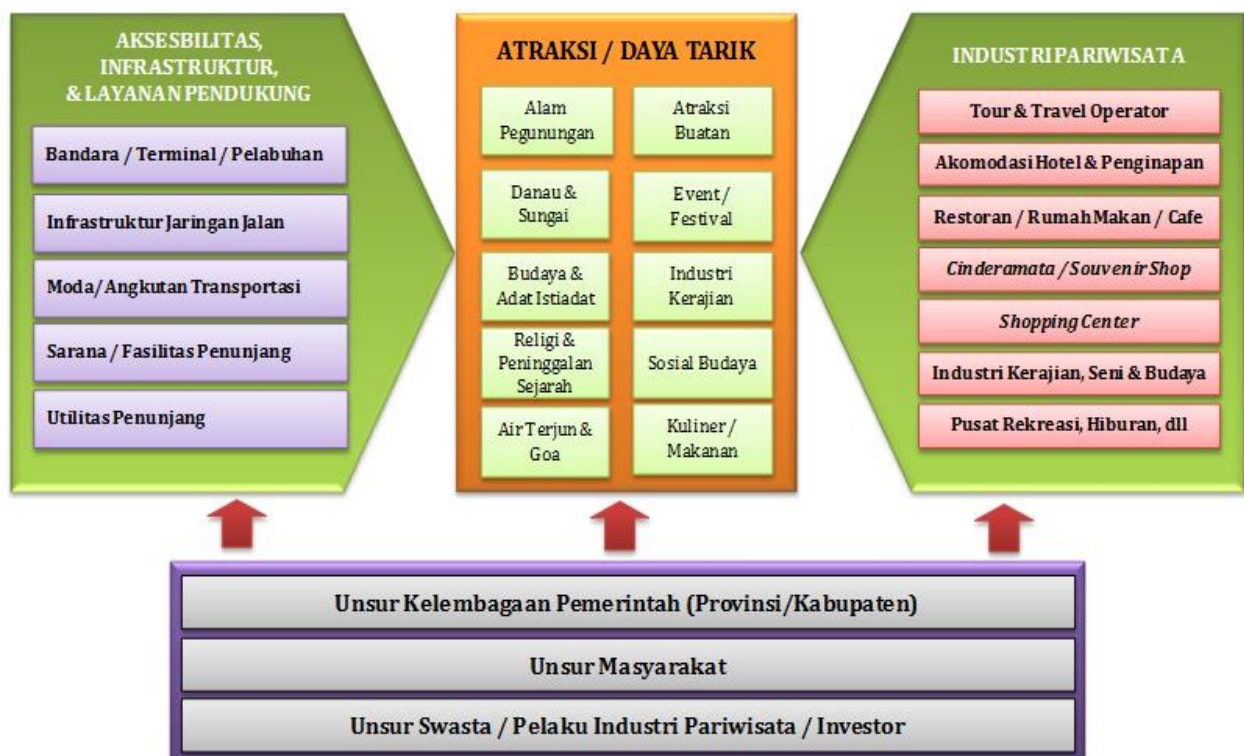


Kabupaten/ Kota	Kawasan Strategis Pariwisata		
	Berbasis Ekonomi	Berbasis Sosial Budaya	Berbasis Lingkungan
Balangan	Kawasan Kota Tani Agropolitan Batu Mandi	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Komunitas Adat Dayak Pitap dan Adat Halong. Pusat Kegiatan Wisata Religius Datuk Kandang Haji (Juai). 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Desa Wisata Danau Baruh Bahinu. Kawasan Ekowisata Pegunungan Meratus

Sumber : RIPPDA Prov. Kalimantan Selatan tahun 2013-2028



Gambar 86. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) di Balangan



Gambar 87. Struktur Industri Pariwisata di Kabupaten Balangan

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Balangan, meliputi :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata andalan di Kabupaten Balangan;
- b. Meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Balangan melalui berbagai pemasaran pariwisata daerah Kabupaten Balangan Secara Efektif & Efisien;
- c. Mewujudkan pertumbuhan industri pariwisata yang mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang sinergis dengan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Balangan, meliputi :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi wisata, serta terkelolanya secara optimal seluruh objek, daya tarik wisata dan atraksi wisata di Kabupaten Balangan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata secara merata;
- c. Peningkatan pergerakan kunjungan wisata ke Kabupaten Balangan secara simultan;
- d. Optimalisasi promosi dan pemasaran destinasi wisata, daya tarik dan atraksi wisata;
- e. Pertumbuhan berbagai sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat secara luas dan berdaya saing;
- f. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Mewujudkan pertumbuhan industri pariwisata yang mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- h. Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi kelembagaan pengelolaan kepariwisataan secara profesional dan efisien, baik dari level pemerintah daerah, swasta hingga level masyarakat.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. Pembangunan destinasi pariwisata;
- b. Pembangunan industri pariwisata;
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

(1) Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Kawasan Pariwisata Dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Merencanakan pengembangan pembangunan kawasan pariwisata Daerah dan kawasan strategis pariwisata Daerah.
 - b) pengelompokan objek dan daya tarik wisata pada satuan kawasan wisata yang memiliki pusat-pusat kegiatan dan mempunyai keterkaitan sirkulasi jalur wisata.
 - c) Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
 - d) Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
 - e) Melaksanakan program pembangunan dan pengendalian pembangunan industri pariwisata daerah.
- b. Pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu:
 - a) Revitalisasi obyek dan daya tarik wisata unggulan daerah, serta perbaikan dan penguatan daya tarik wisata yang belum berkembang.

- b) Merintis pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan dan pengembangan pariwisata
- c) Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar pariwisata.
- c. Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kepariwisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Pembangunan fasilitas kepariwisataan dan perintisan pengembangan fasilitas-fasilitas baru di kawasan wisata.
 - b) Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan yang memiliki minat dan kebutuhan khusus.
 - c) Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata;
 - d) Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta;
 - e) Merintis dan pengembangan fasilitas umum untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata.
 - f) Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (Public Private Partnership);
 - g) Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
 - h) Pengendalian pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - i) Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pariwisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Mengembangkan konektivitas sistem transportasi di sepanjang koridor pariwisata utama/prioritas khususnya dalam lingkup transportasi darat;
 - b) Pengembangan prasarana transportasi pendukung pembangunan kepariwisataan
 - c) Mengembangkan sarana/moda transportasi wisata sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan;
 - d) Mengembangkan moda transportasi penghubung antara daya tarik wisata sesuai dengan rute jalur dan paket wisata.
- e. Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif dan Daya Tarik Wisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Pengembangan dan diversifikasi keragaman produk dan daya tarik wisata;
 - b) Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pendukung industri kepariwisataan;
 - c) Peningkatan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan;
 - d) Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah;
 - e) Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi kegiatan wisata;
 - f) Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
 - g) Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah.
- f. Peningkatan Kapasitas Dan Peran Masyarakat, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b) Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - c) Peningkatan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan;
 - d) Meningkatkan kapasitas/keterampilan/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;

- e) Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
 - f) Penguatan kesadaran wisata kepada masyarakat sekitar objek lokasi wisata;
 - g) Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan;
 - h) Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.
- g. Peningkatan Kebijakan dan Kemudahan Investasi, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) Penegakatan regulasi dan kebijakan pembangunan pariwisata;
 - b) Meningkatkan pemberian keringanan pajak secara tertutup untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
 - c) Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
 - d) Mengembangkan penguatan peran birokrasi di bidang pariwisata;
 - e) Mengembangkan penyederhanaan peraturan yang menghambat perizinan.
- h. Pengendalian Implementasi Pembangunan Pariwisata, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
- a) Penegakan regulasi pembangunan pariwisata daerah;
 - b) Monitoring dan evaluasi berkesinambungan terhadap program pembangunan pariwisata;
 - c) Pengendalian pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi :
- a. Peningkatan keragaman dan kualitas produk-produk usaha kepariwisataan daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Meningkatkan penganeekaragaman dan kualitas produk-produk dan daya tarik usaha kepariwisataan daerah;
 - b) Mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai selling point secara khusus;
 - c) Meningkatkan daya saing usaha kepariwisataan dan berwawasan lingkungan;
 - d) Menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap objek wisata mempunyai kekhasan sendiri;
 - e) Menciptakan perkembangan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif.
 - b. Peningkatan fasilitas regulasi dan insentif, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha kepariwisataan;
 - b) Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha kepariwisataan; dan
 - c) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan usaha di kawasan pariwisata.
 - d) Monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana dan realisasi pembangunan pariwisata daerah
 - e) Pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah
 - f) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat
 - g) Mengembangkan regulasi dan pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - h) Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i) Meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata.
 - c. Penguatan struktur usaha kepariwisataan daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Memfasilitasi pembentukan organisasi industri kepariwisataan; dan
 - b) Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah pariwisata.
 - d. Penguatan kemitraan usaha kepariwisataan daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Mengembangkan pola-pola kerjasama industri pariwisata lintas sektor; dan
 - b) Mengembangkan pola-pola kerjasama antar wilayah.

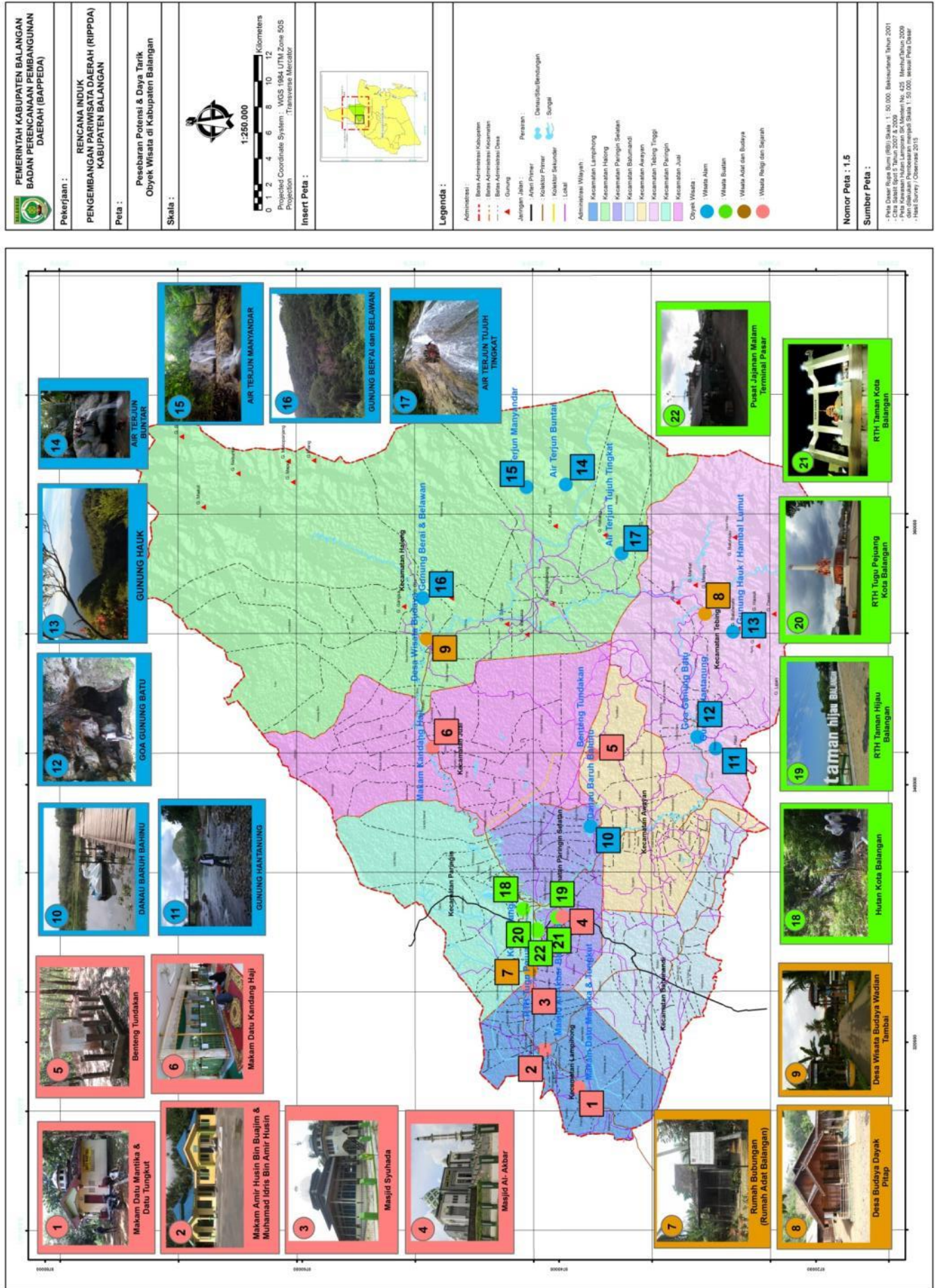
- (3) Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi :
- a. Pemetaan dan analisis peluang pasar, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b) Merencanakan dan mengembangkan strategi baru pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c) Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan wisata;
 - d) Akselerasi pergerakan dan kunjungan wisatawan;
 - e) Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan;
 - f) Memberikan intensif khusus wisata bagi wisatawan.
 - b. Pemantapan segmen pasar wisatawan, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Pemantapan segmen pasar wisatawan massal (Mass Market) dan pengembangan segmen ceruk pasar (Niche Market) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
 - b) Memantapkan segmen pasar wisatawan massal (Mass Market) dengan fokus pengembangan segmen tertentu seperti keluarga, komunitas (hobbies), tradisi budaya, serta segmen ceruk pasar (Niche Market) dengan fokus pengembangan segmen lainnya;
 - c) Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar potensial;
 - d) Mengembangkan promosi berbasis tema dan segmentasi kunjungan wisatawan;
 - e) Mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus.
 - c. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
 - b) Peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;
 - c) Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi, baik media cetak maupun media elektronik;
 - d) Mengembangkan E-Marketing;
 - e) Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
 - f) Mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan wisata dalam jumlah besar.
 - d. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
 - b) Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pemasaran bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan;
 - c) Memfasilitasi pembentukan organisasi kelembagaan pendukung pariwisata.
 - e. Peningkatan promosi pergerakan wisatawan, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Memberlakukan 5 hari kerja; dan
 - b) Menyelenggarakan aneka program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
 - c) Menyelenggarakan event ataupun festival pariwisata daerah secara berkelanjutan.
- (4) Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, meliputi :
- a. Restrukturisasi organisasi kepariwisataan di tingkat daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Mereposisi dan restrukturisasi urusan pariwisata di lingkungan pemerintah daerah;
 - b) Mengembangkan peran birokrasi di bidang pariwisata;
 - c) Revitalisasi struktur, elemen dan komponen organisasi yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan.
 - b. Optimalisasi koordinasi antar dinas/instansi dengan pemerintah daerah, dengan strategi:
 - a) Koordinasi antar dinas dengan lembaga pemerintahan daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan;

- b) Melaksanakan program partisipatif dan koordinasi lintas sektor.
- c. Optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat, dengan strategi yang ditempuh :
 - a) Memperkuat peran serta swasta dan dunia usaha dalam akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui Public-Private Partnership / Good Tourism Governance;
 - b) Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.
- d. Optimalisasi organisasi kemitraan usaha pariwisata antar pemerintah daerah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
 - b) Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.
- e. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM Pemerintah, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Optimalisasi dan perbaikan kapasitas SDM di daerah;
 - b) Memetakan dan distribusi kualifikasi kompetensi SDM di bidang pariwisata.
- f. Akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan, dengan strategi yang ditempuh yaitu :
 - a) Memperkuat institusi pendidikan pariwisata; dan
 - b) Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- g. Standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidikan, dengan strategi yang ditempuh :
 - a) Sertifikasi profesi tenaga pendidik;
 - b) Akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
- h. Optimalisasi kuantitas SDM industri pariwisata, dengan strategi yang ditempuh :
 - a) Perancangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata;
 - b) Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata;
 - c) Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

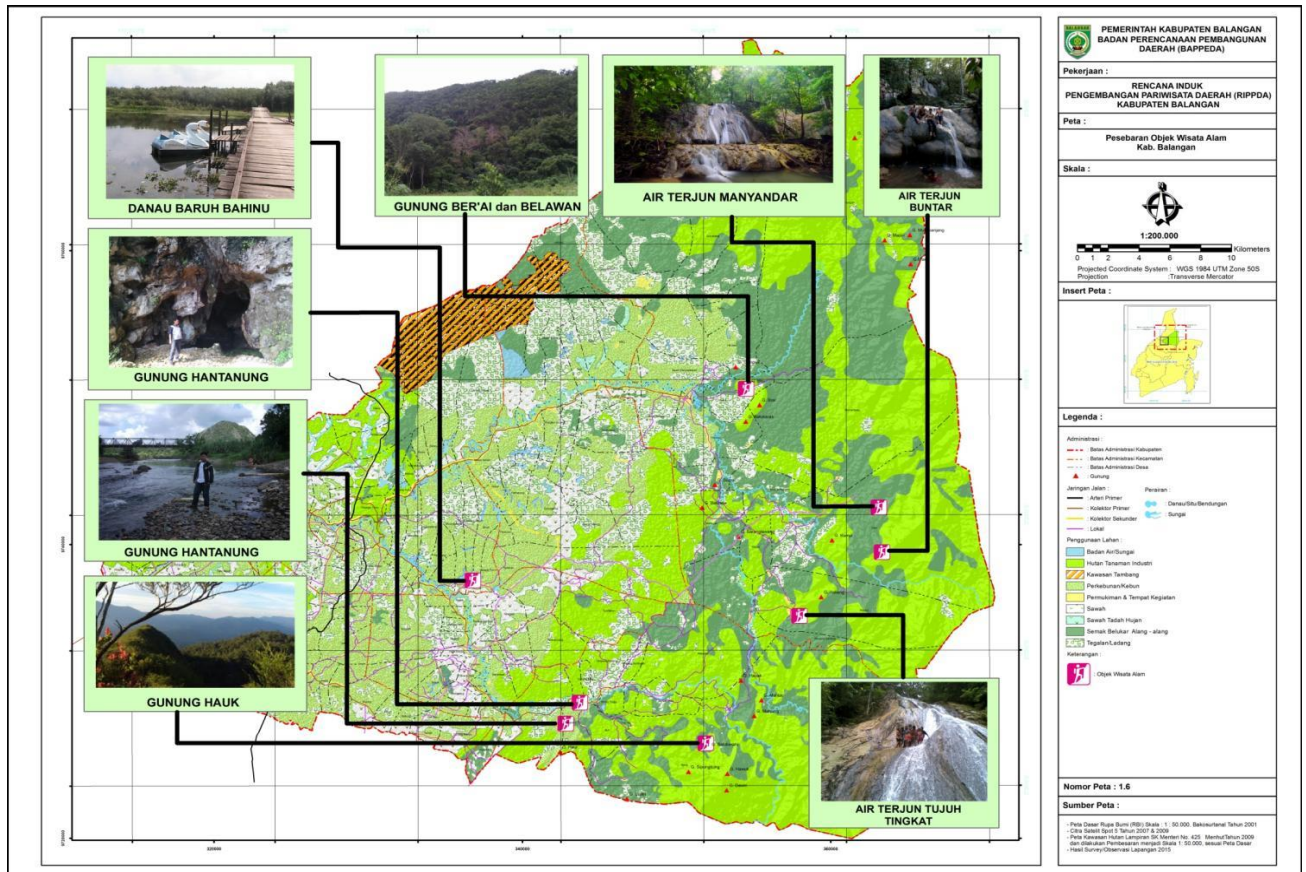
Tabel 28. Rencana Wilayah Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Balangan

WPP	Cakupan Wilayah	ODTW		Pusat Pelayanan
		Tujuan Utama	Obyek Wisata Penunjang	
WPP Timur	- Kecamatan Halong - Kecamatan Juai	- Wisata Budaya Wadian Tambai	- Air Terjun Manyandar - Air Terjun Buntar - Air Terjun 7 Tingkat - Gunung Ber'ai & Belawan - Makam Datu Kandang Haji	- Kecamatan Halong
WPP Selatan	- Kecamatan Tebing Tinggi - Kecamatan Awayan	- Wisata Budaya Dayak Pitap	- Gunung Hawk / Hambal Lumut - Gunung Hantanung - Goa Gunung Batu - Benteng Tundakan	- Kecamatan Awayan
WPP Barat	- Kecamatan Paringin - Kecamatan Paringin Selatan - Kecamatan Lampihong - Kecamatan Batumandi	- Danau Baruh Bahinu Dalam	- Masjid Al-Akbar Balangan - RTH Taman Hijau Balangan - RTH Taman Kota Balangan - RTH Tugu Perjuangan - Pusat Jajajan Malam Terminal Pasar - Makam Amir Husin Bin Buajim & Muhammad Idris Bin Amir Husin - Makam Datu Martika & Datu Tungkut - Masjid Syuhada - Rumah Bubungan (Rumah Adat Banjar) - Hutan Kota Balangan	- Kecamatan Paringin Selatan

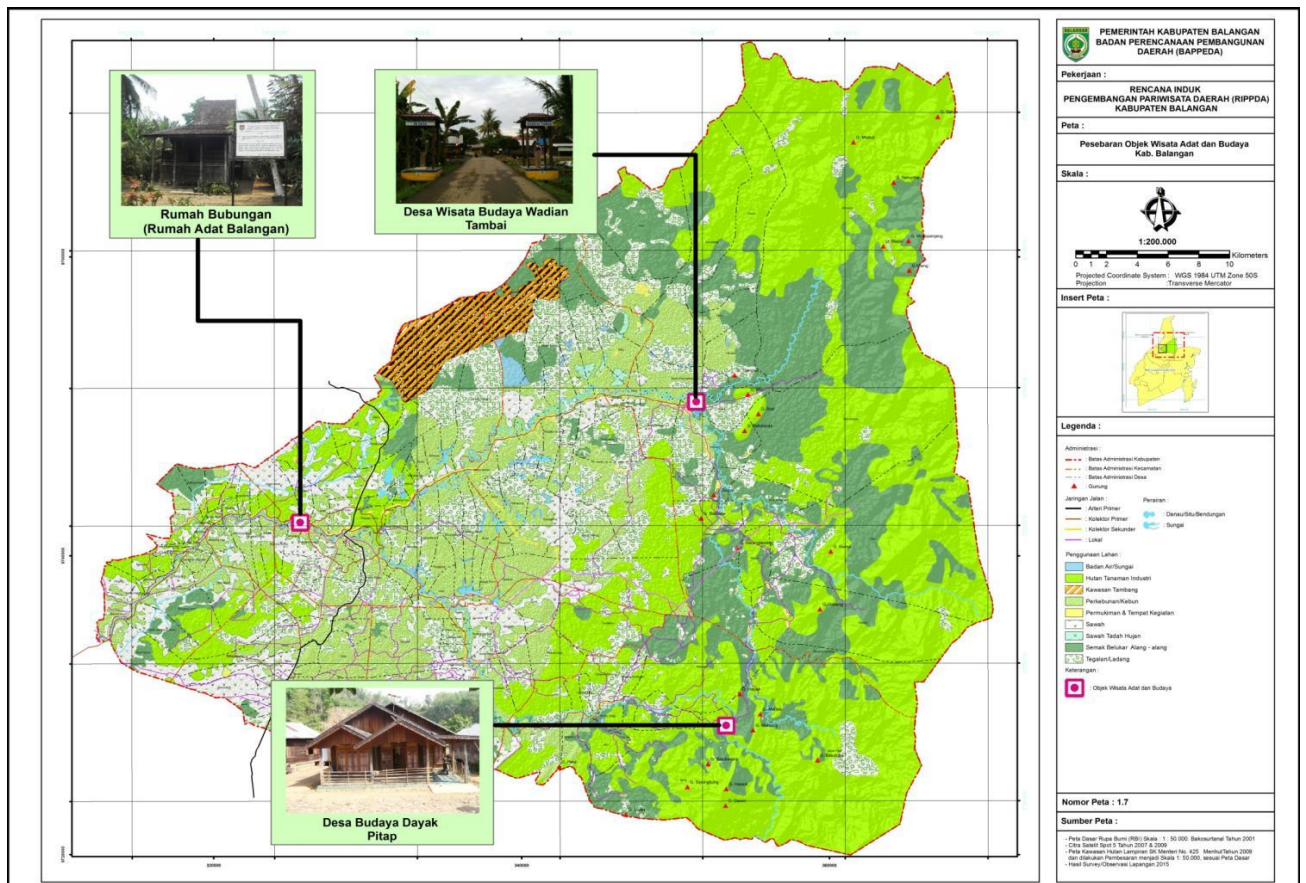
Sumber : Hasil Rencana (RIPDDA)



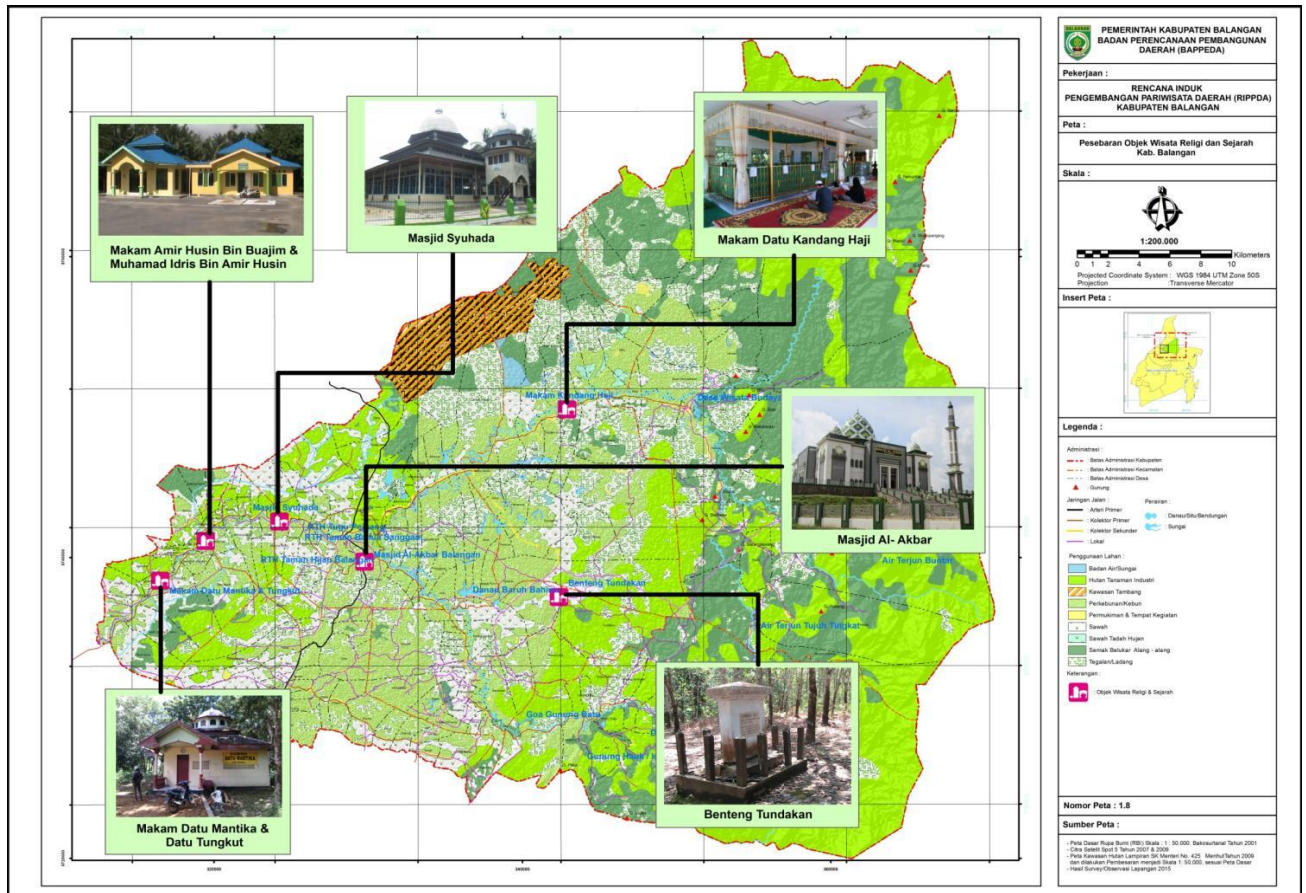
SEBARAN POTENSI DAN DAYA TARIK WISATA ALAM



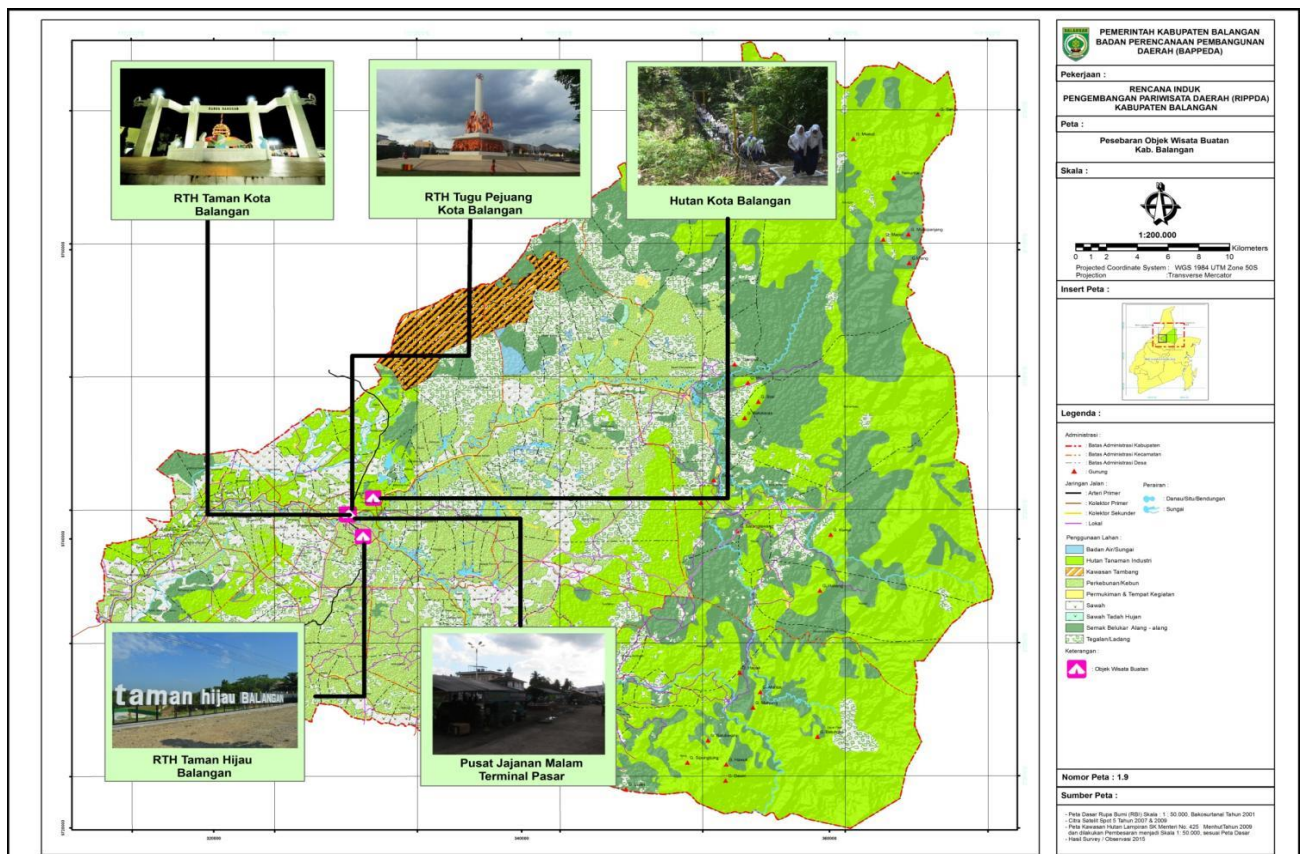
SEBARAN POTENSI DAN DAYA TARIK WISATA ADAT DAN BUDAYA



SEBARAN POTENSI DAN DAYA TARIK WISATA RELIGI DAN SEJARAH



SEBARAN POTENSI DAN DAYA TARIK BUATAN



Rencana Tema Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Rencana tema pengembangan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Balangan mencakup :

- a. Tema Utama Pengembangan; dan
- b. Tema Penunjang Pengembangan;

Tabel 29. Rencana Tema Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Balangan

WPP	Tema Utama Pengembangan	Tema Penunjang Pengembangan
WPP Timur	Pengembangan <i>Ekowisata dan Budaya</i> . Tujuan utama destinasi; - Wisata Budaya Wadian Tambai Destinasi penunjang; - Air Terjun Manyandar - Air Terjun Buntar - Air Terjun 7 Tingkat - Gunung Ber'ai & Belawan - Makam Datu Kandang Haji	Tema Penunjang Pengembangan; - Pengembangan Ekowisata (Ecotourism/Wild Tourism) Kawasan Pegunungan Meratus - Pengembangan Wisata Sosial Budaya (Culture Tourism) - Pengembangan Wisata Sejarah & Religi - Pengembangan Wisata Petualangan & Penjelajahan Alam Minat Khusus - Pengembangan Wisata Edukasi & Penelitian
WPP Selatan	Pengembangan <i>Ekowisata dan Budaya</i> . Tujuan utama destinasi; - Wisata Budaya Dayak Pitap Destinasi penunjang; - Gunung Hauk / Hambal Lumut - Gunung Hantanung - Goa Gunung Batu - Benteng Tundakan	Tema Penunjang Pengembangan; - Pengembangan Ekowisata (Ecotourism/Wild Tourism) Kawasan Pegunungan Meratus - Pengembangan Wisata Sosial Budaya (Culture Tourism) - Pengembangan Wisata Sejarah & Religi - Pengembangan Wisata Petualangan & Penjelajahan Alam Minat Khusus - Pengembangan Wisata Edukasi & Penelitian
WPP Barat	Pengembangan <i>Wisata Bahari dan Buatan</i> . Tujuan utama destinasi; - Danau Baruh Bahinu Dalam Destinasi penunjang; - Masjid Al-Akbar Balangan - RTH Taman Hijau Balangan - RTH Taman Kota Balangan - RTH Tugu Perjuangan - Pusat Jajajan Malam Terminal Pasar - Makam Amir Husin Bin Buajim & Muhammad Idris Bin Amir Husin - Makam Datu Martika & Datu Tungkut - Rumah Bubungan (Rumah Adat Banjar) - Masjid Syuhada - Hutan Kota Balangan	Tema Penunjang Pengembangan; - Pengembangan Desa Mina Wisata Danau - Wisata Budidaya Perairan Danau - Pengembangan Wisata Sosial Budaya (Culture Tourism) - Pengembangan Wisata Sejarah & Religi - Pengembangan Wisata Rekreasi Keluarga - Pengembangan Wisata Olahraga & Kesehatan - Pengembangan Wisata Edukasi & Penelitian - Pengembangan Wisata Mice & Konvensi - Pengembangan Pusat Wisata Kuliner

Sumber : Hasil Rencana, 2015

Pekerjaan :

RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPDDA)
KABUPATEN BALANGAN

Peta :

Rencana Tema Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten Balangan

Skala :



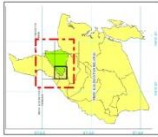
1:300,000



Projected Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 50S

Projection : Transverse Mercator

Insert Peta :



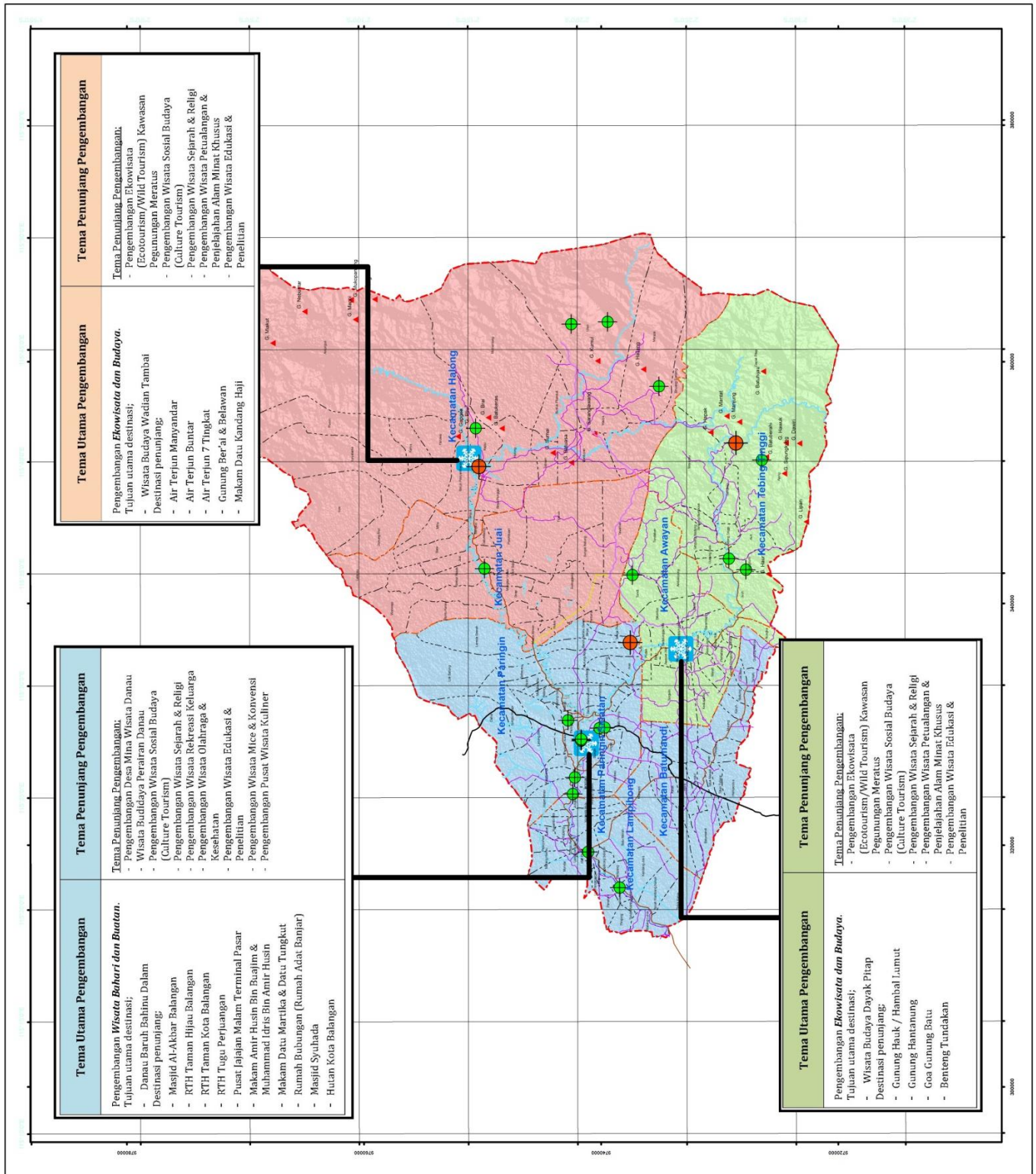
Legenda :

- Administrasi :**
 - - - - - : **Stata Administrasi Kesehatan**
 - - - - - : **Stata Administrasi Keamanan**
 - - - - - : **Stata Administrasi Desa**
 - - - - - : **Quining**
Jaringan Jalan :
 - - - - - : **Antar Primer**
 - - - - - : **Sektor Primer**
 - - - - - : **Sektor Sekunder**
 - - - - - : **Lokal**
 - - - - - : **Dinas/Instansi/Berorganisasi**
 - - - - - : **Sungai**
Wilayah Prioritas Pengembangan :
 - - - - - : **WPP Baraz**
 - - - - - : **WPP Solahan**
 - - - - - : **WPP Timor**
Pusat Pelayanan :
 - - - - - : **Pusat WPP**
Tujuan Wisata :
 - - - - - : **Ziyah Wisata Utama**
 - - - - - : **Ziyah Wisata Penunjang**

Nomor Peta : 1.12

Sumber Peta :

- Peta Dasar Rupa Bumi (RB) Skala : 1 : 50.000. Bakosurtanal Tahun 2001
- Citra Satellite Spot 5 Tahun 2007 & 2009
- Peta Kawasan Hutan Lampsiran SK Menteri No. 425 Menhut Tahun 2009
- Data Koordinat dan Luas Wilayah Desa dan Kelurahan Kecamatan Peta Dasar dan dilakukan Pembatasan menjadi Skala : 1 : 50.000, sesuai Peta Dasar
- Hasil Survey/Observasi Lapangan 2015
- Hasil Proses Analisa 2015



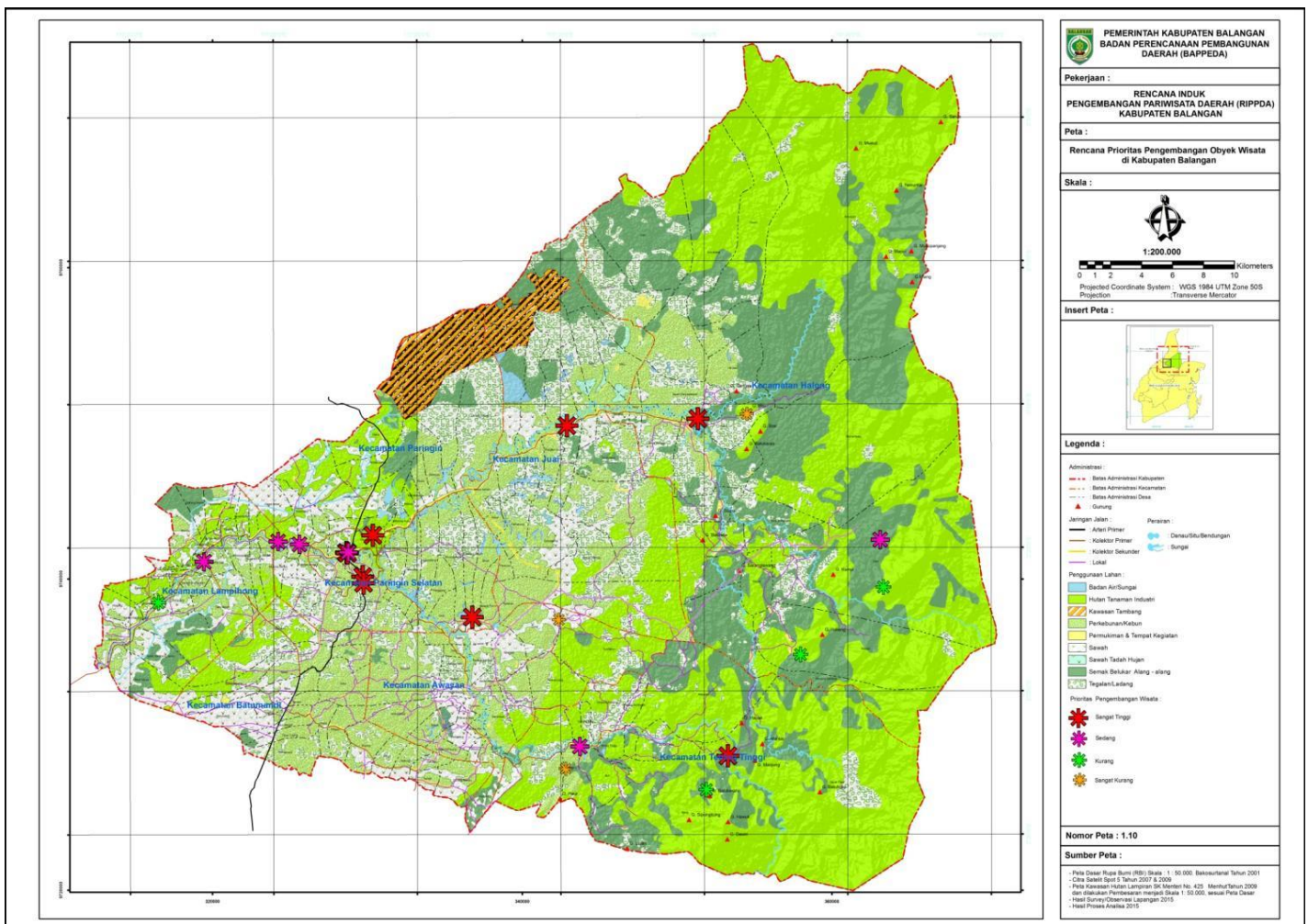
Tabel 30. Klasifikasi Prioritas Obyek Daya Tarik Pariwisata Di Kabupaten Balangan

No	Obyek Wisata	Klasifikasi
Wisata Alam		
1	Danau Baruh Bahinu	Sangat Tinggi
2	Air Terjun Manyandar	Sedang
3	Gunung Ber'ai & Belawan	Sangat Kurang
4	Gunung Hawk / Hambal Lumut	Kurang
5	Gunung Hantanung	Sangat Kurang
6	Goa Gunung Batu	Sedang
7	Air Terjun Buntar	Kurang
8	Air Terjun 7 Tingkat	Kurang
Wisata Budaya		
1	Desa Wisata Budaya Wadian Tambai	Sangat Tinggi
2	Desa Budaya Dayak Pitap	Sangat Tinggi
3	Rumah Bubungan (Rumah Adat Banjar)	Sedang
Wisata Religi & Sejarah		
1	Makam Datu Kandang Haji	Sangat Tinggi
2	Makam Amir Husin Bin Buajim & M. Idris Bin Amir Husin	Sedang
3	Makam Datu Martika & Datu Tungkut	Kurang
4	Masjid Al-Akbar Balangan	Sangat Tinggi
5	Benteng Tundakan	Sangat Kurang
6	Masjid Syuhada	Sedang
Wisata Buatan		
1	RTH Taman Hijau Balangan	Sangat Tinggi
2	RTH Taman Kota Balangan	Sangat Tinggi
3	RTH Tugu Perjuangan	Sedang
4	Pusat Jajanan Malam Terminal Pasar	Sangat Tinggi
5	Hutan Kota Balangan	Sangat Tinggi

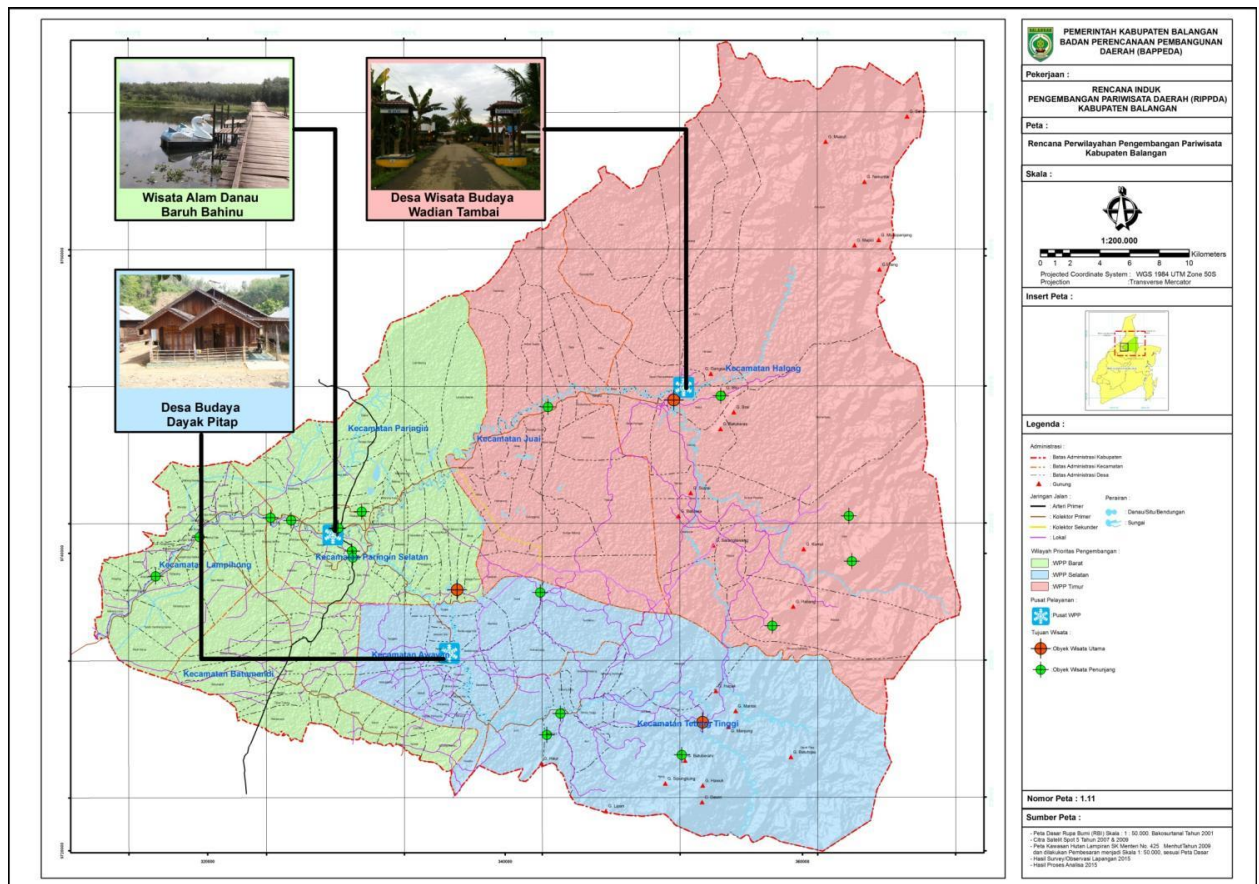
Sumber : Hasil Analisa, 2015

Gambar 94.

Rencana Prioritas Pengembangan Obyek Wisata



Gambar 95. Obyek Wisata Utama & Perwilayahan Pengembangan Pariwisata



Tabel 31. Klasifikasi Prioritas Sangat Tinggi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

Wisata Alam	1. Danau Baruh Bahinu	Destinasi Prioritas Jangka Pendek
Wisata Budaya	1. Desa Wisata Budaya Wadian Tambai 2. Desa Budaya Dayak Pitap	Destinasi Prioritas Jangka Pendek - Menengah
Wisata Religi dan Sejarah	1. Makam Datu Kandang Haji 2. Masjid Al-Akbar Balangan	- -
Wisata Buatan	1. RTH Taman Hijau Balangan 2. RTH Taman Kota Balangan 3. Pusat Jajanan Malam Terminal Pasar 4. Hutan Kota Balangan	Rekreasi Kota Rekreasi Kota Rekreasi Kota Rekreasi Kota

Dari 8 ODTW dengan Klasifikasi Prioritas Sangat Tinggi, masing-masing memiliki kondisi :

1. Wisata Buatan adalah Bagian dari Pengembangan Perkotaan Paringin yang telah direncanakan, dibangun, beroperasi dan dipelihara melalui Pembangunan Perkotaan:
2. Wisata Religi dan Sejarah telah memiliki Rencana Pengembangan & Pembangunan, serta Rencana Pengelolaan , karena telah beroperasi.
3. Wisata Budaya, merupakan bagian dari Pengembangan Ekowisata Pegunungan Meratus, memiliki orientasi pengembangan jangka menengah, dan menjadi bagian dari Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP).
4. Wisata Alam, Danau Baruh Bahinu, adalah satu-satunya Wisata Alam dengan jarak dan waktu tempuh yang relatif dekat dari Pusat Perkotaan Paringin, memiliki Potensi Pasar yang besar dan belum dikelola secara maksimal.

4.2. PENGELOLAAN INVESTASI PARIWISATA

Investasi Sektor Pariwisata, dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Investasi Infrastruktur Dasar dan Prasarana Sarana Berupa Fasilitas Publik, melalui Investasi Publik (Pengeluaran Pemerintah yang sebagian besar adalah untuk Modal Investasi)
2. Investasi Prasarana Sarana Penunjang Kegiatan Pariwisata dan Tematnya Berupa Fasilitas Wisata, melalui Investasi Privat (Modal Investasi dan Modal Kerja Sektor Swasta dan Masyarakat)

Investasi Pariwisata dapat dilakukan melalui Pengembangan Kemitraan Usaha Kepariwisata. Pengembangan kemitraan usaha kepariwisataan mencakup aspek-aspek pengembangan produk, penyediaan sumber daya manusia, dan pemasaran yang meliputi :

- a. Kemitraan usaha sarana akomodasi wisata;
- b. Kemitraan usaha sarana restoran/rumah makan;
- c. Kemitraan usaha jasa pariwisata; dan
- d. Kemitraan usaha daya tarik wisata;

Kerjasama Wisata. Bentuk kerjasama pariwisata dengan menjalin kerjasama antar stakeholder seperti instansi daerah, pemangku kepentingan, pelaku bisnis wisata, serta masyarakat dengan cara :

1. Pembuatan kerjasama yang saling menguntungkan;
2. Pembuatan *Linkage System* yang signifikan antar pelaku wisata; dan
3. Kesamaan dalam program pengembangan dengan biro perjalanan wisata.

Pengelolaan Destinasi dan Daya Tarik Wisata Antara Pemerintah Kabupaten Balangan, BUMD, Sektor Swasta, BUMDes, Koperasi dan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Balangan/ BUMD	UPT Obyek Wisata/ Sektor Swasta	BUMDes/ Koperasi
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan kesejahteraan rakyat Menghapus kemiskinan Menyiapkan regulasi dan kepastian hukum bagi pelaku jasa wisata Membangun prasarana sarana dasar lingkungan dan kawasan Mempromosikan obyek dan kawasan secara berkelanjutan Membuka akses pasar yang lebih luas melalui Jaringan Pariwisata Regional dan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola Obyek dan Kawasan Wisata secara berkelanjutan Menjaga dan Meningkatkan Target Wisatawan Menggerakkan sistem pariwisata Memasarkan potensi kawasan Membuka akses pasar yang lebih luas melalui Jaringan Pelaku Jasa Wisata Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesejahteraan rakyat Mengatasi Pengangguran Melestarikan Alam, Lingkungan dan Sumberdaya Memajukan Kebudayaan Menjadi operator dan tenaga kerja pariwisata Penerapan Sadar Wisata dan Sapta Pesona, serta sebagai tuan rumah yang baik

Kerjasama dalam mempromosikan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Balangan dapat dilakukan oleh pengelola dan pihak-pihak lainnya, meliputi :

1. Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Perhubungan, meliputi :
 - a. Mendorong perusahaan transportasi nasional untuk menyediakan pelayanan transportasi dari dan ke Kabupaten Balangan;
 - b. Menyederhanakan perizinan kunjungan dan penyediaan layanan angkutan untuk mendukung pengembangan wisata;
 - c. Meningkatkan kerjasama bilateral dengan Kabupaten atau propinsi lain yang merupakan sumber pasar wisatawan;
 - d. Mempercepat realisasi peningkatan kapasitas terminal di daerah tujuan wisata;
 - e. Meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
2. Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Pertambangan dan Energi, meliputi :
 - a. Mengembangkan program inventarisasi, penelitian, dan dukungan dalam pemanfaatan kawasan bekas penambangan sebagai daya tarik wisata; dan
 - b. Mendukung pelestarian situs sejarah, purbakala dan komunitas budaya pada daerah penambangan berikut daerah lingkungannya.
3. Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum, meliputi :
 - a. Mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial, melalui peningkatan prasarana jalan nasional, propinsi dan Kabupaten;
 - b. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional, propinsi dan Kabupaten serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi; dan
 - c. Mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.
4. Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Informasi dan Komunikasi meliputi :
 - a. Penyediaan informasi dan publikasi dengan berbagai bentuk media komunikasi;
 - b. Meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap objek wisata; dan
 - c. Turut mensosialisasikan penanaman nilai-nilai budaya bangsa melalui media cetak dan elektronik,
5. Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :
 - a. Mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif pariwisata; dan
 - b. Meningkatkan kerjasama di bidang promosi dalam wadah *Tourism Trade Investment*.
6. Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, meliputi :
 - a. Melakukan program promosi investasi di dalam maupun di luar negeri secara terpadu dengan bidang pariwisata;
 - b. Menyusun database serta informasi peluang investasi di bidang pariwisata; dan
 - c. Mempermudah pelayanan perizinan usaha pariwisata.
7. Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Kehutanan, meliputi :
 - a. Memfasilitasi pemanfaatan kawasan konservasi di zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, untuk pengembangan ekosistem dan ekowisata; dan
 - b. Mengembangkan dan menyiapkan basis data dan sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan.
8. Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Kesehatan, meliputi :
 - a. Meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan;
 - b. Mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandart internasional khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi.
9. Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan aparat Kepolisian, meliputi :
 - a. Meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata;

- b. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal;
- c. Melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara tegas, khususnya dalam kejahatan narkoba; dan
- d. Meningkatkan peran aktif POLRI dalam menjaga keamanan wilayah wisata khususnya dari ancaman terorisme.

Pembangunan Investasi Bidang Pariwisata. Dalam mendorong pertumbuhan industri kepariwisataan di Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan dengan tahapan yang sesuai dengan rumusan kebijakan dan strategi pengembangan aspek investasinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata;
 - b. Peningkatan Kemudahan Investasi Di Bidang Pariwisata;
 - c. Peningkatan Promosi Investasi Di Bidang Pariwisata.
- (1) Strategi pengembangan dalam peningkatan insentif investasi bidang pariwisata mencakup :
 - a. Meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal (nasional ataupun asing) di sektor pariwisata; dan
 - b. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal (nasional ataupun asing) asing di sektor pariwisata.
 - (2) Strategi pengembangan dalam peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata mencakup :
 - a. Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
 - (3) Strategi pengembangan dalam peningkatan promosi investasi bidang pariwisata mencakup :
 - a. Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. Meningkatkan promosi investasi kabupaten Balangan di bidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 - c. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Strategi dan Rencana Pengembangan Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata

Strategi	Rencana
1. Meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal (nasional ataupun asing) di sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi di bidang kepariwisataan • Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa
2. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal (nasional ataupun asing) asing di sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya dalam investasi di bidang kepariwisataan • Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor pariwisata • Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanam Modal akan pentingnya pembayaran pajak

Sumber : Hasil Rencana

Strategi dan Rencana Pengembangan Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

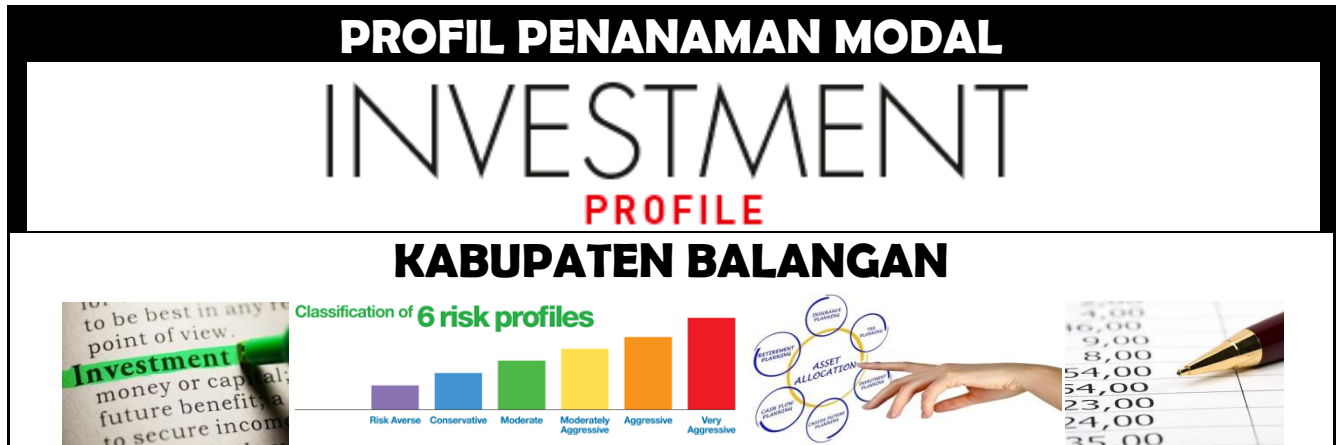
Strategi	Rencana
1. Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata • Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata
2. Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja • Pengurangan / penyederhanaan jenis peraturan perijinan

Sumber : Hasil Rencana

Strategi dan Rencana Pengembangan Peningkatan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata

Strategi	Rencana
1. Menyediakan Informasi Peluang Investasi Di Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan informasi potensi dan daya tarik pariwisata • Penyediaan profil investasi pariwisata Kabupaten Balangan
2. Meningkatkan Promosi Investasi Kabupaten Balangan Di Bidang Pariwisata baik Di Dalam Negeri maupun Di Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan • Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di Kabupaten Balangan • Pengembangan berbagai <i>marketing tools</i> investasi dari kawasan pengembangan di Kabupaten Balangan • promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet • Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan • Penetapan wilayah atau negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata • <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke wilayah ataupun negara potensial
3. Meningkatkan Sinergi Promosi Penanaman Modal Di Bidang Pariwisata Dengan Sektor Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi

Sumber : Hasil Rencana



5 PROFIL INVESTASI PARIWISATA

5.1. POTENSI DAN PELUANG SEKTOR PARIWISATA

Potensi dan Peluang di Sektor Pariwisata merupakan Potensi Investasi Pariwisata dan Peluang Usaha Jasa di Bidang Pariwisata, yang digambarkan melalui Destinasi Wisata/ Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di Kabupaten Balangan pada umumnya dan Destinasi Prioritas/ Unggulan pada khususnya.

- Kebutuhan Investasi Sektor Pariwisata Kabupaten dan Destinasi Prioritas
- Profil Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas/ Unggulan yang dikembangkan Dalam Jangka Pendek dan Menengah



Gambar 96. Ragam Daya Tarik & Destinasi Wisata Kabupaten Balangan

No	Nama Obyek	Alamat	Kategori
1	Mesjid "Suhada Monumen Perjuangan	Desa Hujan Mas – Paringin Kel. Paringin. Kota	Religius Sejarah
2	Rumah Banjar Tarangan Danau Baruh Bahinu Mesjid Al-Akbar Taman Hijau Balangan Pahajatan Putri Junjung Buih Makam "Siti Artika"	Ds. Tarangan, Paringin Selatan Ds. Murung Abuin, Baruh Bahinu, Binjai, Tlg Purun Kel. Batu Piring, Paringin Selatan Kel. Batu Piring, Paringin Selatan Ds. Tungkap, Paringin Selatan Ds. Bungin, Paringin Selatan	Sejarah Alam Religius Religius Budaya Religius
3	Kubah "Datu Martika" Kubah "Amir"	Ds. Kandang Jaya, Lampihong Ds. Simpang Tiga, Lampihong	Religius Religius
4	Siruo Batu Mandi Mandali Tiwadak Pengajian "Nurul Muhibbin"	Batu Mandi Batu Mandi Batu Mandi	Kuliner Kuliner Religius
5	Benteng Tundakan	Awayan	Sejarah
6	Sungsum "Gunung Batu" Gunung "Hantanung" Gunung "Hauk" Arus Deras Nanai	Ds. Sungsum, Tebing Tinggi Tebing Tinggi Tebing Tinggi Tebing Tinggi	Alam Alam Alam Alam
7	Makam "Datu Kandang Haji"	Juai	Religius
8	Air Tejun "Tumate" Air Tejun "Manyandar" Air Tejun "Pemandian Anggang" Air Tejun "Tayak" Air Tejun "Buntar Jalamu" Puncak "Balawana" Gua "Berangin Belawan" Gua "Batu Batulis"	Ds. Angjungan, Halong Ds. Angjungan, Halong Ds. Uren, Halong Ds. Uren, Halong Ds. Marnigang, Halong Ds. Marajai, Halong Ds. Hauwai, Halong Ds. Kapul, Halong Ds. Mantuyan, Halong	Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam

**PUBLIKASI
OBYEK
PARIWISATA
(KABUPATEN
BALANGAN
DALAM
ANGKA)**

**→ Perlu
ditingkatkan
Kuantitas &
Kualitas
Informasinya,
karena dapat
diakses
secara online
dan
merupakan
informasi
Resmi
Pemerintah**

Perkotaan Paringin sebagai Ibukota Kabupaten Balangan terus tumbuh dan berbenah, pembangunan dan investasi bergeliat bangkit. Konsisi ini didukung oleh sektor finansial lembaga keuangan dan pembiayaan, baik perbankan dan non perbankan, seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, BPD Kalsel, BPR Paringin. Lembaga Keuangan Syariah dan sarana lainnya seperti ATM, dan Unit Usaha Mikro. Sektor Properti yang berkembang di Perkotaan tidak hanya terfokus di Pusat Paringin, namun sudah mulai tersebar ke arah Halong, Batumandi hingga Lampihong.



Kondisi ini menguntungkan tidak hanya Pertumbuhan Perkotaan & Properti, namun Pengembangan Kepariwisata dan Usaha Jasa Pariwisata, akomodasi motel, guest house, penginapan/ pondokan, wisma, losmen juga tersedia baik, dan terus berkembang.

Potensi Investasi dan Peluang Usaha pada Sektor Pariwisata, dapat digambarkan atau diperoleh melalui :

1. Rencana Pengembangan Kalender Wisata Kabupaten Balangan
2. Rencana Investasi Pengembangan Fasilitas & Prasarana Sarana pendukung Pariwisata
3. Rencana Investasi Pengembangan Moda Transportasi
4. Pengembangan Kemitraan Usaha pendukung Sektor Pariwisata

AKOMODASI

No	Nama	Kamar	Tempat Tidur	Tenaga Kerja	Lokasi
1	Guest House Pemerintah Kabupaten Balangan				Paringin
2	Penginapan Mulia	21	40	4	Paringin
3	Penginapan Mentaya	10	10	2	Paringin
4	Penginapan Rahmi				Paringin




Hotel Mulia ★



3,0 ★★★★★ 21 ulasan Google

Hotel

Alamat: Jl. Ahmad Yani KM.1, Lingsir, Paringin Sel., Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71611

Telepon: (0526) 2028257

Petunjuk

Losmen Mentaya ★

4,0 ★★★★★ 2 ulasan Google

Hostel

Alamat: Batu Piring, Paringin Sel., Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71612

Petunjuk

AKOMODASI & FASILITAS PENUNJANG

1. Agen Tiket & Perjalanan /Travel
2. Rental Kendaraan/ Mobil
3. Minimarket (Indomaret, Alfamart)

1. [Hotel Mulia](#). Jl. Ahmad Yani KM.1, Lingsir, Paringin Sel. Telp: +62 526 2028257
2. [Wisma Manyandar](#). Bungin, South Paringin,
3. [Losmen Mentaya](#). Batu Piring, South Paringin,
4. [Alif Guest House](#). Bungin, Paringin, Telp: +62 813-5146-7788.
5. [Sewaan Pa Udin Paringin](#). East, Paringin Tim., Paringin

Rental Mobil CV. Salsabilla

Balangan, Kalimantan Selatan



Alamat: Lasung Batu, Paringin, Lasung Batu, Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71612, Indonesia

Rating: 5/5

Telp: +62 852-5279-9444



Jam Operasional:

Monday: Open 24 hours

Tuesday: Open 24 hours

Wednesday: Open 24 hours

Thursday: Open 24 hours

Friday: Open 24 hours

Saturday: Open 24 hours

Sunday: Open 24 hours

Komentar:

(nubunomadulian) 02/05/2017 11:38

cukup membantu untuk wilayah balangan dan sekitar nya untuk klp

Wisma Manyandar

Balangan, Kalimantan Selatan



Alamat: Bungin, South Paringin, Balangan Regency, South Kalimantan 71611, Indonesia

Rating: 3/5

Komentar:

(DikataAntonia) 07/10/2017 12:48

Banyak ruang dalam apartemen yg gratis, no wifi, kamar toilet dilengkapi dengan mirror, ktp, TV dan air panas.



Sewaan Pa Udin Paringin

Balangan, Kalimantan Selatan



Alamat: East, Paringin Tim., Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71611, Indonesia

Rating: 3/5

Komentar:

(SuzanaArdians) 05/09/2017 08:28

Suasana tenang



Alif Guest House

Balangan, Kalimantan Selatan

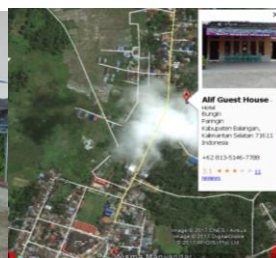
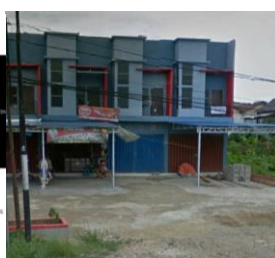


Alamat: Bungin, Paringin, Balangan Regency, South Kalimantan 71611, Indonesia

Rating: 3/5

Telp: +62 813-5146-7788

Komentar:



Rencana kalender wisata adalah salah satu strategi implementasi potensi dan peluang investasi di Sektor Pariwisata, Kalender Wisata bertujuan untuk menentukan waktu-waktu terbaik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Balangan. Wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Balangan akan diarahkan sesuai dengan event-event yang diadakan sehingga melalui penyelenggaraan event festival wisata tersebut mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata.

Tabel 32. Rencana Kalender Wisata Tahunan di Kabupaten Balangan

No	Jenis Atraksi	Acara Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Objek Wisata Penunjang
1	Balangan Art & Culture Parade	<ul style="list-style-type: none"> • Festival Wisata Adat & Budaya Balangan • Aruh Adat Baharin (Festival Panen Raya) • Pameran Industri Kreatif Balangan 	Agustus - November	Desa Wisata Budaya Wadian Tambai (Kecamatan Halong)	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Wisata Budaya Dayak Pitap - Air Terjun Manyandar - Air Terjun Buntar - Air Terjun 7 Tingkat - Makam Datu Kandang Haji
2	HUT Kabupaten Balangan	<ul style="list-style-type: none"> • Karnaval Seni & Budaya Balangan • Perlombaan Seni & Olahraga • Pameran Kuliner & Industri Kreatif • Konser / Pertunjukan • Tasyakuran Akbar Daerah 	April	Kota Paringin	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Al-Akbar Balangan - RTH Taman Hijau Balangan - RTH Taman Kota Balangan - RTH Tugu Perjuangan - Hutan Kota Balangan - Rumah Bubungan (Rumah Adat Banjar) - Pusat Jajanan Malam Terminal Pasar
3	Semarak Ramadhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pagelaran Ragam Kuliner Balangan • Pasar Wadai (Kue / Jajanan) • Perlombaan Kegiatan Keagamaan 	Bulan Ramadhan	Kota Paringin	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Al-Akbar Balangan - Masjid Syuhada - RTH Taman Hijau Balangan - RTH Taman Kota Balangan - Pusat Jajanan Malam Terminal Pasar
4	Festival Minawisata Bahari	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba Dayung • Lomba Memancing • Pagelaran Industri Kreatif Balangan 	Oktober	Danau Baruh Bahinu Dalam (Kec. Paringin Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Taman Hijau Balangan - RTH Taman Kota Balangan - Hutan Kota Balangan - Pusat Jajanan Malam Terminal Pasar
5	Haul Akbar Balangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan/Sejarah Tokoh / Pemuka Agama • Tasyakuran Akbar Daerah 	Bulan Jumaddil Awal	Makam Datu Kandang Haji (Kec. Juai)	<ul style="list-style-type: none"> - Makam Amir Husin Bin Buajim & Muhammad Idris Bin Amir Husin - Makam Datu Martika & Datu Tungkut - Masjid Syuhada
6	HUT NKRI	<ul style="list-style-type: none"> • Karnaval Seni & Budaya Balangan • Perlombaan Seni, Budaya & Olahraga • Konser / Pertunjukan • Pameran Kuliner & 	Agustus	Kota Paringin	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Al-Akbar Balangan - Masjid Syuhada - RTH Taman Hijau Balangan - RTH Taman Kota

		Industri Kreatif			Balangan - RTH Tugu Perjuangan - Pusat Jajanan Malam Terminal Pasar - Benteng Tundakan
7	Jelajah Alam Meratus Balangan	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba Fotografi Alam Meratus • Festival Penanaman Pohon & Reboisasi Alam • Jelajah Alam Pegunungan Meratus • Konser Alam • Perlombaan Olahraga 	Februari	Desa Wisata Budaya Dayak Pitap (Kecamatan Tebing Tinggi)	- Desa Wisata Budaya Wadian Tambai - Air Terjun Manyandar - Air Terjun Buntar - Air Terjun 7 Tingkat - Gunung Ber'ai & Belawan - Makam Datu Kandang Haji - Gunung Hauk / Hambal Lumut - Gunung Hantanung - Goa Gunung Batu - Benteng Tundakan

Sumber : Hasil Rencana (RIPPDA)

Rencana pengembangan fasilitas pariwisata berdasarkan arahan lokasi pengembangan:

Tabel 33. Rencana Pengembangan Fasilitas Pariwisata Pada Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan

WPP	Rencana Pengembangan Fasilitas Pariwisata	Pusat Pelayanan
WPP Barat	- Fasilitas Transfer Moda Transportasi Skala Regional - Fasilitas Akomodasi Wisata (Hotel/Penginapan) - Fasilitas Pusat Informasi Wisata (TIC) - Shelter / Peristirahatan - Restoran / Rumah Makan - Fasilitas Perbelanjaan (cindramata/ souvenir/ kelengkapan perjalanan wisata) - Fasilitas Perbankan & Penukaran Uang - Fasilitas Pengatur / Operator Jasa Perjalanan Wisata - Fasilitas Museum & Gedung Kesenian	- Pusat Perkotaan Paringin
WPP Timur	- Fasilitas Transfer Moda Transportasi skala kabupaten - Fasilitas Akomodasi Wisata (Hotel/Penginapan) - Restoran / Rumah Makan - Shelter / Area Peristirahatan - Fasilitas Perbelanjaan (cindramata/ souvenir/ kelengkapan perjalanan wisata) - Fasilitas Informasi Wisata (Papan Informasi) - Fasilitas Gedung Kesenian	- Pusat Perkotaan Halong
WPP Selatan	- Fasilitas Transfer Moda Transportasi skala kabupaten - Fasilitas Akomodasi Wisata (Hotel/Penginapan) - Restoran / Rumah Makan - Shelter / Area Peristirahatan - Fasilitas Perbelanjaan (cindramata/ souvenir/ kelengkapan perjalanan wisata) - Fasilitas Informasi Wisata (Papan Informasi) - Fasilitas Gedung Kesenian	- Pusat Perkotaan Awayan

Sumber : Hasil Rencana (RIPPDA)

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA)**

**RENCANA INDIK
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPDA)
KABUPATEN BALANGAN**

Peta :

**Rencana Pengembangan Fasilitas Pada Pusat
Pelayanan Kawasan Pariwisata Kabupaten Balangan**

Skala :

1:200.000

**Projected Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 50S
Projection : Transverse Mercator**

Insert Peta :

Legenda :

Administrasi :

- State Administrative Kabupaten
- State Administrative Kecamatan
- State Administrative Desa
- Desa

Jalan :

- Aspal Primer
- Koridor Primer
- Koridor Sekunder
- Local

Perairan :

- Chlorophyll/Perairan
- Sungai

Wilayah Perencanaan Pengembangan :

- WPP Barat
- WPP Selatan
- WPP Timur
- WPP Utara

Pusat Pelayanan :

- Pusat WPP
- Tujuan Wisata
- Objek Wisata Utama
- Objek Wisata Pendukung

Rencana Pengembangan Fasilitas Pariwisata

- Fasilitas Transfer Moda
- Fasilitas Transfer Moda Kabupaten
- Fasilitas Akomodasi Wisata (Hotel/Penghapan)
- Fasilitas Pusat Informasi Wisata (TIC)
- Shelter / Peristirahatan
- Restoran / Rumah Makan
- Fasilitas Perbelanjaan (cendramata/ souvenir/ perlengkapan perjalanan wisata)
- Fasilitas Perbankan & Penukaran Uang
- Fasilitas Pengatur / Operator Jasa Perjalanan Wisata
- Fasilitas Museum & Gedung Kesenian

Pusat Pelayanan

- Pusat Perkotaan Paringin

Rencana Pengembangan Fasilitas Pariwisata

- Fasilitas Transfer Moda Transportasi skala kabupaten
- Fasilitas Akomodasi Wisata (Hotel/Penghapan)
- Restoran / Rumah Makan
- Shelter / Area Peristirahatan
- Fasilitas Perbelanjaan (cendramata/ souvenir/ perlengkapan perjalanan wisata)
- Fasilitas Informasi Wisata (Papan Informasi)
- Fasilitas Gedung Kesenian

Pusat Pelayanan

- Pusat Perkotaan Ayan

Rencana Pengembangan Fasilitas Pariwisata

- Fasilitas Transfer Moda Transportasi skala kabupaten
- Fasilitas Akomodasi Wisata (Hotel/Penghapan)
- Restoran / Rumah Makan
- Shelter / Area Peristirahatan
- Fasilitas Perbelanjaan (cendramata/ souvenir/ perlengkapan perjalanan wisata)
- Fasilitas Informasi Wisata (Papan Informasi)
- Fasilitas Gedung Kesenian

Pusat Pelayanan

- Pusat Perkotaan Halong

Tabel 34. Rencana Investasi Pengembangan Fasilitas di Dalam Kawasan Objek Wisata

No	Obyek Wisata	Pengembangan Fasilitas di Dalam Kawasan Objek Wisata											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Wisata Alam												
1	Danau Baruh Bahinu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Air Terjun Manyandar	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-
3	Gunung Ber'ai & Belawan	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-
4	Gunung Hauk / Hambal Lumut	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-
5	Gunung Hantanung	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-
6	Goa Gunung Batu	√	-	√	-	-	√	√	√	-	√	-	√
7	Air Terjun Buntar	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-
8	Air Terjun 7 Tingkat	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-
	Wisata Adat & Budaya												
1	Desa Wisata Budaya Wadian Tambai	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Desa Budaya Dayak Pitap	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Rumah Bubungan (Rumah Adat Banjar)	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	√
	Wisata Religi & Sejarah												
1	Makam Datu Kandang Haji	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Makam Amir Husin Bin Buajim & M. Idris Bin Amir Husin	√	-	-	-	√	√	√	√	-	√	-	√
3	Makam Datu Martika & Datu Tungkut	√	-	-	-	-	√	√	√	-	√	-	√
4	Masjid Al-Akbar Balangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Benteng Tundakan	√	-	-	-	-	√	√	√	-	√	-	√
6	Masjid Syuhada	√	-	-	-	-	√	√	√	-	√	-	√
	Wisata Buatan												
1	RTH Taman Hijau Balangan	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√
2	RTH Taman Kota Balangan	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√
3	RTH Tugu Perjuangan	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pusat Jajanan Malam Terminal Pasar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Hutan Kota Balangan	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√	-	√

Sumber : Hasil Rencana

Keterangan :

A. Tempat/Area Istirahat

B. Arena Bermain Anak

C. Areal Outdoor & Olahraga

D. Hotel/ Penginapan

E. Rumah Makan / Cafe

F. Area Parkir

G. Tempat Ibadah & Toilet Umum

H. Pos Keamanan & Kesehatan

I. Sentra Cinderamata / Souvenir

J. Pusat Informasi & Papan Petunjuk

K. ATM / Jasa Keuangan

L. Lansekap (Taman, Gazebo, dll)

Pengembangan Moda Transportasi, guna menunjang pengembangan industri pariwisata ditinjau dari keberadaan pintu gerbang utama masuknya wisatawan dari dan ke Kabupaten Balangan. Dalam konteks regional kewilayahan, aksesibilitas di Kabupaten Balangan bertumpu pada jalan utama yaitu jalan arteri, adalah jalur jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Secara domestik, untuk masuk ke wilayah Balangan, dapat melalui 2 rute alternatif utama yaitu; melalui jalur Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bagian Selatan, maupun melalui Kabupaten Tanjung pada bagian utara.

**Tabel 35. Potensi Investasi dan Peluang Usaha
Pengembangan Moda Transportasi Pariwisata Di Kabupaten Balangan**

No	Rencana Pengembangan Moda Transportasi	Visualiasi
1	Pengembangan kerjasama integrasi & konektivitas jalur pariwisata regional provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah Kabupaten Balangan yang sinergis.	
2	Pengembangan kerjasama sinergis perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat.	
3	Pengadaan angkutan khusus wisata yang ditujukan untuk membangun keterhubungan antar pusat Wilayah Pengembangan Pariwisata	
4	Pengembangan konektivitas antar terminal induk Kota Paringin dengan Sub Terminal Kecamatan.	
5	mendorong pengembangan penyediaan angkutan non formal yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai penunjang kemudahan kegiatan wisata.	

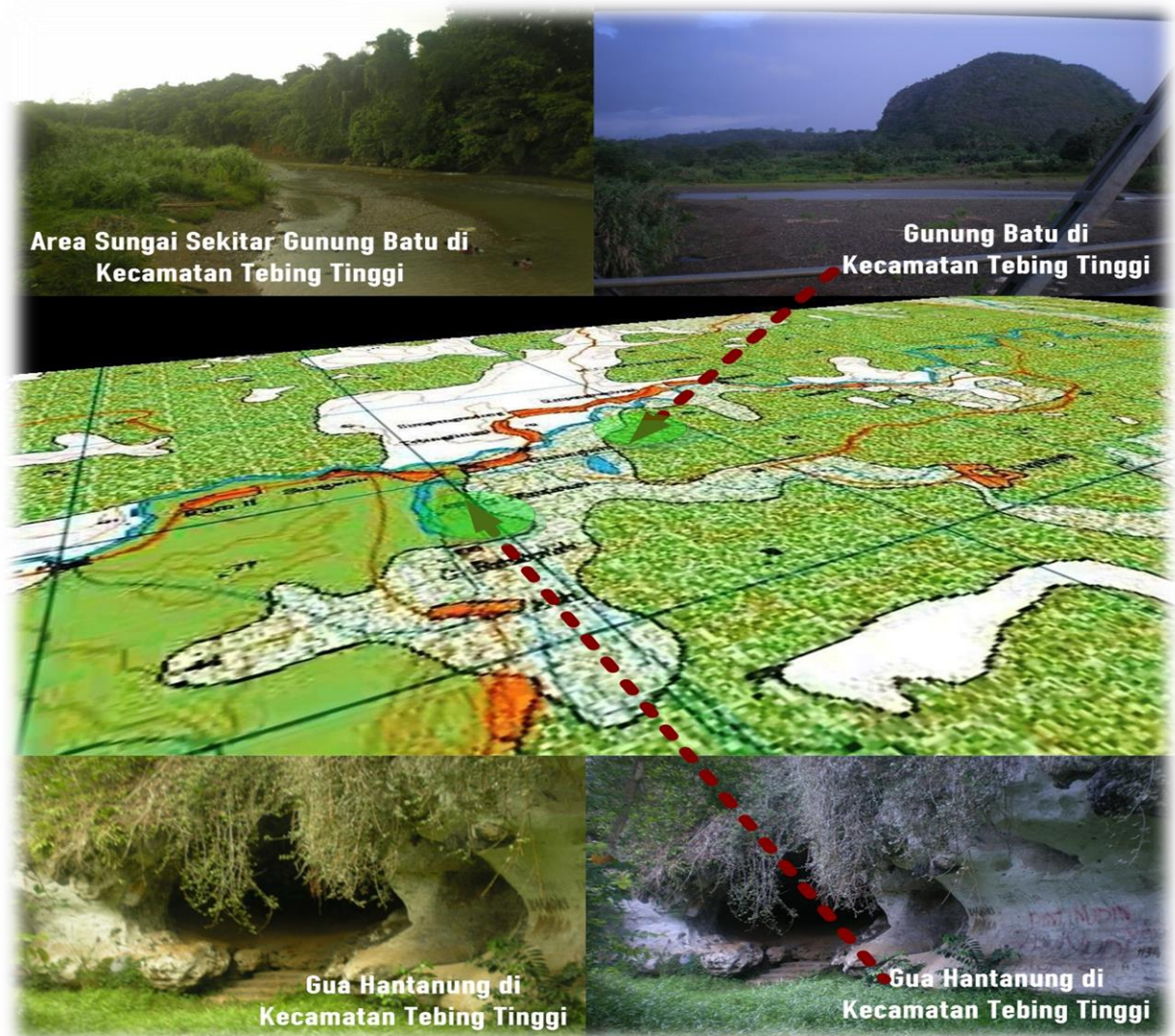
Sumber : Hasil Rencana (RIPPDA)

Destinasi Wisata Alam di Kecamatan Tebing Tinggi





Destinasi Wisata Alam di Kecamatan Tebing Tinggi



Tabel 36. Pengembangan Kemitraan Usaha Sarana Restoran / Rumah Makan

No	Elemen Kemitraan	Pihak Yang Terkait	Pola Kemitraan
1	Pengembangan Produk	Bermitra dgn Pihak Pemilik / Pengelola Toko Souvenir & Cinderamata	Pola kemitraan umum yaitu : Kemitraan hotel dgn toko cinderamata dilakukan dgn menyediakan tempat (<i>display room</i>) untuk hasil kerajinan yg dijual sebagai cinderamata. Skema kemitraan dpt berupa sistem komisi, konsinyasi, bagi hasil, dsb. Penyediaan berbagai bentuk cinderamata dan pernik-pernik, hiasan, interior, dsb untuk digunakan oleh hotel dgn harga lebih murah. Misalnya berupa asbak, vas bunga, hiasan penyangga lampu, dan barang kerajinan lainnya.
		Bermitra dgn Pemilik Sarana Olahraga	Dpt berupa subkontrak pengelolaan sarana olahraga, menyediakan fasilitas olahraga spt aerobik, fitness center, lapangan futsal, lapangan tenis, dsb untuk tamu hotel. Penyediaan sarana olahraga juga membayar sewa tempat kepada hotel.
		Bermitra dgn pemilik restoran/rumah makan	Dpt berbentuk subkontrak yaitu restoran/rumah makan menyediakan fasilitas tempat makan/minum sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan hotel dalam melayani tamunya.
		Bermitra dgn Sanggar Seni & Budaya	Dpt berbentuk subkontrak, dimana sanggar seni melayani kebutuhan tamu hotel dengan berbagai macam pertunjukan seni dan budaya.
		Bermitra dgn pengusaha jasa perhotelan	Dpt dlm bentuk kerjasama antara hotel dan objek wisata. Yakni objek wisata memproduksi kebutuhan tamu hotel dengan pelayanan khusus utk kunjungan objek wisata
		Bemitra dgn pemasok barang dan jasa (foods, beverages, linen, ATK, perlengkapan mandi, internet, rumah sakit, dsb)	Dpt dalam bentuk kerjasama memenuhi kebutuhan tamu hotel akan makanan, minuman, alat tulis, peralatan mandi, kebutuhan jaringan internet, jaringan pengobatan bagi tamu hotel, dsb.
		Bemitra dgn jasa penyedia & pengelola infrastruktur hotel	Dpt dalam bentuk kerjasama memenuhi kebutuhan hotel akan penyediaan dan pengelola infrastruktur hotel (seperti gas, listrik, air bersih, pembuangan limbah, sanitasi, dsb)
2	Penyediaan Sumber Daya Manusia	a.Bermitra dengan Pemasok Tenaga Kerja	Dpt berupa subkontrak, yaitu pemasok menyediakan tenaga kerja untuk karyawan hotel
		b.Bermitra dengan pemasok tenaga keamanan	Dpt berupa sub kontrak, yaitu pemasok tenaga keamanan menyediakan tenaga kerja untuk menjaga keamanan hotel termasuk perlengkapan yang dibutuhkan.
		c.Bermitra dengan Institusi Pendidikan	Pola kemitraan subkontrak yaitu institusi pendidikan menyalurkan lulusannya sebagai SDM Perhotelan. Pembinaan yaitu pihak hotel akan menerima mahasiswa kerja praktek/magang.
3	Pemasaran	a. Bermitra dengan Biro Perjalanan Wisata	Pola kemitraan umum yaitu Biro Perjalanan Wisata turut memasarkan hotel.
		b. Bermitra dengan hotel lain	Pola kemitraan umum yaitu turut memasarkan hotel yang menjadi mitra kepada tamu hotelnya

Sumber : RIPPDA Balangan 2016

ANEKA PRODUK KERAJINAN & INDUSTRI KREATIF



Kerajinan Anyaman



Gula Semut & Gula Aren



Budidaya Gaharu



Keripik Labu



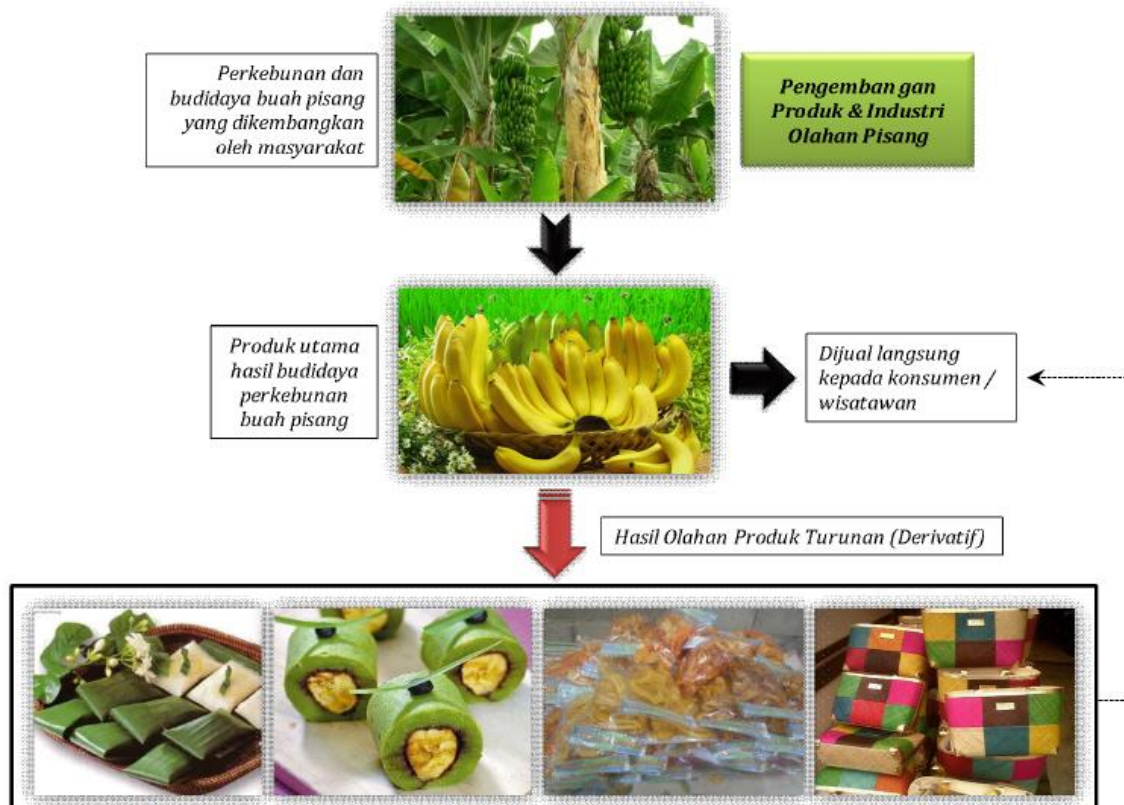
Sirup Batumandi



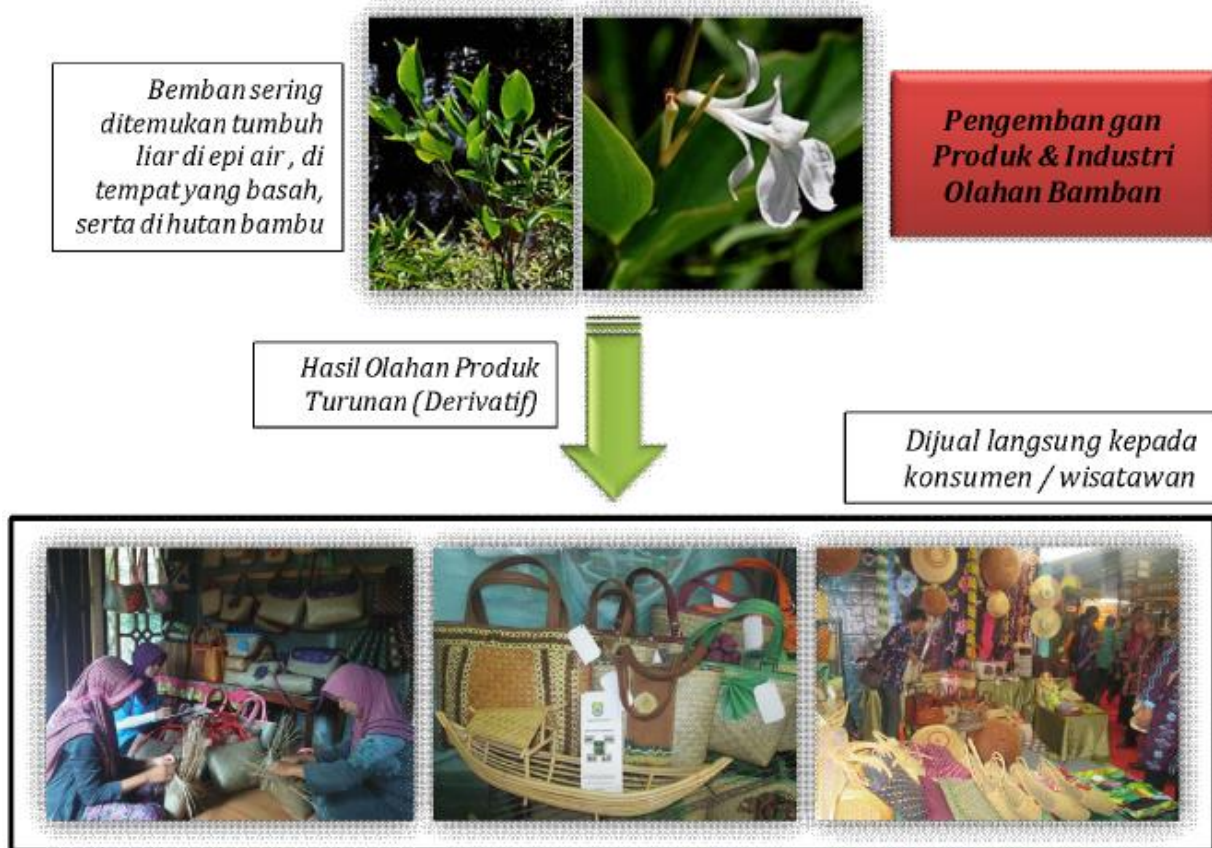
Mandai



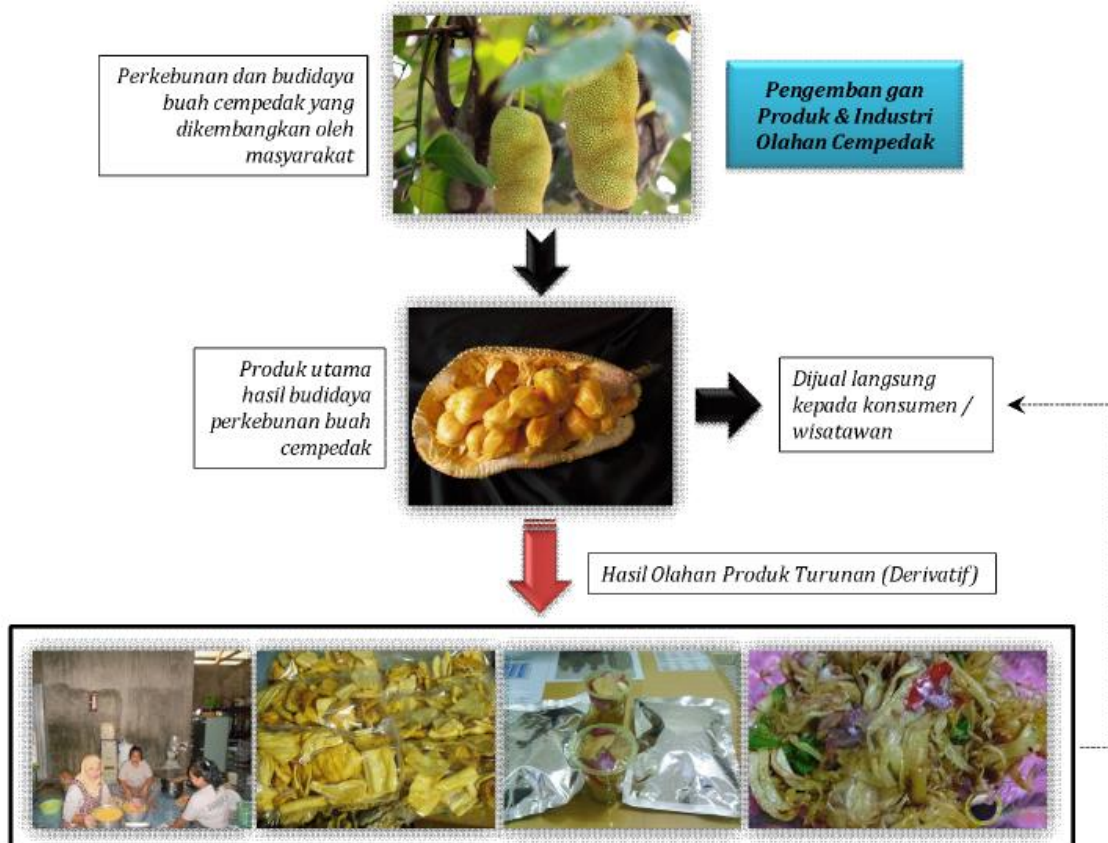
ANEKA PRODUK KERAJINAN & INDUSTRI KREATIF OLAHAN PISANG



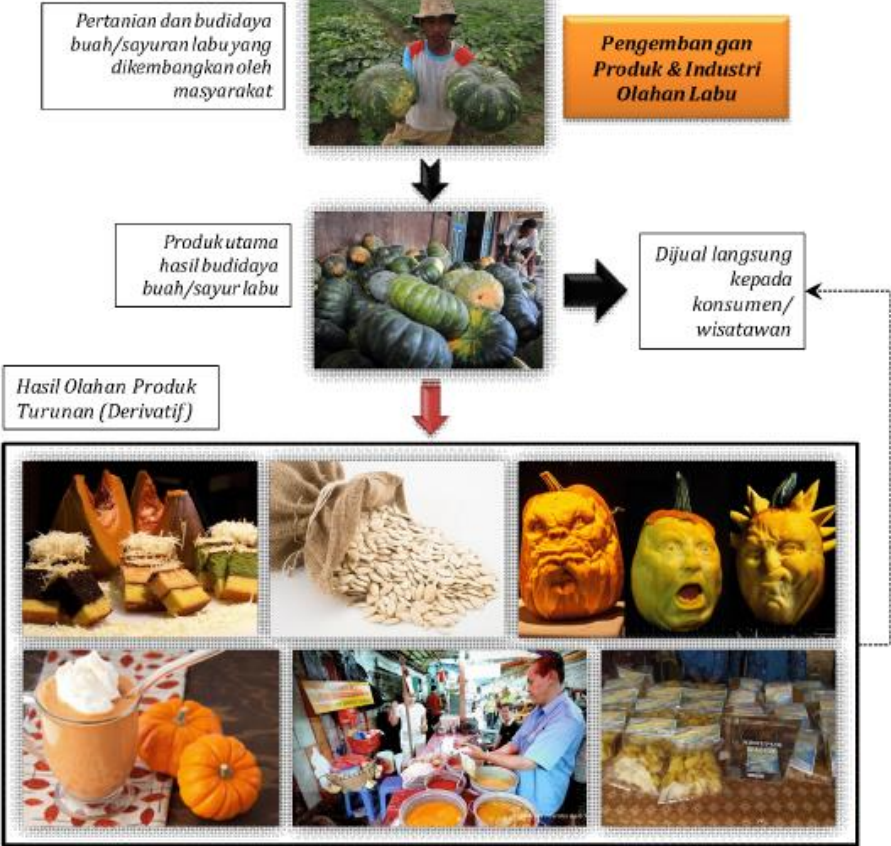
ANEKA PRODUK KERAJINAN & INDUSTRI KREATIF OLAHAN BAMBANG



ANEKA PRODUK KERAJINAN & INDUSTRI KREATIF OLAHAN CEMPEDAK



ANEKA PRODUK KERAJINAN & INDUSTRI KREATIF OLAHAN LABU



ANEKA PRODUK KERAJINAN & INDUSTRI KREATIF GULAN AREN/ NIRA



Tabel 37. Pengembangan Kemitraan Usaha Sarana Akomodasi Pariwisata

No	Elemen Kemitraan	Pihak Yang Terkait	Pola Kemitraan
1	Pengembangan Produk	Bermitra Dengan Sanggar Seni & Budaya	Pola kemitraan yang dapat diterapkan yaitu sanggar seni memenuhi kebutuhan tamu restoran/rumah makan untuk pertunjukkan seni dan budaya.
		Bermitra Dengan Penyelenggaraan Kegiatan Outbound	Pola kemitraan sub kontrak yaitu penyelenggaraan kegiatan outbound memproduksi kegiatan sebagai bentuk diversifikasi pelayanan yang diberikan restoran/rumah makan kepada konsumennya.
2	Pemasaran	Promosi Usaha Restoran/Rumah Makan Bermitra Dengan Biro Perjalanan	Pola kemitraan umum yaitu biro perjalanan wisata turut memasarkan restoran/rumah makan.
		Promosi Usaha Restoran/Rumah Makan Bermitra Dengan Hotel	Pola kemitraan umum yaitu hotel turut memasarkan restoran/rumah makan yang jadi mitranya.
		Promosi Usaha Restoran/Rumah Makan bermitra Dengan Pramuwisata	Pola kemitraan umum yaitu pramuwisata memasarkan restoran/rumah makan kepada konsumennya.
		Promosi Usaha Restoran/Rumah Makan bermitra Dengan Objek Wisata	Pola kemitraan umum yaitu objek wisata memasarkan restoran/rumah makan yang bermitra dengannya

Sumber : RIPPDA Balangan 2016

Tabel 38. Pengembangan Kemitraan Usaha Jasa Wisata

No	Elemen Kemitraan	Pihak Yang Terkait	Pola Kemitraan
1	Pengembangan Produk	<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan hotel	Dpt berbentuk Subkontrak, dmn hotel memproduksi fasilitas penginapan, sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan biro perjalanan wisata
		<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan Restoran/Rumah Makan	Dtp berbentuk Subkontrak, dmn Restoran/rumah makan menyediakan tempat makan/minum sebagai komponen yang dibutuhkan biro perjalanan.
		<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan Jasa Angkutan Wisata	Pola Kemitraan umum yaitu memenuhi kebutuhan fasilitas transportasi bagi konsumennya dan mendapatkan biaya yang lebih rendah, dibandingkan biaya yang berlaku untuk umum.
		<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan Objek Wisata	Dtp berbentuk Subkontrak, dmn objek wisata menyediakan kebutuhan utama bagi konsumen biro perjalanan wisata untuk kunjungan ke objek wisata
		<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan Pramuwisata	Dpt berbentuk Subkontrak yaitu pramuwisata menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh biro perjalanan wisata dalam pengembangan produknya.
		<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan Jasa Event Organizer	Pola kemitraan umum yaitu jasa inpresariat memasok kebutuhan MICE (<i>meeting, incentive, convention and exhibition</i>) dari konsumen biro perjalanan wisata.
2	Penyediaan Sumber Daya Manusia	<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan Pramuwisata	Dpt berbentuk sub kontrak, dmn pramuwisata memenuhi kebutuhan tenaga pemandu wisata yang dibutuhkan biro perjalanan wisata
		<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)	Pola kemitraan umum yaitu HPI memasok pramuwisata sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan biro perjalanan wisata
3	Pemasaran	<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan Biro Perjalanan Wisata Lainnya (Nasional maupun Internasional)	Pola kemitraan umum yaitu biro perjalanan wisata lain turut memasarkan paket wisata ataupun daya tarik wisata
		<input type="checkbox"/> Bermitra Dengan Pemerintah Daerah	Pola kemitraan bentuk lain yaitu pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, dengan mengajak biro perjalanan wisata untuk promosi di luar negeri dan menyediakan tempat promosi tanpa biaya.

Sumber : RIPPDA Balangan 2016

Tabel 39. Pengembangan Kemitraan Usaha Daya Tarik Wisata

No	Elemen Kemitraan	Pihak Yang Terkait	Pola Kemitraan
1	Pengembangan Produk	Bermitra Dengan Pemerintah	Pola kemitraan Intiplasma yaitu pemerintah membina dan mengembangkan usaha daya tarik wisata melalui penyediaan infrastruktur dan pembinaan kepada masyarakat
		Bermitra Dengan Swasta	Pola kemitraan Intiplasma yaitu pengelolaan swasta menyediakan lahan untuk disewakan kepada masyarakat yang ingin berusaha di area objek dan daya tarik wisata.
		Bermitra Dengan Masyarakat	Pola kemitraan umum yaitu masyarakat menyewa lahan untuk berdagang barang-barang sebagai penunjang daya tarik wisata yang ditawarkan
		Bermitra Dengan Tim / Tenaga Ahli	Pola kemitraan Intiplasma yaitu tim/ tenaga ahli memberikan pembinaan kepada pengelola dalam pengembangan usaha daya tarik wisata
2	Penyediaan Sumber daya manusia	Bermitra Dengan Lembaga Desa	Pola kemitraan umum yaitu lembaga desa memasok kebutuhan SDM usaha daya tarik wisata
3	Pemasaran	Bermitra Dengan Pemerintah Daerah	Pola kemitraan bentuk lain yaitu pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan mengajak pengelola objek daya tarik wisata untuk promosi di luar maupun dalam negeri dan menyediakan tempat promosi tanpa biaya.
		Bermitra Dengan Swasta	Pola kemitraan umum yaitu pengelola swasta memasarkan objek dan daya tarik wisata
		Bermitra Dengan hotel	Pola kemitraan umum yaitu hotel turut memasarkan objek dan daya tarik wisata yang dikelolanya

Sumber : RIPPDA Balangan 2016

5.2. STRATEGI DAN MODEL INVESTASI

Model dan Bentuk Investasi Pariwisata yang dikembangkan, dapat berupa; Kerjasama Pemerintah Swasta, Privatisasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Pengelola Teknis (UPT) Destinasi Prioritas, Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT), dan lainnya.

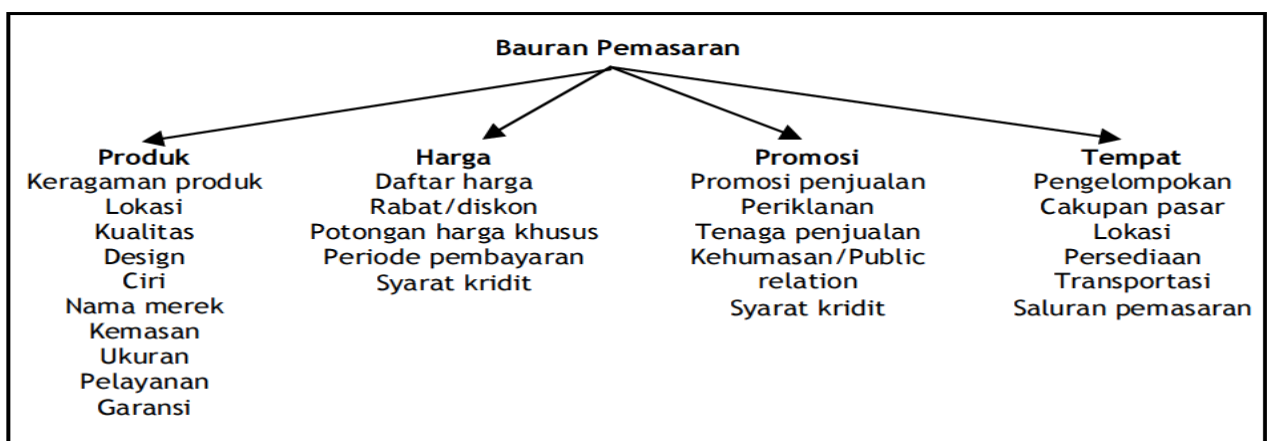
Pengembangan Kepariwisataan sudah seharusnya dilakukan Kelayakan Pengembangan terlebih dahulu, terlebih apabila Nilai Investasinya sangat besar atau dalam jangka menengah, baik untuk Destinasi Pariwisata Prioritas/ Unggulan maupun yang bukan unggulan. Sehingga dari hasil Studi Kelayakan tersebut akan didapatkan Persyaratan Investasi Dalam Pembangunan Kepariwisataan.

Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) yang berupa Permukiman, baik Perkotaan maupun Perdesaam, seperti Desa Wisata dan Desa Adat, juga dapat ditempuh melalui jalan lainnya, berupa Peningkatan Pelayanan Publik pada Kawasan Wisata; Perbaikan Gizi Anak, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pengurangan Angka Kemiskinan, Peningkatan Pemberian dan Pendampingan Pembinaan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau Monitoring Pengawasan dan Pembinaan dalam pengalokasian Dana Desa sehingga dapat berjalan efektif dalam mendukung tercapainya / terwujudnya KSP sesuai Rencana Induk, Rencana Detail dan Rencana Teknis lainnya yang telah dan akan disusun kemudian.

Koordinasi Pembangunan Destinasi Prioritas & Unggulan Tahun 2018-2021, menjadi kunci suksesi dalam kemajuan peningkatan di lapangan pada 2 (dua) Lokasi Destinasi Prioritas & Unggulan; KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata, dan Desa Wisata Adat Dayak Halong.



Gambar 99. Bauran Pemasaran Pariwisata

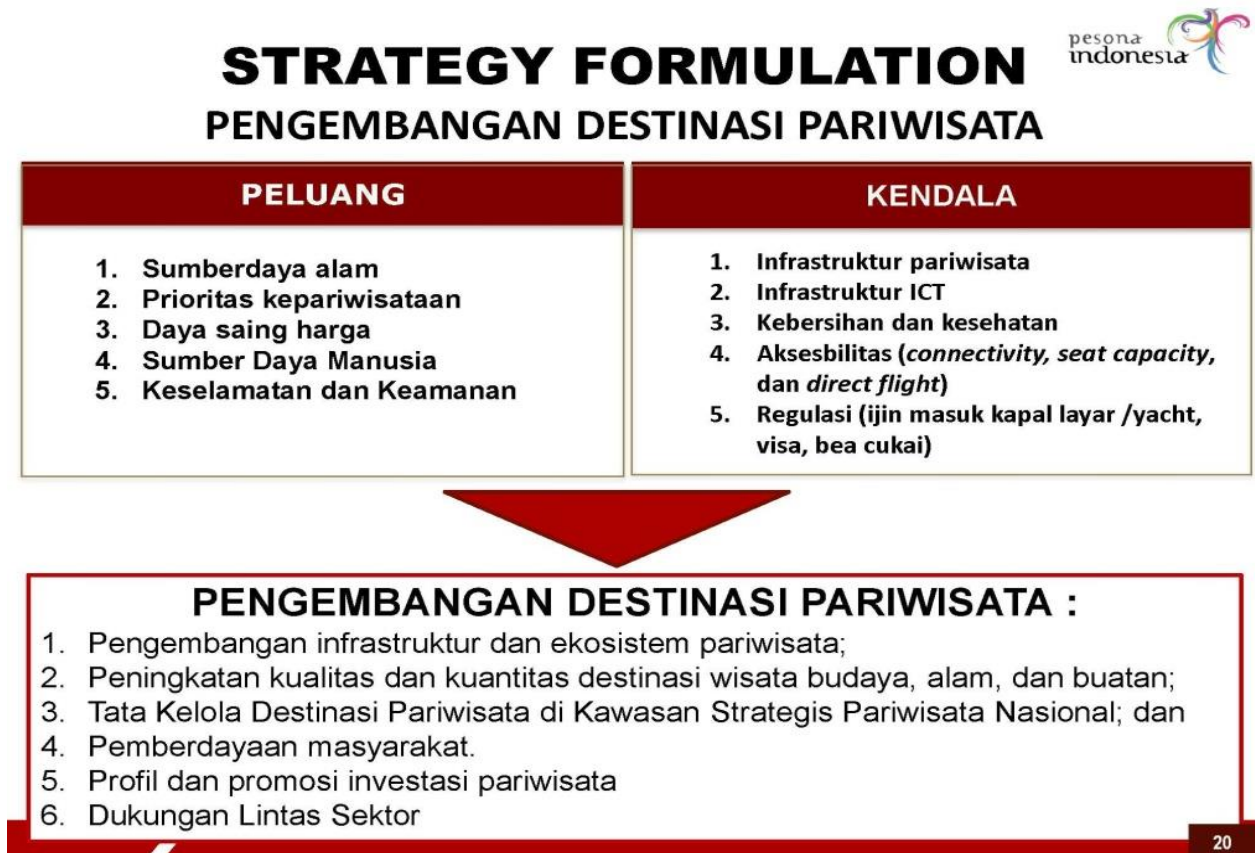


Pergeseran trend wisatawan dari mass tourism menjadi alternative tourism merupakan fenomena yang mesti dipahami dan disikapi secara bijaksana dengan memandang bahwa pariwisata pada akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat untuk pariwisata Indonesia ke depan menjadi syarat mutlak jika ingin pembangunan pariwisata Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kajian Investasi ini untuk menganalisa pembagian peran dan bentuk investasi yang dapat dilaksanakan dan atau dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai Investasi Publik pada Infrastruktur Dasar dan Prasarana Sarana Lingkungan, maupun Peran BUMD pada pengelolaan dan kerjasama pengeolaan, dan Sektor Swasta dalam Investasi Privat untuk Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi dan Amenitas, serta

masyarakat desa wisata baik secara langsung maupun melalui BUMDes/ Koperasi yang ada dalam berperan sebagai operator maupun tenaga pelaku jasa wisata.

Gambar 100. Formulasi Strategi Pengembanagn Destinasi Pariwisata



UN World Tourism Organization atau UNWTO sebagai organisasi dunia yang bertanggungjawab memberikan definisi mengenai pariwisata, yang merilis definisi : pariwisata di konferensi internasional : perjalanan dan statistik pariwisata di Ottawa pada tahun 1991. Berdasarkan pada definisi pariwisata tersebut Komisi Statistik dari UN (United Nations) membedakan istilah-istilah yang dipergunakan pada pariwisata hingga saat ini, yaitu:

- *visitors* (pengunjung) adalah istilah untuk mendeskripsikan **semua wisatawan** yang segala aktivitasnya sesuai dengan terdapat pada definisi pariwisata.
- *tourist* (wisatawan) atau **pengunjung yang menetap** adalah istilah untuk mendeskripsikan pengunjung yang tinggal semalam pada sebuah destinasi.
- *same-day visitors* atau *excursionists* adalah istilah untuk **mendeskripsikan pengunjung yang tiba lalu berangkat kembali di waktu yang bersamaan**. *Same-day visitors* sebagian besar merupakan orang-orang yang meninggalkan rumah dan kembali lagi ke rumah pada waktu yang sama, tetapi bagi wisatawan memungkinkan melakukan hal tersebut pada suatu destinasi yang jauh dari tempat mereka, sehingga memungkinkan untuk tinggal lebih lama di destinasi yang akan dituju yang jauh dari tempat mereka menginap

Dukungan Lintas Sektor dan Koordinasi Pembangunan Destinasi Prioritas & Unggulan Tahun 2018-2021 untuk mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja infrastruktur, prasarana sarana yang berkaitan dengan Kepariwisata berupa Peran Dinas/ Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai berikut :

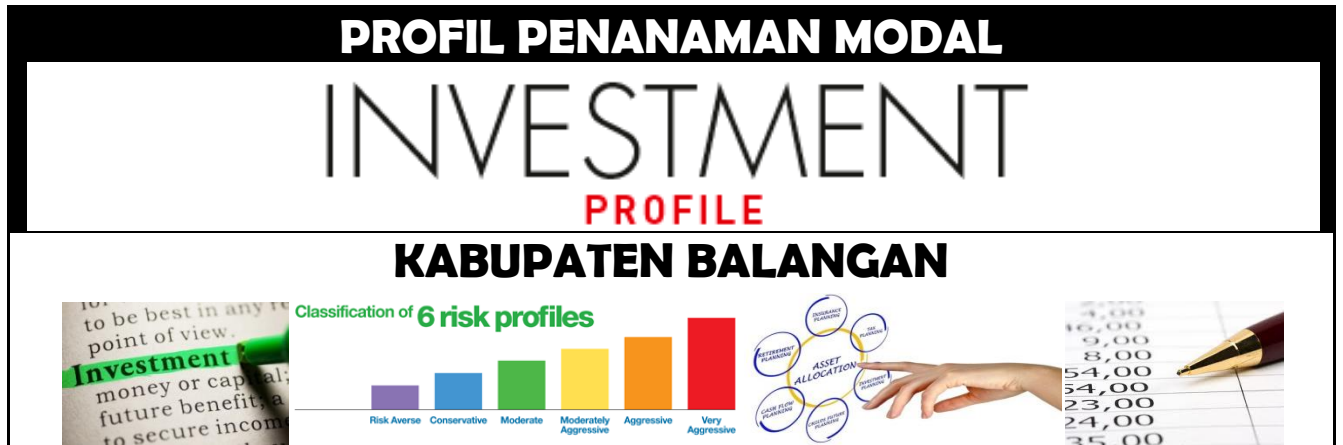
No	Dinas	Peran
1	Pendidikan Tipe A (dan Kebudayaan)	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Non Fornal/ Pengetahuan Kepariwisata pada Pelajar Pengelolaan Budaya dan Obyek Budaya
2	Kesehatan Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitas Kesehatan di Sekitar Kawasan dan Obyek Wisata
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan Legalisasi RDTR KSP Danau Baruh Bahinu Peningkatan Infrastruktur Jalan Poros Desa Panjang 4.500 meter, Lebar 8-10 Meter Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Perairan Danau & Sempadan Danau Pembangunan Sistem Drainase Permukiman Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Sanitasi (Limbah, Sampah)
4	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Tipe B	<p>Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Bidang Pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Permukiman Desa Wisata Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Prasarana/ Fasilitas Pendukung Wisata (Pembebasan Lahan dan Pengadaan Tanah)
5	Tenaga Kerja & Transmigrasi Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan SDM Pariwisata sebagai Pelaku dan Operator Jasa Wisata pada Kawasan Wisata dan Obyek-Obyek Wisata
6	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Alam Pangan dan Pemasaran Hasil Olahan
7	Pariwisata Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> Legalisasi RIPPPDA dan Penyusunan RIPOW, dan Rencana Teknis (DED) Destinasi Prioritas (Fokus pada perbaikan Lokasi/ Obyek/ Destinasi) Penyiapan Masyarakat Desa Wisata Prasarana Sarana Penunjang Pariwisata; Kantor Administrasi, Pengelola, Rescue Pengembangan Atraksi dan Kerjasama Wisata
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penyelesaian hal-hal yang menjadi kendala dan berpotensi menjadi kendala perbaikan destinasi pariwisata, termasuk mempercepat pembentukan atau penyempurnaan kelembagaan destinasi pariwisata yang berbentuk kawasan strategis/
7	Lingkungan Hidup Tipe B	<p>Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Flora Fauna)
8	Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa Wisata Peningkatan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata Mendorong BUMD dan BUMDes untuk pengelolaan destinasi.
9	Perhubungan Tipe C	<p>Terminal Kota, Transit Point, Shelter and Rest Area Moda Angkutan; Angkutan Perdesaan, Angkutan Perintis, Angkutan Wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Rute Trayek Perdesaan yang Melintasi Kawasan Pariwisata Penyediaan Trayek Angkutan Khusus Pariwisata

10	Komunikasi & Informatika Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jaringan (Sinyal) Telekomunikasi 4G bekerja sama dengan Provider • Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi Bersama
11	Koperasi, Usaha Mikro/ Kecil dan Perindustrian Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil; Pengelolaan, Pemasaran Hasil
12	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam mengakses Informasi Pariwisata dan Kawasan Strategis, dapat dilakukan melalui pengembangan Information and communications technology. Kemudahan, Dukungan Informasi dan Insentif dalam Investasi Bidang Pariwisata.
13	Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Event/ Kegiatan pada Kawasan Wisata; Prioritas Lomba Dayung & Olah Raga Air Lainnya
14	Perpustakaan Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Perpustakaan Desa dan Taman Baca Anak
15	Perikanan Tipe C Pertanian Tipe B	Diversifikasi Komoditas; Pertanian, Perikanan, Peternakan untuk mendukung Destinasi <ul style="list-style-type: none"> • Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kawasan Danau • Pengembangan Agrowisata
16	Perdagangan Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Pasar-Pasar Desa • Penyediaan Lokasi & Penampungan Pasar (Permanen, Semi Permanen, temporer)

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017



***"Hambal Lumut"* Puncak Gunung Hawuk di Kecamatan Tebing Tinggi**



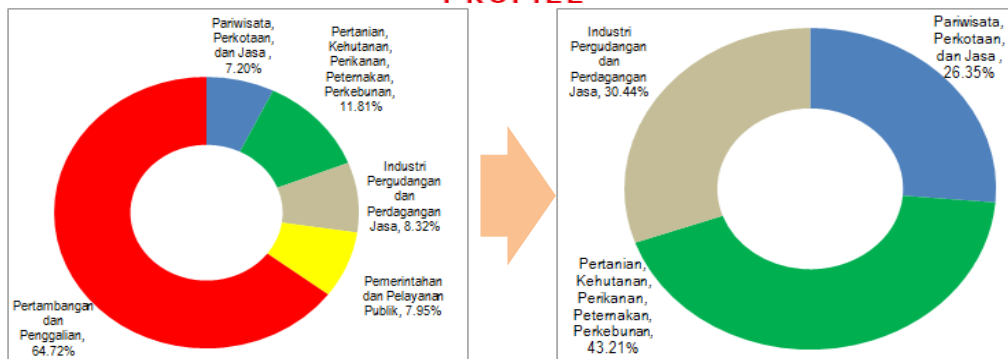
6 PRA-KELAYAKAN INVESTASI



BALANGAN
ready for
BUSINESS



INVESTMENT PROFILE



PDRB dengan Pertambangan 9.293.213 / PDRB tanpa Pertambangan 3.283.493
(juta rupiah), Tahun 2015

BANUA ENAM
Amuntai
Tanjung
Barabai
Kandangan

THE POTENTIAL MARKET LIST
A sample of traveler origin and segmentation

BANJAR AREA
Banjarmasin
Banjarbaru
Martapura

OLAH RAGA AIR
Dayung
Memancing
Polo Air
Permainan Air

Tourism for
Family, Business,
Sport, Hobbies,
Special Purpose



Gambar 101. Contoh Model Cover Promosi Investasi

6.1. PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

LOKAKARYA NASIONAL SINERGI PENGELOLAAN DANAU

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, ketahanan air, termasuk eksistensi danau, adalah salah satu prioritas. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan danau, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan "**Lokakarya Nasional Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran Para Pemangku Kepentingan**" pada 9-10 Mei 2017 di Jakarta.

www.bappenas.go.id @bappenasRI Kementerian PPN/Bappenas



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

DANAU DALAM ANGKA

Berapa jumlah dan luas danau di Indonesia?

840 Indonesia memiliki **840 danau** dengan tipologi sangat bervariasi. Sebagian besar danau di Indonesia merupakan danau alami.

7.103 Total luas seluruh danau mencapai **7.103 km²**. Danau-danau tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua.

www.bappenas.go.id @bappenasRI Kementerian PPN/Bappenas



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

LOKAKARYA NASIONAL SINERGI PENGELOLAAN DANAU

Peserta lokakarya adalah para pemangku kepentingan pengelolaan danau dari unsur pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat. Lokakarya membahas:

- ☒ Koordinasi antar pemangku kepentingan
- ☒ Identifikasi isu-isu penting dalam pengelolaan danau
- ☒ Solusi kebijakan sejak perencanaan, kelembagaan, hingga regulasi

www.bappenas.go.id @bappenasRI Kementerian PPN/Bappenas



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

BERKELANJUTAN

Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa, salah satunya adalah danau yang tersebar di berbagai pulau. Danau tak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga penyedia sumber air (baku), protein, mineral dan energi. Satu lagi, **danau juga memiliki potensi yang tinggi sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata.**

15 DANAU PRIORITAS NASIONAL

Danau Toba, Sumut	Danau Singkarak, Sumbar
Danau Kerinci, Jambi	Danau Rawapening, Jateng
Danau Batur, Bali	Danau Tempe, Sulsel
Rawa Danau, Banten	Danau Matano, Sulsel
Danau Poso, Sulteng	Danau Limboto, Gorontalo
Danau Tondano, Sulut	Danau Sentarum, Kalbar
Danau Maninjau, Sumbar	Danau Sentani, Papua
	Danau Semayang, Melintang, Kaltim

Sumber: RPJMN 2015-2019

www.bappenas.go.id @bappenasRI Kementerian PPN/Bappenas

KESEPAKATAN BALI TENTANG PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN

Dengan dilandasi komitmen untuk mewujudkan pengelolaan danau berkelanjutan dan dalam mengantisipasi perubahan iklim global, kami sepakat untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya melalui :

1. Pengelolaan Ekosistem Danau, dengan melakukan upaya pengendalian pencemaran air, konservasi keanekaragaman hayati, pengaturan dan pengawasan kegiatan budidaya pada perairan, pengaturan dan penertiban tata guna lahan, pengaturan perijinan sertifikasi lahan bangunan, pengendalian tata ruang Daerah Tangkapan Air (DTA) dan pengendalian erosi.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau untuk berbagai pemenuhan kebutuhan air hanya dapat diizinkan setelah melakukan kajian mendalam berdasarkan azas-azas ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi serta antisipasi terhadap dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.
3. Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Informasi Danau, dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya informasi peringatan dini kerusakan ekosistem danau dan potensi risiko bencana.
4. Penyiapan Langkah-Langkah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Danau, berdasarkan penerapan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim global terhadap keberlanjutan fungsi danau sebagai sumber air tawar, keanekaragaman hayati danau dan jasa lingkungan lainnya.
5. Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan dan Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas berbagai program/ kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem danau.
6. Peningkatan Peran Masyarakat; melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar danau untuk menjaga kelestariannya.
7. Pendanaan Berkelanjutan, dengan penyediaan dana yang bersumber, dari APBN, APBD, investasi swasta dan bantuan luar negeri serta swadaya masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan danau secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan kesepakatan bersama ini, kami bersedia bekerja sama dengan semua pihak melalui sinkronisasi dan sinergisitas Program/Kegiatan Pengelolaan Danau Berkelanjutan (terlampir) pada danau prioritas dan menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. disepakati di Bali, 13 Agustus 2009. (**Menteri Negara Lingkungan Hidup.** Rachmat Witoelar. **Menteri Dalam Negari.** Mardiyanto. **Menteri Pekerjaan Umum.** Djoko Kirmanto. **Menteri Pertanian.** Anton Apriyantono. **Menteri Kehutanan..** M.S. Kaban. **Menteri Kelautan dan Perikanan.** Fready Numberi. **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.** Purnomo Yusgiantoro. **Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.** Jero Wacik. **Menteri Negara Riset dan Teknologi.** Kusmayanto Kadiman)

Tabel 40. Potensi Pemanfaatan Pengelolaan Danau Berkelanjutan

- 1. AIR BAKU**
- 2. PERTANIAN**
- 3. PERIKANAN**
- 4. LISTRIK (MIKRO HIDRO/ PLTA)**
- 5. PENGENDALIAN BANJIR**
- 6. PARIWISATA**

Nama Danau	Pemanfaatan	Keterangan
Batur	I, PW	
Bratan	PW	
Buyan	PW	
Diatas	I, T, PW	
Dibawah	B, I, T, PW	
Kerinci	B, I, PW	
Limboto	B, I, T, PW, PB	
Maninjau	B, I, T, L, PW	PLTA Maninjau dibangun pada outlet danau yang mengalir menuju S. Batang Antokan dengan kapasitas 17 MW
Matano	PW	
Poso	B, I, T, L, PW	PLTA pada tahap pembangunan di S. Poso yang mengalir keluar dari D. Poso; kapasitas rencana 685 MW, sedang dibangun 200 MW.
Ranau	B, I, T, PW	
Rawa Pening	B, I, T, L, PB	Sumber air PLTA Jelok dan PLTA Timo dengan kapasitas 20,46 MW
Sentani	B, I, T, L, PW	
Singkarak	B, I, T, L, PW	PLTA dibangun pada outlet D. Singkarak menuju S. Ombilin dengan kapasitas 180 MW
Tamblingan	B, I, PW	
Tempe	B, I, T, PW	
Toba	B, I, T, L, PW	PLTA dibangun di S. Asahan yang mengalir keluar dari D. Toba; kapasitas rencana 1050 MW, telah dibangun 604 MW.
Tondano	B, I, T, L, PW	
Towuti	PW	

Sumber: (1) Badruddin M. 2003 ; (2) Profil Danau Indonesia, KLH 2006, (3) Soehoed 2000.

Keterangan: B – air baku, T – pertanian, I – perikanan, L – listrik/PLTA, PB – Pengendalian banjir, PW – pariwisata.

Tabel 41. Kategori Kedalaman Danau

No	Kategori	Kedalaman (m)	Danau
1	Sangat dangkal	< 10	Limboto dan Tempe
2	Dangkal	10 - 50	Bratan, Diatas, Tondano, Rawa Danau dan Rawa Pening
3	Medium	50 - 100	Batur, Buyan, Kerinci dan Tamblingan
4	Dalam	100 - 200	
5	Sangat dalam	> 200	Dibawah, Maninjau, Matano, Poso, Ranau, Singkarak, Toba dan Towuti

Sumber: Badruddin M, dkk, 2007

Tabel 42. Klasifikasi Ukuran Danau

KLASIFIKASI	LUAS (km ²)	VOLUME (juta m ³)
Besar	10.000 – 1.000.000	10.000 – 100.000
Medium	100 – 10.000	100 – 10.000
Kecil	1 - 100	1 - 100
Sangat Kecil	< 1	< 1

Sumber: ILEC, Vol9, p.33, 1999

Tabel 43. Ukuran Danau di Indonesia dan Klasifikasi Luas & Volumennya

No	Nama Danau	Luas km ²	Dalam Maks. (m)	Volume Juta m ³	Kategori Luas Danau	Kategori Volume Danau
1	Batur	15,9	88	820	Kecil	Medium
2	Bratan	3,85	22	49	Kecil	Kecil
3	Buyan	3,9	87	160	Kecil	Medium
4	Diatas	12,3	44	ND	Kecil	
5	Dibawah	11,2	309	ND	Kecil	
6	Kerinci	46	97	ND	Kecil	
7	Limboto	56	2,5	ND	Kecil	
8	Maninjau	97,9	169	10.400	Kecil	Besar
9	Matano	164,1	590	55.015	Medium	Besar
10	Poso	323,2	450	ND	Medium	
11	Ranau	125,9	229	21.950	Medium	Besar
12	Rawa Pening	25	14	52	Kecil	Kecil
13	Sentani	93,6	42	ND	Kecil	
14	Singkarak	107,8	268	16.100	Medium	Besar
15	Tamblingan	1,9	90	27	Kecil	Kecil
16	Tempe	350	5	ND	Medium	
17	Toba	1.130	529	240.000	Medium	Sangat Besar
18	Tondano	50	20	ND	Kecil	
19	Towuti	561,1	203	ND	Medium	

Sumber: Badruddin M, dkk, 2007



Gambar 102. Best Practicess Pengelolaan Danau Berkelanjutan

POTENSI & PELUANG INVESTASI

2. POTENSI PERAIRAN KAWASAN INTI DANAU RAWA PENING

- PENGGERAK TURBIN PLJA JELOK
- PENGAIRAN SAWAH
- LAHAN PERTANIAN PASANG SURUT
- PENGENDALI BANJIR KARENA MAMPU MENAMPUNG SELUAS 7.680 HA
- DAERAH REKREASI DAN PARIWISATA
- PDAM DI KANAL TUNTANG
- PUSAT OLAH RAGA PERAIRAN CABANG DAYUNG, SKI AIR
- KAWASAN USAHA PERIKANAN AIR TAWAR
- KAWASAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS, KHUSUNYA ITIK
- PENAMBANG GAMBUT SEBAGAI ANDALAN PEREKONOMIAN



LANGKAH NYATA GERAKAN PENYELAMATAN DANAU RAWA PENING

1. TH 1931 – 1967, PENANGANAN ENCENG GONDOK OLEH PEMERINTAH DNG MEMAKAI OBAT & MENGGERGAJI PULAU APUNG
2. TH 1968 – 1974, TIDAK ADA PENANGANAN
3. TH 1975 – 1987, PENANGANAN OLEH PEMPROV MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN & PEMPUS DITJEN PENGAIRAN DEPARTEMEN PU MELALUI PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI (PPWS) JRATUN SELUNA
4. TH 1998 – 2005, PENANGANAN ENCENG GONDOK DNG MELIBATKAN MASYARAKAT MELALUI PAGUYUBAN KELOMPOK TANI NELAYAN SEDYO RUKUN
5. TH 2004 PEMBENTUKAN FORUM REMBUG RAWAPENING
6. TH 2005 DILAKUKAN PENGANGKATAN ENCENG GONDOK SELUAS 5 HA



LANGKAH NYATA GERAKAN PENYELAMATAN DANAU RAWA PENING

1. TH 2006 PEMBUATAN DEMPLOT TANAMAN AIR PENYERAP UNSUR DARI LIMBAH DOMESTIK
2. TH 2007, PENANGANAN ENCENG GONDOK DENGAN PENGGELOMONGAN KANAL TUNTANG & PEMBUATAN DEMPLOT SUMUR RESAPAN DI DAERAH CATCHMENT AREA SEJUMLAH 4 UNIT DAN BANTUAN BIBIT TANAMAN KONSERVASI 18.200 BATANG
3. TH 2007 DILAKUKAN PULA PENEBARAN BENIH IKAN
4. TH 2008 MELAKSANAKAN :
5. NORMALISASI KALI PARAT SEPANJANG 400 M
6. NORMALISASI KALI BLERE SEPANJANG 1.600 M
7. PEMBERSIHAN ENCENG GONDOK SELUAS 150 HA
8. PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DI DESA KEBONDOWO, PEMBUATAN CHECKDAM DI ANAK KALI GALEH DESA TAMBAKBOYO, PEMBERSIHAN EMBUNG BALONG DI DESA NGRWAN KECAMATAN GETAS, SERTA PEMBERSIHAN ENCENG GONDOK DI KANAL TUNTANG
9. PEMBERSIHAN ENCENG GONDOK DI RAWAPENING SELUAS 475,3 HA
10. MENDUKUNG PENDAPATAN MASYARAKAT LOKAL DI RAWAPENING

Tabel 44. Hasil Dekomposisi Bahan Organik Yang Berasal Dari Sisa-Sisa Tumbuhan Air Yang Mati.

No	Parameter Analisis	Satuan	Baku Mutu	Metoda Analisis	Hasil Analisis
Fisika					(D.Limboto)
1	Bau	-	-	SME WW-2150	Tdk berbau
2	TDS	mg/L	1500	SME WW-2540-C	679
3	Kekeruhan	NTU	25	SME WW-2540-B	3,32
4	Daya hantar listrik (*)	uS/cm	-	SME WW 2510	965
Kimia					
1	Besi (Fe) (**)	mg/L	1,0	SME WW-3500-Fe-B	0,556
2	Flourida (F)	mg/L	1,5	SME WW 4500-F-D	< 0,001
3	Kesadahan (CaCO ₃) (*)	mg/L	500	SME WW-2340-C ⁻	157,28
4	Klorida (Cl ⁻) (*)	mg/L	600	SME WW-4500-Cl ⁻	8,61
5	Mangan (Mn) (**)	mg/L	0,5	SME WW-3500-Mn-B	0,658
6	Nitrat (NO ₃ - N) (**)	mg/L	10	SNI 06-2480 1991	0,433
7	Nitrit (NO ₂ - N) (**)	mg/L	1,0	SME WW-4500-NO ₂ -B	0,018
8	pH (*)		6.5 - 9.0	SME WW-4500-H ⁺	7,99
9	Sulfat (SO ₄)	mg/L	400	SME WW-4500-SO ₄ -E	40,57
10	MBAS	mg/L	0,5	SME WW-5540	0,137
11	Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	10	SNI 06-2506 1991	15,97
12	Sisa Klor	mg/L	-		0,0

Baku Mutu mengacu kepada Air Bersih No.: 416/MENKES/Per/IX/1990

Catatan : (*) Terakreditasi

: (**) Penambahan ruang lingkup Akreditasi

Sumber : Laboratorium Air Teknik Lingkungan FTSL ITB 2008

Tabel 45. Jenis-Jenis Tumbuhan Air Di Danau Limboto.

No.	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Tipe Habitat	Persen Kelimpahan
1	Eceng Gondok	Eichhornia crassipes	mengapung	***
2	Bumalo	Hydrilla, Ceratophyllum, Utricularia	tenggelam berakar	*
3	Kangkung	Ipomoea aquatica	mengapung	*
4	Kiambang	Azolla pinata	mengapung	*
5	Plambungo	Ipomoea crassicaulis	mengapung	***
6	Rumput	Panicum repens	muncul di bagian tepi danau	**
7	Rumput	Scirpus mucronatus	muncul di bagian tepi danau	*
8	Teratai	Nelumbium	mengapung	**
9	Tumbili	Otelia alismoides, Pistia	mengapung	*

Sumber : LRPSI, 2007

Ket: *) sedikit **) sedang ***) banyak

6.2. HUBUNGAN SUPPLY DAN DEMAND

SUPPLY	DEMAND
<p>Ada lima jenis supply yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tourist attraction; kegiatan 2. accessibility; aksesibilitas, daya jangkau, waktu tempuh; fasilitas 3. amenities; fasilitas 4. ancillaries, dan 5. community involvement. 	<p>Ada 12 jenis tourist / tourism demand yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. family, 2. hedonistic, 3. back packer, 4. visiting friends and relatives, 5. excursionist, 6. educational tourist, 7. religious tourist, 8. snow bird, 9. ethnic minority, 10. disable tourist, 11. social tourist dan 12. short break market.

Hubungan antara Demand dan Supply

Demand adalah seseorang yang melakukan pariwisata ke suatu tempat (tourist) sedangkan supply adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh negara penerima wisatawan (tourist receiving country). Pariwisata hanya dapat terbentuk jika kedua hal itu sudah terpenuhi. Kedua hal tersebut sangat mempengaruhi satu dengan yang lainnya, jika di suatu Destinasi / Daerah Tujuan Wisata (DTW) tidak ada supply maka otomatis tidak akan ada demand yang berkunjung ke Destinasi / Daerah Tujuan Wisata (DTW) tersebut. Begitu pula jika di suatu Negara tidak ada demand, maka supply yang dimilikinya tidak akan berkembang.

Family. Family tourist atau tourist keluarga dapat terbagi atas keluarga kecil yang terdiri dari orang tua dan anak, maupun keluarga besar yang terdiri dari orang tua, anak, paman, bibi, kakek, nenek, dan yang lainnya. Tourist ini umumnya melakukan perjalanan pada waktu liburan sehingga mereka benar-benar ingin menikmati liburannya itu di suatu tempat yang mereka inginkan

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Memberikan keuntungan ekonomi secara langsung kepada hotel dan restaurant. Tourist jenis ini umumnya memerlukan kamar yang besar dan makanan yang lebih banyak. Dampak ekonomi tidak langsung dapat dirasakan oleh pedagang-pedagang di pasar karena permintaan terhadap barang/bahan makanan akan bertambah. 2.) Tourist jenis ini umumnya menggunakan travel agent untuk mengatur jadwal perjalanannya. Hal ini akan meningkatkan keuntungan travel agent tersebut, semakin banyak pula membutuhkan tenaga kerja sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran. 3.) Anak-anak biasanya menyukai tempat-tempat dan atraksi wisata, khususnya yang berjenis man-made, seperti waterboom, taman bermain, dan sebagainya sehingga tempat-tempat tersebut dapat berkembang dan memperoleh keuntungan. 4.) Memberikan keuntungan kepada perajin dan penjual souvenir atau oleh-oleh karena tourist jenis ini biasanya akan membeli kenang-kenangan untuk dirinya dan kerabatnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Anak-anak biasanya suka bermain-main hingga merusak fasilitas-fasilitas yang ada, seperti di hotel, objek wisata, dan sebagainya. 2.) Agak sulit untuk mengelola atau mengatur jadwal tourist family ini karena anak-anaknya biasanya rewel dan dapat merusak atau membatalkan jadwal yang telah direncanakan.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Hedonistic adalah tourist yang menginginkan kebebasan, kebebasan yang tidak bisa mereka dapatkan di Negara asalnya, misalnya drugs, sex, drunk, dan sebagainya. Tourist jenis ini umumnya dari kalangan berusia muda dan menyukai kehidupan malam.

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Memberikan keuntungan ekonomi kepada hotel dan restaurant. 2.) Memberikan keuntungan kepada rental mobil atau motor karena tourist ini tidak suka di atur dan ingin bebas pergi kemanapun ia inginkan. 3.) Memberikan keuntungan kepada bar, night club, dan tempat-tempat night life lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Dapat memberikan pengaruh buruk terhadap budaya lokal, khususnya remaja. Karena remaja masih sangat labil dan mudah meniru perilaku-prilaku buruk yang dibawa tourist hedonistic ini seperti budaya minum-minuman keras, pakaian seksi, merokok, dugem, drugs, dan lain-lain. 2.) Prostitusi semakin meningkat karena adanya permintaan dari tourist-tourist hedonistic. 3.) Muncul dan berkembangnya barang-barang illegal seperti obat-obatan terlarang. 4.) Tourist ini seringkali merusak fasilitas-fasilitas umum dan menyebabkan polusi terhadap lingkungan.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Back Packer adalah jenis tourist yang melakukan aktivitas pariwisata dengan dana terbatas. Oleh karena itu, tourist ini biasanya menggunakan fasilitas-fasilitas berstandar lokal. Ciri khas tourist ini adalah biasanya menggondong tas ransel di punggungnya.

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Memberikan keuntungan kepada penginapan-penginapan dan makanan berstandar lokal, seperti motel atau bungalow. 2.) Tourist jenis ini peduli dan ramah lingkungan karena mereka lebih sering melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau dengan sepeda gayung. 3.) Tourist jenis ini mudah berinteraksi dengan masyarakat sekitar sehingga dapat terjadi akulturasi budaya misalnya bahasa, cara mereka mengelola waktu, dan sebagainya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Tidak banyak memberikan devisa bagi Negara, karena tourist ini sangat hemat dalam berbelanja dan hanya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang penting saja. 2.) Tourist ini juga perlu diwaspadai karena bisa saja mereka melakukan tindakan mencuri karena keadaan ekonomi mereka sangat pas-pasan.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Visiting friends and relatives adalah jenis tourist yang mempunyai tujuan tertentu, yaitu mengunjungi teman dan kerabatnya. Tourist jenis ini biasanya dikelola oleh teman maupun kerabatnya sendiri, mulai dari tempat tinggal, makan, hingga transportasi.

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Tourist jenis ini tetap menguntungkan objek wisata dan atraksi-atraksi wisata karena mereka pasti akan diajak oleh kerabatnya untuk menikmati waktunya di tempat tersebut. 2.) Memberikan keuntungan kepada perajin dan penjual souvenir atau oleh-oleh karena tourist jenis ini biasanya akan membeli kenang-kenangan untuk keluarganya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Tidak banyak memberikan devisa bagi Negara, karena segala sesuatunya biasanya disediakan oleh teman atau kerabatnya tersebut seperti akomodasi, makanan, transportasi, dan sebagainya.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Excursionist adalah tourist yang mengunjungi suatu tempat dalam waktu yang kurang dari 24 jam. Yang termasuk tourist jenis ini misalnya penumpang kapal pesiar yang singgah ke suatu daerah, pelaju/pemudik perjalanan jarak jauh yang hanya memerlukan rest area.

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Hanya menguntungkan pusat perbelanjaan dan restaurant, karena tourist hanya mempunyai sedikit waktu untuk menikmati tempat tujuan atau persinggahannya. 2.) Menguntungkan perajin dan penjual souvenir atau oleh-oleh karena tourist ini biasanya pasti menyempatkan diri untuk membeli souvenir khas daerah yang dikunjungi/disinggahinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Tidak menguntungkan akomodasi, transportasi, dan tempat-tempat wisata karena tourist ini tidak mempunyai banyak waktu untuk menikmati kunjungannya karena mereka hanya sekedar berkunjung atau singgah di tempat tersebut.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Educational tourist adalah tourist yang melakukan perjalanan dengan tujuan pendidikan, misalnya untuk belajar maupun studi banding di suatu sekolah atau universitas.

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Memberikan keuntungan ekonomi kepada fasilitas-fasilitas berstandar lokal, seperti boarding house (kos-kosan) dan tempat makan lokal. 2.) Dapat menyebabkan terjadinya pertukaran pikiran dan pertukaran kebudayaan (akulturasi budaya) misalnya dalam bahasa, teknologi, pola pikir, dsb. 3.) Dapat mengembangkan suatu sekolah atau universitas yang dipilih sehingga dapat meningkatkan gengsi dan akreditasi sekolah tersebut. 4.) Sebagai sarana politik dalam membina hubungan yang baik antar Negara penerima educational tourist dengan Negara pengirim Educational tourist. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Tidak begitu menguntungkan dalam bidang ekonomi karena tourist jenis ini lebih memilih menggunakan fasilitas-fasilitas lokal ketimbang memilih fasilitas mewah dan modern. 2.) Tourist ini juga bisa saja memberikan pengaruh yang buruk terhadap kebudayaan lokal, seperti mengajarkan temannya untuk minum-minuman keras, free sex, merokok, dan sebagainya.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Religious Tourist adalah tourist yang melakukan perjalanan suci ke tempat-tempat yang berhubungan dengan agama, misalnya kegiatan naik haji, tirta yatra, dan lain sebagainya

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Menguntungkan akomodasi, restaurant, transportasi, travel agent (sesuai dengan ekonomi mereka.) 2.) Dapat membantu mengembangkan daerah-daerah yang mempunyai tempat ibadah atau kawasan religious. 3.) Dapat mengadakan pertukaran kebudayaan dan penyebaran ajaran agama. 4.) Tourist jenis ini juga pasti membeli oleh-oleh atau souvenir khas daerah setempat, hal ini menguntungkan penjual atau perajin oleh-oleh atau souvenir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Tourist jenis ini juga terkadang perlu diwaspadai karena mereka bisa saja menyebarkan ajaran-ajaran atau aliran sesat kepada penduduk lokal.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Snowbird adalah jenis tourist dari Negara yang bermusim dingin yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah tropis.

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Menguntungkan ekonomi Negara yang beriklim tropis karena pasti akan banyak tourist-tourist dari Negara yang sedang mengalami musim dingin berdatangan dan menikmati liburannya 2.) Memberikan keuntungan kepada hotel, travel agent, dan restaurant, perajin atau penjual souvenir sebagai penyedia barang dan jasa, baik berupa akomodasi, transportasi, maupun penyedia makanan dan minuman. 3.) Memberikan keuntungan kepada tempat-tempat dan atraksi wisata terutama yang berhubungan langsung dengan matahari, seperti pantai, waterboom, dan sebagainya 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Daerah-daerah dingin biasanya lebih sepi dan kurang diuntungkan karena tourist jenis ini umumnya menyukai matahari dan ingin menikmati panas karena di negaranya sedang mengalami musim dingin.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Ethnic Minority

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Memberikan keuntungan kepada hotel, restaurant, dan travel agent. 2.) Memberikan keuntungan pada museum-museum, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Tidak begitu menguntungkan dalam bidang ekonomi karena tourist jenis ini lebih memilih menggunakan fasilitas-fasilitas lokal ketimbang memilih fasilitas mewah dan modern.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Disable tourist adalah jenis tourist yang mempunyai kekurangan fisik atau cacat

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Memberikan keuntungan ekonomi secara langsung kepada hotel, restaurant dan travel agent. Tourist jenis ini memerlukan pengelolaan yang baik dari travel agent, dengan begitu walaupun ia mempunyai ketidakmampuan (cacat) namun ia tetap dapat menikmati wisatanya di daerah yang dituju. 2.) Memberikan keuntungan kepada tourist attraction terutama yang bersifat natural karena tourist jenis ini lebih merasa nyaman berada di daerah yang memiliki keindahan alam. 	<ol style="list-style-type: none"> 2.) Pengelolaan tourist jenis ini lebih sulit dibandingkan dengan tourist lainnya karena kita harus ekstra waspada dan membuat jadwal yang sesuai dengan fisiknya.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Social tourist adalah jenis tourist yang melakukan perjalanan bukan untuk berlibur, melainkan mencari sponsor di suatu Negara.

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Memberikan keuntungan kepada hotel/motel sebagai tempat peristirahatan para social tourist. 2.) Dapat menciptakan hubungan yang baik antara Negara pengirim tourist dan Negara penerima tourist sehingga dapat tercipta suasana tolong menolong antar negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Tourist jenis ini tidak banyak memberikan devisa bagi Negara, karena tujuannya bukan berlibur, melainkan melakukan aksi social atau mencari sponsor di suatu Negara untuk tujuan tertentu.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Short Break Market adalah jenis tourist yang mengunjungi suatu daerah dalam kurun waktu satu sampai tiga hari. Biasanya tourist ini mengunjungi ke satu Negara dengan banyak daerah wisata.

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Memberikan keuntungan kepada hotel/motel sebagai tempat peristirahatan para short break market tourist, biasanya satu hingga tiga hari. 2.) Memberikan keuntungan pada rental transportasi (mobil, motor) karena tourist jenis ini biasanya tidak menggunakan travel agent dalam berwisata. Beberapa tourist juga menggunakan angkutan umum sebagai sarana transportasinya. 3.) Tourist jenis ini biasanya berkunjung ke tempat-tempat atraksi wisata yang sudah terkenal. Tourist ini juga senang berwisata kuliner di daerah yang dikunjungi dan membeli beberapa cendera mata khas sehingga hal ini sangat menguntungkan dalam bidang ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Tourist jenis ini tidak mempunyai waktu yang lama dalam berkunjung, biasanya antara sehari hingga tiga hari saja. Oleh karena itu, kita harus mampu mengelola tourist ini dengan baik dan mengusahakan agar ia merasa puas dan menikmati kunjungannya sehingga ia akan kembali ke tempat itu dikemudian hari.

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Ada lima jenis supply yaitu tourist attraction, accessibility, amenities, ancillaries, dan community involvement. Adapun hubungan masing-masing supply dengan demand dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Hubungan Demand dengan Tourist Attraction.** Tourist attraction sangat mempengaruhi demand atau jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi pariwisata. Semakin bagus tourist attractionnya, semakin banyak demand yang akan mengunjunginya sehingga tourist attraction itu akan semakin berkembang. Tourist attraction ada yang bersifat natural dan ada pula yang bersifat kultural. Hal ini sangat menarik perhatian wisatawan, semakin khas dan menarik sebuah tourist attraction akan semakin banyak pula wisatawan yang ingin melihat atau mengunjunginya. Seiring dengan permintaan demand, maka berkembanglah man-made tourist attraction atau tourist attraction buatan manusia, misalnya taman bermain, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa demand sangat mempengaruhi tourist attraction, begitu juga sebaliknya.
- 2. Hubungan Demand dengan Accessibility.** Accessibility merupakan suatu hal vital yang sangat mempengaruhi kunjungan demand. Jika di suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang mencukupi, seperti airport, pelabuhan dan jalan raya maka tidak akan ada demand yang mengunjungi daerah tersebut. Demand pulalah yang mempengaruhi perkembangan accessibility di suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi demand atau tourist.
- 3. Hubungan Demand dengan Amenities.** Amenities merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pariwisata. Amenities ini adalah fasilitas-fasilitas seperti hotel, transportasi, restaurant, spa, dan yang lainnya. Jika di suatu daerah tidak terdapat amenities yang mencukupi, maka demand tidak akan betah berkunjung di tempat tersebut. Amenities ini sangat dipengaruhi oleh permintaan dan harapan konsumen, contohnya spa. Dewasa ini spa sudah menjadi kebutuhan demand. Oleh karena itu, hampir semua hotel kini menyediakan fasilitas spa. Fasilitas-fasilitas inilah yang menyebabkan demand merasa betah dan nyaman berada di suatu destinasi pariwisata. Jika amenitiesnya tidak berkualitas dan mencukupi, maka demand tidak akan tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada demand maka amenities pun tidak akan berkembang karena tidak ada pemasukan atau keuntungan.
- 4. Hubungan Demand dengan Ancillaries.** Ancillaries adalah hal-hal kecil atau pendukung, misalnya warung-warung kecil dan tourist information centre. Adanya hal-hal pendukung ini disebabkan oleh demand yang berkunjung ke suatu tempat karena hal-hal tersebut dibutuhkan oleh demand dan dirasa dapat menghasilkan keuntungan. Contohnya, di suatu kawasan pariwisata terdapat pedagang-pedagang asongan yang menjual makanan, minuman, maupun souvenir. Hal itu merupakan inisiatif

pedagang yang timbul karena adanya demand yang ingin membeli barang dagangannya. Disisi lain, ancillaries ini juga dibutuhkan oleh para tourist yang menginginkan kemudahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ancillaries ini timbul karena adanya permintaan dari demand.

- 5. Hubungan Demand dengan Community Involvement.** Community involvement adalah keterlibatan atau dukungan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Community involvement ini sangat mempengaruhi kunjungan demand. Masyarakat harus dapat mendukung jalannya kegiatan pariwisata ini. Jika masyarakat tidak mendukung atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti pencurian, perampokan, pengeboman, pembunuhan, maka demand tidak akan berani mengunjungi daerah tersebut. Sebaliknya, jika masyarakat bersikap baik dan ramah terhadap tamu, maka tourist akan betah tinggal di daerah tersebut

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa supply sangat berpengaruh terhadap demand dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu daerah pariwisata, harus tersedia supply dan demand yang mencukupi. Dengan adanya supply yang berkualitas dan menarik maka akan banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi daerah tersebut. Demand pulalah yang memberikan pemasukan atau keuntungan agar supply dapat terus berkembang.

ATRAKSI	DEMAND	POTENTIAL DEMAND
Kegiatan Berdasarkan Zona 1.) Agrowisata 2.) Bumi Perkemahan 3.) Outbond Activity; 4.) Kuliner (Resto Apung) 5.) Pemancingan 6.) Olah Raga Air & Lintasan Dayung 7.) Olah Raga Ketangkasan (Menembak & Panahan) 8.) Olah Raga Atletik 9.) Permainan Anak 10.) Rekereasi Keluarga & Hobi 11.) Tribun & Area Terbuka; Pentas Seni (Musik, dll)	Ada 12 jenis tourist / tourism demand yaitu: 1. family, 2. hedonistic, 3. back packer, 4. visiting friends and relatives, 5. excursionist, 6. educational tourist, 7. religious tourist, 8. snow bird, 9. ethnic minority, 10. disable tourist, 11. social tourist dan 12. short break market.	Family, Business Class, Sport & Club, Hobbies, Special Purpose 1. Keluarga 2. Keperluan Bisnis & Rapat (Pemerintah & Swasta) 3. Atlit/ Olah Ragawan 4. Hobi/ Peminat 5. Pelajar & Mahasiswa

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Demand	Family, Business Clas, Sport & Club, Hobbies, Special Purpose
Supply	Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata
Tourist Attraction	<p>Potensi Atraksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Reguler; Event (Government, Educational, Hobbies) 2.) Berdasarkan Zona <p>Kegiatan Berdasarkan Zona</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Agrowisata 2.) Bumi Perkemahan 3.) Outbond Activity; 4.) Kuliner (Resto Apung) 5.) Pemancingan 6.) Olah Raga Air & Lintasan Dayung 7.) Olah Raga Ketangkasan (Menembak & Panahan) 8.) Olah Raga Atletik 9.) Permainan Anak 10.) Rekereasi Keluarga & Hobi 11.) Tribun & Area Terbuka; Pentas Seni (Musik, dll)
Accessibility	<p>Accessibility Planning: (Daya Jangkau, Daya Tempuh, dan Kemudahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Kualitas Prasarana Jalan; Jalan Kabupaten. Jalan Desa, Lintasan/ Tracking Kawasan 2.) Kualitas Prasarana Terminal; Terminal Kota, Sub Terminal Perdesaan, Halte 3.) Kualitas Sarana/ Moda Angkutan; Angkutan Perdesaan, Angkutan Wisata 4.) Kemudahan Pencapaian (Rambu Penunjuk Arah) 5.) Dalam Km, dan Dalam Waktu Menit
Amenities	<p>Fasilitas-fasilitas seperti hotel, transportasi, restaurant, spa, dan yang lainnya, dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan permintaan, atau potensi pasar dan standar pelayanan minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Akomodasi yang ada menyediakan informasi terhadap Destinasi/ DTW 2.) Restaurant/ Tempat Makan; Bersih, Menu Lokal Khas & Universal
Ancillaries	<p>Hal-hal kecil atau pendukung, yang timbul karena adanya permintaan dari demand/ timbul karena adanya permintaan dari demand, dan atau ancillaries ini juga dibutuhkan oleh para tourist yang menginginkan kemudahan. misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) warung-warung kecil 2.) pedagang-pedagang asongan yang menjual makanan, minuman, maupun souvenir 3.) tourist information centre. <p>TIC dapat berupa Kios, Billboard, hingga sistem informasi di internet.</p> <p>Tourist Information Centre (TIC) dapat berlokasi di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Bandara, menyatu dengan TIC Provinsi 2.) Lokasi Destinasi/ DTW yang potensi, menyatu pada Lokasi eksisting (ikut serta promosi dan informasi; Menara Pandang, dll 3.) Berdasarkan Minat, Hobi, dan Kegiatan tertentu; Pusat Pelatihan dan Pembinaan Olah Raga Air, Atletik, Ketangkasan, Komunitas Memancing 4.) Berlokasi di sepanjang Jalan Arteri & Pusat Perkotaan Balangan Paringin
Community Involvement	<p>KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata</p> <p>Melibatkan elemen masyarakat dari ke empat desa, dan kelembagaan desa.</p> <p>Dari proses Perencanaan, Pembangunan, Pemanfaatan hingga Pengelolaan Destinasi/ DTW.</p>

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

6.3. KELAYAKAN INVESTASI
ANALISA POTENSI KUNJUNGAN DAN POTENSI PENDAPATAN

Kelompok Kunjungan	Jumlah Potensi						
Kunjungan Pelajar & Mahasiswa	1. Kunjungan Sekolah (Pembelajaran, Pramuka/ Perkemahan/ Olah Raga/ Pentas Seni) 1x/ Tahun						
	2. Kunjungan Liburan Sekolah 2x/ Tahun						
	3. Kunjungan Bersama Keluarga 2x – 6x/ Tahun						
	4. Total 445 Unit Pendidikan (TK/ SD/ SMP/ SMA) / 445 Kunjungan						
	5. Distribusi Kunjungan 37 Kunjungan/ Bulan atau Kunjungan/ Minggu						
	6. Potensi Pendapatan > Rp. 500.000.000,00/ Tahun						
	No	Kecamatan/ Perkotaan	Penduduk	TK & Sederajat	SD & Sederajat	SMP & Sederajat	SMA& Sederajat
	1	Lampihong	17,297	27	31	3	2
	2	Batumandi	17,707	24	26	6	2
	3	Awayan	13,494	22	26	4	2
	4	Tebing Tinggi	6,674	13	13	3	1
	5	Paringin	18,806	20	22	5	4
	6	Paringin Selatan	12,819	16	17	6	4
	7	Juai	17,767	22	32	5	2
	8	Halong	20,970	34	39	8	4
	Jumlah		125,534	178	206	40	21
	Event Kegiatan Pelajar TK/ Tahun			178	2		
	Event Kegiatan Pelajar SD/ Tahun			206	4		
	Event Kegiatan Pelajar SMP/ Tahun			40	4		
Event Kegiatan Pelajar SMA/ Tahun			21	4			
Event Kegiatan Pelajar / Tahun			445				
1 Tahun = 12 Bulan/ 48 Minggu							
Bulan		12	37	event/ kunjungan/ bulan			
Minggu		48	9	event/ kunjungan/ minggu			
Kegiatan : Pendidikan/ Pembelajaran/ Kunjungan							
1. Pengenalan Tanaman/ Flora							
2. Perkemahan/ Pramuka							
3. Olah Raga							
4. Pentas Seni							
Pendapatan Kawasan :							
1. Parkir Rp. 3.000/ Unit R4/ Rp. 5.000/ Unit Bus							
2. Kontrak Kemitraan Penyelenggaraan Kegiatan Rp. 500.000-Rp. 1.000.000,-/ Event							
3. Makanan & Minuman							
4. Souvenir							
Pendapatan Kawasan							
1. Parkir		445,000	12	5,340,000			
2. Kontrak		37,083,333	12	445,000,000			
3. Makanan		3,708,333	12	44,500,000			
4. Souvenir		370,833	12	4,450,000		499,290,000	

Dinas/ Lembaga	1. Kunjungan Kerja; Rapat/ Bisnis (Pemerintah/ Swasta) 2. Kunjungan Resmi/ Kontrak Komitmen Pemerintah 2x/ Tahun 3. Kunjungan Lainnya; Makan Siang, Kunjungan Tamu, dll 4. Total Jumlah 30 Lembaga Pemerintahan + Swasta 5. Potensi Pendapatan > Rp. 200.000.000,00/ Tahun (Pemerintah)				
	Pendapatan Kawasan :				
	1. Parkir Rp. 3.000/ Unit R4/ Rp. 5.000/ Unit Bus 2. Penyelenggaraan Kegiatan Rp. 5.000.000 - Rp. 8.000.000,-/ Event 3. Makanan & Minuman 4. Souvenir				
	Komitmen Pemerintah	2	event/ kunjungan/ tahun		
	Kunjungan Lainnya	-	event/ kunjungan/ tahun		
	Pendapatan Kawasan				
	1. Parkir	1,050,000	2	2,100,000	
	2. Kontrak	112,000,000	2	224,000,000	
	3. Makanan/ Minuman Ekstra	3,500,000	2	7,000,000	
4. Souvenir	3,500,000	2	7,000,000	240,100,000	
Sumber : Hasil Analisa					
Perda No. 24/ 2016 Jumlah Lembaga/ Perangkat Daerah : 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 24 Dinas, 4 Badan, 8 Kecamatan					
Festival Minawisata Bahari	1. Lomba Dayung Lokal & Regional 2. Lomba Memancing Lokal & Regional 3. Pagelaran Industri Kreatif 4. Jumlah Penyelenggaraan 2x – 4x / Tahun 5. Potensi Pendapatan > Rp. 200.000.000,00/ Tahun				
	Festival Minawisata Bahari				
	1. Lomba Dayung	Lokal	Regional		
	2. Lomba Memancing	Lokal	Regional		
	3. Pagelaran Industri Kreatif Balangan	Lokal			
	Pendapatan Kawasan :				
	1. Parkir Rp. 3.000/ Unit R4/ Rp. 5.000/ Unit Bus 2. Penyelenggaraan Kegiatan Rp. 100.000/ Peserta 3. Penyelenggaraan Kegiatan Rp. 1.000.000/ Peserta 4. Makanan & Minuman 5. Souvenir				
	Jumlah Kecamatan	8	2	1,600,000	
	Jumlah Kabupaten/ Kota	13	6	78,000,000	
	Pendapatan Kawasan				
1. Parkir	350,000	2	700,000		
2. Kontrak	79,600,000	2	159,200,000		
3. Makanan/ Minuman Ekstra	15,000,000	2	30,000,000		
4. Souvenir	1,000,000	2	2,000,000	191,900,000	

Masyarakat
Balangan &
Perkotaan
Paringin

1. Kunjungan 1x/ Tahun (Liburan Sekolah/ Kenaikan Tingkat / Pergantian Tahun)
2. Kunjungan 2x/ Tahun (Liburan Sekolah/ Kenaikan Tingkat / Pergantian Tahun)
3. Kunjungan 1x/ Bulan (Rekreasi Keluarga Kabupaten Balangan)
4. Kunjungan 1x/ Minggu (Rekreasi Keluarga di Perkotaan Paringin/ Masyarakat Perkotaan)
5. Potensi Pendapatan Retribusi Kawasan Wisata > Rp. 100.000.000,00/ Tahun
6. Sampai dengan saat ini, belum terdapat Destinasi/ Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Kabupaten Balangan yang cukup lengkap yang mampu mengakomodasi kepentingan, kebutuhan keluarga, orang tua, anak, bisnis, olah raga dan minat khusus lainnya dalam 1 (satu) lokasi.
7. Dengan jarak yang cukup dekat dengan Perkotaan Paringin, Perkotaan Batumandi, Perkotaan Juai dan Perkotaan Awayan menjadi Lokasi KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata ini menjadi potensial untuk dikembangkan.
8. Kegiatan Potensial ; Outbond, Kuliner, Olah Raga, Pemancingan, Permainan Ketangkasan

KECAMATAN	JUMLAH	%	JUMLAH
LAMPIHONG	17,297	20%	3,459
BATUMANDI	17,707	40%	7,083
AWAYAN	13,494	20%	2,699
TEBING TINGGI	6,674	10%	667
PARINGIN	18,806	80%	15,045
PARINGIN SELATAN	12,819	80%	10,255
JUAI	17,767	20%	3,553
HALONG	20,970	10%	2,097
JUMLAH	125,534		44,859
			2,500
			112,147,000

STRUKTUR USIA	JUMLAH (JIWA)	KUNJUNGANKE DANAU BARUH BAHINU				KUNJUNGANKE DANAU BARUH BAHINU			
		1X/ TAHUN	2X/ TAHUN	1X/ BULAN	1X/ MINGGU	1X/ TAHUN	2X/ TAHUN	1X/ BULAN	1X/ MINGGU
		%	%	%	%	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA
0-4	13,338	5%	5%	5%	1%	666.9	666.9	666.9	133.38
5-9	12,699	10%	10%	10%	1%	1269.9	1269.9	1269.9	126.99
10-14	11,883	15%	15%	10%	1%	1782.45	1782.45	1188.3	118.83
15-19	10,528	20%	20%	10%	1%	2105.6	2105.6	1052.8	105.28
20-24	10,246	25%	25%	10%	1%	2561.5	2561.5	1024.6	102.46
25-29	10,109	20%	20%	10%	1%	2021.8	2021.8	1010.9	101.09
30-34	9,741	15%	15%	10%	1%	1461.15	1461.15	974.1	97.41
35-39	9,740	15%	15%	10%	1%	1461	1461	974	97.4
40-44	9,411	15%	15%	10%	1%	1411.65	1411.65	941.1	94.11
45-49	8,421	15%	15%	10%	1%	1263.15	1263.15	842.1	84.21
50-54	6,939	15%	10%	10%	1%	1040.85	693.9	693.9	69.39
55-59	4,572	10%	10%	10%	1%	457.2	457.2	457.2	45.72
60-64	3,393	10%	10%	10%	1%	339.3	339.3	339.3	33.93
65-69	2,020	10%	10%	10%	1%	202	202	202	20.2
70-74	1,387	10%	10%	10%	1%	138.7	138.7	138.7	13.87
75 +	1,107	5%	5%	5%	1%	55.35	55.35	55.35	11.07
JUMLAH	125,534					18,239	17,892	11,831	1,255
ASUMSI RETRIBUSI						2,500	2,500	2,500	2,500
TOTAL						123,041,350	45,596,250	44,728,875	29,577,875

<p>Wisatawan Luar/ Regional (Kalsel, Kalteng, Kaltim, Lainnya)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak/ Belum Dapat Diprediksi secara Akurat 2. Destinasi/ Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang memiliki Karakteristik Sejenis/ Hampir Sama, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Kota Banjarbaru : Danau Caramin, Danau Seran b. Kabupaten Banjar : Waduk Riam Kanan, Danau Biru Pengaron c. Kabupaten Hulu Sungai Utara : Danau Panggang d. Kabupaten Tapin : Danau Nes 12 (Area Bekas Tambang) e. Waterboom dan Water Park 3. Peluang / Kesempatan di Tingkat Destinasi Regional, melalui penyelenggaraan event perlombaan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Lomba Dayung Regional b. Penyelenggaraan Lomba Atletik & Traitlon Regional c. Penyelenggaraan Bumi Perkemahan Regional/ Banua Enam 4. Kunjungan Wisatawan Luar, dapat melalui rangkaian kunjungan dan event wisata lainnya di Kabupaten Balangan yang telah terkenal/ lebih dulu dikenal <ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Relijius Makam Datu Kandang Haji 2. Wisata Budaya Desa Adat Dayak Halong 5. Pelancong/ Pemudik/ Pelaju Perjalanan Jauh (Banjarmasin – Tanjung/ Balikpapan/ Samarinda), merupakan potensi sasaran lainnya 6. Potensi Pendapatan > Rp. 200.000.000,00/ Tahun (Pemerintah)
<p>Kelompok Kunjungan Lainnya</p>	<p>Kelompok Kunjungan Lainnya, diidentifikasi berdasarkan Jenis Kegiatan yang diselenggarakan pada masing-masing Zona, Kegiatan Berdasarkan Zona</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Agrowisata (Berbayar) 2.) Bumi Perkemahan (Berbayar) 3.) Outbond Activity; (Berbayar) 4.) Kuliner (Resto Apung) (Berbayar) 5.) Pemancingan (Berbayar) 6.) Olah Raga Air & Lintasan Dayung (<i>include event</i>) 7.) Olah Raga Ketangkasan (Menembak & Panahan) 8.) Olah Raga Atletik 9.) Permainan Anak (sebagian gratis/ sebagian berbayar) 10.) Rekereasi Keluarga & Hobi (Berbayar) 11.) Tribun & Area Terbuka; Pentas Seni (Musik, dll) (Berbayar) <p>Potensi Pendapatan > Rp. 200.000.000,00/ Tahun</p>

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Aspek Manfaat

Aspek Manfaat dalam pengembangan dan pengelolaan KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata, meliputi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

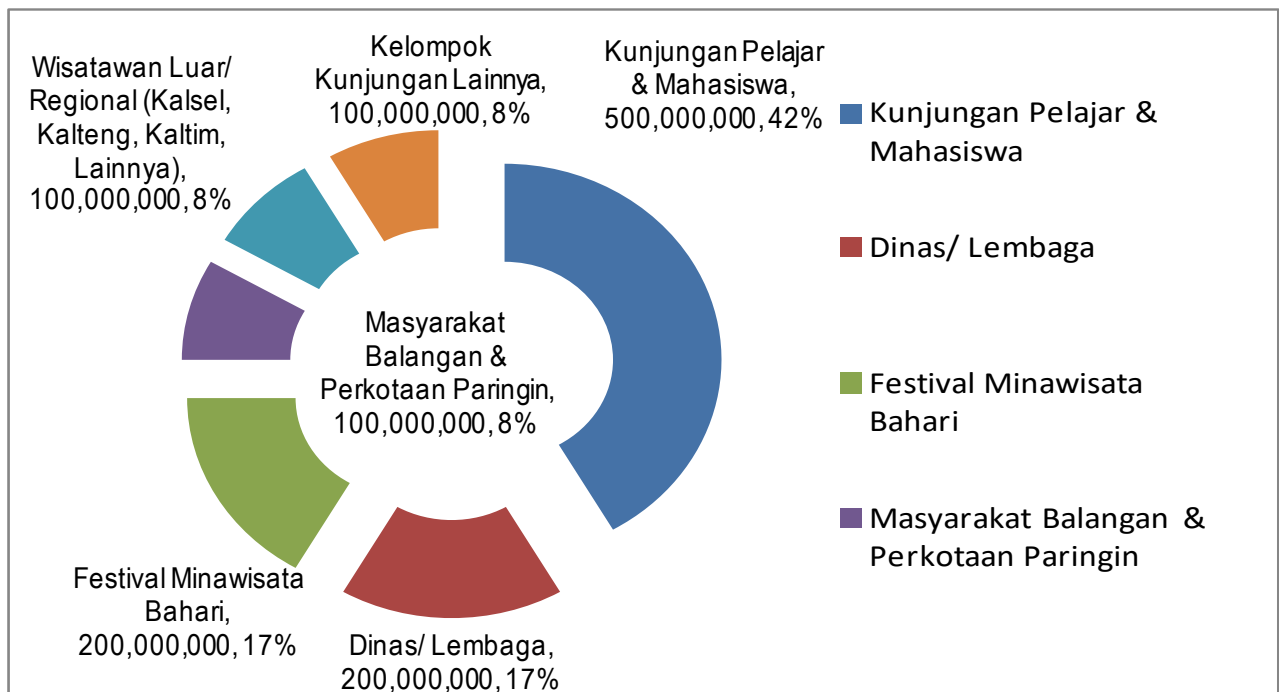
1. Ketahanan Sumberdaya Air;
 - a. Air Baku dan
 - b. Pengendalian Banjir
2. Ketahanan Pangan ;
 - a. Pertanian
 - b. Perikanan
3. Ketahanan Energi ; berupa Listrik/ Mikro Hidro
4. Pengembangan Wilayah dan Kawasan
 - a. Pariwisata
 - b. Permukiman Perdesaan

Banyak manfaat yang tidak dan atau belum dapat dihitung secara rinci dalam tahapan pra-kelayakan ini, seperti ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi hingga pengembangan wilayah, dengan kata lain hanya dampak terhadap pemasukan berupa pendapatan dari retribusi dan atau pajak saja yang dihitung melalui asumsi dan jumlah, serta nilai perkiraan.

Tabel 46. Perkiraan Pendapatan Kawasan

Jenis Pendapatan	Jumlah	%
Kunjungan Pelajar & Mahasiswa	500,000,000	41.67%
Dinas/ Lembaga	200,000,000	16.67%
Festival Minawisata Bahari	200,000,000	16.67%
Masyarakat Balangan & Perkotaan Paringin	100,000,000	8.33%
Wisatawan Luar/ Regional (Kalsel, Kalteng, Kaltim, Lainnya)	100,000,000	8.33%
Kelompok Kunjungan Lainnya	100,000,000	8.33%
Total Perkiraan Awal Pendapatan Kawasan (Rp/ Tahun)	1,200,000,000	100.00%

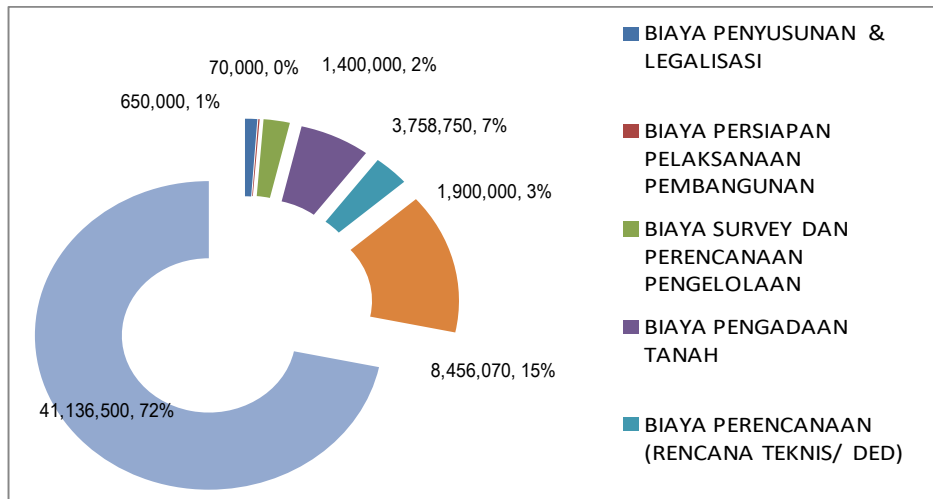
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017

Gambar 103. Perkiraan Pendapatan Kawasan


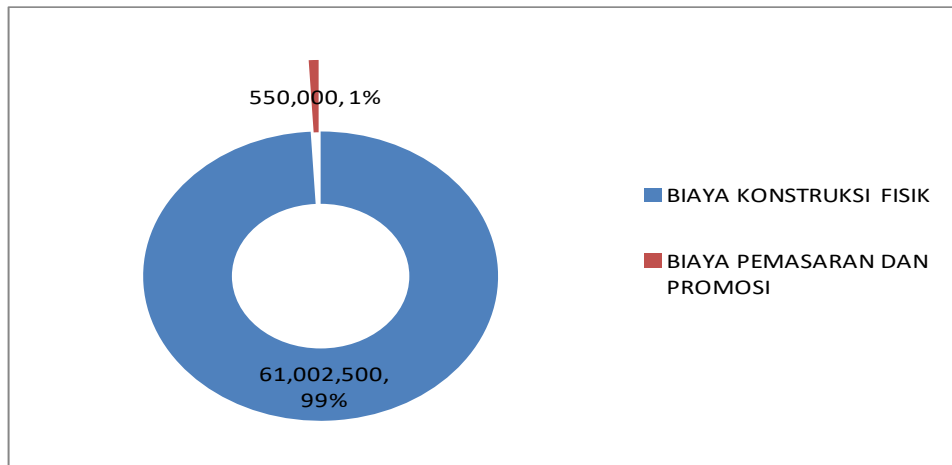
Aspek Biaya

Tabel 47. Biaya Modal Investasi dan Aset

BELANJA MODAL INVESTASI & ASET	57,371,320
BIAYA PENYUSUNAN & LEGALISASI	650,000
BIAYA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	70,000
BIAYA SURVEY DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN	1,400,000
BIAYA PENGADAAN TANAH	3,758,750
BIAYA PERENCANAAN (RENCANA TEKNIS/ DED)	1,900,000
BIAYA PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN	8,456,070
BIAYA KONSTRUKSI FISIK	41,136,500
Prasarana SDA Danau	8,000,000
Aksesibilitas & Prasarana Jalan	26,286,500
Perbaikan Lingkungan & Prasarana Sanitasi Desa Wisata	6,850,000

Gambar 104. Perkiraan Biaya Investasi Kawasan

Tabel 48. Biaya Modal Kerja

BELANJA MODAL KERJA	61,552,500
BIAYA KONSTRUKSI FISIK	61,002,500
Prasarana Wisata di Darat	58,450,000
Prasarana Wisata di Perairan	2,282,500
Pekerjaan Vegetasi/ Landscaping	270,000
BIAYA PEMASARAN DAN PROMOSI	550,000

Gambar 105. Rekapitulasi Biaya Investasi Kawasan


KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata ini di kategorikan sebagai Kawasan wisata yang memiliki kondisi supply yang cukup baik dan dapat ditingkatkan melalui Wisata Buatan (*Man-Made*) Karakter demand yang mengunjungi kawasan wisata ini sudah termasuk dalam kategori kecil yang dapat terus ditingkatkan. KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata untuk saat ini belum dapat dijadikan andalan utama dalam pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Perlunya Investasi Publik/ Pemerintah dalam Pembangunan KSP
2. Perlu menambahkan wahana dan sarana prasaranan.
3. Perlu lebih mengoptimalkan kenyamanan wisatawan.
4. Menambah promosi kepada masyarakat.

Analisis Kelayakan

Tahap	Investasi Pemerintah	Investasi Swasta	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Operasi dan Pemeliharaan Area & Fasilitas Wisata	Manfaat Langsung	Manfaat Tidak Langsung
1	650,000					
2	70,000					
3	1,400,000					
4	3,758,750					
5	1,900,000				120,000	
6	41,136,500		550,000	0	120,000	
7	61,002,500		8,456,070	250,500	600,000	
1				501,000	1,200,000	
2				506,010	1,200,000	1,500,000
3				511,070	1,200,000	1,500,000
4				516,181	1,320,000	1,650,000
5				521,343	1,452,000	1,815,000
6				526,556	1,597,200	1,996,500
7				531,822	1,756,920	2,196,150
8				537,140	1,932,612	2,415,765
9				542,511	2,125,873	2,657,342
10				547,936	2,338,461	2,923,076
11				553,416	2,572,307	3,215,383
12				558,950	2,829,537	3,536,922
13				564,539	3,112,491	3,890,614
14				570,185	3,423,740	4,279,675
15				575,887	3,766,114	4,707,643
16				581,645	4,142,725	5,178,407
17				587,462	4,556,998	5,696,248
18				593,337	5,012,698	6,265,872
19				599,270	5,513,968	6,892,459
20				605,263	6,065,364	7,581,705
	109,917,750	0	9,006,070	11,282,021	57,959,008	69,898,760

130,205,841

127,857,767

B/C Ratio 0.98196645
Komponen Manfaat Tidak Langsung :

Air Baku

Pengendalian Banjir

Pertanian

Perikanan

Energi

Pengembangan Wilayah & Perdesaan

Nilai BSR sebesar 0,98196645*

* Nilai rasio diperoleh dari hasil perhitungan merupakan nilai yang berasal dari biaya investasi (cost) murni dan tidak adanya investasi dari pihak swasta.

Total pembiayaan investasi KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Nilai Investasi Rp. 109.917.750.000. INvestasi pemerintah dengan jumlah tersebut diberikan dalam jangka pendek hingga 5 tahun atau 10 tahun paling lama. Nilai investasi yang dikeluarkan merupakan besar investasi untuk perencanaan, pembangunan, pengelolaan (operasi dan pemeliharaan) KSP setelah dibangun. Sedangkan nilai manfaat yang digunakan dalam perbandingan untuk menghitung BCR adalah manfaat langsung dari Sektor Pariwisata saja, yang akan menghasilkan nilai BCR sebesar 0,98196645.

Kelembagaan Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata (KSP)
A. Struktur Organisasi Pengelola KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata

Bentuk organisasi pengelolaan KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata terdiri dalam 3 Tahapan Kelembagaan, yaitu :

KELEMBAGAAN PERENCANAAN	KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN	KELEMBAGAAN PENGELOLAAN & PEMANFAATAN
<p>Lingkup Perencanaan, dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW)/ Grand Design Obyek Wisata 2. Rencana Detail KSP 3. RTBL KSP 4. Rencana Tapak Kawasan Wisata 5. Rencana Teknik/ DED 	<p>Lingkup Pembangunan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reklamasi Danau, Normalisasi Saluran, Sungai dan Badan Air Lainnya (Hulu-Hilir) 2. Pertanahan dan Tapak Kawasan 3. Infrastruktur Jalan & Jembatan 4. Infrastruktur Sumberdaya Air/ Bangunan Air (Danau, Sungai dan Saluran Drainase) 5. Prasarana Lingkungan Permukiman Desa Wisata 6. Prasarana Penunjang Wisata Sisi Darat 7. Prasarana Penunjang Wisata Sisi Air 	<p>Lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sumberdaya Air Danau, Sungai dan Saluran 2. Pengelolaan Kualitas Air 3. Pengelolaan Pariwisata Air/ Danau 4. Pengelolaan Pariwisata Zona Agrowisata, Zona Tribun, Zona Bumi Perkemahan dan Zona Konservasi 5. Pengelolaan Pariwisata Desa Wisata
<p>Koordinator : BAPPEDA/ PENATAAN RUANG Leading Sector : Dinas Pariwisata Perencana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata 2. Dinas PUPR Bidang SDA/ Pengairan 3. Dinas PUPR Bidang Binamarga 4. Dinas PUPR Bidang Cipta Karya 5. Dinas Perumahan & Permukiman 6. Dinas Perikanan 7. Dinas Olah Raga 	<p>Koordinator : BAPPEDA Leading Sector : Manajemen Konstruksi Dinas PUPR Pelaku Pembangunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan 2. Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat 3. Swasta 4. Masyarakat 	<p>Koordinator : Dinas PUPR Bidang Penataan Ruang Leading Sector : Dinas Pariwisata Pengelola :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Desa Wisata ; Perangkat/ Pemerintah Desa & BUMDes 2. Pengelola Zona Wisata; Perusahaan Komersial (profit), Koperasi, UPT Dinas Pariwisata 3. Pengelola Danau; Dinas PUPR Bidang SDA/ Pengairan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Dengan banyaknya zonasi wisata yang terdapat pada KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata, dimungkinkan pengelolaan, dilakukan secara menyatu atau terpisah namun didalam 1 (satu) perusahaan induk/ *holding*. Yang terlibat atau dimungkinkan terlibat adalah pihak swasta perusahaan profit, masyarakat melalui Kelembagaan Koperasi dan/ atau BUMDes, maupun UPT Dinas Pariwisata.



**Gambar 106. Usulan Kelembagaan Pengelola dan Pemanfaatan
KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata**

B. Struktur Organisasi Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Desa Adat Dayak Halong

Bentuk organisasi pengelolaan KSP Danau Baruh Bahinu & Desa Wisata terdiri dalam 3 Tahapan Kelembagaan, yaitu :

KELEMBAGAAN PERENCANAAN	KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN	KELEMBAGAAN PENGELOLAAN & PEMANFAATAN
Lingkup Perencanaan, dapat berupa : 1. Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW)/ Grand Design Obyek Wisata 2. Rencana Detail KSP 3. RTBL KSP 4. Rencana Tapak Kawasan Wisata 5. Rencana Teknik/ DED	Lingkup Pembangunan, meliputi: 1. Pertanahan dan Tapak Kawasan 2. Infrastruktur Jalan & Jembatan 3. Prasarana Lingkungan Permukiman Desa Wisata 4. Prasarana Penunjang Wisata 5. Sarana Pendukung Wisata	Lingkup Pengelolaan dan Pemanfaatan, meliputi: 1. Pengelolaan Pariwisata Desa Adat 2. Pengelolaan Pariwisata Ekowisata Pegunungan Meratus
Koordinator : BAPPEDA/ PENATAAN RUANG Leading Sector : Dinas Pariwisata Perencana : 1. Dinas Pariwisata 2. Dinas PUPR Bidang Binamarga 3. Dinas PUPR Bidang Cipta Karya 4. Dinas Perumahan & Permukiman 5. Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Koordinator : BAPPEDA Leading Sector : Manajemen Konstruksi Dinas PUPR Pelaku Pembangunan : 1. Dinas Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan 2. Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat 3. Swasta 4. Masyarakat	Koordinator : Dinas PUPR Bidang Penataan Ruang Leading Sector : Dinas Pariwisata Pengelola : 1. Pengelola Desa Adat, balai Adat dan Fasilitas Wisata Lain; Dewan Adat/ Perangkat Pemerintah Desa & BUMDes 2. Pengelola Ekowisata Peg. Meratus; Dewan Adat dan Perusahaan Komersial (profit).

Fungsi Utama dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan (Operasi & Pemeliharaan), meliputi :

1. Memasarkan Destinasi ke luar (*web marketing, events, conference and festivals, cooperative programs, direct mail, direct sales, sales blitzes, trade show, advertising, familization tours, publications and brochures*)
2. Mengembangkan destinasi pariwisata (*visitor management, information/ reasearch, coordinating tourism stakeholders, crisis magamanet, human resources development, finance and venture capital, resources stewardship, quality of the visitor experience*)

Salah satu bentuk potensi yang ada di Kabupaten Balangan yang sampai saat ini belum tergali secara optimal ialah pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan *eco-turism* (wisata lingkungan). Ditinjau dari perspektif bisnis, pengembangan eko-turisme memiliki prospek yang sangat baik dimasa yang akan datang karena daya tarik yang dimilikinya, berupa kekayaan sumber daya hutan dengan mega biodiversity dan keindahan panorama alam yang dilengkapi dengan keunikan adat istiadat budaya yang khas. Dengan potensi seperti ini diharapkan mampu mengundang minat wisatawan domestik maupun mancanegara

Hutan Balangan berada di deretan Pegunungan Meratus yang melintang dari sleatan di Kabupaten Tanah Laut hingga ke utara di Kabupaten Tabalong, semakin memberi daya tarik wisata karena keragaman tipe hutan dengan biodiversity dan kekayaan flora dan faunanya, serta keragaman dan keunikan budaya dan adat istiadat masyarakat asli suku dayak pitap dan dayak halong, serta dayak dea yang tinggal di pedalaman.

Peluang investasi eko-turisme yang demikian besar belum dikelola dan dikembangkan secara optimal, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hutan berkesinambungan, baik manfaat ekonomis, ekologis maupun sosial dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa Kawasan sebaga Hutan Adat melalui SK Kementrian Kehutanan.

Jenis-jenis eko-turisme yang potensial untuk ditawarkan antara lain : wisata hutan hujan tropis dengan segala keanekaragaman hayati dan keunikan flora fauna khas kalimantan, wisata arung jeram, susur sungai, air terjun, habitat gua, pegunungan kapur dan perbukitan dengan panorama yang indah, wisata budaya dan adat masyarakat Dayak, berbagai macam wisata petualangan lainnya kiranya akan mempunyai daya tarik yang layak saing dipasar pariwisata nasional maupun internasional.

Pembiayaan dan pengelolaan proyek pengembangan eko-turisme ini direncanakan melalui bentuk kemitraan baik antara investor dalam negeri maupun dengan investor luar negeri yang tertarik untuk menanamkam modal di sektor ini.

INDEKS DAYA SAING WISATA

Dalam Penelitian ini pengukuran daya saing industri pariwisata dapat menggunakan variabel daya saing dengan menggunakan delapan indikator yang digunakan World tourism organization (WTO) yaitu,

- 1.) Human Tourism Indicator (HTI),
- 2.) Price Competitiveness Indicator (PCI),
- 3.) Infrastructure Development Indicator (IDI),
- 4.) Environment Indicator (EI),
- 5.) Technology Advancement Indicator (TAI),
- 6.) Human Resources Indicator (HRI),
- 7.) Openess Indicator (OI) dan
- 8.) Social Development Indicator (SDI).

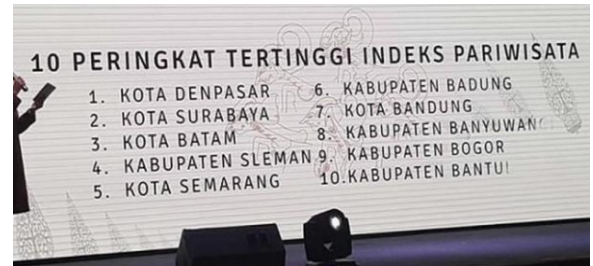
Gambar 107. Komposisi 3 Sub Indeks Travel & Tourism Competitiveness



DAYA SAING DANAU BARUH BAHINU TERHADAP DESTINASI/ DAERAH TUJUAN WISATA (DTW) disekitarnya dan terhadap Wisata Sejenis, adalah sebagai berikut :

DESTINASI REGIONAL BANUA ENAM	DESTINASI SEJENIS REGIONAL KALSEL
1. Tabalong : Tangjung Puri & Kinarum 2. Hulu Sungau Utara : Danau Panggang & Paminggir 3. Hulu Sungai Tengah : Pemandian Air Panas Pagat Batu Benawa 4. Hulu Sungai Selatan : Loksado, Tanuhi, dan sekitarnya	1. Banjarbaru : Danau Caramin, Danau Seran 2. Kab. Banjar : Waduk Riam Kanan, Danau Biru Pengaron 3. Kab. Hulu Sungai Utara : Danau Panggang 4. Kab. Hulu Sungai Tengah : Pemandian Air Panas Pagat Batu Benawa 5. Kab. Tapin : Danau Nes 12 (Area Bekas Tambang) 6. Waterboom dan Water Park

BEST PRACTICES. Kementerian Pariwisata meluncurkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) dari 505 kabupaten-kota se tanah air. Penyusunannya ranking itu didapat melalui survey dan mengacu pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Hasil Pengukuran Indeks Pariwisata Indonesia



Sepuluh Peringkat Tertinggi Indeks Pariwisata Indonesia. No Kota Total Skor IPI

- 1 Kota Denpasar 3,81
- 2 Kota Surabaya 3,74
- 3 Kota Batam 3,73
- 4 Kab Sleman 3,72
- 5 Kota Semarang 3,59
- 6 Kab Badung 3,55
- 7 Kota Bandung 3,39
- 8 Kab Banyuwangi 3,30
- 9 Kab Bogor 3,27
- 10 Kab Bantul 3,22

Kelompok 5 Peringkat Tertinggi masing-Masing Aspek

Aspek Lingkungan Pendukung Bisnis Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Denpasar 3,71 1 2. Sleman 3,42 2 3. Kota Semarang 3,26 3 4. Kota Surabaya 3,21 4 5. Bantul 3,19 5 	Aspek Tata Kelola Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Surakarta 3,99 1 2. Kota Denpasar 3,79 2 3. Badung 3,68 3 4. Kota Makassar 3,59 4 5. Kota Yogyakarta 3,54 5
Aspek Infrastruktur Pendukung Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Makassar 4,39 1 2. Kota Denpasar 4,12 2 3. Kota Bandung 4,12 3 4. Kota Surabaya 3,89 4 5. Kota Palembang 3,75 5 	Aspek Potensi Wisata Alam dan Wisata Buatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Sukabumi 3,79 1 2. Badung 3,45 2 3. Bogor 3,39 3 4. Wakatobi 3,29 4 5. Raja Ampat 3,25 5.